RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka konsistensi prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 atau Tahun Kelima.

(2) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi:
   a. Perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong; dan
   b. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tabalong serta Rancangan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tabalong.

Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 tertuang dalam Naskah RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

(2) Naskah RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
   Bab I. Pendahuluan;
   Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
   Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   Bab VII. Penutup.

(3) Naskah RKPD Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Juli 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 04 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 18

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat diselesaikan. Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah memberikan dasar penyusunan arah pembangunan tahunan Kabupaten Tabalong dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan APBD.

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk memberikan informasi gambaran kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, merumuskan permasalahan, prioritas dan rencana strategis pembangunan masyarakat Kabupaten Tabalong selama tahun 2024 dengan thema ; **Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**. RKPD ini selanjutnya juga akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing masing.

Harapan kami dalam mengemban amanah adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan warga Kabupaten Tabalong. Semoga dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan dukungan semua pihak akan mampu mewujudkan visi Kabupaten Tabalong yaitu "**Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri**"

Tabalong, Juli 2023

BUPATI TABALONG

H. ANANG SYAKHFIANI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RKPD I-2
1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8
1.4 Maksud dan Tujuan I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-10

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.1.2 Topografi II-3
2.1.1.3 Jenis Tanah II-4
2.1.1.4 Geologi II-5
2.1.1.5 Klimatologi II-9
2.1.1.6 Hidrologi II-10
2.1.1.7 Penggunaan Lahan II-13
2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah II-14
2.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana II-15
2.1.1.10 Demografi II-15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-19
2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB II-19
2.1.2.2 Laju Inflasi II-24
2.1.2.3 PDRB Per Kapita II-25
2.1.2.4 Indeks Gini II-26
2.1.2.5 Potensi Wilayah II-28
2.1.2.6 Persentase Penduduk Miskin II-31
2.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia II-34
2.1.2.8 Angka Melek Huruf (AMH) II-36
2.1.2.9 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) II-37
2.1.2.10 Angka Harapan Lama Sekolah II-38
2.1.2.11 Angka Harapan Hidup II-40
2.1.2.12 Persentase Balita Gizi Buruk II-43
2.1.2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-44
2.1.2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka II-47

2.1.2.15 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah II-49
2.1.2.16 Kontribusi Sektor Tanaman Pertanian II-49
2.1.2.17 Kontribusi Sektor Pertambangan II-51
2.1.2.18 Kontribusi Sektor Perdagangan II-52
2.1.2.19 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan II-53
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-53
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib II-54
2.1.3.1.1 Pendidikan II-54
2.1.3.1.2 Kesehatan II-68
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-80
2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman II-87
2.1.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat II-93
2.1.3.1.6 Sosial II-97
2.1.3.1.7 Tenaga Kerja II-101
2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-103
2.1.3.1.9 Pangan II-108
2.1.3.1.10 Lingkungan Hidup II-110
2.1.3.1.11 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-114
2.1.3.1.12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-119
2.1.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-121
2.1.3.1.14 Perhubungan II-122
2.1.3.1.15 Komunikasi dan Informatika II-124
2.1.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah II-125
2.1.3.1.17 Penanaman Modal II-127
2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga II-131
2.1.3.1.19 Statistik II-132
2.1.3.1.20 Kebudayaan II-134
2.1.3.1.21 Perpustakaan II-135
2.1.3.1.22 Kearsipan II-138
2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan II-139
2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan II-140
2.1.3.2.2 Pariwisata II-142
2.1.3.2.3 Pertanian II-144
2.1.3.2.4 Perdagangan II-150

2.1.3.2.5 Perindustrian II-151
2.1.3.3 Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan II-152
2.1.3.3.1 Sekretariat Daerah II-152
2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-154
2.1.3.4.1 Perencanaan II-154
2.1.3.4.2 Keuangan II-159
2.1.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan II-159
2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan II-160
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-167
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya II-172
2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro II-172
2.2.2 Evaluasi Perkembangan Capaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah II-194
2.2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah II-201
2.3 Telaahan Kebijakan II-227
2.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... II-227
2.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ..... II-230
2.3.3 Penelaahan Usulan Musrenbang Kecamatan II-234
2.3.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD II-234
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah II-237
2.4.1 Analisis dan Permasalahan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-237
2.4.2 Analisis dan Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-247
2.5 Isu Strategis II-249

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-16
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-25
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-25
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-29
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-34

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024
4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-4
4.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-63

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024
5.1 Rencana Prioritas Daerah V-1
5.2 Rencana Program Pembangunan Tahun 2024 ..... V-13
5.3 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2024 . V-20

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-3

BAB 7 PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022……..	II-1
Tabel 2.2	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG Kabupaten Tabalong Tahun 2022……..	II-10
Tabel 2.3	Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Tabalong……..	II-13
Tabel 2.4	Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong……	II-14
Tabel 2.5	Jumlah, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022……	II-16
Tabel 2.6	Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-17
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-17
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tabalong Tahun 2022……..	II-18
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-20
Tabel 2.10	PDRB Menurut Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022……..	II-22
Tabel 2.11	PDRB Menurut Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022……..	II-23
Tabel 2.12	Perbandingan Komoditi Inflasi Tahun 2018-2022 ……	II-24
Tabel 2.13	PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-26
Tabel 2.14	Penentuan Kategori Unggulan Daerah……..	II-30
Tabel 2.15	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-33
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-36
Tabel 2.17	Perbandingan Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan…..	II-42

Tabel 2.18	Persentase Balita Gizi Kurang dan Buruk	II-43
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut kegiatan Utama 2018-2022.....	II-45
Tabel 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2018-2022.....	II-46
Tabel 2.21	TPAK kabupaten Tabalong menurut Umur 2018-2022.....	II-46
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk (Jiwa) Angkatan Kerja, TPAK, TPT di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-48
Tabel 2.23	Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2018-2022.....	II-49
Tabel 2.24	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-51
Tabel 2.25	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-52
Tabel 2.26	Kontribusi Sektor Perdagangann Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-52
Tabel 2.27	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-53
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-54
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-55
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-55
Tabel 2.31	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tabalong Tahun2018-2022.....	II-56
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-57
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-57
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-58
Tabel 2.35	Angka Kelulusan (AL) Sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.....	II-59

Tabel 2.36	Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-59
Tabel 2.37	Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-60
Tabel 2.38 ‘	Jumlah dan Presentasi Guru dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022	II-61
Tabel 2.39	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-61
Tabel 2.40	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-62
Tabel 2.41	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-63
Tabel 2.42	Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Dasar di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-64
Tabel 2.43	Rasio Sekolah Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-65
Tabel 2.44	Rasio Sekolah Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-66
Tabel 2.45	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-67
Tabel 2.46	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-67
Tabel 2.47	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-68
Tabel 2.48	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022	II-68
Tabel 2.49	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong	II-70
Tabel 2.50	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022	II-70

Tabel 2.51	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong……..	II-71
Tabel 2.52	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Tabalong……..	II-72
Tabel 2.53	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-73
Tabel 2.54	Jumlah Dokter Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong…….	II-74
Tabel 2.55	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Tabalong……..	II-74
Tabel 2.56	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong……..	II-76
Tabel 2.57	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-76
Tabel 2.58	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-77
Tabel 2.59	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Children Immunization di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022….	II-77
Tabel 2.60	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-78
Tabel 2.61	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-78
Tabel 2.62	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-79
Tabel 2.63	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-79
Tabel 2.64	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-80
Tabel 2.65	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong……..	II-82

Tabel 2.66	Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-83
Tabel 2.67	Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong……..	II-84
Tabel 2.68	Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-86
Tabel 2.69	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2022…….	II-87
Tabel 2.70	Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-88
Tabel 2.71	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-88
Tabel 2.72	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-89
Tabel 2.73	Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……..	II-90
Tabel 2.74	Rasio Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022……..	II-92
Tabel 2.75	Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-94
Tabel 2.76	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-96
Tabel 2.77	Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……	II-97
Tabel 2.78	Perkembangan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-99
Tabel 2.79	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-100
Tabel 2.80	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….	II-101

Tabel 2.81 Rasio Lulusan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…… II-103
Tabel 2.82 Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS) di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…... II-104
Tabel 2.83 Rasio KDRT di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022……... II-105
Tabel 2.84 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…… II-106
Tabel 2.85 IDG, IPG, dan Status Kota Layak Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…… II-108
Tabel 2.86 Perkembangan Indikator Pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….. II-108
Tabel 2.87 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong…… II-111
Tabel 2.88 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tabalong…… II-112
Tabel 2.89 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022…… II-112
Tabel 2.90 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tabalong…….. II-113
Tabel 2.91 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…… II-114
Tabel 2.92 Status Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….. II-115
Tabel 2.93 Status Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021…… II-116
Tabel 2.94 Status Kepemilikan Akta Nikah di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…… II-117
Tabel 2.95 Ketersediaan Database di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022…….. II-118

Tabel 2.96 Status Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-118
Tabel 2.97 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-119
Tabel 2.98 Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-120
Tabel 2.99 Jumlah LSM yang Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-121
Tabel 2.100 Jumlah PPK Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-121
Tabel 2.101 Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-122
Tabel 2.102 Pelayanan Angkutan Umum di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-124
Tabel 2.103 Persentase Penduduk Menggunakan Handphone di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-125
Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-125
Tabel 2.105 Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-127
Tabel 2.106 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-128
Tabel 2.107 Jumlah Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-129
Tabel 2.108 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN dan PMA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-131
Tabel 2.109 Perkembangan Organisasi Olahraga di Kabupaten Tabalong 2018-2022..... II-132
Tabel 2.110 Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-133
Tabel 2.111 Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-134

Tabel 2.112 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-134
Tabel 2.113 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-135
Tabel 2.114 Jumlah Perpustakaan Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong II-136
Tabel 2.115 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-137
Tabel 2.116 Jumlah Penataan Arsip Dinamis Tahun 2018-2023..... II-139
Tabel 2.117 Perkembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-141
Tabel 2.118 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Tahun 2018-2022..... II-144
Tabel 2.119 Perkembangan Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan ‘ Utama Lainnya Per Hektar di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-146
Tabel 2.120 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2018-2022..... II-149
Tabel 2.121 Produksi dan Produktivitas Peternakan Tahun 2018-2022 II-149
Tabel 2.122 Perkembangan Penerbitan SIUP di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-150
Tabel 2.123 Perkembangan Penerbitan TDP di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-151
Tabel 2.124 Jumlah Unit Usaha Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-152
Tabel 2.125 Rincian Penilaian SAKIP..... II-153
Tabel 2.126 Nilai SAKIP, LPPD Kabupaten Tabalong..... II-154
Tabel 2.127 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-156

Tabel 2.128 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-157

Tabel 2.129 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-158

Tabel 2.130 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-159

Tabel 2.131 Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-160

Tabel 2.132 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017-2022... II-161

Tabel 2.133 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang /Tahun) di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-167

Tabel 2.134 Angka Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong..... II-168

Tabel 2.135 Angka Kriminalitas di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2022..... II-170

Tabel 2.136 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-170

Tabel 2.137 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022..... II-171

Tabel 2.138 Perbandingan Perkembangan IPM..... II-173

Tabel 2.140 Perbandingan Perkembangan Angka Harapan Hidup..... II-174

Tabel 2.141 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah..... II-177

Tabel 2.142 Perbandingan Harapan Lama Sekolah..... II-179

Tabel 2.143 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita..... II-180

Tabel 2.144 Perbandingan Indeks Gini..... II-182

Tabel 2.145 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi..... II-183

Tabel 2.146 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II-184

Tabel 2.147 Perbandingan Tingkat Inflasi..... II-186

Tabel 2.148 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka..... II-187

Tabel 2.149 Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan..... II-189

Tabel 2.150	Perbandingan Angka Kemiskinan……..	II-191
Tabel 2.151	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin……..	II-192
Tabel 2.152	Pencapaian Kinerja Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) ……..	II-193
Tabel 2.153	Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang lebih Agamais……	II-195
Tabel 2.154	Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat……..	II-197
Tabel 2.155	Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Daerah……..	II- 199
Tabel 2.156	Capaian Indikator Kinerja Daerah……..	II-202
Tabel 2.157	Indentifikasi Kebijakan Nasional Dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024……	II-233
Tabel 2.158	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Kompilasi Usulan Kecamatan Untuk RKPD Tahun 2024……	II-234
Tabel 2.159	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tabalong……..	II-235
Tabel 2.160	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah……..	II-239
Tabel 2.161	Analisis dan Permasalahan yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah……..	II-247
Tabel 2.162	Isu dan Permasalahan Strategis……	II-255
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persen)……..	III-4
Tabel 3.2	Peranan PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (persen)……..	III-9
Tabel 3.3	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tabalong menurut Lapangan Usaha 2018-2022 ……..	III-14
Tabel 3.4	Sektor Unggulan Kabupaten Tabalong…….	III-16
Tabel 3.5	Target Indikator Makro ……..	III-25
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022……..	III-26
Tabel 3.7	Proyeksi PendapatanDaerah Kabupaten Tabalong Tahun	

	2024.....	III-29
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022.....	III-30
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	III-33
Tabel 3.10	Target dan Realiasasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022.....	III-35
Tabel 3.11	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong 2024....	III-36
Tabel 3.12	Perkembangan Dana CSR Tahun 2015-2023.....	III-37
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalsel 2024.....	IV-26
Tabel 4.2	Hubungan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas.....	IV-56 IV- 65
Tabel 4.3	Sinergitas Prioritas Nasional Provinsi dan Kabupaten.....	IV- 66
Tabel 4.4	Target dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	V-2
Tabel 5.1	Program Prioritas Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	V-14
Tabel 5.2	Program Pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2024	
Tabel 5.3	Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	V-21 V-92
Tabel 5.4	Daftar Proyek Strategis Kabupaten Tabalong Tahun 2024...	VI-1
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2024...	
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tabalong	II-3
Gambar 2.2	Peta Tofografi Kabupaten Tabalong	II-4
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Tabalong	II-9
Gambar 2.4	Pola Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong	II-11
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Tabalong	II-12
Gambar 2.6	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kab. Tabalong	II-27
Gambar 2.7	Posisi Relatif Indeks Gini terhadap Kab/Kota se Kalsel	II-27
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin	II-31
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin terhadap Kab/Kota	II-32
Gambar2.10	Perkembangan IPM	II-35
Gambar 2.11	Posisi Relatif IPM Tabalong Terhadap Kab/Kota Kalsel	II-36
Gambar 2.12	Perbandingan Rata-rata Lama sekolah	II-37
Gambar 2.13	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah terhadap Kab/Kota	II-38
Gambar 2.14	Angka Harapan Lama sekolah	II- 39
Gambar 2.15	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah terhadap Kab/Kota	II-40
Gambar 2.16	Angka Harapan Hidup	II-41
Gambar 2.17	Perbandingan Angka Harapan Hidup dengan Kab/Kota	II-42
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-47
Gambar 2.19	Posisi Relatif Pengangguran Terbuka terhadap Kab/Kota	II-48
Gambar 2.20	Perbandingan IPM Kab Tabalong, Kalsel, Nasional	II-173
Gambar 2.21	Perbandingan Angka Harapan Hidup	II-175
Gambar 2.22	Perbandingan Rata-Rata lama sekolah	II-177
Gambar 2.23	Perbandingan Harapan Lama sekolah	II-178
Gambar 2.24	Perbandingan Pengeluaran Perkapita	II-180
Gambar 2.25	Perbandingan Indeks Gini	II-181
Gambar 2.26	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi.	II-183
Gambar 2.27	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-184
Gambar 2.28	Perbandingan Tingkat Inflasi	II-186

Gambar 2.29	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka	II-187
Gambar 2.30	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan	II-188
Gambar 2.30	Perbandingan Angka Kemiskinan	II-190
Gambar 3.1	Grafik Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2022	III-5
Gambar 3.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalsel tahun 2022	III-7
Gambar 3.3	Peran PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian	III-11
Gambar 3.4	Peran PDRB sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	III-12
Gambar 3.5	Peranan PDRB sector Perdagangan Besar dan Eceran	III-13
Gambar 3.6	PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong	III-15
Gambar 3.7	Perkembangan Dana CSR tahun 2015-2023	III-37

BAB I

PENDAHULUAN

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, RKP dan program strategis nasional Tahun 2024 dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara

lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Guna melengkapi 4 (empat) pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 menerapkan pendekatan yang berorientasi pada substansi. Pendekatan berorientasi pada substansi meliputi: Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Dan yang terakhir namun tidak kalah penting adalah pendekatan spasial yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease Tahun 2019* (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Naiosnal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2006-2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9

Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025.

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
46. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

1.3. HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dengan dokumen:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong diacu dan dipedomani dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong dalam hal :
   a. Memperkirakan kemampuan wilayah untuk pelaksanaan pembangunan dengan menghitung daya dukung wilayah berdasarkan kondisi awal.
   b. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan analisis spasial (rencana struktur dan pola ruang)
   c. Mensinergikan perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata ruang wilayah yang memuat tentang potensi-potensi unggulan dari masing-masing kecamatan. Sinergitas ini akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang terdapat di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

2. RKP Pusat Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang menjadi pedoman dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Kalimantan Selatan.
3. RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 dan RPJMD 2019-2024.
4. RKPD Kabupaten Tabalong 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah memberikan dasar penyusunan arah pembangunan tahunan Kabupaten Tabalong dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, yaitu :

1. Melakukan analisa terhadap gambaran umum kondisi Daerah, kerangka ekonomi dan kapasitas riil keuangan daerah;
2. Merumuskan permasalahan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Tabalong dengan Bupati Tabalong yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.
4. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
6. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
7. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada DPRD;

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 79 ayat (2) dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 **Pendahuluan**, memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

Bab 2 **Gambaran Umum Kondisi Daerah,** memuat kondisi geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir, dan permasalahan pembangunan. Selain itu disajikan pula evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu sampai dengan tahun berjalan.

Bab 3 **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Bab 4 **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,** memuat tujuan dan sasaran pembangunan, serta kaitannya dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, dan identifikasi isu strategis pembangunan daerah tahun depan.

Bab 5 **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,** memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disertai dengan target capaian kinerja dan pagu anggaran Tahun 2024 serta perencanaan prakiraan maju Tahun 2025.

Bab 6 **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,** menyajikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

Bab 7 **Penutup,** memuat hal-hal yang dipandang penting dan perlu dilakukan untuk terlaksananya perencanaan pembangunan Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Tabalong berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) adalah ± 3.946 Km² atau ± 394.600 Ha. Namun setelah dilakukan penataan batas dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan serta terakhir dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penetapan Batas Daerah dan Batas Indikatif Menurut Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, luas wilayah Kabupaten Tabalong menjadi ± 3.553,421 Km² atau ± 355.342,1 Ha, yang terdiri dari 12 kecamatan, 121 desa, dan 10 kelurahan yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1	Banua Lawas	150,86	4,25	-	15
2	Pugaan	31,87	0,90	-	7
3	Kelua	53,39	1,50	1	11
4	Muara Harus	26,78	0,75	-	7
5	Tanta	149,73	4,21	-	14

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
6	Tanjung	191,69	5,39	4	11
7	Murung Pudak	172,53	4,86	5	5
8	Haruai	271,97	7,65	-	13
9	Bintang Ara	1.170,19	32,93	-	9
10	Upau	183,01	5,15	-	6
11	Muara Uya	877,14	24,68	-	14
12	Jaro	274,26	7,72	-	9
	Jumlah	**3.553,42**	**100**	**10**	**121**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2023

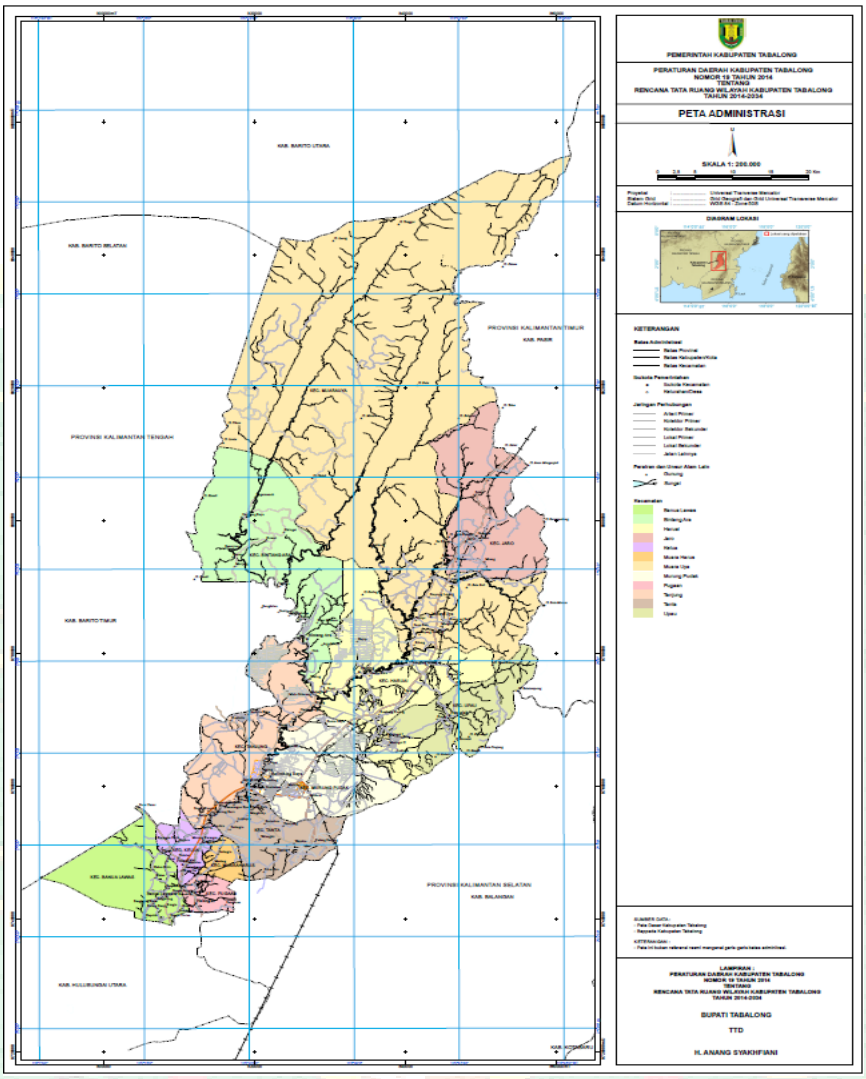
Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung, secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut (gambar 2.1) :

Sebelah utara : Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Sebelah timur : Kabupaten Paser Provinsi Kalimatan Timur

Sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

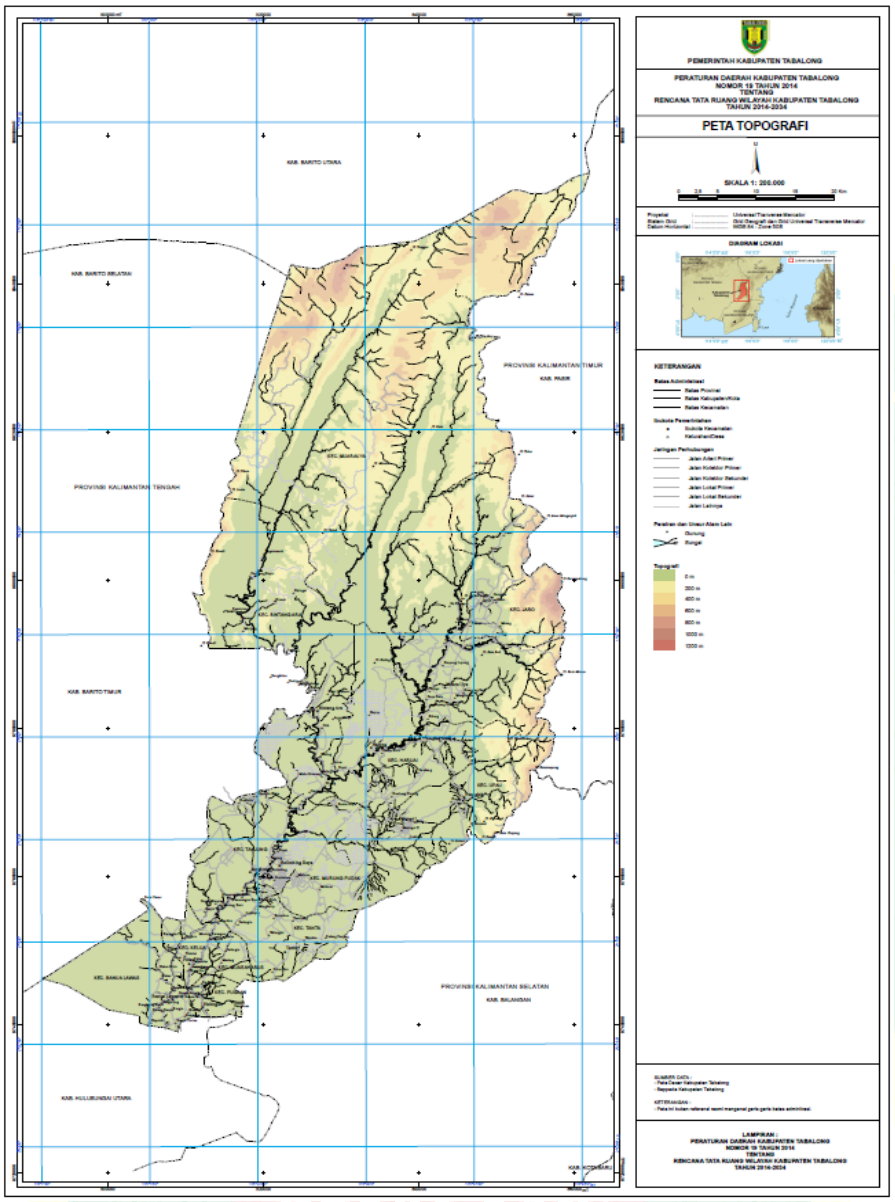
Sebelah barat : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tabalong

2.1.1.2. Topografi

Ditinjau dari Topografinya, bagian utara Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari pegunungan Meratus yang terbentang dari arah utara ke selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan dataran dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan merupakan batas timur cekungan Barito didominasi oleh dataran rendah dan rawa.



Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Tabalong

2.1.1.3 Jenis Tanah

Tanah di Kabupaten Tabalong terdiri dari lima jenis yaitu Aluvial, Podsolik, Potsol, Organosol, Glei Humus dan Komplek Podsolik Merah Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol. Jenis yang terbanyak adalah adalah tanah Podsolik sebanyak 41,99% atau 151.168 Ha yang terdapat di sembilan kecamatan, kecuali Kecamatan Banua Lawas dan Kelua. Tanah Komplek Merah Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol seluas 106.766 Ha (29,66%) hanya terdapat di Kecamatan Muara Uya dan Haruai.

Kemiringan lerengnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan rendah (0-5%), sisanya memiliki kemiringan sedang (15-40%) dan lebih dari 40%. Kedalaman efektif tanah rata-rata lebih dari 90 cm (97,8%), dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus.

Berdasarkan jenis tanahnya Kabupaten Tabalong sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan dan kehutanan berbasis agroforestri karena sebesar ± 43,17% dari luas wilayahnya tanah berjenis podsolik merah kuning. Jenis tanah podsolik merah kuning ini memiliki sifat yang sangat rentan yaitu mudah tercuci, peka erosi, permeabilitas rendah dan agregat kurang stabil. Jenis tanah ini tingkat kesuburannya sangat tergantung pada jenis vegetasi yang menjadi penutupnya, dan penggunaan jenis tanah ini harus dengan sistem siklus unsur hara tertutup. Pola yang sesuai untuk dikembangkan adalah agroforestri yaitu pola pengkombinasian tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Untuk pertanian lahan basah cocok pada tanah berjenis aluvial dan organosol glei humus yang melingkupi ± 5,13% wilayah Kabupaten Tabalong.

2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kabupaten Tabalong secara geologi termasuk ke dalam zona cekungan Barito pada bagian utara dan zona pegunungan meratus pada bagian sayap sebelah barat, memanjang dari sebelah timur sampai dengan utara. Berdasarkan peta geologi Lembar Buntok, Balikpapan, Sampanahan, dan Amuntai skala 1: 250.000. yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Maka wilayah Kabupaten Tabalong tersusun oleh beberapa formasi batuan yaitu: Formasi Pitap, Olistolit Kintap, Formasi Gunung Api Haruyan, Batuan Terobosan, Formasi Tanjung, Formasi Berai, Formasi Warukin, dan Formasi Dohor.

Selanjutnya berdasarkan umur Formasi Batuan, diurutkan menjadi tujuh urutan dan satu kelompok batuan terobosan.

Pertama, Formasi Pintap, tersebar sepanjang Pegunungan Meratus yang terdiri atas Batulanau, batugamping, kristalin, batupasir, serpih, batuan vulkanik berupa andesit, basalt, dan amphibolite. Andesit dan basalt berupa leleran yang terubah menjadi mineral lempung, kalsit dan klorit. Ambhibolite berupa pecahan lensa dalam basalt dengan ketebalan 100 m *(Soetrisno, S. Supriatna, E.Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan. 1994. Peta Geologi Lembar Buntok).* Satuan batuan ini menempati wilayah kecamatan Muara Uya. Perselingan batupasir, Graywacke, dan konglomerat dengan ketebalan > 1.500 m *(S. Hidayat dan I. Umar. 1994. Peta Geologi Lembar Balikpapan).* Satuan batuan ini menempati wilayah kecamatan Muara Uya bagian timur dan wilayah kecamatan Jaro. Endapan Flysch berupa perselingan antara batupasir, batulempung, batulanau, serpih, rijang, breksi aneka bahan olistolit, batugamping dan lava basalt dengan ketebalan > 2.000 m *(R. Haryanto, S. Supriatna, E. Rustandi, Bahrudin. 2007. Peta Geologi Lembar Sampanahan).* Satuan batuan ini menempati wilayah kecamatan Upau.

Formasi batuan kedua yaitu formasi Olistolit Kintap. Formasi ini berupa Batugamping masif berwarna kelabu kehitaman berupa olistolit dengan ketebalan sekitar 200 m (*S. Hidayat dan I. Umar. 1994. Peta Geologi Lembar Balikpapan).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Muara Uya bagian utara dan wilayah Kecamatan Upau bagian timur.

Formasi batuan ketiga yaitu Formasi Gunung Api Haruyan. Formasi ini merupakan satuan batuan penyusun Formasi Gunung Api Seruyan yang berupa lava basal, breksi, dan tuff. Breksi tersusun atas andesit dan basal, sedangkan tuff mengandung kaca dan klorit *(S. Hidayat dan I. Umar. 1994. Peta Geologi Lembar Balikpapan).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Muara Uya bagian timur laut , Kecamatan Jaro, Kecamatan Upau bagian timur laut. Batuan Vulkanik kalase basal berupa retas, sumbat, dan stocks. Satuan batuan ini sebagian sudah mengalami perubahan menjadi

mineral lempung, klorit dan kalsit dengan ketebalan sekitar 50 m *(Soetrisno, S. Supriatna, E.Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan. 1994. Peta Geologi Lembar Buntok).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Muara Uya bagian barat laut.

Urutan keempat yaitu Batuan Terobosan berupa Granit dan Diorit yang menerobos Formasi Gunung Api Haruyan. Granit memiliki komposisi mineral muskovit dan sedikit mineral hornblade sedangkan Diorit kaya akan mineral biotit *(S. Hidayat dan I. Umar. 1994. Peta Geologi Lembar Balikpapan).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Muara Uya bagian tenggara.

Formasi batuan kelima yaitu Formasi Tanjung, yang merupakan satuan batuan berupa batu pasir kuarsa, batu lempung, konglomerat, batu gamping dan napal dengan sisipan batubara. Formasi ini memiliki ketebalan sekitar 400 – 1.500 m *(S. Hidayat dan I. Umar. 1994. Peta Geologi Lembar Balikpapan).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Upau.

Formasi batuan keenam yaitu Formasi Berai. Terdiri dari satuan batuan berupa batu gamping berlapis dengan batulempung, napal dan batubara. Formasi ini memiliki ketebalan berkisar antara 1000 – 1.250 m *(Soetrisno, S. Supriatna, E.Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan. 1994. Peta Geologi Lembar Buntok).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Jaro, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Upau.

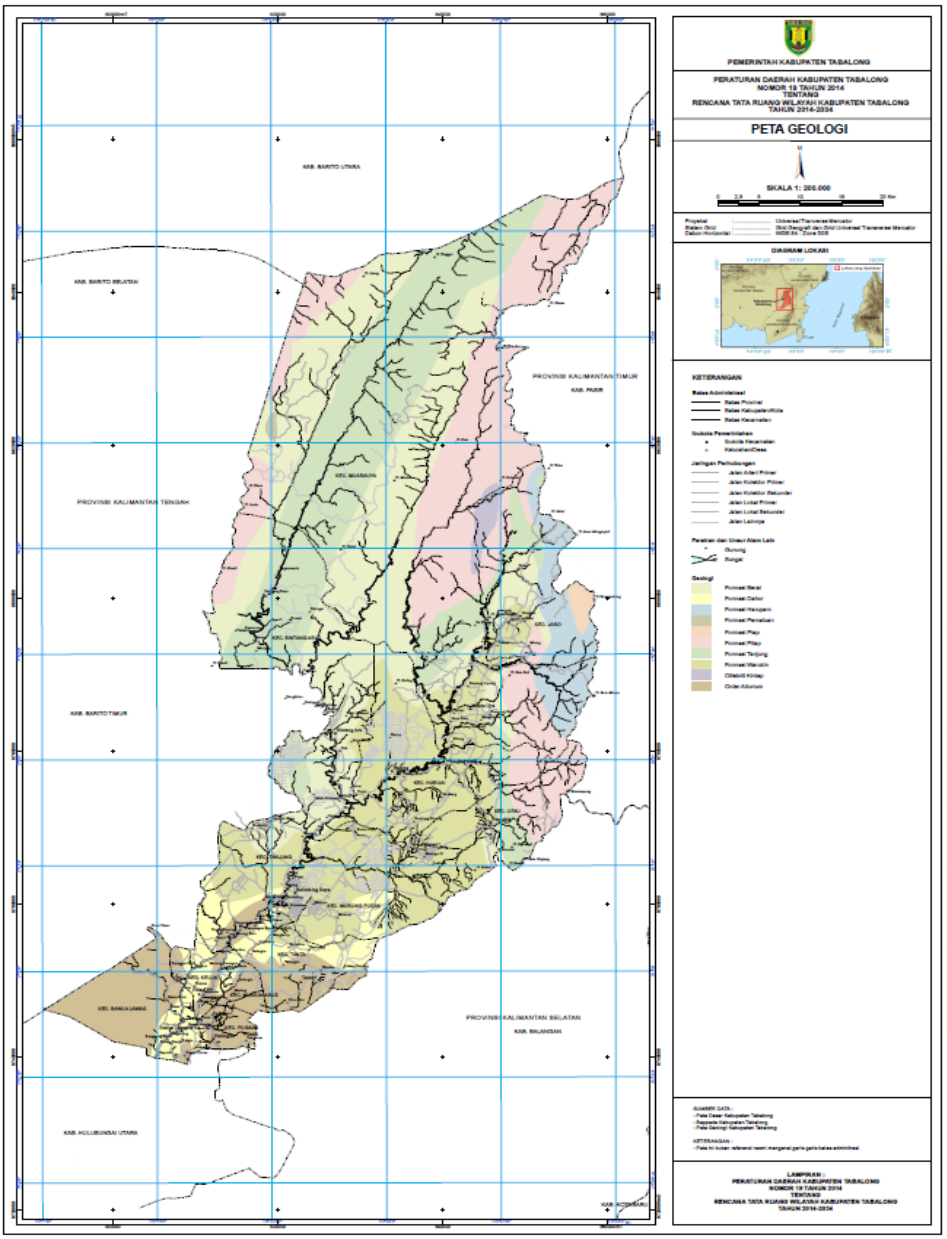
Formasi batuan ketujuh yaitu Formasi Warukin yang merupakan satuan batuan berupa batupasir dan batulempung dengan sisipan serpih dan batubara. Formasi ini memiliki ketebalan berkisar antara 300 – 1.500 m *(R. Haryanto, S. Supriatna, E. Rustandi, Bahrudin. 2007. Peta Geologi Lembar Sampanahan).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak , Kecamatan Tanta, Kecamatan Muara Harus,

Kecamatan Kelua, Kecamatan Haruai, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Jaro dan Kecamatan Upau.

Urutan terakhir yaitu Formasi Dohor, yang merupakan satuan batuan berupa Batupasir kuarsa, konglomerat lepas, batulempung lunak, lignit dan limonit. Formasi ini memiliki ketebalan sekitar 200 m *(R. Haryanto dan P. Sanyoto, 1994. Peta Geologi Lembar Amuntai).* Satuan batuan ini menempati wilayah Kecamatan Kelua, Kecamatan Banua Lawas, dan Kecamatan Pugaan.

Struktur Geologi yang dijumpai pada wilayah Kabupaten Tabalong adalah struktur perlipatan yang berupa Struktur Antiklin dan Sinklin serta patahan berupa Struktur Sesar. Struktur Antiklin dan Sinklin dengan arah sumbu relatif Utara – Selatan hingga Timur laut – Barat Daya. Struktur Sesar secara relatif berarah Barat Laut – Tenggara pada bagian barat wilayah Kabupaten Tabalong, Berarah Utara – Selatan sampai dengan Timur Laut - Barat Daya pada bagian utara wilayah kabupaten Tabalong. Selain ketiga struktur tersebut perlu diperhatikan adanya Struktur Sesar Adang-Patenoster yang memanjang dari wilayah Serawak Malaysia sampai dengan Selat Makasar. Struktur ini bidang sesarnya diperkirakan berada pada bagian Utara Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan Kabupaten Paser. Sesar Adang – Patenoster merupakan sesar normal yang mengalami reaktivasi dan menjadi kawasan rawan gempa apabila Paternoster mengalami pergerakan.

Sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis adalah minyak bumi yang terdapat disekitar daerah Tanjung pada formasi Tanjung. Batubara pada Formasi Tanjung dan Formasi Warukin, batu gamping pada Formasi Berai, batu lempung pada Formasi Tanjung, batupasir kuarsa pada Formasi Warukin dan Formasi Dohor yang dapat diusahakan pada bidang industri *(R. Haryanto dan P. Sanyoto, 1994. Peta Geologi Lembar Amuntai).*



Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Tabalong

2.1.1.5. Klimatologi

Kabupaten Tabalong beriklim panas (tropis), kelembaban udara maksimum berkisar antara 85 – 98 persen dan kelembaban udara minimum antara 42 - 74 %, sementara kelembaban udara rata-rata setiap bulan adalah 70 – 89 persen. Temperatur udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Temperatur maksimum di Kabupaten Tabalong 29°

C sampai dengan 35° C, temperatur udara minimum berkisar antara 25° sampai 30° C dan temperatur udara rata-rata 27° sampai 32° C. Kondisi klimatologi di Kabupaten Tabalong disajikan pada Tabel 2.2.

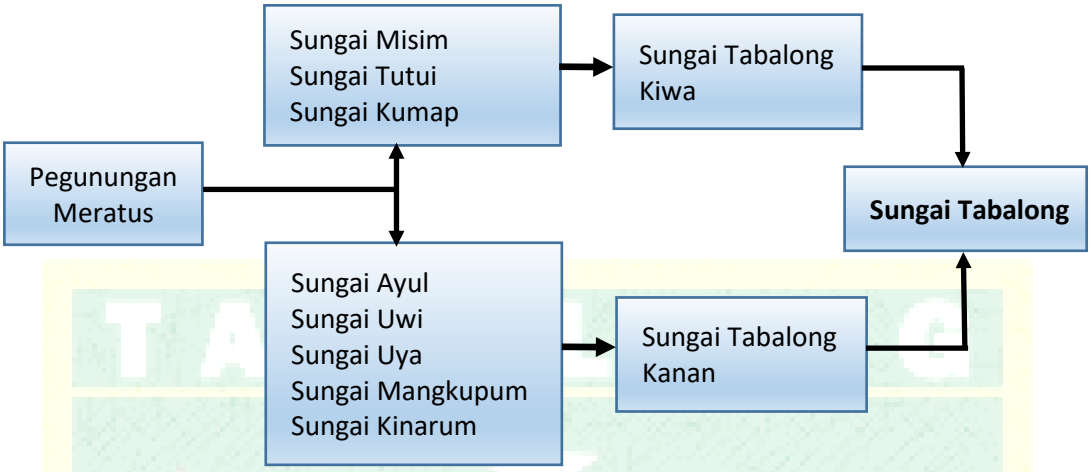
Tabel 2.2
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG
Kabupaten Tabalong

Kecamatan	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Banua Lawas	Banua Rantau	1.760,5	111
Pugaan	Halangan	2.482,0	136
Kelua	Pulau	1.503,7	123
Muara Harus	Tantaringin	1.795,0	154
Tanta	Murung Baru	1.819,5	107
Tanjung	Hikun	2.463,0	112
Murung Pudak	Tanjung Selatan	2.143,5	134
Haruai	Kembang Kuning	1.878,3	131
Bintang Ara	-	-	-
Upau	Masingai I	1.544,0	117
Muara Uya	Muara Uya	2.422,0	144
Jaro	Jaro	2.305,0	177

Catatan : Kecamatan Bintang Ara tidak ada data jumlah curah hujan
Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka, 2022

2.1.1.6. Hidrologi

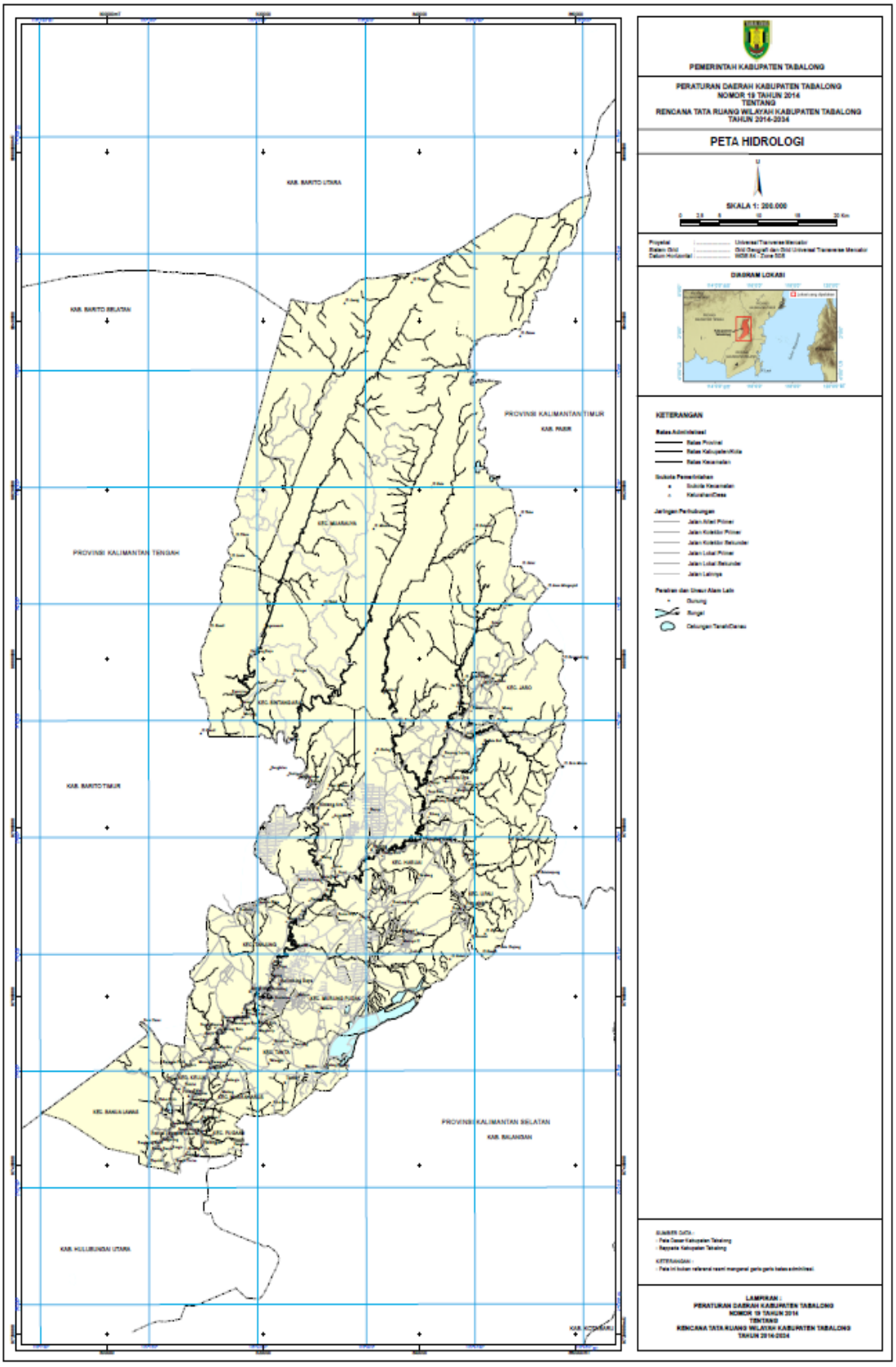
Daerah Kabupaten Tabalong Sebagian besar dilalui oleh sungai, sekitar 89 % desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong dilalui aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Tabalong sepanjang ± 75 Km dengan lebar 60 meter. Sungai ini merupakan gabungan dari Sungai Tabalong Kiwa dan Sungai Tabalong Kanan yang berhulu di Pegunungan Meratus. Jika hujan turun berlebihan kapasitas sungai Tabalong tidak mencukupi dan akan terjadi banjir pada daerah rendah seperti Banua Lawas, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Tanta. Pola aliran Sungai Tabalong berikut anak sungainya dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4
Pola Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan pola aliran sungai terdapat 1 DAS yang terbagi atas dua sub DAS dan enam sub-sub DAS dengan luas *catchment area* masing-masing sebagai berikut :

- DAS Tabalong 73.581 Ha
- Sub DAS Tabalong Kiwa 26.110 Ha dan Tabalong Kanan 38.261 Ha
- Sub-Sub DAS Ayul 42.812 Ha, Uwi 39.504 Ha, Tutui 36.818 Ha, Misim 39.792 Ha, Kumap 40.470 Ha dan Jaing 22.647 Ha.



Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Tabalong

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong sebagian besar masih berupa hutan sebesar 65,62% dari luas wilayah, lahan perkebunan sebesar 21,47%, lahan pertanian sebesar 6,19%, permukiman 5,49%, dan yang lainnya berupa lahan perkantoran, perikanan, perairan dan lain-lain sebesar 1,22%. Penyebaran kawasan hutan terutama terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan.

Arah perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong masih tergantung pada sektor usaha pertanian dan usaha pertambangan dan penggalian. Hal itu dapat dilihat dari peranan sektor usaha tersebut dalam menyumbang pendapatan daerah yang sangat besar dan berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu.

Sedangkan arah perkembangan penggunaan lahan untuk pemukiman/pedesaan mengarah pada pola aliran sungai, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah pedesaan yang dilalui oleh sungai dan banyaknya kegiatan dan pegerakan barang dan orang yang terjadi diatas sungai. Sungai telah menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Untuk itu sumber daya air ini harus dijaga termasuk volume air agar tetap dapat bertahan sepanjang masa dan tidak merupakan sebagai sumber bencana pada musim hujan dan hambatan pada musim kemarau.

Adapun komposisi jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Tabalong

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan	230.296	64,81
2.	Perkebunan	78.279	22,03
3.	Pertanian lahan basah	18.673	5,25

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
4.	Pertanian lahan kering dan hortikultura	3.914	1,10
5.	Pemukiman Perkotaan	2.784	0,78
6.	Pemukiman Perdesaan	17.250	4,85
7.	Industri	1.557	0,44
8.	Perdagangan dan Jasa	472	0,13
9.	Perkantoran	70	0,02
10.	Perikanan	526	0,17
11.	Perairan (sungai)	1.442	0,41
12.	Lain-lain	88	0,02
Jumlah		355.342	100

Sumber: Data diolah dari peta Pola Ruang RTRWK Tabalong Tahun 2013-2033

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Tabalong, potensi pengembangan wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong

NO	KAWASAN	LOKASI	ARAH PENGEMBANGAN
1.	Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten	Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak	Pengembangan perdagangan di Kelurahan Tanjung; Pembataan dan Mabuun, wisata buatan dan religi di Mabuun serta pengembangan perkantoran pemerintah dan pelayanan publik lainnya di Mabuun
2.	Kawasan Puri Mawar	Kecamatan Murung Pudak	Pengembangan wisata buatan dan pendidikan kepramukaan di Tanjung Puri, pengembangan perdagangan dan industri di Mabuun, dan pengembangan transportasi udara di Warukin
3	Kawasan Perkebunan dan Peternakan Sapi	Kecamatan Muara Uya, Jaro dan Haruai	Pengembangan perkebunan dan peternakan

NO	KAWASAN	LOKASI	ARAH PENGEMBANGAN
4	Kawasan Pertanian Lahan Basah	Kecamatan Kelua, dan Banua Lawas	Pengembangan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian, kegiatan wisata agro secara terbatas, pengembangan penganeka-ragaman pangan
5.	Kawasan Minapolitan	Desa Kambitin dan Kambitin Raya di Kecamatan Tanjung dan desa Jaro di Kecamatan Jaro	Budidaya pertanian lahan basah dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang

Sumber : RTRW Kabupaten Tabalong

2.1.1.9. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi besar mengalami bencana meliputi :

1) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terdiri atas: kebakaran pada kawasan hutan, lahan kritis, padang alang-alang, kawasan perkebunan dan kawasan pertanian lahan kering yang terjadi setiap musim kemarau di Kecamatan Jaro, Muara Uya, Haruai, Upau, Bintang Ara, Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Kelua, Muara Harus, Banua Lawas dan Pugaan.
2) Kawasan rawan banjir yang terdapat di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak, Tanta, Haruai, Muara Uya, Upau dan Muara Harus.

2.1.1.10 Demografi

Penduduk Kabupaten Tabalong berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 berjumlah 261.353 jiwa yang terdiri atas 132.537 jiwa penduduk laki-laki dan 128.816 jiwa penduduk perempuan. Dari 12 kecamatan, penduduk terbanyak ada di Kecamatan Murung Pudak yaitu sebanyak 59.622 jiwa atau sebesar 22,81 persen dari total penduduk Kabupaten Tabalong. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan

Muara Harus sebanyak 6.999 jiwa atau sebesar 2,68 persen dari total penduduk di Kabupaten Tabalong.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tabalong tahun 2022 mencapai 72 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi pada wilayah Kecamatan Kelua dengan kepadatan sebesar 471 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bintang Ara sebesar 8 jiwa/km2. Jumlah persentase dan kepadatan penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2022 per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km²)
1.	Banua Lawas	20.704	7,95	137,25
2.	Pugaan	7.663	2,94	240,37
3.	Kelua	25.436	9,78	476,60
4.	Muara Harus	6.999	2,68	261,16
5.	Tanta	23.335	8,84	155,80
6.	Tanjung	36.692	14,11	191,46
7.	Murung Pudak	59.622	22,62	345,65
8.	Haruai	24.434	9,35	89,84
9.	Bintang Ara	9.422	3,61	8,05
10.	Upau	7.446	2,88	40,69
11.	Muara Uya	24.334	9,36	27,73
12.	Jaro	15.266	5,89	55,72
	Kab. Tabalong	**261.353**	**100**	**73,55**

Sumber : BPS Kabupaten Tabalong, Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna

untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Pertumbuhan, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7. Kepadatan penduduk selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 kepadatan penduduk Tabalong sebesar 68,13 orang/km2, dan bertambah hingga mencapai 73,55 orang/km2 pada tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 sebesar 7,95 % atau mengalami penambahan sebesar 19.265 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Tabalong yang terus bertambah.

Tabel 2.6
Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah Rmh Tangga	Kepadatan org/km²	Laju pertum-buhan (%)
		Laki2	Perempuan	Total			
1.	2018	122.526	119.562	242.088	74.272	61,35	1,26
2.	2019	123.274	120.489	243.763	78.301	61,78	0,69
3	2020	128.547	124.758	253.305	67.613	64,19	1,48
4	2021	130.327	126.576	256.903	68.330	65,1	1,48
5	2022	132.537	128.816	261.353	69.514	69,38	1,50

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)			
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Banua Lawas	19.678	19.582	20.201	20.420	20.704	-0,49	1,12	0,81	0,90
Pugaan	7.243	7.222	7.443	7.541	7.663	-0,24	1,35	0,99	1,02
Kelua	24.467	24.554	24.911	25.134	25.436	0,36	0,93	0,67	0,66
Muara Harus	6.835	6.779	6.795	6.886	6.999	-0,82	1,37	1,00	0,98
Tanta	20.278	20.591	22.168	22.710	23.335	1,54	2,48	1,83	1,99
Tanjung	35.503	35.678	35.899	36.239	36.692	0,49	0,98	0,71	0,9

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)			
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Murung Pudak	50.100	51.473	56.790	58.099	59.622	2,74	2,34	1,72	1,81
Haruai	23.449	23.430	23.688	24.022	24.434	-0,08	1,44	1,06	0,88
Bintang Ara	9.024	9.090	9.146	9.269	9.422	0,73	1,38	1,01	1,09
Upau	7.404	7.408	7.366	7.395	7.446	0,05	0,43	0,30	0,32
Muara Uya	23.294	23.182	23.839	24.049	24.334	-0,48	0,91	0,66	0,71
Jaro	14.813	14.774	15.059	15.139	15.266	-0,26	0,57	0,40	0,36
Tabalong	**242.088**	**243.763**	**253.305**	**256.903**	**261.353**	**0,69**	**1,44**	**1,06**	**1,50**

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2022, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Murung Pudak yaitu 59.622 jiwa. Kemudian disusul oleh Kecamatan Tanjung sebanyak 36.692 jiwa.

Berdasarkan struktur usia penduduk, penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok usia 5-9 tahun yaitu sebanyak 24.662 jiwa. Sedangkan kelompok usia produktif 15-64 tahun didominasi oleh kelompok usia 30-34 tahun sebanyak 22.633 jiwa.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tabalong Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			*Sex Ratio*
	Laki-laki	Perempuan	Total	
0-4	12.357	11.862	24.219	104
5-9	12.574	12.088	24.662	104
10-14	11.450	10.518	21. 968	108
15-19	10.364	9.676	20.040	107
20-24	11.077	10.536	21.613	105
25-29	11.213	10.949	22.162	102
30-34	11.544	11.089	22.633	104
35-39	10.147	9.791	19.938	103
40-44	9.671	9.244	18.915	103
45-49	8.892	8.518	17.410	104
50-54	7.417	7.089	14.506	104

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			*Sex Ratio*
	Laki-laki	Perempuan	Total	
55-59	6.134	6.037	12.171	101
60-64	4.469	4.524	8.993	98
65-69	2.877	3.322	6.199	87
70-74	1.405	1.940	3.345	72
75+	946	1.633	2.579	58
Total	**132.537**	**128.816**	**261.353**	**102,89**

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan dapat ditunjukkan oleh meningkatnya taraf hidup masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Pada bagian ini akan digambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Tabalong selama beberapa tahun terakhir, yaitu melalui Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat antara lain meliputi pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB Sektoral, struktur perekonomian, inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Angka Kemiskinan.

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Dalam pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk PDRB), yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB ADHB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022, laju partumbuhan PDRB sebesar 5,30% Laju pertumbuhan ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Adapun mengenai data laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Sektor	Pertumbuhan (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	5,34	1,95	-1,95	2,71	2,88
B	Pertambangan dan Penggalian	0,72	1,36	-4,37	1,78	5,57
C	Industri Pengolahan	5,69	2,89	-3,71	4,59	5,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,54	8,34	4,71	4,74	7,85
E	Pengadaan Air	8,3	7,31	7,52	2,47	3,34
F	Konstruksi	7,86	8,22	-1,83	5,34	4,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	9,47	9,48	-2,30	6,84	8,13
H	Transportasi dan pergudangan	9,3	9,13	-4,37	4,45	5,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,15	11,21	-0,92	7,59	7,42
J	Informasi dan Komunikasi	10,53	9,57	8,26	8,61	8,66
K	Jasa keuangan	9	5,51	2,52	2,46	1,38
L	Real Estate	6,23	8,82	3,16	5,24	6,26
M,N	Jasa Perusahaan	7	6,85	-1,35	7,85	5,06
O	Adm Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,84	5,95	-0,70	0,45	-0,28
P	Jasa Pendidikan	6,91	7,95	-0,78	3,04	4,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,89	6,02	7,22	9,71	7,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,2	10,81	-2,53	5,86	7,39
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong		**3.78**	**3,50**	**-2,49**	**3,28**	**5,30**
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan		**5.13**	**4,08**	**-1,81**	**4,82**	**5,11**

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong, data diolah dari Kabupaten Tabalong dalam Angka tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Tabalong berada diatas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, Tabalong menyumbang sebesar 9,99 persen terhadap PDRB Kalimantan Selatan dan merupakan penyumbang terbesar setelah Kota Banjarmasin, Kotabaru dan Tanah Bumbu. Sektor primer (pertanian dan pertambangan) menyumbang sebesar 14,11 persen, sektor sekunder (Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Pengadaan Air, Konstruksi) menyumbang sebesar 7,06 persen. Sedangkan sektor tersier (Perdagangan, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Informasi dan

Komunikasi, Real Estate Jasa dan Administrasi Pemerintah menyumbang sebesar 7,01 persen.

Struktur perekonomian di Kabupaten Tabalong tahun 2022 didominasi oleh Jasa Kesehatan dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini tercermin dari sumbangan kedua sektor ini terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku yang cukup besar yaitu masing-masing 8,61 persen dan 9,71 persen.

Tabel 2.10

PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022

No	Sektor	Tahun (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.490,26	1.519,35	1.487,98	1.527,86	1.571,80
2	Pertambangan dan Penggalian	7.409,21	7.509,92	7.181,45	7.302,67	7.678,51
3	Industri Pengolahan	1.119,74	1.152,07	1.108,74	1.163,09	1.234,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,46	5,92	6,20	6,49	7,00
5	Pengadaan Air	35,96	38,59	41,49	42,51	44,79
6	Konstruksi	751,9	813,7	798,83	836,59	874,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	979,39	1.072,26	1.047,58	1.119,26	1.232,38
8	Transportasi dan pergudangan	273,31	298,26	285,21	297,63	314,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	197,09	219,18	217,17	233,26	250,56
10	Informasi dan Komunikasi	585,9	641,95	698,11	758,25	820,59
11	Jasa Keuangan	232,88	245,72	251,92	258,12	261,69
12	Real Estate	159,26	173,31	178,79	188,15	199,94
13	Jasa Perusahaan	34,71	37,08	36,59	39,346	41,45
14	Adm Pemerintahan.Pertahanan dan Jaminan Sosial	459,47	486,81	482,24	483,67	482,42
15	Jasa Pendidikan	440,55	475,58	471,86	486,20	506,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,74	93,02	99,73	109,42	117,41
17	Jasa lainnya	87,13	96,54	94,10	99,61	106,97
PDRB		14.349,96	14.879,25	14.487,98	14.957,25	15.746,27

Tabel 2.11
PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022

No	Sektor	Tahun (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.906,11	1.987,54	1.961,40	2.061,50	2.255,36
2	Pertambangan dan Penggalian	7.673,7	7.554,48	7.288,21	8.066,68	16.937,22
3	Industri Pengolahan	1.550,36	1.605,43	1.574,35	1.712,27	1.712,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,7	9,67	10,41	11,19	12,17
5	Pengadaan Air	50,22	54,45	58,58	60,67	64,38
6	Konstruksi	1.073,29	1.195,73	1.174,54	1.259,58	1.352,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	1.436,26	1.603,97	1.591,40	1.724,24	2.001,16
8	Transportasi dan pergudangan	384,03	432,14	420,12	441,82	495,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	274,53	315,53	315,91	346,21	380,46
10	Informasi dan Komunikasi	745,8	835,05	878,30	958,58	1.062,02
11	Jasa Keuangan	340,77	366,91	380,21	406,44	442,50
12	Real Estate	212,9	237,85	247,76	265,36	287,70
13	Jasa Perusahaan	53,35	59,13	59,51	65,18	71,22
14	Adm Pemerintahan.Pertahanan dan Jaminan Sosial	716,75	791,44	781,46	794,31	807,67
15	Jasa Pendidikan	634,35	706,49	714,14	750,95	792,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,09	141,35	152,19	170,48	185,22
17	Jasa lainnya	130,73	149,82	148,75	159,69	178,36
PDRB		1.6211,70	1.7319,93	1.8046,98	1.7757,24	29.172,84

2.1.2.2 Laju Inflasi

Indikator inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di level konsumen. Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua harga selama periode tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi tumbuhnya produksi masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya kegiatan perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun demikian, perlu juga diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi, akan mendorong kegiatan perekonomian menjadi tidak terkendali, sehingga besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu dikendalikan.

Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang mengalami kenaikan. Nilai inflasi rata-rata adalah ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Tanjung selama tahun 2022 antara lain: ikan nila, telur ayam ras, bawang merah, bahan bakar rumah tangga dan ikan mas. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya inflasi di Kabupaten Tabalong di antaranya adalah karena sebagian besar komoditas bahan makanan tidak diproduksi di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.12
Perbandingan Komoditi Inflasi Tahun 2018-2022

No	Komoditi Inflasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bahan Makanan	2,20	4,10	3,39	0,56	-0,12
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,75	1,35	1,92	0,56	-0,12

No	Komoditi Inflasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,54	1,32	0,01	0,02	0,09
4	Sandang	2,92	5,59	2,56	-0,04	0,09
5	Kesehatan	4,62	2,18	2,42	0,48	0,33
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	4,56	1,09	1,15	0,75	0,30
7	Informasi dan Komunikasi	3,30	-0,27	-2,30	0,00	0,00
Inflasi Tabalong		**2,60**	**2,15**	**2,05**	**2,43**	**5,01**
Inflasi Kalsel		**2,63**	**4,01**	**2,37**	**2,54**	**7,06**

Sumber : BPS Kabupaten Tabalong 2018-2023 (Diolah)

Kenaikan harga di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu (tiga) tahun, yaitu 2018-2022 secara rata-rata diimbangi oleh kenaikan pendapatan riil penduduk. Pada tahun 2022, inflasi Kabupaten Tabalong menurun menjadi 5,01 persen. sehingga secara keseluruhan, inflasi di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

2.1.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tabalong selama tahun 2018-2022, mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari 69.054,69 ribu rupiah pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 72.056,89 ribu rupiah, namun pada tahun 2020 turun menjadi 70.285,25 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 111.622,38. PDRB perkapita Tabalong masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi PDRB per kapita konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong tumbuh melambat selama periode 2018-2022, dengan

rata-rata pertumbuhan naik 1,25% pertahun. Kondisi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu yang sama akibat dampak pandemi Covid 19. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 3,38% dibanding tahun 2021 menjadi 60.249,05 ribu rupiah.

Tabel 2.13
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021*	2022**
Nllai PDRB (Juta Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	17.319,54	18.175,41	17.742,46	19.934,96	29.172,84
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)	14.351,35	14.853,25	14.481,31	14.954,33	15.746,27
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	69.054,69	72.056,89	70.285,25	77.597,22	111.622,38
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)	57.220,22	58.886,08	57.366,49	58.210,01	60.249,05
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2,24	2,91	-2,58	1,47	3,50
Jumlah Penduduk (ribu orang)	**250,81**	**252,24**	**252,44**	**256,90**	**261,35**
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	**1,50**	**0,57**	**0,08**	**1,77**	**1,73**

*) Angka Sementara

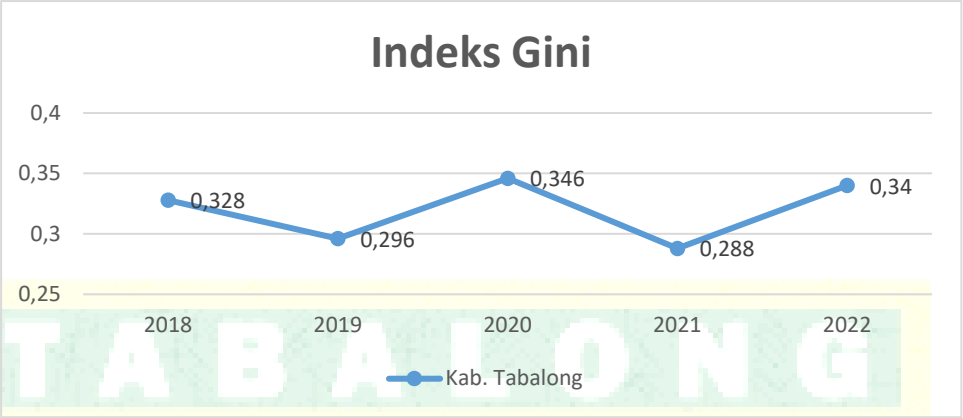
**) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha, 2023

2.1.2.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau *Gini Ratio* atau koefisien gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai IG terletak antara nol sampai dengan satu. Bila IG = 0 berarti pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila IG = 1 artinya ketimpangan pendapatan sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

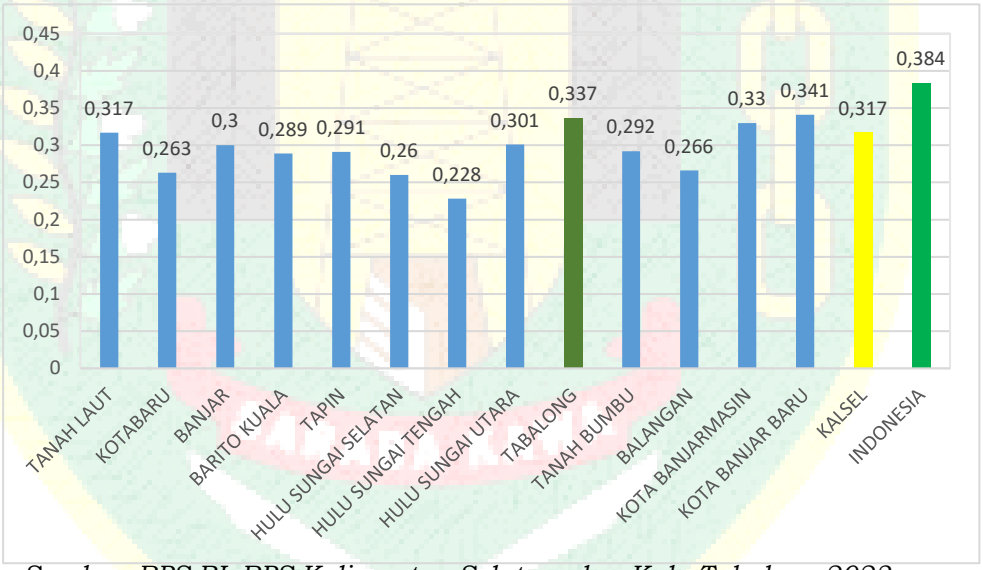
IG Kabupaten Tabalong dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif. Pada rentang waktu tersebut, IG tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu 0,346 dan terendah pada tahun 2021 yaitu 0,288. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Sumber: BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan Kab. Tabalong, 2023

Gambar 2.6
Grafik Perkembangan Indeks Gini (IG) Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

Sedangkan untuk posisi relatif IG Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan Kab. Tabalong 2023

Gambar 2.7
Grafik Posisi Relatif Indeks Gini (IG) Kabupaten Tabalong Terhadap Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa posisi relatif IG Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 terhadap IG Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan terendah ke-8 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten HSU (0,301), Tanah Bumbu

(0,292), Tapin (0,291), Barito Kuala (0,289), Balangan (0,266), Kotabaru (0,263) dan Hulu Sungai tengah (0,228) serta lebih rendah dari rata – rata IG Nasional dan namun lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, kesenjangan distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tabalong relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan IG Nasional namun lebih tinggi dari IG Kalimantan selatan. Peningkatan Indeks Gini pada tahun 2022 di Kabupaten Tabalong mempengaruhi tingkat kemiskinan yang meningkat pada tahun yang sama. Hal ini juga dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global sehingga pengeluaran masyarakat atas menurun. Sementara sektor pendorong ekonomi seperti aktivitas ekonomi kreatif serta usaha kecil dan menengah yang terdampak Covid-19 belum pulih sepenuhnya.

2.1.2.5 Potensi Wilayah

Potensi wilayah merupakan kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai. Potensi wilayah dapat dihitung menggunakan metode *Location Qoutient* (LQ), *shift-share*, dan tipologi klassen . Metode LQ digunakan untuk :

1. Menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar
2. Mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah
3. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu wilayah

Metode *shift share* digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah admistratif yang lebih luas sebagai referensi serta menganalisis data statistik regional untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif, dengan penilaian :

1. DSij > 0 : bahwa daya saing sektor i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada daya saing sektor i di wilayah referensi dan sebaliknya
2. SSij > 0 : terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada sektor i di wilayah analisis tersebut.

Sedangkan tipologi klassen digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor, subsektor, usaha/industri, atau komoditas unggulan atau prioritas suatu daerah. Tujuan tipologi ini untuk menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah. Pola dan karakteristik daerah berdasarkan tipologi ini adalah :

1. Daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah referensi
2. Daerah berkembang cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata wilayah referensi
3. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata wilayah referensi
4. Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata wilayah referensi

Berdasarkan ketiga metode tersebut, kategori unggulan di Kabupaten Tabalong adalah sektor pertambangan dan penggalian serta Jasa Keuangan dan Asuransi, sedangkan sektor lainya potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Penentuan Kategori Unggulan Daerah

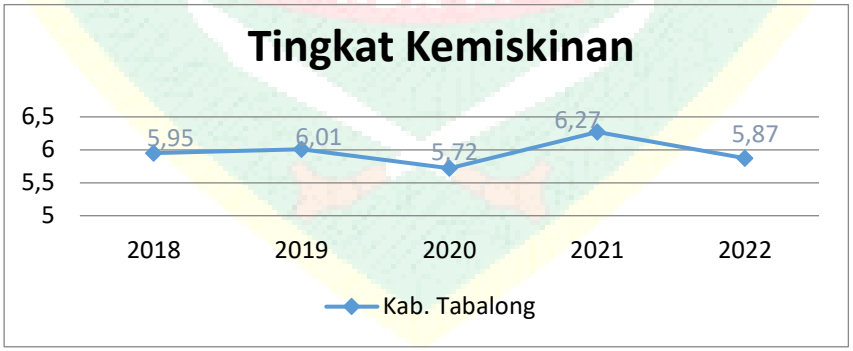
No	Sektor	Metode				Kesimpulan
		LQ	*Shift Share*		Tipologi Klassen	
			Psij	Dsij		
1	Pertanian.Kehutanan. dan Perikanan	-	-	+	4	Potensial, memiliki daya saing
2	Pertambangan dan Penggalian	+	-	-	2	Unggulan, Tertekan
3	Industri Pengolahan	-	-	+	4	Potensial, memiliki daya saing
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	-	+	-	4	Terhambat namun masih berpotensi
6	Konstruksi	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
8	Transportasi dan pergudangan	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
10	Informasi dan Komunikasi	+	+	+	1	Unggulan
11	Jasa Keuangan	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
12	Real Estate	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
13	Jasa Perusahaan	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-	+	-	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
15	Jasa Pendidikan	-	+	-	4	Terhambat namun masih berpotensi
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
17	Jasa lainnya	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat

Berdasarkan analisis tersebut, Kabupaten Tabalong merupakan daerah maju tapi tertekan, dimana pendapatan per kapita lebih tinggi, namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Diperlukan gebrakan yang inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor yang potensial.

2.1.2.6 Persentase Penduduk Miskin

Data kemiskinan di Indonesia umumnya dibedakan menjadi 2 yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Di Indonesia, data kemiskinan makro disajikan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya sejak 1984 dengan menggunakan Susenas sebagai sumber data. Data kemiskinan makro ini, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs approach* dalam mengukur kemiskinan. Dengan konsep ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Indikator Kemiskinan Komsumsi oleh BPS ini disajikan melalui Persentase Penduduk Miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Indeks Gini.

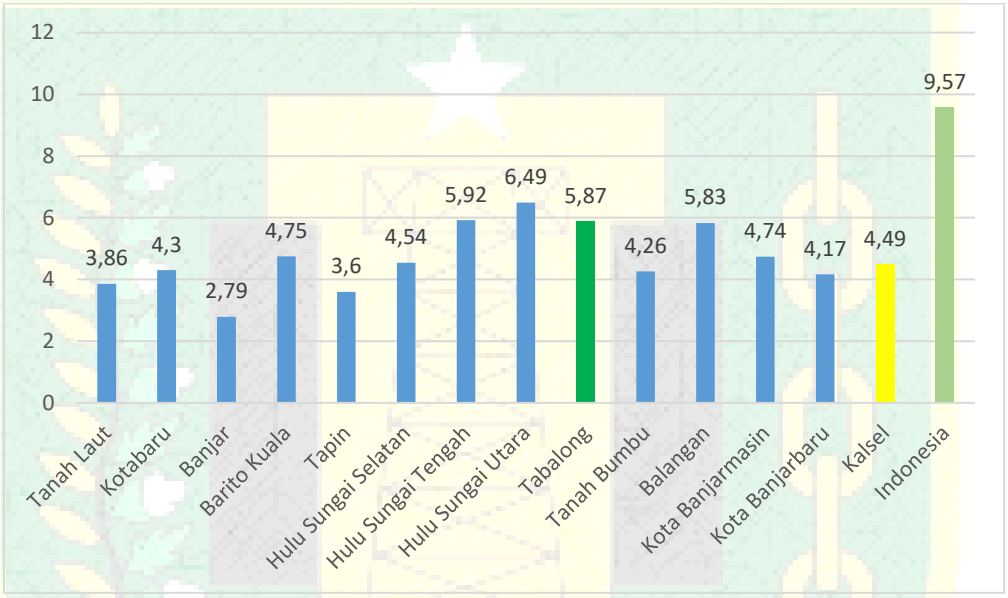
Persentase Penduduk Miskin (P0) merupakan persentasi jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Apabila dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong selama periode 2018-2022 relatif turun secara fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Tabalong 2023

Gambar 2.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tabalong tahun 2018 - 2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, maka pada tahun 2022 Kabupaten Tabalong menempati urutan ke-4 sebagai Kabupaten dengan presentasi penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi relatif Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tabalong terhadap Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.9
Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong mencapai 5,87% menduduki peringkat terendah ke-3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 5,92%. Persentase ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan presentase rata – rata Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 4,49% namun lebih rendah jika dibandingkan persentase Nasional yaitu 9,54%.

Selain persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga merupakan salah satu indikator kemiskinan. Jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukan tren yang sama dengan persentase penduduk miskin.

Indikator kemikinan lainnya adalah P1 atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah koefisien yang menyatakan jarak atau kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai koefisien tersebut maka semakin lebar kesenjangan antara rata – rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 adalah 0,702. Indeks ini lebih rendah dari indeks pada tahun 2021 yaitu 1,082.

Indikator lain yang juga dipakai sebagai indikator kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2. Indeks Keparahan Kemiskinan adalah koefisien yang menunjukkan persebaran (kesenjangan) pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai koefisien tersebut maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tabalong tahun 2022 adalah 0,146 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 0,24.

Indikator Kemiskinan di Kabupaten Tabalong tahun 2017 sampai dengan 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2017 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	446.765	463.980	531.190	542.800	573.018
Penduduk Miskin (jiwa)	14.874	15.222	14.700	16.128	15.243
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,95	6,01	5,72	6,27	5,87

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,17	1,04	0,72	1,082	0,702
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,34	0,29	0,21	0,24	0,146

Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Tabalong Tahun 2023

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020, terdiri dari (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; (4) Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Strategi tersebut diformulasikan menjadi 3 kelompok program yaitu :

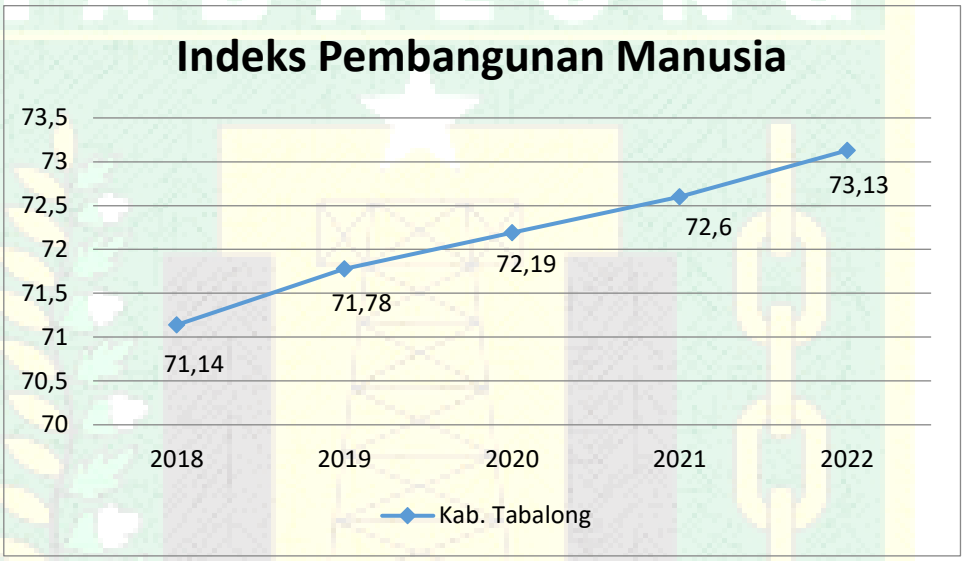
1. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu Yang Bertujuan Untuk Melakukan Pemenuhan Hak Dasar, Pengurangan Beban Hidup, dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Yang Bertujuan Untuk Memperkuat Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin Untuk Terlibat dan Mengambil Manfaat dari Proses Pembangunan.
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka harapan

hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

IPM Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 – 2022 menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 71,14 pada tahun 2018 menjadi 73,13 pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

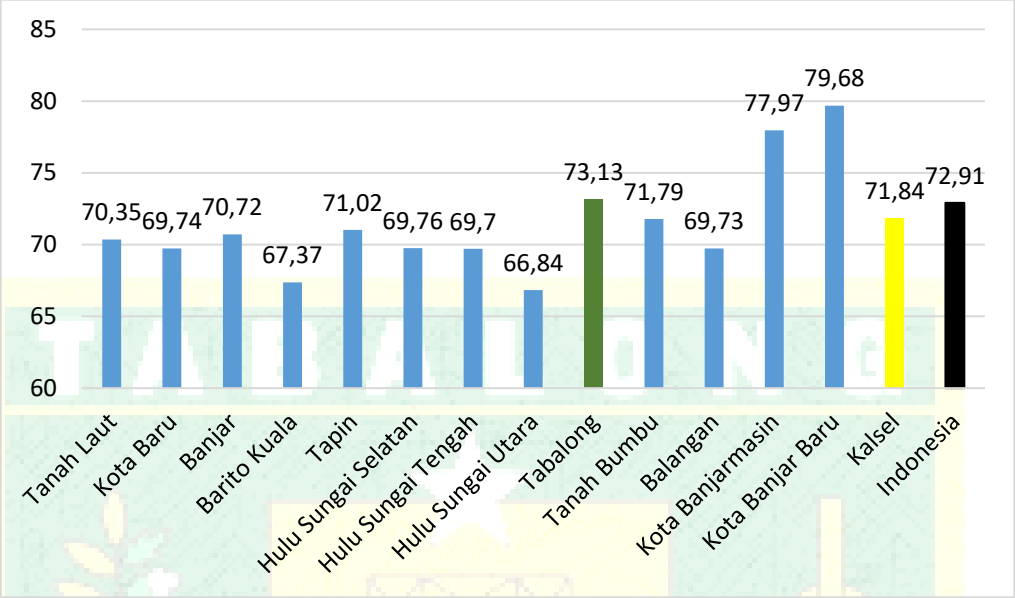


Sumber : BPS Kabupaten Tabalong 2023

Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

Merujuk kepada konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maka capaian angka IPM Tabalong sebesar 73,13 masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia tinggi, yaitu di kisaran angka 70 ≤ IPM < 80.

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tabalong menempati rangking ke-3 setelah Kota Banjarbaru yaitu 79,68 dan Kota Banjarmasin yaitu 77,97. Untuk posisi relatif IPM Kabupaten Tabalong terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : BPS RI, BPS Provinsi Kalsel 2023

Gambar 2.11
Posisi Relatif IPM Kabupaten Tabalong terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

2.1.2.8 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Melek Huruf adalah 100 persen.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf	99,36	99,48	99.51	98,525	99,53

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, Tabalong dalam Angka 2022 (Diolah).

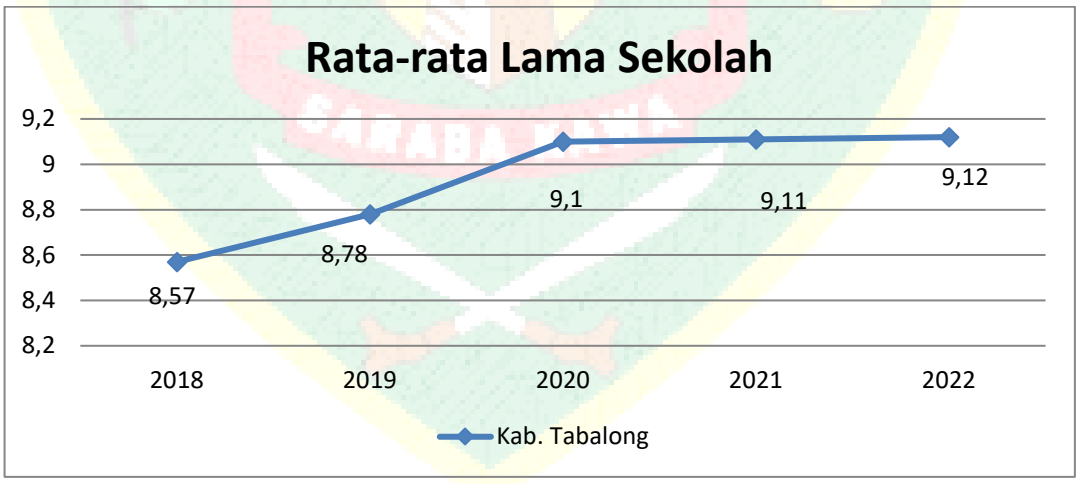
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 AMH di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan, namun demikian pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,985% jika dibandingkan dengan tahun 2020. AMH

perempuan lebih rendah sebesar 2,29% jika dibandingkan AMH laki-laki. Jika dibandingkan dengan AMH Provinsi Kalimantan Selatan, maka AMH di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 yaitu 99,53%.

2.1.2.9 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka RLS di Kabupaten Tabalong dari tahun 2018-2022 menunjukan tren peningkatan, seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini. Peningkatan dari tahun ke tahun menjadikan rata-rata lama sekolah Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 berada di angka 9,12 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa penduduk Tabalong rata-rata telah menyelesaikan pendidikan kelas IX atau tingkat SLTP.

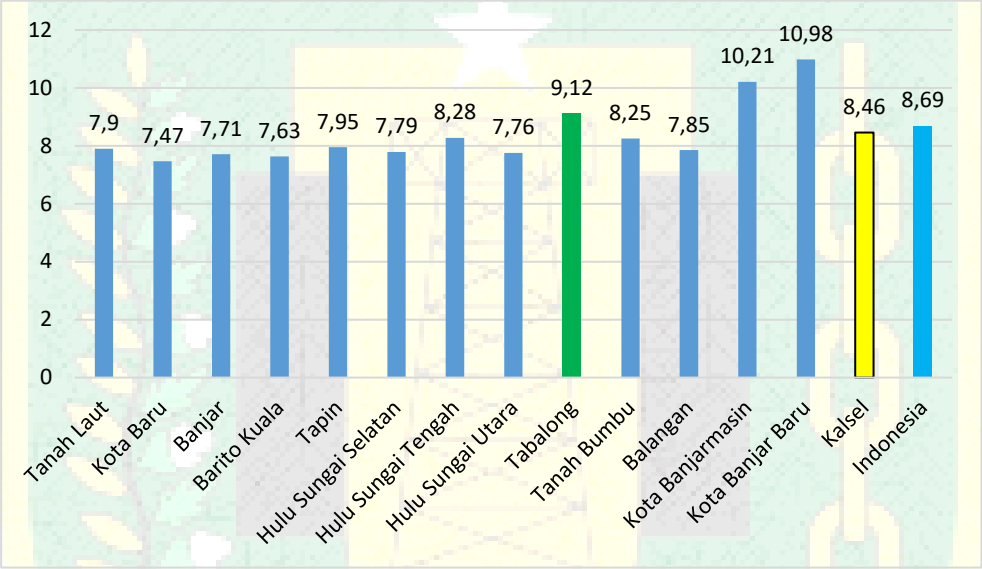


Sumber: BPS RI 2023

Gambar 2.12
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan maka RLS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 menempati peringkat ke-3 setelah Kota Banjarbaru yaitu 10,98 tahun dan Kota Banjarmasin yaitu 10,21 tahun.

Angka RLS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 ini lebih tinggi dari angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 8,46 tahun dan Indonesia yaitu 8,69 tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Kalimatan Selatan 2023

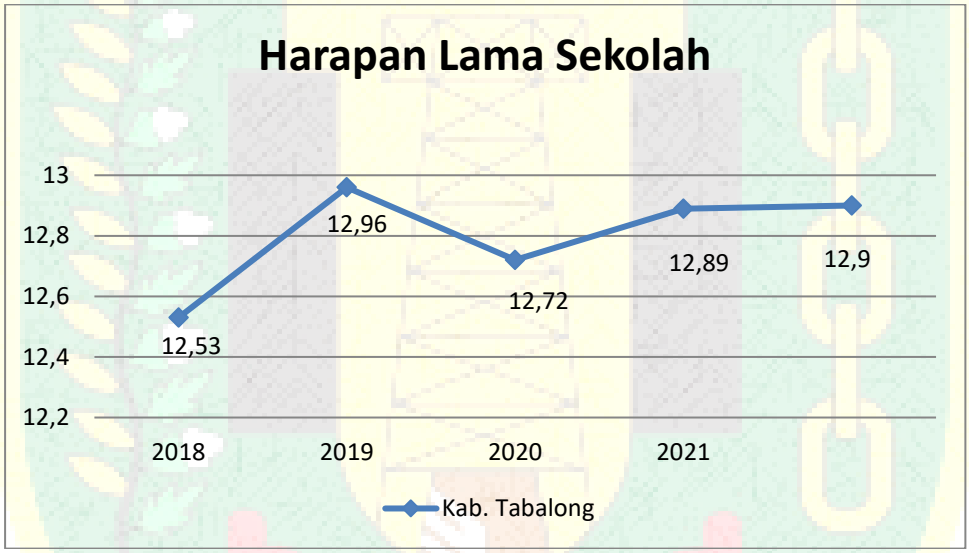
Gambar 2.13
Posisi Relatif Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tabalong terhadap Kabupaetn/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

2.1.2.10 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk

penduduk berusia 7 tahun ke atas, angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Angka HLS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan tren peningkatan. Angka HLS tahun 2018 sebesar 12,53 tahun terus meningkat sehingga mencapai 12,9 tahun pada tahun 2022. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



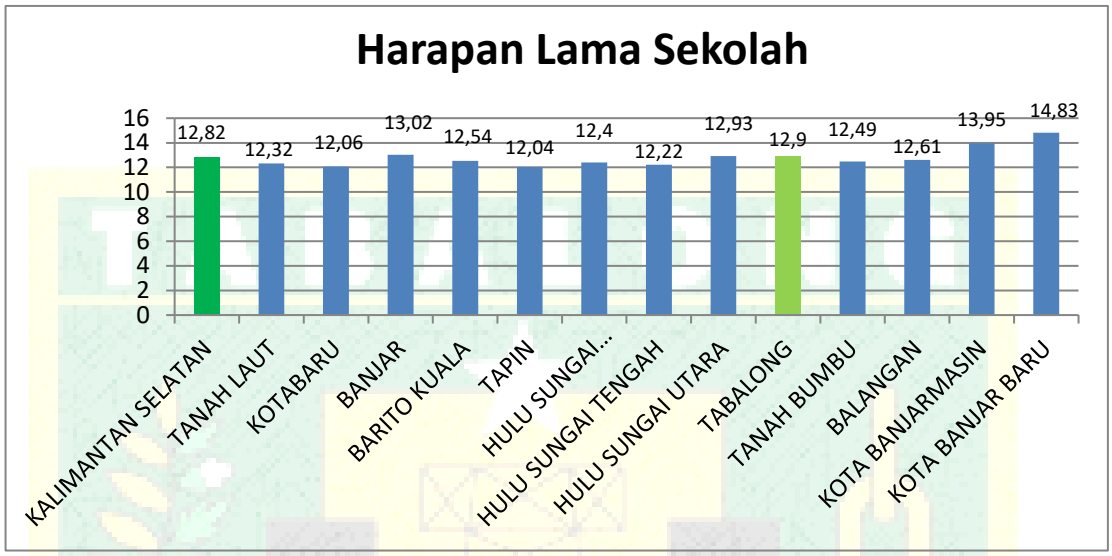
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Gambar 2.14
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Bila dibandingkan dengan angka HLS Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kabupaten Tabalong menempati peringkat ke-4 setelah Kota Banjarbaru yaitu 14,83 tahun dan Kota Banjarmasin yaitu 13,95 tahun dan Kabupaten Banjar yaitu 13,02 Tahun.

Angka HLS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 ini lebih tinggi daripada Angka HLS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 12,82 tahun, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Angka

HLS Nasional yaitu 13,10 tahun. Data selengkapnya sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



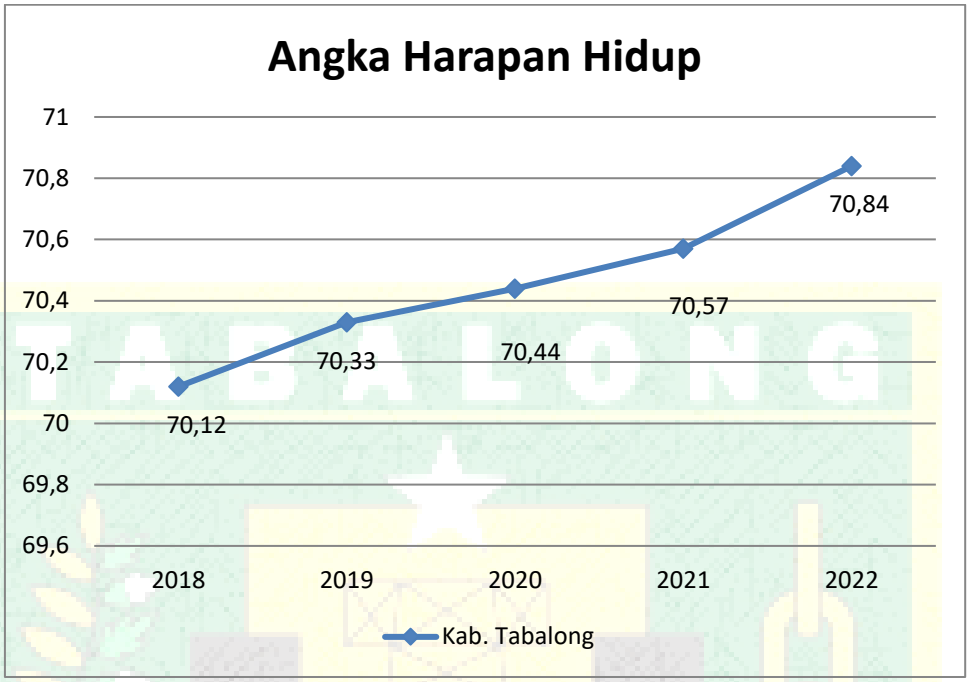
Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 2.15
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

2.1.2.11 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum AHH adalah 85 tahun.

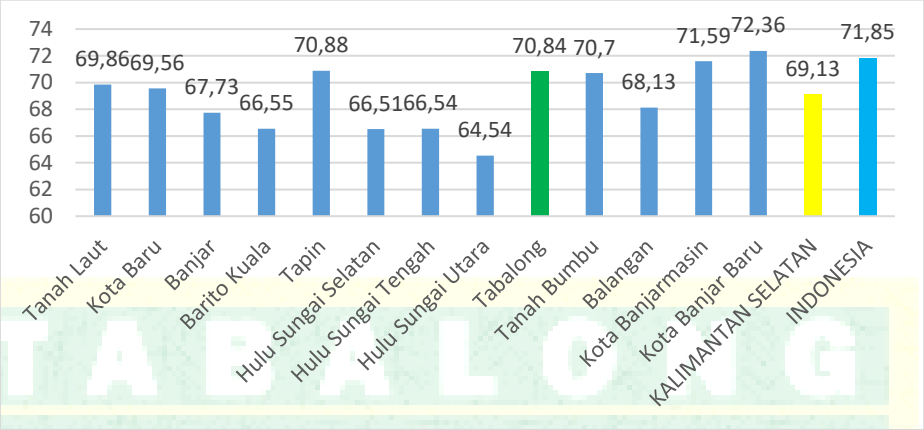
Tren AHH Kabupaten Tabalong tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan dari 70,12 tahun pada tahun 2018 hingga mencapai 70,84 tahun pada tahun 2022. Data selengkapnya dapat sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Gambar 2.16
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 – 2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maka AHH Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 menempati peringkat ke-4 setelah Kota Banjarbaru yaitu 72,36 tahun dan Kota Banjarmasin yaitu 71,59 Tahun serta sama dengan Kabupaten Tapin yaitu 70,88 tahun. AHH Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 ini lebih tinggi dari AHH Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 69,13 tahun namun lebih rendah dari AHH Nasional yaitu 71,85 tahun sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.17
Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tabalong terhadap Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka AHH perempuan di Kabupaten Tabalong lebih tinggi daripada laki – laki. Pola tersebut juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, Nasional bahkan di dunia. Lebih tingginya AHH pada perempuan berdasarkan referensi disebabkan dengan resiko pekerjaan yang menyebabkan kecelakaan pada laki – laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan, resiko penyakit kardiovaskuler yang lebih tinggi pada laki – laki, gaya hidup dan juga faktok genetik.

Tabel 2.17
Perbandingan Angka Harapan Hidup Laki – Laki dan Perempuan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lk2	Pr	Lk2	Pr	Lk2	Pr	Lk2	Pr	Lk	Pr
Tabalong	68,10	72,04	68,30	72,25	68,46	72,36	68,62	72,49	68,85	72,81
Kalimantan Selatan	66,16	70,19	66,55	70,45	66,76	70,62	66,97	70,79	67,23	71,13
Indonesia	69,30	73,19	69,44	73,33	69,59	73,46	69,67	73,55	69,93	73,83

Sumber : BPS RI, Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

2.1.2.12 Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada anak balita mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Status gizi diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB tersebut disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan Berat Badan menurut tinggi badan (BB/TB). Angka berat badan dan tinggi badan setiap balita dikonvensikan ke dalam bentuk nilai terstandar (Z-score) dengan menggunakan baku antropometri WHO 2006.

Gizi buruk merupakan salah satu kriteria status gizi balita berdasarkan indikator BB/U. Balita Gizi Buruk adalah Balita yang penimbangan berat badannya menunjukkan nilai Z-score < -3,0 sedangkan Balita Gizi Kurang adalah Balita yang hasil penimbangan berat badannya menunjukkan nilai Z-score ≥ -3 s/d <-2.

Tabel 2.18
Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Buruk
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

No	Kondisi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita	24.391	24.162	18.548	17.978	17.528
2	Jumlah Balita Gizi Kurang	762	644	2.182	1.597	1.436
	% Balita Gizi Kurang	3,12	2,67	11,76	8,88	7,9
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	1	0	1	1	1
	% Balita Gizi Buruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan indikator BB/U persentase balita gizi kurang pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 walaupun masih tinggi dibanding tahun 2018.

Sehubungan dengan usaha menurunkan angka persentase balita gizi kurang dan gizi buruk tersebut, maka telah dilakukan upaya perbaikan gizi balita antara lain melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian multivitamin A mineral, pendampingan balita gizi buruk yang dirawat, konseling, kunjungan rumah, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Selain indikator BB/U, indikator TB/U juga merupakan indikator gizi balita yang saat ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Indikator TB/U menggambarkan status gizi yang dipengaruhi kondisi yang sifatnya kronis (akibat kondisi yang berlangsung dalam waktu lama). Berdasarkan indikator TB/U disebut maka balita dikatakan *stunting* atau pendek dan sangat pendek jika Z-score ≤ -2. Berdasarkan data dari elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) maka angka stunting di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 adalah 7,90%. Angka ini telah melampau target RPJMD Kabupaten Tabalong 2024 yaitu 10%.

2.1.2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK dihitung dengan menghitung persentase banyaknya Angkatan Kerja terhadap penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas.

Sebelum membahas mengenai TPAK, maka berikut ini disajikan terlebih dahulu data mengenai data penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utamanya.

Tabel 2.19
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Kegiatan Utama Tahun 2018 – 2022

Kegiatan Utama	Tahun									
	2017	2018	2019	2020*			2021*			2022
				L	P	T	L	P	T	Total
Angkatan Kerja				81,07	57,28	69,27	83,01	59,82	71,49	139.542
- Bekerja	71,74	73,30	68,68	96,21	97,97	96,93	97,31	95,54	96,57	133.323
- Pengangguran	3,88	3,09	3,3	3,79	2,03	3.07	2,69	4,46	3,43	4,46
Bukan Angkatan Kerja				18,93	42,72	30,73	16,99	40,18	28,51	
- Sekolah	8,85	7,88	7,82	44,73	20,44	27,98				
- Mengurus RT	14,76	15,27	17,74	16,46	74,67	56,60				
- Lainnya	1,74	1,22	3.42	38,81	4,89	15,42				

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong 2023
**: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022, BPS*

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (0-14 tahun). Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja adalah penduduk yang beraktivitas sekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sudah tidak mampu bekerja, baik karena alas an kesehatan atau usia (misalnya pensiunan dan penerima pendapatan). Sedangkan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja) dan penduduk yang ingin terlibat aktif secara ekonomi atau berusaha mencari pekerjaan (pengangguran).

Penduduk angkatan kerja di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 mencapai 72,32 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK penduduk laki-laki mencapai 83,01 persen, sedangkan TPAK penduduk perempuan hanya sebesar 59,82 persen. Hal ini terjadi dikarenakan laki- laki di dalam keluarga menjadi pihak yang lebih bertanggung jawab secara ekonomi, sehingga nilai TPAK menjadi lebih tinggi. Perkembangan TPAK di Kabupaten Tabalong dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	75,06	70,42	69,27	71,49	72,32

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2023

Jika melihat TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf ”U” terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tabalong berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

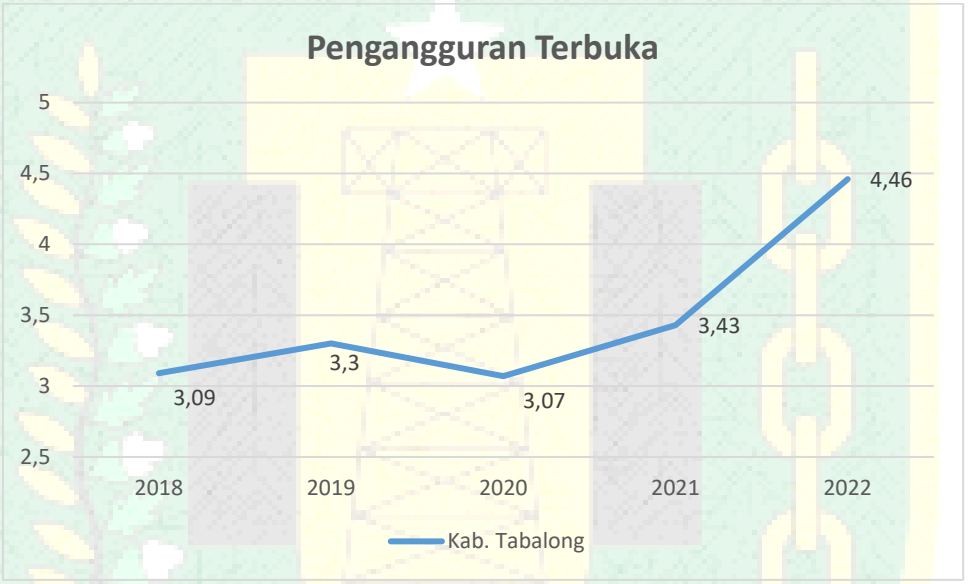
GOLONGAN UMUR	2018	2019	2020	2021	2022
15-19	25,98	28,09	21,59	24,98	26,99
20-24	78,17	73,44	65,18	76,87	67,98
25-29	81,68	67,81	73,61	78,05	76,56
30-34	81,24	83,32	77,93	81,52	76,68
35-39	88,10	82,95	83,55	84,04	79,23
40-44	93,76	84,92	87,75	83,79	81,69
45-49	89,36	86,34	84,99	86,58	81,97
50-54	91,79	86,48	87,37	87,34	80,96
55-59	83,59	73,29	82,87	83,59	76,52
60-64	51,93	49,86	57,70	59,54	55,73
65+			39,07	37,95	69,06
TPAK	**75,06**	**70,42**	**69,27**	**71,49**	**72,32**

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2018 – 2023, diolah.

2.1.2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka (PT) terdiri dari (a). Mereka yang mencari pekerjaan; (b). Mereka yang mempersiapkan usaha; (c). Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan TPT di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

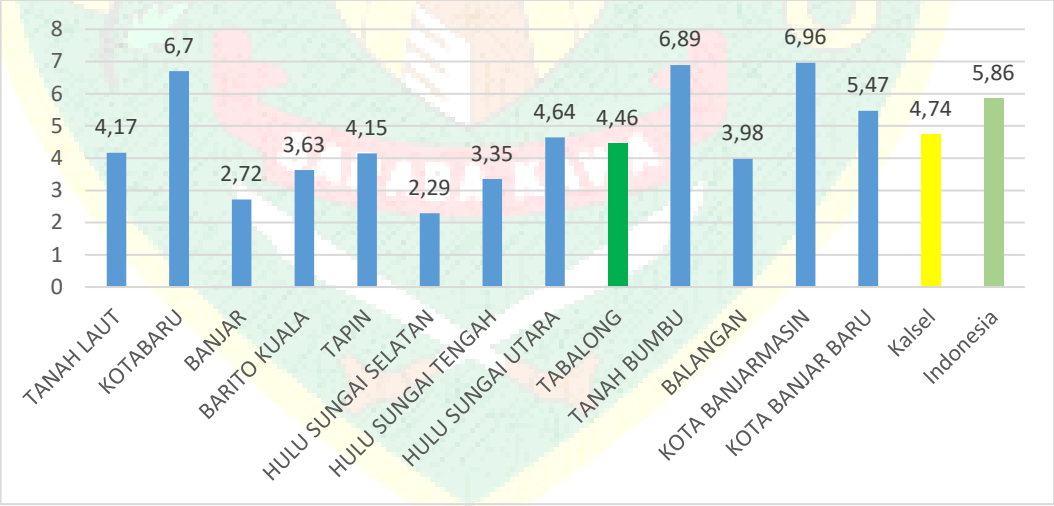
Kesempatan kerja di Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi untuk persentase penduduk yang bekerja. Demikian juga dengan angka pengangguran yang persentasenya ikut berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan persentase penduduk yang bekerja, berbanding lurus dengan meningkatnya persentase angka pengangguran, demikian juga sebaliknya. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, TPAK, Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa), Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja dan TPT di Kabupaten Tabalong 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk (Jiwa) Angkatan Kerja, TPAK, TPT di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Indikator Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2022
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	137.118	130.200	129.928	136.032	139. 542
Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	132.994	126.057	125.937	131.366	133 .323
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,06	70,42	69,27	71,49	72,32
Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa)	4.124	4.143	3.991	4.666	6.219
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,01	3,29	3,07	3,43	4,46
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	45.555	54.688	57.647	54.244	53. 422

Sumber : BPS Provinsi Kalsel, 2023

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan maka TPT Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 berada pada peringkat ke-4 setelah Kabupaten Tapin yang mempunyai nilai TPT 4,15, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.19
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tabalong terhadap Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

2.1.2.15 Opini BPK tehadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator yang memberikan gambaran pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel adalah Opini BPK tehadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kebaikan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.23
Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tabalong, 2023

2.1.2.16 Kontribusi Sektor Tanaman Pertanian

Sektor Pertanian didukung oleh 3 (tiga) sub kategori lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan (3) Perikanan.

Pada tahun 2022 Kategori Pertanian, memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,73 persen atau penyumbang perekonomian terbesar kedua di Kabupaten Tabalong. Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2018, kategori tumbuh hingga 11,01 persen. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi hanya 1,95 persen. Meski demikian secara rata-rata, selama kurun waktu 2018-2022 kategori ini mampu tumbuh rata-rata sebesar 3,47 persen.

Sekitar 81,90 persen kategori ini disumbang oleh sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Kemudian diikuti oleh sub kategori perkebunan sekitar 40,02 persen dan sub

kategori tanaman pangan (Holtikultura) sekitar 30,71 persen. Selama periode tahun 2018-2022 terlihat bahwa peranan sub kategori perkebunan cenderung menurun, sedangkan perikanan dan peternakan memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Jika dilihat lebih dalam, ternyata penurunan peranan sub kategori Pertanian cenderung disebabkan oleh penurunan peranan sub kategori Perkebunan. Peranan sub kategori Perkebunan mengalami penurunan dari 45,36 persen di tahun 2018 menjadi 40,02 persen di tahun 2022. Perlambatan kinerja lapangan usaha perkebunan selama kurun waktu tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet, karena banyaknya tanaman tua yang perlu peremajaan dan penurunan produksi akibat penyakit gugur daun.

Sementara itu, kinerja sub kategori usaha pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah perkebunan. Subkategori ini sebagian besar ditopang oleh produksi tanaman padi sawah. Padi sawah memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi ladang. Secara umum, kinerja produksi tanaman pangan masih terpengaruh oleh iklim. Pertumbuhan produksi tanaman pangan tahun 2019 tidak sebaik tahun 2018, karena adanya kejadian banjir yang menyebabkan beberapa areal tanaman terdampak.

Selain itu, pembentuk kinerja pertanian Kabupaten Tabalong yang menunjukan pertumbuhan positif adalah perikanan dan peternakan. Kebutuhan protein hewani yang besar menyebabkan produksi cukup berlimpah pada tahun 2022. Hal ini menjadi keuntungan bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Tabalong dari aspek keberlanjutan.

Tabel 2.24
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018- 2022

Uraian		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Konstribusi Pertanian terhadap PDRB		11,01	10,85	11,05	10,71	7,73
Peranan sektor :						
1	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, Jasa Pertanian	86,84	85,90	85,54	85,20	81,90
	b. Tanaman Pangan	30,72	30,04	30,76	30,28	30,71
	c. Tanaman Hortikultura	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15
	d. Tanaman Perkebunan	45,36	44,45	42,89	41,08	40,02
	e. Peternakan	7,40	7,96	8,34	8,91	8,85
	f. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,20	2,29	2,38	2,42	2,51
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,81	1,84	1,83	1,82	1,89
3	Perikanan	11,35	12,26	12,64	11,04	11,50

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong 2023

2.1.2.17 Kontribusi Sektor Pertambangan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong mencakup komoditas yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian, yang dikelompokkan dalam empat sub kategori yaitu, pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor pertambangan merupakan sektor utama dalam pemberian kontribusi perekonomian di Kabupaten Tabalong, yang ternyata selama lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada awal periode tahun 2018 mencapai angka 44,31 persen dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sampai tahun 2020 dan mengalami peningkatan mencapai 41,89 persen pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2022 mengalami

peningkatan menjadi 58,02 Persen. Penyebab penurunan sektor ini telah dijelaskan pada sub bab Pertumbuhan PDRB di bagian atas.

Tabel 2.25
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Pertambangan Terhadap PDRB	44.31	42,46	40,95	41,89	58,06

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023

2.1.2.18 Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Tabel 2.26
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	8,29	8,82	8,95	8,89	6,86

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong memiliki perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun pada periode 2018 sampai dengan 2022. Pada awal periode tahun 2018 mencapai angka 8,29 persen, meningkat terus sampai mencapai

8,89 persen pada tahun 2021 pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi mencapai 6,86 persen .

2.1.2.19 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen.

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuatf. Pada tahun 2018 kontribusi sektor perindustrian sebesar 8,95 persen lalu mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif hingga mengalami penurunan menjadi sebesar 6,33 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.27
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018- 2022

Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perindustrian	8,95	8,82	8,87	8,89	6,33

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan daerah.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.1.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK juga menggambarkan akses penduduk usia sekolah terhadap pendidikan.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2018–2022 menunjukan fluktuasi meskipun secara keseluruhan melebihi 100 persen. APK SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2018–2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten Tabalong Tahun 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK SD/MI	110,8	105,94	105,00	107,44	110,54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 menujukkan tren yang cenderung meningkat dan sejak tahun 2019 sudah melampau 100 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Kabupaten Tabalong Tahun 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK SMP/MTs	93,40	107,81	101,83	113,10	101,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, dan BPS Kabupaten Tabalong 2023

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong tahun 2018–2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Sejak tahun 2019 tingkat Pendidikan ini menjadi urusan provinsi. Perkembangan APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Kabupaten Tabalong Tahun 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK SMA/MA/SMK	96,7	N/A	106,36	94,95	117,97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, BPS Kabupaten Tabalong 2023

b. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Selama kurun waktu 2018 sampai 2022, persentase lulusan SD/setara relatif lebih besar dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, persentase pendidikan yang

ditamatkan dari tahun 2018 - 2022 berfluktuasi, namun masih di kisaran 24 s/d 25 persen. Di tingkat SMP/setara dan tingkat SMA, persentase pendidikan yang ditamatkan juga berfluktuasi, namun dengan tren meningkat hingga akhir 2022.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	24,33	24,48	23,58	29,73	28,82
2	SMP	16,07	16,08	16,03	21,84	23,00
3	SMA	18,33	18,22	19,13	33,36	40,23
4	Perguruan Tinggi	5,81	6,14	6,34	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong 2023

Pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa Pendidikan yang ditamatkan pada tingkat SD lebih tinggi dari pada SMP sederajat yaitu berada pada angka 28,82 , namun lebih rendah dari angka SMA sederajat yang berada angka 40,23 Persen hal ini pada bagian pendidikan dasar perlu penanganan yang lebih lanjut.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni atau APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah

1) Angka Partisipasi Murni SD/MI

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong maka APM SD/MI

Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 adalah 99,93%. Berdasarkan angka tersebut maka pada tahun 2022 99,97% penduduk berusia 7 – 12 tahun di Kabupaten Tabalong bersekolah di jenjang SD/MI. APM Kabupaten Tabalong dari tahun 2018–2022 menunjukkan tren yang fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Tabalong Tahun 2018- 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APM SD/MI	98,10	99,75	99,41	99,93	99,97

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kab. Tabalong, 2023

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Tabalong pada periode tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi. APM SMP/MTs pada tahun 2022 mencapai 79,36%, dengan demikian berdasarkan angka tersebut bahwa penduduk yang berusia 13 – 15 tahun di Kabupaten Tabalong bersekolah di jenjang SMP/MTs.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten Tabalong Tahun 2018- 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APM SMP/MTs	81,00	93,12	82,89	98,57	79,36

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

3) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong tahun 2018 adalah 69,00% kemudian meningkat menjadi 88,95% pada tahun 2020. Data terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong pada tahun 2022, APM SMA/MA/SMK adalah 61,28%. Berdasarkan

data ini maka pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Tabalong berusia 16-18 tahun sekolah di jenjang SMA/MA/SMK.

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APM SMA/MA/SMK	69,00	N/A	88,95	80,57	61,28

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Sedangkan Angka melanjutkan (AM) sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

1) Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SD/MI adalah jumlah siswa/i yang lulus ujian tingkat SD/MI dibagi jumlah siswa/i yang mengikuti ujian tingkat SD/MI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2019 telah mecapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua murid yang mengikuti ujian tingkat SD/MI di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2019 semuanya lulus ujian tersebut. Dari Angka Kelulusan yang 100% ini dapat

disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah tingkat SD/MI di Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan berhasil. Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2017 – 2021 selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SD/MI
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

INDIKATOR	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2022
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98,15	99,36	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

2) Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka Kelulusan SMP/MTs adalah jumlah siswa/i yang lulus ujian tingkat SMP/MTs dibagi jumlah siswa/i yang mengikuti ujian tingkat SMP/MTs. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2019 telah mecapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di tingkat SMP/MTs di Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan berhasil.

Angka Kelulusan untuk SMP/MTs di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMP/MTs
Di Kabupaten Tabalong 2017-2021

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,92	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

3) Angka Kelulusan SMA/SMK

Angka Kelulusan SMA/SMK adalah jumlah siswa/i yang lulus ujian tingkat SMA/SMK dibagi jumlah siswa/i yang mengikuti ujian tingkat SMA/SMK. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 telah mecapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di tingkat SMA/SMK di Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan berhasil. Angka Kelulusan SMA/SMK di Kabupaten Tabalong 2018 – 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMA/SMK
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK (%)	N/A	N/A	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

e. Rasio Guru

1) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar

Merujuk pada Peraturan Pemerintah RepubIik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang disebut dengan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru sebagai pendidik professional memegang peran yang sangat besar dalam menentukan mutu pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, di Kabupaten/Kota ketersediaan guru dengan kualifikasi D4/S1 di setiap jenjang Pendidikan. Dalam tabel berikut disajikan data tentang Jumlah dan Persentase Guru dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022.

Tabel 2.38
Jumlah dan Presentasi Guru dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Seluruhnya	Jumlah Guru dengan Pendidikan D4/S1	Persentasi Guru dengan Pendidikan D4/S1
TK	895	680	75,98%
SD	2.594	2.413	93,02%
SLTP	1.167	1.112	95,28%
Total	4.656	4.205	90,31%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tabalong, 2023

2) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar

Rasio guru terhadap murid sekolah dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.39
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sekolah Dasar (SD/MI)					
1.1.	Jumlah Guru	2.383	2.312	2.550	2.416	2.330
1.2.	Jumlah Murid	28.883	29.761	29.920	28.409	29.831

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.3.	Rasio Per 10.000	825	777	852	850	780

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid sekolah dasar di Kabupaten Tabalong 2018 – 2022 berfluktuasi dan terakhir pada tahun 2022 adalah 780 per 10.000 murid atau terdapat 780 orang guru per 10.000 murid. Dengan demikian setiap orang guru menangani 11 – 12 orang murid. Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik maka rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Tabalong telah memenuhi standar.

3) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama

Rasio guru terhadap murid sekolah menengah pertama adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah pertama. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.40
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SMP/MTs					
1.1.	Jumlah Guru	1.192	1.168	1.235	1.340	1.197

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.2.	Jumlah Murid	12.134	12.231	11.901	14.778	12.374
1.3.	Rasio Per 10.000	982	955	1.037	906	967

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 – 2022 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 rasio guru terhadap murid SMP/MTs adalah 967 per 10.000 atau dapat disimpulkan bahwa setiap guru menangani ±11 orang murid. Namun demikian jika merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota maka untuk tingkat SMP/MTs tidak memakai rasio guru terhadap siswa sebagai indikator melainkan tersedianya 1(satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.

4) Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah atas per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah atas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.41
Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Menengah Atas
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah Guru	850	840	861	953	909
1.2.	Jumlah Murid	10.948	11.445	11.681	10.829	9.177

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.3.	Rasio per 10.000	776	734	737	880	990

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio guru terhadap Murid Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2022 yaitu 990 guru terhadap 10.000 murid. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru maka standar rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMA/SMK telah dihapuskan.

f. Rasio Ketersediaan Sekolah

1) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar

Rasio ketersediaan sekolah SD adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh SD/MI yang ada untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah dasar di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 berfluktuatif dan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong maka pada tahun 2022 rasio tersebut adalah 33,15%. Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar (SD/MI) di Kabupaten Tabalong tahu 2018 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Dasar
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar (SD/MI)	93,15	94,07	89,62	89,76	33,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama

Rasio ketersediaan sekolah menengah pertama adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan menengah pertama. Rasio ini mengindikasikan kemampuan semua sekolah SMP/MTs yang ada untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah pertama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong maka Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 – 2022 kecenderungan penurunan. Pada tahun 2022 Rasio Ketersediaan SMP (SMP/MTs) di Kabupaten Tabalong adalah 91,4% meningkat dari rasio tahun 2021 yaitu 58,19%.

Tabel 2.43
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs)	69,85	69,60	66,38	58,19	91,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

3) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah atas per 10.000 jumlah usia pendidikan menengah atas. Rasio ini mengindikasikan kemampuan semua SMA/MA/SMK untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah atas. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menengah atas di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/ SMK)
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas(SMA/MA/ SMK)	26,03	33,07	30,31	31,40	50,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Semakin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitupun sebaliknya, jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APS 16-18 = 1% berarti bahwa secara rata-rata dari 10.000 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 100 anak yang putus sekolah.

1) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong 2018 – 2022 cenderung meningkat, terakhir di tahun 2022 di angka 1,06%. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI tahun 2018 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SD/MI
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,01	0,05	0,01	0,35	1,06

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong,2023

2) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong mengalami penurunan pada periode tahun 2019 dibanding tahun 2018, namun kembali mengalami kenaikan menjadi 0,37% pada tahun 2020. Sempat turun 0,29% pada tahun 2021 namun Kembali meningkat pada angka 0,47% di tahun 2022. Data selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMP/MTs
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,13	0,12	0,37	0,29	0,47

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong 2023

3) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 yaitu 0,10 % mengalami peningkatan sebanyak 0,50% jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 0,60% kemudian di tahun 2022 sebanyak 20 Orang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Tabalong 2018-2022

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	N/A	N/A	0,10	0,60	20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.1.2 Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Tabalong, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = 1 – angka kematian bayi. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah bayi mati usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Perkembangan angka kelangsungan hidup bayi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi (AKB/1000 Kelahiran Hidup)	0,4	7,2	10,2	10,0	10,0
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	999,6	992,8	989,8	990,0	991,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa AKB di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 secara umum cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2021 dan 2022 AKB adalah 10 per 1000 kelahiran hidup, sedikit lebih rendah dibandingkan AKB tahun 2020 yaitu 10,2 per 1000 kelahiran hidup. AKB ini sudah sesuai dengan target RKPD 2022 yaitu 10 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 itu masih tergolong rendah dibawah 20 per 1.000 kelahiran hidup, dikategorikan tinggi bila angka melebihi 20 per 1.000 kelahiran hidup.

Selain AKB, indikator yang tidak kalah pentingnya dalam penilaian terhadap derajat kesehatan di suatu daerah adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Indikator ini sangat terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya pada masa kehamilan dan melahirkan.

Adapun AKI di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 adalah 135 per 100.000 kelahiran hidup,

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KN mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Jumlah posyandu dan Balita di Kabupaten Tabalong tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017-2021
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Posyandu	283	286	282	282	282
2.	Jumlah Balita	24.391	24.162	18.548	19.465	17.528
3.	Rasio	1,16	1,18	1,51	1,45	1,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2023

Dari data rasio posyandu terhadap jumlah bayi seperti di atas dapat dikatakan bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Tabalong sudah melampaui rasio yang ditetapkan yaitu 1,4 posyandu untuk 100 (seratus) balita. Sedangkan jumlah posyandu dan balita tahun 2022 secara kewilayahan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	Banua Lawas	26	1569	1,66
2.	Bintang Ara	17	711	2,39
3.	Haruai	29	1791	1,67
4.	Jaro	10	1284	0,70
5.	Kelua	29	2008	1,44
6.	Muara Harus	10	518	1,93
7.	Muara Uya	38	1931	1,96
8.	Murung Pudak	31	4033	0,76
9.	Pugaan	17	569	2,98
10.	Tanjung	33	2894	1,14
11.	Tanta	34	1533	2,15
12.	Upau	9	624	1,44
Jumlah		**282**	**17.528**	**1,40**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2023

c. Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat maka Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Sedangkan Puskesmas Pembantu atau Pustu adalah salah satu jaringan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2018-2022
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Puskesmas	18	18	18	18	18
2.	Jumlah Klinik	9	5	20	20	24
3.	Jumlah Pustu	56	44	34	34	34
4.	Jumlah Penduduk	250.809	254.323	245.765	256.903	261.353
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,03	0,19	0,08	0,08	0,08

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,22	0,17	0,01	0,14	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2023

Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2018 – 2022 sebanyak 18 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2022, maka 1 (satu) buah Puskesmas dapat melayani 14.520 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu secara kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk *	Puskesmas		Klinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Banua Lawas	20.774	1	0,05	0	0,00	3	0,15
2.	Bintang Ara	9.430	2	0,22	0	0,00	1	0,11
3.	Haruai	24.438	2	0,08	1	0,04	3	0,13
4.	Jaro	15.401	1	0,07	0	0,00	2	0,13
5.	Kelua	25.569	2	0,08	1	0,04	1	0,04
6.	Muara Harus	7.005	1	0,14	0	0,00	1	0,14
7.	Muara Uya	24.466	2	0,85	0	0,00	7	0,30
8.	Murung Pudak	59.105	2	0,04	16	0,30	5	0,09
9.	Pugaan	7.672	1	0,13	0	0,00	1	0,13
10.	Tanjung	36.867	2	0,06	3	0,08	6	0,17
11.	Tanta	23.103	1	0,05	0	0,00	4	0,19
12.	Upau	7.523	1	0,13	0	0,00	1	0,14
Jumlah		**261.353**	**18**	**0,07**	**21**	**0,08**	**35**	**0,14**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong 2023
* DKBS Disdukcapil

d. Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Ratio rumah sakit per satuan penduduk menggambarkan ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyakarat. Di Kabupaten Tabalong hingga tahun 2022 terdapat 2 (dua) buah rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim (Kelas C) dan Rumah Sakit Umum yang dimiliki oleh PT. Pertamina (Kelas C). Ratio rumah sakit terhadap 10.000 penduduk adalah 0,08. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Penduduk	250.809	254.323	245.765	256.903	261.353
7.	Rasio per 10.000 penduduk	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong 2023

e. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan

dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, atau dengan kata lain 40 orang per 100.000 orang penduduk.

Jumlah tenaga dokter dan tenaga medis serta rasionya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Dokter Tahun 2018-2022
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Dokter (Umum)	58	50	53	92	90
2.	Jumlah Penduduk	250.809	254.323	245.765	256.903	261.353
3.	Rasio	23,12	19,66	21,56	36,81	1 : 2172

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong,2023

Sedangkan jumlah dokter yang melayani masyarakat secara kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2022
Kabupaten Tabalong

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1.	Banua Lawas	20.774	3	14,85
2.	Bintang Ara	9.430	1	10,97
3.	Haruai	24.438	3	12,65
4.	Jaro	15.401	2	13,31
5.	Kelua	25.569	5	20,16
6.	Muara Harus	7.005	3	57,11
7.	Muara Uya	24.466	3	16,97
8.	Murung Pudak	59.105	49	91,26
9.	Pugaan	7.672	2	39,74
10.	Tanjung	36.867	13	8,28
11.	Tanta	23.103	4	35,88
12.	Upau	7.523	2	27,07
Jumlah		**261.353**	**90**	**1 : 2.172**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2023

Rasio dokter umum yang disyaratkan adalah 40 per 100.000 orang penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 261.353 orang, seharusnya minimal ada dokter sebanyak ±105 orang. Jadi dengan jumlah dokter umum pada tahun 2022 mencapai 90 orang berarti masih ada kekurangan dokter sejumlah ±15 orang.

Jumlah dokter umum terbanyak ada di Kecamatan Murung Pudak yaitu sebanyak 49 orang dokter meskipun jika menggunakan rasio jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan maka dengan jumlah penduduk sebesar 59.105, di Kecamatan Murung Pudak tersebut hanya dibutuhkan ±22 orang dokter.

f. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari: Tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker), tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga keterapian fisik (fisioterapi, okupasiterapis, terapis wicara), tenaga keteknisan medis (radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten tabalong mengalami Perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah penduduk diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada

penduduk. Berikut adalah tabel perkenbangan jumlah tenaga medis di Kabupaten Tabalong dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.56
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2018-2022
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Tenaga Medis	77	830	794	139	137
2.	Jumlah Penduduk	247.106	250.809	254.323	256.903	261.353
3.	Rasio	0,311	3,30	3,12	0,56	0,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

g. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi persalinan yang ditangani diperhitungkan dengan target/asumsi bahwa 20% kehamilan, melahirkan dan nifas mengalami penyulit atau komplikasi. Berikut ini disajikan tabel cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2018 - 2022.

Tabel 2.57
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (persen)	62,61	127,2	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong,2023

h. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dari tahun 2018 - 2022 mengalami penurunan capaian pada tahun 2019 dan 2020 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu mencapai 98,2% dan menurun di Tahun 2022 menjadi 98,10 %

namun demikian fakta bahwa masih ada pertolongan persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi kebidanan tetap perlu mendapatkan perhatian mengingat resiko yang mungkin terjadi terhadap Ibu dan Bayinya ketika pertolongan persalinan dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten.

Berikut disajikan tabel Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.58
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96,9	86,2	83,4	98,2	98,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong,2023

i. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization*

Jika melihat capaian cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2018 – 2022, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 adalah capaiannya yaitu 67,9% lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 60,3%. Cakupan UCI tertinggi dalam rentang waktu tersebut adalah pada tahun 2019 yaitu 96,95%. Data cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) per tahun disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.59
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (persen)	90,08	96,95	89,9	60,3	67,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

j. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤3 dan atau dengan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Tabalong mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 mendapatkan perawatan 100 persen.

Tabel 2.60
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kasus yang ditemukan	1	0	1	1	1
Kasus yang ditangani	1	0	1	1	1
Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA positif di Kabupaten Tabalong semua kasus telah ditangani. Berikut ini disajikan Tabel Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.61
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kasus yang ditemukan	156	136	161	231	232
Kasus yang ditangani	156	136	161	231	232
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (persen)	100	100	100	100	39,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

l. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sejak tahun 2018 semua penderita DBD yang ditemukan telah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Dibandingkan tahun – tahun sebelumnya jumlah kasus DBD yang ditemukan pada tahun 2021 jauh mengalami penurunan yaitu hanya 3 kasus.

Tabel 2.62
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kasus yang ditemukan	107	184	39	3	133
Kasus yang ditangani	107	184	39	3	133
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

m. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sampai dengan 2022 telah mencapai 100 persen. Berikut ini disajikan tabel cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2018–2022:

Tabel 2.63
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong Tahun (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

n. Cakupan Kunjungan/Pelayanan Kesehatan Bayi

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan maka yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Bayi adalah Pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI).

Berikut disajikan tabel cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Tabalong tahun 2018-2022.

Tabel 2.64
Cakupan Kunjungan/Pelayanan Kesehatan Bayi
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan kunjungan/pelayanan kesehatan bayi (persen)	81,98	97,6	84,0	99,1	99,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2023.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Tabalong juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan. Semakin meningkatnya usaha pembangunan dan berkembangnya suatu wilayah, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Persentase jalan negara dan jalan provinsi dari tahun 2018 sampai 2022 yang dalam kondisi baik sudah sangat bagus, sedangkan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih rendah, yaitu pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 78,15 % dari panjang jalan kabupaten sepanjang 904,126 km. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

Tabel di bawah ini merupakan data proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Tabel 2.65
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong

Status	Jalan Kondisi Baik (Km)							Panjang Jalan Di Kab. Tabalong (Km)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jalan Negara	-	-	581,04	581,04	40,43	39,63	39,63	121,61	121,61	1.204,29	1.204,29	124,47	124,21	124,23
Jalan Provinsi	-	-	558,14	558,14	49,82	31,59	31,59	65,29	65,29	762,61	762,61	65,29	65,29	65,29
Jalan Kabupaten	533,09	539.16	586,61	593.82	371,49	372,988	363,592	904,13	904,13	904,13	904,13	904,13	904,13	904,126
Total	**533,09**	**539.16**	**1.725,79**	**1.733.00**	**461,74**	**444,208**	**434,812**	**1.091,03**	**1.091,03**	**2.871,03**	**2.871,03**	**1.093,89**	**1.093,63**	**1.093,65.**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong, 2023

Tabel 2.66
Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

Keadaan Jalan	2018			2019			2020			2021			2022		
	Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)		
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten
Jenis Permukaan															
Aspal		-	572,258		-	573,581		-	592,195	122,71	65,29	562,616	124,23	64,99	730,245
Beton	-	-	-			7,495		-	8,046	1,50	-	14,026	-	-	30,019
Kerikil		-	227,145		-	220,377		-	222,916	-	-	242,102		0,30	82,417
Tanah		-	104,723		-	102,673		-	80,969	-	-	67,415			61,445
Tidak Diperinci		-	-		-	-				-	-	17,967			
Kondisi Jalan															
Baik / Mantap	67,70	-	586,614	207,330	-	593.818		-	419,163	39,63	31,59	372,988	43,10	18,18	363,592
Sedang		-	118,832		-	120,803		-	280,437	80,98	17,20	333,551	79,23	17,10	347,503
Rusak Ringan		-	69,483		-	67,508		-	88,925	3,50	10,80	87,323	1,90	17,80	41,319
Rusak Berat		-	129,197		-	121,997		-	114,801	0,10	5,70	110,264	0,00	12,21	151,712

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong, 2023

b. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Sedangkan rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Dari tabel di bawah diketahui bahwa panjang seluruh saluran adalah 87.076 meter, sedangkan luas lahan budidaya pertanian menurut RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 adalah 55.587 Ha, maka rasio jaringan irigasi adalah 6,25 %. Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.

Tabel 2.67
Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2018-2022
Kabupaten Tabalong

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jaringan Primer	190	190	190	190	190
2.	Jaringan sekunder	69.958	71.149	71.439	97.000	97.119

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Jaringan tersier	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556
4.	Persentase sarana dan prasarana pengairan dalam kondisi baik	69,00	70,04	71,18	72,86	73,94

Sumber : Dinas PU PR Kab. Tabalong, 2023

Tabel 2.68
Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Jenis Sarana Irigasi	2018			2019			2020			2021			2022		
	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak
Saluran Pasangan Batu (m)	64,233	75,93	8,189	66.717	12.169	8.189	72.439,72	12.169,00	6.931,91	88.158,91	12.169	6.931,91	88.276,91	12.169	6.813,91
Bendung (unit)	15	6	3	16	6	3	16	6	3	18	5	2	19	5	1
Pintu Air (unit)	86	39	3	92	37	3	98	37	3	100	37	3	107	33	2
Jalan Inspeksi (m)	137.118	1.950	1.248	139.198	1.950	1.248	141.378,25	1.950,00	1.248,00	143.795,45	1.950	1.248	146.128,45	1.950	863
Saluran Pembuang (m)	47.773	24.711	16.350	48.973	24.711	16.350	49.123	24.711	16.350	49.123	24.711	16.350	50.023	24.711	15.450
Box Pembagi (unit)	37	41	4	37	41	4	39	39	4	39	39	4	39	39	4
Polder (m)	23.482	3.195	2.392	26.238	3.195	2.392	27.238	3.195	1.892	27.238	3.195	1.892	28.872	3.195	1.671

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, 2023

Sedangkan rasio jaringan irigasi secara perwilayahan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2023.

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Kec. Jaro	50	38.013	1.856	3.9919	1.256	31,78
2	Kec. Muara Uya	0	6.342	550	6.892	865	7,97
3	Kec. Haruai	0	6.624	300	6.924	950	7,29
4	Kec. Tanjung	0	10.303	4.850	15.153	1.008	15,03
5	Kec. Murung Pudak	0	2.047	0	2.047	264	7,75
6	Kec. Tanta	100	2.655	0	2.755	1.547	1,78
7	Kec. Upau	40	3.748	0	3.788	543	6,98
8	Kec. Muara Harus	0	1.490	0	1.490	749	1,99
9	Kec. Kelua	0	3.307	0	3.307	1.999	1,65
10	Kec. Banua Lawas	0	3.727	0	3.727	4.865	0,77
11	Kec. Pugaan	0	1.074	0	1.074	1.269	0,85
12	Kec. Bintang Ara	0	0	0	0	193	0,00
Jumlah		**190**	**79.330**	**7.556**	**87.076**	**15.508**	**6,25**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, 2023

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang terbuat bukan dari tanah. Jumlah rumah layak huni dari tahun 2018 hingga tahun 2022 meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana sanitasi dan air bersih yang baik. Pada tahun 2018 jumlah rumah layak huni sebesar 67.532 rumah, kemudian ada peningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 69.928 buah rumah hingga tahun 2020 jumlah rumah layak huni menurun sebesar 62.064 rumah, hingga

Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi menjadi 62.190 buah kemudian pada tahun 2022 jumlah rumah layak huni menjadi 62.470 buah .

Tabel 2.70
Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabalong
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Rumah (buah)	Jumlah Rumah Layak Huni/Rumah Kategori Sehat (buah)
1	2018	70.445	67.532
2	2019	72.324	69.928
3	2020	71.919	62.064
4	2021	80.611	62.190
5	2022	80.994*	62.470

Sumber: Data Dinas Permukinan 2023

b. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Tabalong masih sangatlah penting dalam rangka mendukung program masyarakat yang sehat. Khususnya di pedesaan, Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (persen)	88,31	90,41	92,52	86,77	80,85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel di atas, rumah tangga pengguna air di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 terus meningkat hingga pada tahun 2020 mencapai 92,52 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi menjadi 86,77 persen, dan tahun 2022 persentase rumah tangga pengguna air bersih menjadi 80,85 persen. Dapat dijelaskan, bahwa penurunan persentasi rumah tangga pengguna air bersih ini disebabkan bertambahnya data terkait jumlah rumah tangga baru karena tumbuhnya pemukiman atau perumahan yang semakin bertambah pula. Pada tahun-tahun mendatang target jumlah rumah tangga pengguna air bersih diprediksikan akan menurun kembali, karena semakin banyaknya rumah tangga baru yang belum mampu dijangkau sehubungan dengan keterbatasan kemampuan membangun instalasi dan sambungan rumah baru.

c. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya. Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong tahun, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 100 persen.

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan dikalikan 100%. Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Rumah Tangga Bersanitasi
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Bersanitasi (persen)	96,07	97,89	99,98	91,77	95,39

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Tabalong 2023

Berdasarkan tabel di atas, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sampai 2022 selalu meningkat hingga sebesar 99,98 persen di tahun 2020. Turunnya capaian realisasi pada tahun 2022 secara umum disebabkan karena sistem penataan permukiman pada lingkungan baru belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penataan lingkungan

tersebut tidak dikerjakan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/mata air, dan Pemakaman) dan RTH privat (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; taman atap bangunan).

Berdasarkan aspek pelayanan umum, indikator kinerja pembangunan daerah untuk penataan ruang dilihat dari rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dimana untuk Kabupaten Tabalong ruang terbuka hijaunya terdiri atas:

1. Kawasan hutan kota seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang berada di Bataman Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak.
2. Kawasan taman kota, taman lingkungan kantor Pemerintah Daerah dan gedung Sarabakawa seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Kelurahan Tanjung.
3. Kawasan taman kota seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar yang berada di komplek Pertamina Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak.
4. Lapangan golf Murung Pudak seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar di Kecamatan Murung Pudak.

5. Pembangunan Tanjung City Centre (TCC) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
6. Taman terminal regional seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
7. Taman lingkungan Islamic Centre di Maburai Kecamatan Murung Pudak seluas 6 (enam) Hektar.
8. Kawasan tempat wisata Danau Tanjung Puri seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Murung Pudak.
9. Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di Kelurahan Tanjung dan Jangkung Kecamatan Tanjung dan Kelurahan Belimbing, Belimbing Raya, Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
10. Taman di lingkungan rumah jabatan bupati, GOR dan stadion Pembataan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.
11. Penanaman pohon-pohon yang diwajibkan pada komplek-komplek perumahan dengan luas total kuang lebih 7 (tujuh) hektar.

Tabel 2.74
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong
Tahun 2022

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	159,50
2	Luas wilayah Perkotaan	4.814
3	Rasio	1:30,182

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 2023

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Jadi ruang terbuka hijau yang

harus ada di luas wilayah perkotaan Kabupaten Tabalong adalah 962,8 hektar sedangkan rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Tabalong yaitu 1:30,182.

2.1.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Indikator urusan wajib ini diantaranya adalah jumlah polisi pamong praja, jumlah linmas, dan pos kamling. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

a. Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan per 10.000 jumlah penduduk. Kabupaten Tabalong merupakan

wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas. Berikut ini merupakan tabel informasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Tabalong dalam rentang tahun 2018 hingga 2022. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Rasio Jumlah Linmas
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Linmas	2.844	2.884	1.310	1.716	3.026
2	Jumlah penduduk	250.809	254.323	245.765	256.903	261.353
3	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	113,4	113,4	53,3	68,7	30,26

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah linmas pada tahun 2022 meningkat sebanyak 3.026 orang petugas Linmas jika dibandingkan tahun 2021 dengan rasio 30,26 petugas terhadap 10.000 penduduk pada tahun 2022.

b. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka yang disebut Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sertaketenteraman masyarakat sedangkan jumlah polisi pamong praja adalah jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di luar tenaga administrasi/ kesekretariatan.

Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk.

Rasio jumlah Pol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Pol PP pada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan.

Rasio jumlah polisi pamong praja pada tahun 2022 adalah 3,32 per 10.000 penduduk mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rasio pada tahun 2020 yaitu 5,41 per 10.000 penduduk. Rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah polisi pamong praja	84	87	133	99	83
2	Jumlah penduduk	250.809	254.323	245.765	256.903	261.353
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	3,38	3,40	5,41	3,96	3,32

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah polisi pamong praja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 12 orang jika dibandingkan tahun 2020 dan penurunan rasio per 10.000 penduduk sebesar 1,48%.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka di Kabupaten Tabalong diperlukan > 150 orang Pol PP

c. Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling digunakan untuk melihat perkembangan sejumlah pusat pengamanan sosial masyarakat. Pos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalah kelembagaan sosial terbawah yang lahir dari inisiatif masyarakat untuk menciptakan keamanan lingkungan secara *bottom up.* Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan di Kabupaten Tabalong. Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Rasio Pos Kamling Per Jumlah
Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Poskamling	681	681	889	536	889
2	Jumlah Desa/Kelurahan	131	131	131	131	131
3	Rasio Pos Kamling per jumlah Desa/Kelurahan	5,2	5,2	6,7	4,09	6,78

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2022 adalah 6,78% atau dapat diartikan bahwa di tiap desa/kelurahan terdapat rata – rata 6 sampai 7 buah pos kamling. Rasio pos kamling pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan rasio pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,09%.

d. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah yang mendukung kegiatan perizinan yang ada di Kabupaten Tabalong berstatus “Ada”.

2.1.3.1.6 Sosial

Sasaran penyelenggaran kesejahteraan sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, PPKS adalah perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial,

sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

a. Jumlah PPKS Yang Memperoleh Bantuan

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, Lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Jumlah PPKS pada tahun 2022 adalah 70.091, meningkat sebanyak 41.318 jika dibandingkan tahun 2021. Jumlah PPKS pada tahun 2021 yaitu 28.773 merupakan jumlah tertinggi pada rentang waktu 2018 – 2022. Perkembangan jumlah PPKS di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Perkembangan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Balita Terlantar (0-4 th)	-	-	-		144
2	Anak Terlantar(5-18 th)	311	311	555	668	1.027
3	Anak Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah	9	2	2	4	-
4	Anak Nakal	14	-	10	-	-
5	Anak Jalanan	-	-	-	-	1
6	Anak Cacat (0-18 tahun)	115	-	83	-	27
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	734	784	767	767	15
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	-	-	42
9	Lanjut Usia Terlantar (60 th ke atas)	2.560	423	810	645	558
10	Lanjut Usia Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-
11	Penyandang Cacat (19 th keatas)	901	647	564	252	103
12	Penyandang Cacat Eks. Penderita Kronis (19 th ke atas)	50	-	-	-	59
13	Tuna Susila	-	-	-		-
14	Pengemis/orang terlantar	-	-	-	39	31
15	Gelandangan	-	-	-	13	2
16	Bekas Narapidana	57	-	26	19	26
17	Korban Penyalahgunaan Napza/HIV Aids	16	-	-	-	34
19	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	1.822	570	-	1.887	140
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	11
21	Komunitas Adat Terpencil	30	180	-		246
22	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	352	352	3.662	3.662	1.154
23	Korban Bencana Alam	10	8	5.261	3.924	36
24	Korban Bencana Sosial/ Pengungsi	85	60	83	26	14
25	Pekerja Migran Terlantar	-	-	-	-	-

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
26	Keluarga Rentan	-	-	-	-	66.421
27	Keluarga Fakir Miskin	13.422	13.380	17.961	18.734	-
JUMLAH TOTAL		**20.488**	**16.717**	**29.784**	**28.773**	**70.091**

Sumber: Dinas Sosial Kab, Tabalong 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, jumlah PPKS tertinggi adalah keluarga Rentan yaitu berjumlah 66.421, Masyarakat tinggal di daerah rawan sebanyak 1.154 Jiwa dan anak terlantar yang berusia 5-18 Tahun 1.027 Jiwa.

b. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan pemerlu masalah kesejahteraan sosial dihitung dari jumlah PPKS yang telah mendapatkan penanganan baik berupa bantuan sosial, jaminan sosial dan lainnya dibagi dengan PPKS seluruhnya dikalikan 100. Persentase Penanganan PPKS di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Persentase Penanganan PPKS
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	83,43	N/A	69,36	74,05	88,79

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tabalong 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 adalah 88,79%. Meskipun belum mencapai target RPJMD yaitu 100% namun telah mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian pada tahun 2021 yaitu 74,05%.

c. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Terdapat berbagai macam sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Persentase Sarana Sosial di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tabalong 2023

Berdasarkan tabel di atas, sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 10 dan tahun 2019 sebanyak 10 buah dan 2021 sampai tahun 2022 sebanyak 10 buah.

2.1.3.1.7 Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

a. Persentase Keselamatan dan Perlindungan

Aspek keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek ini juga merupakan jaminan untuk meningkatan produktivitas kerja. Maksud dari memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan kepada tenaga kerja adalah tidak lain untuk memberikan kenyamanan dalam lingkungan kerja dan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerjanya. Jaminan keselamatan dan perlindungan tertuang di dalam instrumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Instrument ini melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja.

b. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Analisis peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan terhadap tingkat kelulusan pada S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk

yang tidak produktif terhadap penduduk yang berusia produktif. Berdasarkan tabel di bawah ini, maka dapat diartikan dalam 10.000 penduduk Kabupaten Tabalong, terdapat 656 orang yang merupakan lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.81
Rasio Lulusan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
≤SD	N/A	N/A	N/A	63.996	100,00
SMTP	N/A	N/A	N/A	46.610	100,00
SMTA Umum	N/A	N/A	N/A	38.128	100,00
SMTA Kejuruan	N/A	N/A	N/A	21.728	99,60
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	N/A	N/A	N/A	3.405	-
UNIVERSITAS	N/A	N/A	N/A	16.409	12.717
JUMLAH PENDUDUK	N/A	N/A	N/A	256.903	261.353
RASIO PUK Berpendidikan S1/S2/S3 PER 10.000 Penduduk	398	431	336	656	-

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka (data diolah), Tahun 2023

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2021 sebanyak 2.399 orang dari 4.307 jumlah PNS di Tabalong. Persentasi partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan pada

tahun 2021 adalah 55,70% mengalami peningkatan sebesar 1,2% jika dibandingkan tahun 2020. Perkembangan jumlah dan persentasi pekerja perempuan di lingkungan pemerintahan daerah tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS) Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018–2022

No	Instansi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PNS Struktural dan Staf	517	578	517	427	427
2	Medis dan Paramedis	436	427	479	390	320
3	PPL dan PPS	-	-	-	-	-
4	Instruktur BPK, Auditor, Funsional Kehutanan, Penyuluh KB dan Fungsional lainnya	70	68	68	275	275
5	Guru TK	168	181	170	170	170
6	Guru SD	831	807	770	824	824
7	Guru SLTP	317	315	300	313	313
8	Guru SLTA	Kewenangan Provinsi				
9	Penjaga Sekolah	0	0	0	0	0
10	Tata Usaha SLTP	30	30	21	0	0
11	Tata Usaha SLTA	Kewenangan Provinsi				
Jumlah		**2.369**	**2.406**	**2.325**	**2.399**	**2.329**
Jumlah PNS Seluruhnya		**4.488**	**4.478**	**4.266**	**4.307**	**4088**
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		**52,78**	**53,73**	**54,50**	**55,70**	**56,97**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong, Tahun 2023

b. Rasio KDRT

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT diperhitungkan dengan membagi jumlah kejadian KDRT dengan jumlah rumah tangga yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tahun 2022 terjadi 13 kasus KDRT, meningkat dari tahun – tahun sebelumnya. Kasus KDRT tersebut adalah kasus yang ditangani pada UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Tabalong. Kasus KDRT pada tahun 2018 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Rasio KDRT di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KDRT	1	2	4	8	13
2	Jumlah Rumah Tangga	68.392	70.725	71.716	80,403	80.994
3	Rasio KDRT	0,001	0,002	0,005	0,009	0,016

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada rentang waktu 2018– 2022 terjadi kecenderungan peningkatan kasus KDRT yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Tabalong. Salah satu sebab meningkatnya kasus KDRT yang ditangani oleh UPTD PPA ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang KDRT dan adanya UPTD PPA yang memberikan bantuan pelayanan bagi korban KDRT.

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Pada tabel di bawah dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tabalong dari tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.84
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	62,15	57,56	69,27	57,28	N/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong 2023

TPAK Perempuan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 – 2021 berfluktuasi dan terakhir pada tahun 2021 adalah 57,28 % artinya 57,28% penduduk usia kerja perempuan termasuk dalam Angkatan kerja perempuan, sudah bekerja atau ingin bekerja.

d. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 maka yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh

pendidikan, kesehatan dan pendapatan dengan deskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan sehingga IPG dapat digunakan untuk mengungkapkan ketimpangan atau kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Data IPG dan IDM pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Peningkatan IPG ini sejalan dengan tren peningkatan IPM Kabupaten Tabalong. IPG Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 adalah 86,06 lebih rendah sedikit jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 89,44. Sedangkan IDG tahun 2022 adalah 74,65, juga lebih rendah sedikit jika dibandingkan IDG Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 74,48.

Selain IPG dan IDG, indikator kinerja DP3AP2KB lain adalah Predikat Kota Layak Anak. Pada tahun 2022, Kabupaten Tabalong berhasil menjadi Kabupaten/Kota satu – satunya di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mencapai Kota Layak Anak dengan predikat Nidya. Kota Layak Anak merupakan kota dengan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Capaian Indikator IPG, IDG dan Predikat KLA tahun 2018 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
IDG, IPG dan Status Kota Layak Anak
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	- Kab. Tabalong	71,97	72.30	72.49	73,39	74,65
	- Prov. Kalsel	71,31	74,60	74,60	74,48	Blm Rillis
2	Indeks Pembangunan gender (IPG)					
	- Kab. Tabalong	84,95	85,43	85,34	85,48	86,06
	- Prov. Kalsel	88,61	88,61	88,86	88,86	89,44
3	Status Kota Layak Anak	Madya	Madya	Tidak Ada	Nindya	Nindya

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.1.9 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi isu penting dalam setiap pembangunan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus bisa diwujudkan. Beberapa indikator yang menjadi acuannya adalah rasio ketersediaan pangan, skor pola pangan harapan dan penguatan cadangan pangan. Berikut adalah data perkembangan indikator pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022.

Tabel 2.86
Perkembangan Indikator Pangan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan energi (orang/hari)					
	- energi (kkl)	4.023	4.310	4.352	4.100	3.017

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	- Protein (gr)	140	149	153	150	91,71
2	Ketersediaan Pangan utama (ton)	87.975	60.753	59.573	63.876,8	88.439,67
3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	0	10%	30%	41,5%	47,80%
4	Skor Pola Pangan Harapan	87,5	88,4	91,2	91,8	59,67
5	Penanganan daerah rawan pangan (%)	62	74	90,07	125	96,18
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	84	85	86	87,5	88

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan , Perikanan , Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2023.

Ketersediaan energi yang ada di Kabupaten Tabalong sudah memenuhi standar kecukupan, dimana kebutuhan per hari sebesar 2.250 kilo kalori/orang, sedangkan ketersediaan energi Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 sebanyak 3.017 kilo kalori/orang/per hari. Disamping itu, kebutuhan protein pun telah memenuhi kebutuhan minimal (91,71 gr/hari).

Skor pola pangan harapan yang merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan daerah, dimana pada tahun 2022 skor pola pangan harapan Kabupaten Tabalong sebesar 59,67 %. Angka ini masih berada dibawah skor maksimal, yaitu 100. Ada kelompok bahan makanan yang masih perlu ditingkatkan kesediaannya, yaitu kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan.

Dari segi ketersediaan pangan, meskipun secara jumlah mengalami surplus, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menangani 125 % desa yang rentan pangan. Desa rentan pangan tersebut diindikasikan dengan penduduk dengan status kesejahteraan yang rendah, yaitu desa-desa di Kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Muara Harus, Tanta, Bintang Ara dan Muara Uya.

Sedangkan pengawasan keamanan pangan, pada tahun 2020 telah dilakukan uji pestisida pada 8 (delapan) pangan segar asal tumbuhan, yaitu tomat, cabe besar, cabe kecil, terong, bayam, kangkung, sawi dan kacang panjang. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa komoditas tersebut mengandung pestisida sebanyak 12,5%. Untuk keamanan pangan perlunya pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuh mulai dari tempat produksi.

2.1.3.1.10 Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan/rencana/program harus mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalamnya. Beberapa hal yang biasanya terkait dengan masalah lingkungan hidup adalah penanganan sampah, ketersediaan untuk mengakses air minum, tingkat kualitas air, tingkat kualitas udara dan tutupan lahan.

a. Persentase Penanganan Sampah

Pelayanan pengelolaan persampahan saat ini sebagian besar baru wilayah perkotaan yang terlayani secara kontinue yang meliputi kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, dengan sumber dari sampah pemukiman, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah perkantoran dan sampah hasil penyapuan jalan.

Penangangan sampah di wilayah utara dan selatan yang baru ditangani adalah sampah pasar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, dana dan armada angkutan yang sangat minim dibandingkan volume timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari yang jumlahnya begitu besar. Disamping itu masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sedangkan jumlah

volume sampah dan produksi sampah di Kabupaten Tabalong dalam 9 (sembilan) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Persentase Penanganan Sampah
Tahun 2018-2022 Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m^3/hari)	187,5	187,5	166,36	181,97	222,48
2.	Jumlah volume produksi sampah (m^3/hari)	617,765	617,765	299,9	307,04	311,39
3.	Persentase penanganan sampah	30,35	30,35	75,02	59,27	71,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 2023

Penanganan sampah di Kabupaten Tabalong menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari sampah yang tertangani pada tahun 2018 sebanyak 30,35 persen, mengalami penurunan 30,35 pada tahun 2018 hingga 2019, kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 75,02 persen, namun pada tahun 2022 turun menjadi 71,95 persen.

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Rasio fasilitas tempat pembuangan sampah per satuan penduduk dan secara kewilayahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.88
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah TPS	60	60	47	81	47
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	187,5	187,5	282	486	486
3.	Jumlah Penduduk	247.106	247.106	243.763	256.903	261.353
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah Penduduk	0,075	0,075	1:1.037	1:529	1 :1.128

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 2023

Bila ditinjau menurut kecamatan, maka data tahun 2022 menunjukkan bahwa Kecamatan Tanta, Kecamatan Kelua dan Kecamatan Banua Lawas merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki TPS.

Tabel 2.89
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Daya Tampung (m3)	
1.	Banua Lawas	20.704	9	54	0,38
2.	Pugaan	7.663	3	18	0,51
3.	Kelua	25.436	8	48	0,50
4.	Muara Harus	6.999	5	30	0,50
5.	Tanta	23.335	9	54	0,47
6.	Tanjung	36.692	7	42	0,16
7.	Murung Pudak	59.622	6	36	0,67
8.	Haruai	24.434	8	48	1,21
9.	Bintang Ara	9.422	6	36	0,21
10.	Upau	7.446	8	48	0,75
11.	Muara Uya	24.334	10	60	0,38

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Daya Tampung (m3)	
12.	Jaro	15.266	2	12	0,62
Jumlah		**261.353**	**81**	**486**	**0,32**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 2023

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Akses air minum merupakan kebutuhan primer masyarakat. Semakin tinggi akses penduduk terhadap air minum maka semakin baik tingkat pelayanan daerah terhadap kebutuhan primer masyarakat. Berikut adalah data persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.90
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	156.226	159.890	237.360	248.904	211.304
2.	Jumlah penduduk	250.809	250.809	253.305	256.903	261.353
3.	Persentase penduduk berakses air Minum	78,43	82,38	93,05	86,77	80,85%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan website Kabupaten Tabalong 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2018 sebesar 78,43 persen dan mengalami peningkatan sampai dengan 2019 sebesar 82,38

persen hingga tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 93,05 persen kemudian sampai pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 86,77 persen hingga tahun 2022 menjadi 80,85 persen. Oleh karena itu akses penduduk terhadap air minum ini harus terus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong

Tabel 2.91
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Sumber Air Minum	Persentase				
	2018	2019	2020	2021	2022
Air kemasan / Isi Ulang	28,3	38,3	38,96	0,05	0,37
Leding	24,7	18,7	24,77	37,2	39,61
Pompa	3,8	4,9	5,69	12,5	12,24
Sumur terlindung	13,6	11,7	10,62	18,2	19,03
Sumur tak terlindung	19,8	13,9	15,55	13,3	15,03
Mata air	0,4	0,6	2,20	3,1	19,03
Air sungai dan lainnya	4,8	7,6	2,22	15,6	13,72
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**`100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2023

2.1.3.1.11 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

a. Penduduk yang Memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Yang Telah Berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun atau Telah Kawin atau Pernah Kawin Wajib Memiliki KTP.

Persentasi Kepemilikan KTP didapatkan dari rumus jumlah penduduk usia ≥17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia ≥17 atau telah/pernah menikah. Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Persentasi Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentasi Kepemilikan KTP	100	98,04	99,05	99,05	99,26

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Persentase Kepemilikan KTP pada tahun 2018 – 2022 relatif meningkat dan pada tahun 2022 adalah 99,26% meningkat dari tahun 2021. Sisa sebesar 0,75% penduduk yang seharusnya sudah mempunyai KTP namun belum ber-KTP adalah penduduk di daerah sangat terpencil, sakit keras dan penduduk disabilitas yang belum bisa dijangkau serta penduduk yang baru saja mencapai usia 17 tahun yang belum melakukan perekaman.

b. Penduduk Berakte Kelahiran

Kutipan Akta kelahiran adalah kutipan akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari sejak kelahiran. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran per satuan penduduk di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 – 2022 berfluktuasi, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.93
Status Kepemilikan Akte Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kepemilikan akta kelahiran/kutipan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	67,99	71,79	53,33	54,62	60,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kepemilikan akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2022 adalah 60,09% meningkat jika dibandingkan tahun 2021.

c. Pasangan Berakta Nikah/Buku Nikah

Akta nikah/buku nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang diakui sah oleh negara dan secara agama Islam. Kepemilikan akta nikah/buku nikah juga dapat memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Indikator kepemilikan akta nikah/buku nikah ini dihitung dengan rumus formula jumlah pasangan nikah yang mempunyai akta nikah/buku nikah dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah.

Sedangkan sebagai bukti sah perkawinan untuk Non Muslim adalah akta perkawinan. Pasangan yang mempunyai akta

perkawinan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Status Kepemilikan Akta Nikah/Buku Nikah
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kepemilikan akta perkawinan	47,24	42,70	44,08	54,09	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persentase kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Tabalong pada periode 2018 – 2022 menunjukan penurunan namun pada tahun 2020 – 2021 terlihat adanya peningkatan lagi meskipun masih jauh dari capaian tahun 2018 hingga tahun 2022 kepemilikan Buku Nikah menjadi 100 Persen.

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Database merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan database akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari atau menganalisis data kependudukan. Selama ini banyak pemerintah daerah belum mempunyai database kependudukan yang baik sehingga mengalami kesulitan apabila ingin melakukan analisis. Ketersediaan database kependudukan di Kabupaten Tabalong berstatus “Ada” mulai awal periode 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 2.95
Ketersediaan Database
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pengolahan data sistem administrasi kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2023

e. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan diketahui telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK, sehingga hal ini diharapkan akan memudahkan dalam proses administrasi kependudukan secara nasional. Untuk penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun berstatus “Sudah”.

Tabel 2.96
Status Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

2.1.3.1.12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pengangguran. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong mulai awal periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 131 kelompok.

Tabel 2.97
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelompok Binaan LPM	131	131	131	131	131

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabalong, 2023

b. Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender

serta kesadaran hukum dan Lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma atau sejenis lainnya. Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Untuk menghitung jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK. Jumlah kelompok binaan PKK yang ada di Kabupaten Tabalong dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Jumlah Kelompok Binaan PKK
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelompok Binaan PKK	6.810	6.810	3.592	3.736	3.818

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabalong, 2023

c. Jumlah LSM Yang Aktif

Jumlah LSM yang aktif di Kabupaten Tabalong sampai tahun 2022 berjumlah 42 LSM, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Jumlah LSM Yang Aktif
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah LSM Yang Aktif	30	37	42	42	42

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong, 2023

d. Jumlah PKK

Jumlah PKK yang ada di Kabupaten Tabalong mulai awal periode tahun 2018 sampai dengan akhir periode tahun 2022 berjumlah 144 PKK. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Jumlah PKK Aktif
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PKK	155	155	144	144	144

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka yang dimaksud dengan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam rangka pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri agar dapat melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal digunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi

a. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Data Cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Cakupan Peserta KB Aktf
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pasangan Usia Subur	47.441	48.364	47.811	47.826	43.008
Jumlah Peserta KB aktif	38.950	33.632	38.676	37.839	32.523
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	82,10	80,21	80,89	79,12	79,22

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabalong, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022 berfluktuasi. Cakupan pada tahun 2022 adalah 79,22% mengalami Peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 79,12 %.

2.1.3.1.14 Perhubungan

a. Jumlah Terminal

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan

penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya.

b. Jumlah Angkutan Umum

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastuktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Tabalong saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten.

Dari sisi transportasi jalan raya, akses dari dan ke wilayah Kabupaten Tabalong dengan menggunakan jaringan transportasi darat dapat dilalui dari tiga arah yaitu; (1) dari arah selatan yang merupakan lalu-lintas dari Kota Banjarmasin dan wilayah sekitarnya; (2) dari arah Barat yang merupakan lalu-lintas dari Kota Amuntai dan Kota Tamiyang Provinsi Kalimantan Tengah; (3) dari arah utara yang merupakan lalu-lintas dari Kota Balikpapan dan Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur.

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Tabalong meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Pelayanan angkutan umum ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 102
Pelayanan Angkutan Umum Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

Jenis Angkutan Umum	Jumlah Armada (Unit) Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkutan Kota	25	33	35	42	51
Angkutan Perbatasan	0	0	0	0	0
AKAP	46	46	76	76	71
Angkutan Desa	0	0	0	0	480
JUMLAH	**189**	**197**	**144**	**165**	**602**

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah armada di Kabupaten Tabalong tahun 2018 sampai 2022 berfluktuatif dari 189 armada pada tahun 2018 dan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 197 armada hingga meningkat menjadi 197 armada di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 144 armada dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 165 armada, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 602 Armada.

2.1.3.1.15 Komunikasi dan Informatika

a. Persentase Penduduk Menggunakan Alat Telekomunikasi

Persentase jumlah penduduk yang menggunakan handphone selama lima tahun terakhir di Tabalong mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penduduk yang menggunakan handphone sebanyak 77,47 persen tpersen pada tahun 2018. Tahun 2019 turun menjadi 61,87 persen namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 81,22 persen tetapi tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 81,60persen.

Tabel 2. 103
Persentase Penduduk Menggunakan Handphone
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk menggunakan handphone	77,47	61,87	81,22	78,51	81,60

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kab Tabalong, 2022

2.1.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Berikut perkembangan jumlah koperasi dan persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.104
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi Aktif (unit)	57	58	63	61	60

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah koperasi (unit)	99	100	103	104	100
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	57.6	58.00	61,76	58,65	60

Sumber: BPS Kab. Tabalong, 2023

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tabalong cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan persentase koperasi aktif (koperasi yang sudah melaksanakan RAT) mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 juga mengalami tren peningkatan. Hal tersebut menunjukan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan persentase koperasi aktif.

b. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UKM sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tabalong berperan besar dalam menopang pondasi perekonomian daerah sehingga UKM perlu dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan UKM di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Jumlah UKM non BPR/LKM
Kabupaten Tabalong Tahun 2018- 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah seluruh UKM	64.815	64.845	18.720	18,771	18.990
2.	Jumlah BPR/LKM	3/-	3/-	1/-	1/-	3/-
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	53.476	53.476	18.056	18.770	18.893
4.	Pertumbuhan UKM	21,20	0,046	-71,13	0,27	1,15

Sumber: Dinas Koperasi , UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong, 2023(diolah)

Jumlah pertumbuhan UKM tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu mencapai pertumbuhan 21,20%. Hal ini disebabkan oleh semakin terbukanya akses pemasaran. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 18.720 unit atau turun -71,13% walaupun hingga tahun 2021 kembali meningkat menjadi 18.771 unit dan tahun 2022 menjadi 18.990 Unit, sebagian besar adalah UKM non BPR/LKM. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2022, jumlah BPR berjumlah 3 unit, yaitu BPR Haruai, BPR Kelua dan BPR Bersinar. Sedangkan LKM hingga tahun 2019-2020 melebur dalam BPR Bersinar.

2.1.3.1.17 Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Di Kabupaten Tabalong hanya ada 3 (tiga) investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sudah beroperasi

yaitu industri crumb rubber, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Berikut jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.106
Jumlah Investor Berskala Nasional
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	249	343	179	284	1.441
2	Jumlah investor berskala nasional PMA	0	0	0	0	6

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong, Tahun 2023

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolok ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk

merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Berikut besaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.107
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (Rp.)	3.945.056.630.392	2.364.695.432.450	4.095.039.363..582	4.645.449.937.862	2.997.098.500.000
2	Jumlah nilai investasi berskala internasional PMA (U$)	3.791.554.667	1.569.124.517	531.833.587	5.748.881.000	207.086.310.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong, Tahun 2023

Semakin banyaknya nilai investasi maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberikan fasilitas penunjang bagi investor untuk memberikan investasi yang telah direncanakan. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2020 sebesar Rp.4.095.039.363.582 mengalami peningkatan menjadi Rp.4.645.449.937.862 pada tahun 2021 dan turun menjadi Rp 2.997.098.500.000 pada tahun 2022. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar U$1.569.124.517 pada tahun 2019 turun menjadi U$531.833.587 pada tahun 2020 namun kembali naik pada tahun 2021 menjadi U$5.748.881.000

dan sangat signifikan peningkatannya pada tahun 2022 menjadi U$207.086.310.000,-.

Investasi yang diperlukan berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Investasi sektor pemerintah dilakukan dan dibiayai melalui APBD, sedangkan investasi sektor swasta bisa berupa Penanaman Modal Asing maupun penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Dalam perkembangannya investasi lebih banyak dipenuhi dari sektor swasta sedangkan sektor Pemerintah bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi swasta tersebut. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi suatu daerah maka diperlukan adanya investasi memadai dan berkelanjutan dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun.

Adapun untuk rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup bagus, yaitu 77,95 persen pada tahun 2018 sampai mencapai titik 151,75 persen tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 menjadi turun ke 95,86 persen, dan pada tahun 2022 menjadi 100 persen. Daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN Dan PMA
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMDN dan PMA	24,399	24.516	37.516	38.345	10.485
2	Jumlah Seluruh PMDN dan PMA	313	337	247	400	1447
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja(Rumus : Jumlah TK yang Bekerja Pada PMDN & PMA/Jumlah Seluruh PMDN & PMA)	77,95	72,74	151,75	95,86	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

Dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan. Banyaknya organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan sudah cukup bagus. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan mencakup kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, fasilitasi kegiatan kepemudaan, bakti sosial bagi pemuda, penyuluhan pencegahan tentang bahaya narkoba dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, pada tahun 2022 jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Tabalong adalah 123 lembaga, mengalami penambahan sebanyak 5 lembaga jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah organisasi olahraga yang cukup banyak tersebut menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Data perkembangan organisasi olahraga di Kabupaten Tabalong tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Perkembangan Organisasi Olahraga
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Jumlah Organisasi Olah Raga				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jaro	2	2	2	2	2
2	Muara Uya	2	2	2	3	3
3	Haruai	4	4	4	5	5
4	Upau	2	2	2	2	2
5	Bintang Ara	2	2	2	2	2
6	Tanjung	17	19	20	21	21
7	Murung Pudak	47	52	52	54	54
8	Tanta	5	5	5	5	5
9	Muara Harus	12	12	12	12	12
10	Kelua	6	8	9	9	9
11	Banua Lawas	4	4	4	4	4
12	Pugaan	2	2	4	4	4
JUMLAH		**105**	**114**	**118**	**123**	**123**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.1.19 Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif.

Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Tabalong. Output yang dihasilkan dan menjadi rutinitas setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Tabalong Dalam Angka (KDA) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) serta dokumen Indikator Makro Pembangunan serta Kecamatan Dalam Angka. Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

a. Buku Kabupaten Dalam Angka

Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan bahwa pengelolaan database wilayah berjalan dengan baik. Database dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana pengembangan wilayah dari berbagai sektor seperti misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya. Berikut ketersediaan dokumen buku kabupaten dalam angka di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.110
Ketersediaan Dokumen Kabupaten Dalam Angka
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2023

b. Buku PDRB Kabupaten

Dokumen PDRB skala daerah, yaitu PDRB menurut lapangan usaha. Dokumen PDRB menurut lapangan usaha berisi data PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi (jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit-unit produksi). Karena publikasi PDRB tidak hanya satu tahun data, maka penghitungan publikasi dalam laporan ini didasarkan pada ketersediaan data yang ada, bukan pada tahun publikasinya. Berikut ketersediaan buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.111
Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2023

2.1.3.1.20 Kebudayaan

a. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong dimanfaatkan oleh kalangan seniman yang terdapat di Kabupaten Tabalong untuk memelihara budaya yang ada. Para pekerja seni yang ada di Kabupaten Tabalong umumnya mendirikan sanggar–sanggar seni sebagai wadah mengasah kemampuan seninya. Untuk menampung para pekerja seni tersebut, pemda Kabupaten Tabalong melaksanakan dan ikut serta sejumlah pagelaran seni. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	5	5	9	5

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong, 2023

b. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 3 buah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Tabalong yaitu (1) Tabalong Expo Center; (2) Gedung Saraba Kawa; (3) Gedung Informasi.

2.1.3.1.21 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

a. Jumlah Perpustakaan

Di Kabupaten Tabalong jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah sampai dengan tahun 2021 sebanyak 4 buah, namun pada tahun 2022 menjadi 247. Sedangkan jumlah perpustakaan milik swasta selalu mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2018 dan 2019 berjumlah 82 buah, tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 483 dan 489 buah namun serta pada tahun 2022 terus meningkat menjadi 498 buah. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Jumlah Perpustakaan Tahun 2018-2022
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	82	82	483	489	494
3	Total Perpustakaan (1+2)	86	86	487	493	498

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, 2023

Perpustakaan milik pemerintah daerah tersebut berlokasi di :

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
(2) Unit Layanan Kecamatan Kelua
(3) Unit Layanan Kecamatan Haruai
(4) Unit Layanan Kecamatan Muara Uya

Sedangkan untuk perpustakaan milik non pemda terdiri dari antara lain perpustakaan desa, perpustakaan kecamatan, perpustakaan sekolah, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan perguruan tinggi dan lain lain.

Dari sejumlah 493 buah perpustakaan tersebut, sampai dengan tahun 2022 baru 8 buah perpustakaan yang terakreditasi.

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Saat ini pengunjung perpustakaan tidak hanya untuk mencari bahan pustaka tapi banyak juga yang berkunjung ke perpustakaan untuk memperoleh akses internet gratis terutama untuk mahasiswa dan pelajar.

Selain koleksi buku yang berwujud fisik, saat ini perpustakaan milik pemerintah daerah kabupaten Tabalong juga telah memiliki koleksi buku online yang bisa diakses melalui aplikasi e-pusda Kabupaten Tabalong yang bisa didownload gratis.

Berikut adalah jumlah pengunjung perpustakaan pada rentang waktu 2018 – 2022.

Tabel 2.115
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	76.160	77.021	43.622	65.726	79,757
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik non Pemda	18.360	19.140	3.200	18.649	9.961
3	Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)	94.520	96.161	46.822	88.480	89.718

Sumber: Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Tabalong dari tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan, namun dikarenakan terjadinya

pandemi COVID 19 terjadi penurunan drastis terhadap jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2020. Namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 88.480 pengunjung.

Selain menyediakan bahan pustaka, saat ini juga dikembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial khususnya di perpustakaan-perpustakaan desa. Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang ber-komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Dengan pendekatan ini maka layanan perpustakaan tidak lagi bersifat pasif namun secara langsung terlibat dalam pembangunan ekonomi masyarakat misalnya dengan menyediakan pelatihan – pelatihan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat desa.

2.1.3.1.22 Kearsipan

Pengelolaan kearsipan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan arsip, baik dari segi tenaga maupun ketersediaan sarana prasarana kearsipan. Sasaran pengelolaan arsip meliputi seluruh instansi pemerintah dan lembaga legislatif.

a. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip Dinamis

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang dimaksud dengan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,

Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di perangkat daerah. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Jumlah penataan arsip dinamis tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Jumlah Penataan Arsip Dinamis
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SKPD yang telah dilakukan Penataan Arsip Dinamis	8	19	10	7	33
2	Jumlah Kecamatan Yang Telah dilakukan penataan arsip dinamis	3	-	-	11	7
3	Jumlah Kelurahan Yang telah dilakukan penataan arsip dinamis	-	-	-	7	9
4	Jumlah desa yang telah dilakukan penataan arsip dinamis	9	43	19	40	67

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Tabalong. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Peran sektor perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Tabalong sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya untuk mendukug pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapanga kerja serta mengurangi pengangguran.

Produksi perikanan di Kabupaten Tabalong hingga tahun 2022 meningkat dengan capaian produksi sebesar 16.160,51 Ton. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten surplus terhadap produksi perikanan, sehingga dapat menyuplai kebutuhan kabupaten di sekitarnya. Namun dilihati dari sisi angka konsumsi ikan (AKI) Kabupaten Tabalong yang terus meningkat, pencapaian ini belum menunjukkan peringkat yang baik. Angka konsumsi ikan Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 sebesar 61,76 masih berada di bawah angka konsumsi ikan provinsi Kalimantan Selatan (AKI tahun 2022 masih belum rillis).

Dalam produksi perikanan, Kabupaten Tabalong juga mengembangkan usaha budidaya sampingan dari usaha utama bercocok tanam padi di sawah atau yang dikenal dengan istilah minapadi. Eksistensi budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Seluruh kegiatan minapadi ada di Kecamatan Jaro sehingga produktivitas minapadi ini seluruhnya berasal dari Kecamatan Jaro.

Selanjutnya, dalam rangka pelestarian habitat lokal, Kabupaten Tabalong juga telah mengembangkan pembenihan ikan lokal, seperti gabus, bethuk, sepat siam, sepat rawa, toman, seluang, baung, biawan, kapar dan ikan bancir.

Disamping itu, untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor perikanan, Kabupaten Tabalong juga melakukan pengolahan hasil perikanan. Terdapat 8 kelompok pengolah yang menggunakan bahan baku ikan. Realisasi sektor perikanan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Perkembangan Sektor Perikanan Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi perikanan (ton)	13.093	13.848,9	14.013	15.378,95	16.160,51
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	30	114	10	28,57	57,90
3.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	73,38	75,51	80	77,73	79,37
4.	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,49	0,49	0,13	0,45	0,80
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	10,60	11,57	12,20	22,40	24,70
6.	Nilai tukar nelayan	109,39	110,2	110,2	112,5	112,40
7.	Produksi budidaya minapadi (ton)	64,4	59	57,5	57 (Budidaya)	61
8.	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan	12	13	13	8	8
9.	Jumlah ikan lokal yang dibudidaya	10	6	1	3	7
10.	Produksi ikan gabus (Ton)	174	182	250,7	250,4	255,8
11	Angka Konsumsi Ikan	46,51	47,10	45,5	61,76	(Belum rillis)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2023.

2.1.3.2.2 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarian seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabalong, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan rekreasi budaya. Sampai tahun 2022 tercatat 59 potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabalong.

Obyek wisata alam seperti air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Banua Lawas, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya.

Obyek wisata buatan seperti Tanjung Puri, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalang jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro serta tempat hiburan atau rekreasi budaya/religi seperti Mesjid Pusaka Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas,

Makam Syech Nafis di Kecamatan Kelua, Mesjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai, dan etnis Dayak Ma'anyan di desa Warukin Kecamatan Tanta.

Sampai saat ini, obyek wisata tersebut masih belum menjadi sumber pendapatan asli daerah, namun masyarakat di sekitar lokasi wisata atau pihak yang mengelola obyek wisata tersebut telah bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan obyek wisata tersebut misalnya melalui penjualan karcis masuk, parkir, penjualan makanan minuman dan oleh – oleh khas masing – masing obyek wisata dan lainnya.

a. Kunjungan Wisata

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara sedangkan Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan).

Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Data kunjungan wisatawan tersebut direkapitulasi berdasarkan jumlah kunjungan ke obyek wisata yang dilaporkan oleh Kelompok – kelompok Sadar

Wisata (pokdarwis) yang ada di Kabupaten Tabalong. Data wisatawan yang berkunjung ke Tabalong sejak tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
Tahun 2018-2022

No.	Jumlah Wisatawan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wisatawan Mancanegara	6.354	13.267	3.315	15.904	30.415
2.	Wisatawan Domestik	789.038	190.130	857.760	3.876.767	1.962.673
Jumlah		**795.392**	**203.397**	**861.065**	**3.892.671**	**1.993.088**

Sumber: Pariwisata Kalsel (https://pariwisatakalsel.id/kunjungan-wisatawan-2022)

2.1.3.2.3 Pertanian

a. Peranan Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor Pertanian didukung oleh 3 (tiga) sub kategori lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan (3) Perikanan.

Pada tahun 2022 Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 10,71 persen atau penyumbang perekonomian terbesar di Kabupaten Tabalong. Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2018, kategori tumbuh hingga 0,60 persen. Namun pada tahun 2022, pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi hanya 0,20 persen. Hal ini diakibatkan karena adanya perlambatan dari sub kategori perkebunan, selain itu juga ada beberapa komoditas tanaman pangan yang mengalami penurunan. Secara rata-rata, selama kurun waktu 2018-2022 kategori ini mampu tumbuh rata-rata sebesar 0,05 persen.

Sekitar 85.54 persen kategori ini disumbang oleh sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Kemudian diikuti oleh sub kategori perkebunan sekitar 42,89 persen dan sub kategori tanaman pangan sekitar 30,76 persen. Selama periode tahun 2017-2021 terlihat bahwa peranan sub kategori Pertanian cenderung menurun, sedangkan perikanan dan peternakan memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Jika dilihat lebih dalam, ternyata penurunan peranan sub kategori Pertanian cenderung disebabkan oleh penurunan peranan sub kategori Perkebunan. Peranan sub kategori Perkebunan ini turun persen di tahun 2018 menjadi 42,89 persen di tahun 2020. Perlambatan kinerja lapangan usaha perkebunan selama kurun waktu tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet, karena banyaknya tanaman tua yang perlu peremajaan.

Sementara itu, kinerja sub kategori usaha pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah perkebunan. Subkategori ini sebagian besar ditopang oleh produksi tanaman padi sawah. Padi sawah memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi ladang. Secara umum, kinerja produksi tanaman pangan masih terpengaruh oleh iklim. Pertumbuhan produksi tanaman pangan tahun 2021 sedikit lebih baik tahun 2019, namun masih adanya beberapa kendala seperti adanya kejadian banjir yang menyebabkan beberapa areal tanaman terdampak.

Selain itu, pembentuk kinerja pertanian Kabupaten Tabalong yang menunjukan pertumbuhan positif adalah perikanan dan peternakan. Kebutuhan protein hewani yang besar menyebabkan produksi cukup berlimpah pada tahun 2022. Hal ini menjadi keuntungan bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Tabalong, terutama dari aspek keberlanjutan.

b. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar adalah membandingkan antara produksi tanaman padi/bahan utama lokal lainnya (ton) dengan luas areal tanaman padi bahan pangan utama lokal lainnya (ha) dikalikan 100.

Tabel 2.119
Perkembangan Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya PerHektar Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

Komoditas	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Padi						
Produksi	Ton	136.237	166.684	133.129	92.713,6	55.001,55
Luas Areal	Ha	29.616	35.864	22.261	20.210	55.022
Produktivitas	Ton/Ha	4,60	4,65	4.6	39,97	4,75
Jagung						
Produksi	Ton	20.282,4	13.034	7.596,10	4.192,1	364
Luas Areal	Ha	5.634	3.724	2.053	1.133	
Produktivitas	Ton/Ha	3,60	3,50	3.7	3,7	3,95
Ubi kayu						
Produksi	Ton	2.267	345,6	623,50	536,5	580
Luas Areal	Ha	28	24	64	28	37
Produktivitas	Ton/Ha	14,35	14,40	14,50	14,5	14,7
Ubi Jalar						
Produksi	Ton	126	21	52,25	41,8	118
Luas Areal	Ha	12	2	6	5	5
Produktivitas	Ton/Ha	10,45	10,50	10,45	10,45	10,45
Kacang Tanah						
Produksi	Ton	31,3	9,1	83,20	27,3	8
Luas Areal	Ha	25	7	38	20	23
Produktivitas	Ton/Ha	1,25	1,30	1,30	1,3	1,30
Kedelai						
Produksi	Ton	1.080	631,25	11,52	0	0
Luas Areal	Ha	1.000	505	509	503	504
Produktivitas	Ton/Ha	1,08	1,25	1,28	0	1,10
Kacang Hijau						
Produksi	Ton	8,8	2,3	18	4,8	5,5
Luas Areal	Ha	8	2	15	5	5
Produktivitas	Ton/Ha	1,10	1,15	1,20	1,2	1,30

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2018-2023.

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas panen padi dari tahun 2018 sampai 2022 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luasan panen padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian. Tanaman palawija yang terdiri dari kacang tanah, jagung, Ubi jalar, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau pada umumnya ditanam setelah musim panen padi atau saat air sawah kering, sehingga tanah dapat menunjang sistem perakaran yang tidak tahan genangan. Luas panen tanaman palawija secara umum fluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen terbesar setelah padi adalah jagung, ubi kayu dan kacang tanah.

Produksi padi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan menjadikan Tabalong surplus beras, sedangkan produktivitas padi pada tahun 2017-2021 mengalami kenaikan. Kenaikan itu disebabkan oleh semakin membaiknya metode dan teknis penanaman yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ketersediaan produksi tanaman pangan didaerah berkaitan erat dengan ketahanan pangan disuatu daerah/wilayah. Dari data produksi padi tersebut Kabupaten Tabalong dinyatakan surplus, artinya ketahanan pangan di daerah terjaga.

Selain tanaman padi, produksi tanaman lain yang cukup tinggi produksinya adalah jagung dan ubi kayu. Produktivitas jagung dari tahun 2018-2022 juga mengalami kenaikan dan penurunan. Secara umum tanaman jagung di Kabupaten Tabalong ditanam pada lahan sekitar persawahan maupun lahan persawahan (setelah dilakukan pemanenan padi) serta pada lahan karet yang baru dibuka. Kenaikan produktivitas tanaman jagung ini disebabkan karena belum optimalnya produksi padi di sawah akibat musim kemarau dan anomali iklim. Para petani padi sering

memanfaatkan lahan sawah mereka dengan menanam jagung dalam menghadapi musim kemarau dan anomali iklim tersebut. Semakin panjang musim kemarau atau anomali iklim tersebut maka semakin banyak produksi tanaman jagung karena semakin panjang pula masa bertanam jagung.

Untuk tanaman ubi kayu dan ubi jalar pola tanamnya sama seperti tanaman jagung, tetapi produktivitasnya tidak terlalu signifikan untuk kenaikan maupun penurunannya. Hal ini disebabkan kebutuhan pasar terhadap ubi kayu dan ubi jalar cenderung tetap setiap tahunnya.

Tanaman kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau secara umum ditanam masyarakat pada areal persawahan saat pra tanam dan pasca panen, pada lahan untuk perkebunan karet yang baru di buka dan di lokasi pinggiran sungai. Ketiga tanaman kacang-kacangan ini selain diambil hasilnya juga bermanfaat untuk menyuburkan lahan. Produktivitas ketiga tanaman ini selama tahun 2018-2022 tidak terlalu signifikan kenaikan maupun penurunannya, hal ini disebabkan oleh kebutuhan pasar yang cenderung tetap dari tahun ke tahun.

Semua komoditas pertanian di atas ketersediaannya selain oleh produksi dalam Kabupaten Tabalong sendiri juga berasal dari luar Kabupaten. Hal ini disebabkan karena semua komoditas di atas (selain padi) bukan tanaman pokok di Kabupaten Tabalong.

c. Perkebunan

Peranan subkategori Perkebunan ini turun dari 52.23 persen di tahun 2019 menjadi 52.06 persen di tahun 2020. Pertumbuhan nilai tambah bruto subkategori perkebunan mengalami perlambatan sekitar 0,17 persen dari tahun 2018. Perlambatan kinerja lapangan usaha perkebunan selama kurun waktu tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet. Pertumbuhan ini tetap didukung oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dari tanaman

karet melalui Program Gemas Mekar supaya harga karet dapat meningkat.

Realisasi produksi dan produktivitas perkebunan di Kabupaten Tabalong tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.120
Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2018 – 2022

No	Komoditas	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	**Karet**						
	Produksi	Ton	62.129	61.875	62.574	57.450,14	60.442
	Luas Areal	Ha	69.348	69.506	68.695	69.543	69,117
	Produktivitas	Ton/Ha	0,90	0,89	1,269	1,191	0,86
2	**Lada**						
	Produksi	Ton	6	6	5	5	5
	Luas Areal	Ha	54	57	64	-	-
	Produktivitas	Ton/Ha	0,1	0,1	0,2	386	-
3	**Kelapa Sawit**						
	Produksi	Ton	612,1	250	561	19.497	19.452
	Luas Areal	Ha	245	177	205	4.380	4.393
	Produktivitas	Ton/Ha	2,49	1,41	3,1	N/A	4,42

Sumber Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Tabalong (diolah), 2023

d. Peternakan

Kinerja pertanian Kabupaten Tabalong juga ditopang oleh subkategori Peternakan dengan pertumbuhan rata-rata tahun 2017 - 2021 adalah sebesar -0.573 persen. Kinerja peternakan disokong oleh produksi ternak yang cukup besar dengan produksi peternakan sebagai berikut :

Tabel 2.121
Produksi dan Produktivitas Peternakan Tahun 2018 – 2022

No	Komoditas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Populasi ternak :					
	Sapi	3.570	3.232	3.478	3.767	3.889
	Kambing	1.740	2.208	2.457	2.731	3.188
	Babi	291	267	233	332	362
	Itik	69.148	72.296	80.782	90.191	101.869
	Ayam ras petelur	9.793	8.688	33.200	35.000	43.385
	Ayam ras pedaging	6.394.400	6.090.550	4.768	7.058.020	7.102.330

	Ayam kampung	142.305	221.080	165.288	140.038	142.078
2	Produksi ternak yang dipotong :					
	Sapi	3.355	3.270	2.109	3.307	834.959
	Kambing	2.812	2.735	5.792	5.839	74.002,50
	Babi	277	316	153	233	14,363
	Itik	31.657	35.157	25.906	35.122	
	Ayam ras petelur	13.049	15.523	86.730	92.010	31.783,85
	Ayam ras pedaging	3.150.000	3.230.800	2.384.000	2.810.500	-
	Ayam kampung	266.488	206.620	101.500	212.500	153.159,93
3	Produksi telor :					
	Itik	474.158	495.580	554.300	722.707	
	Ayam ras petelur	102.827	65.421	249.996	263.550	289.445
	Ayam kampung	116.431	180.866	135.222	114.565	159.687

Sumber Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Tabalong (diolah), 2023

Kebutuhan daging Kabupaten Tabalong belum bisa dipenuhi dari produksi lokal. Kebutuhan daging sapi sebesar 3.600 ekor/tahun sementara populasi sapi pada tahun 2022 sebesar 3.767 ekor. Sedangkan kebutuhan telor sebesar 42.186.864 butir/tahun. Sedangkan produksi telor hanya sebesar 11.008.220 butir/tahun.

2.1.3.2.4 Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Peningkatan usaha perdagangan yang legal dapat tergambar dari penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan golongan usaha. Perkembangan usaha perdagangan ditinjau dari penerbitan ijin usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 122
Perkembangan Penerbitan SIUP Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018- 2022

No.	Golongan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan Kecil	185	148	103	58	61
2.	Perusahaan Menengah	43	41	49	87	89
3.	Perusahaan Besar	2	6	-	42	44
Jumlah		**230**	**195**	**152**	**213**	**194**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong, 2023

Salah satu kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan adalah dengan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penerbitan TDP terbanyak pada tahun 2022 di Kabupaten Tabalong pada perusahaan berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan perseroan komanditer (CV) sebanyak 87 TDP. Namun secara keseluruhan perbitan TDP ini pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 ini disebankan karena dalam pelayananan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah terintergrasi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Jadi NIB bisa sebagai pengganti TDP. Data perkembangan penerbitan TDP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.123
Perkembangan Penerbitan TDP Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 – 2022

No.	Bentuk Perusahaan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PT	38	54	42	30	41
2.	Koperasi	1	1	1	1	1
3.	CV	83	86	30	86	89
4.	FA	1	-	1	-	-
5.	PO	-	58	14	58	61
6.	BUL	-	-	-	-	-
Jumlah		**139**	**187**	**76**	**213**	**194**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.2.5 Perindustrian

Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan ekspor guna menunjang pembangunan daerah

dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta mengembangkan kemampuan teknologi.

Bila dilihat dari unit usaha menurut kelompok industri pada tahun 2022, maka industri pangan merupakan kelompok industri Pangan terbesar dengan jumlah mencapai 180 unit. Kelompok industri terbesar berikutnya adalah industri logam Elektro sebanyak 40 unit dan industri Kerajinan sebanyak 23 unit. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Tabalong adalah industri pangan, industri kerajinan, dan industri kimia bahan bangunan. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Tabel 2.124
Jumlah Unit Usaha Menurut Kelompok Industri
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2022

No	Kelompok Industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Pangan	369	81	81	45	180
2	Industri Sandang	165	35	35	10	17
3	Industri Kimia Bahan Bangunan	78	31	31	-	15
4	Industri Logam dan Elektro	188	52	52	15	40
5	Industri Kerajinan	109	23	23	3	23

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.3 Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.3.1 Sekretariat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Setiap pemerintah daerah di Indonesia wajib untuk menerapkan SAKIP, dengan menyerahkan laporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ke KemenPAN dan RB. Selanjutnya, KemenPAN dan RB akan melakukan penilaian atas SAKIP pemda.

Nilai SAKIP Pemda Kabupaten Tabalong pada periode 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan nyata. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai SAKIP sampai pada peringkat B (68,13) pada Tahun 2022 namun Pada tahun 2022 Nilai Sakip daerah masih pada predikat B yang menunjukkan tingkat tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan Penyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome)* pada pemerintah kabupaten Tabalong sudah menunjukan hasil yang baik namun masih memerlukan perbaikan rincian hasil penilaaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.125
Rincian Penilaian SAKIP

No	Komponen yang di Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	23,12	23,22	23,37	-	22,58
2	Pengukuran Kinerja	25	14,44	16,39	16,52	-	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	9,71	10,33	10,45	-	10,54
4	Evaluasi Internal	10	5,78	5,83	5,95	-	15,15
5	Capaian Kinerja	20	11,61	11,68	11,76	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**64,66**	**67,45**	**68,05**	**68,13**	**68,37**
Tingkat Akuntabilitas			**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

Sumber : Setda Kabupaten Tabalong 2023 (diolah)

Selain nilai SAKIP, indikator penyelenggaran pemerintah daerah juga dapat digambarkan dengan nilai LPPD. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan penilaian peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

Peringkat dan status kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahun yang diserahkan pemda (provinsi/kabupaten/kota) se Indonesia ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil penilaian LPPD Pemda Kabupaten Tabalong menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sebab terus meningkat. Nilai LPPD Tabalong pada tahun 2019 adalah 3,7629 dengan kategori predikat Tinggi, hal ini disebabkan ada perubahan kategori dalam penilaian LPPD, serta perubahan regulasi dalam penilaian kinerja pemerintah Daerah dan dengan nilai ini Tabalong mendapatkan peringkat nomor 2 di provinsi Kalimantan Selatan sedangkan untuk penilaian pada tahun 2020 serta tahun 2021 hingga tahun 2022 masih belum rillis dalam verifikasi pusat.

Tabel 2.126
Nilai SAKIP dan Nilai LPPD Pemda Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP	B (61,09)	B (64,66)	B(67,46)	B (68,04)	B (68,13)	B(68,13)
2	Nilai LPPD	3,0240 (Sangat Tinggi)	3,329 (Sangat Tinggi)	(3,7628) Tinggi	Belum Rillis	Belum rillis	Belum rillis

Sumber : Setda Kabupaten Tabalong, 2023 (Diolah)

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025.

Tabel 2.127
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, 2023

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih subtansial. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan.

Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yang menjadi dasar selanjutnya dalam penyusunan RKPD. Jaminan keberlanjutan program akan sangat terdukung oleh adanya dokumen RPJMD. Adapun RPJMD Kabupaten Tabalong 2018-2022 telah ditetapkan dengan Perda, demikian juga dengan RPJDM pada periode sebelumnya.

Tabel 2.128
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2018	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, 2023

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap perangkat daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

Tabel 2.129
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, 2023

d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam bentuk program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk terbaru dari sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD. Dengan menghitung penjabaran program RPJMD kedalam RKPD maka akan diketahui capaian RKPD terhadap RPJMD. Menggunakan kesimpulan yang dibangun, maka Kabupaten Tabalong memiliki cakupan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang baik. Hal ini

adalah sebuah prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

Tabel 2.130
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100

Sumber: Bappedalitbang Kab. Tabalong, 2023

2.1.3.4.2 Keuangan

Salah satu indikator penilaian untuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah untuk keuangan, adalah ketepatan waktu penetapan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Sesuai Pasal 312 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Setelah itu, akan dievaluasi oleh Gubernur sebelum dilakukan penetapan Perda APBD.

Pemerintah Kabupaten Tabalong selalu menetapkan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai wujud tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tabalong pada periode 2018 – 2022 berfluktuasi, terakhir pada tahun 2021 berjumlah 4.314 orang terdiri dari 1905 laki – laki (44,16%) dan 2409 perempuan (55,84%). Fluktuasi jumlah PNS/ASN di Kabupaten Tabalong dikarenakan adanya pengangkatan CPNS, pegawai yang pensiun dan meninggal dunia serta mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten

Tabalong. Perkembangan jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin dan jenis pendidikan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PNS:	4.488	4.621	4.266	4.314	4.074
	- Laki-laki	2.119	2.151	1.941	1.905 (44,16%)	1.750 (42,96)
	- Perempuan	2.369	2.470	2.325	2.409 (55,84%)	2.324 (57,04)
2	Pendidikan PNS:					
	- SD	67	64	50	42 (0,97%)	39 (1,0%)
	- SMP	84	83	64	61 (1,41%)	52 (1,3%)
	- SMA	701	661	52	442 (10,25%)	413 (10,1%)
	- DI, DII, DIII,D IV	1.013	1.026	641	868 (20,12%)	842 (20,6%)
	- Sarjana (S1,S2,S3)	2.623	2.787	2.949	2.901 (67,25%)	2.687 (66%)

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong, 2023 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tabalong pada periode 2018 – 2022 jumlah PNS/ASN perempuan lebih banyak daripada PNS/ASN laki – laki dan mayoritas ASN/PNS berpendidikan Sarjana (S1,S2,S3).

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tabalong dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Beberapa hasil penelitian yang telah dihasilkan sejak tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.132
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2018-2022

No.	Judul Kajian/Penelitian	Tahun	Rekomendasi	Keterangan
1	Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong	2016	Pemekaran Kecamatan dapat dilakukan dengan mengambil beberapa desa dari beberapa kecamatan	Pemekaran tidak dilaksanakan terkendala umur desa dan umur kecamatan
2	Pengkajian Potensi, Kendala dan Alternatif Solusi untuk Pengembangan Wilayah Lebak di Kabupaten Tabalong dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Perbaikan Kesejahteraan Petani	2016	Optimalisasi Watun, Folder Mini Desa, Folder Mikro, Rekayasa Sistem Pola Tanam, Folder Wilayah Lebak, Political Will dan Sarana Pendukung	Hanya Optimalisasi Watun yang terlaksana
3	Studi Kelayakan Pembangunan dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Kabupaten Tabalong	2016	Layak untuk mendirikan STAI	Sudah terlaksana
4	Studi Kelayakan Pembangunan Kebun Raya Tanjung Puri Kabupaten Tabalong	2016	Layak untuk dibangun Kebun Raya dengan memperhatikan varietas lokal	Dilanjutkan dengan Masterplan Kebun Raya
5	Masterplan Kebun Raya Tanjung Puri Kabupaten Tabalong	2017	Pembagian tahap pembangunan Kebun Raya menjadi 3 tahap	Identifikasi ulang luas area Kebun Raya
6	Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabalong	2017	Pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi	Telah dilaksanakan sesuai rekomendasi
7	Penyusunan Action Plan Kawasan Perkebunan/ Pertanian di Kabupaten Tabalong	2017	Terdapat beberapa rekomendasi program untuk masing-masing bidang	Sebagian sudah terlaksana
8	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	2017	Insentif dan kemudahan bagi investor harus diatur Perda dan	Perda dan Perbup sudah ada

No.	Judul Kajian/Penelitian	Tahun	Rekomendasi	Keterangan
			RUPM dibuatkan regulasi berupa Perbup	
9	Rencana Induk LLAJ/Tatralok Kabupaten Tabalong	2017	Integrasi Angkutan Kota dan Restrukturisasi Jaringan, Potensi Travel Demand Jalur, Sistem Pengoperasian, Penempatan Lokasi dan Desain Halte, Sistem Kelembagaan	Hasil renduk kurang aplikatif sehingga dibuatkan renduk baru pada tahun 2018-2020
10	Kajian Potensi Hilirisasi Produk Unggulan di Kalimantan Selatan	2018	Produk Turunan Gula Aren	Belum ada data
11	Masterplan Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2029	2018	Pembangunan sekolah berdasarkan action plan, peninjauan sekolah satu atap, pembangunan 5 toilet pertahun, rasionalisasi tenaga Non-ASN, Perda Sertifikasi, Revitalisasi UPT Pendidikan	Sebagian rekomendasi telah dilaksanakan, dan sebagian lagi tidak bisa dilaksanakan terkait perubahan regulasi pusat
12	Evaluasi Gerbang Emas Bersinar Kabupaten Tabalong	2018	Masih banyak masyarakat yang belum mengenal Program Gerbang Emas namun merasakan dampak dari program tersebut	Sosialisasi kegiatan Gerbang Emas terus dilaksanakan
13	Kajian Potensi PAD Kabupaten Tabalong	2019	Peningkatan pajak melalui optimalisasi pajak dan perluasan objek pajak	Proyeksi terlalu rendah sehingga perlu kaji ulang
14	Review Masterplan Kebun Raya Tanjung Puri Kabupaten Tabalong	2019	Penetapan kembali rencana pembangunan Kebun Raya berdasarkan luas area	Pelaksanaan penetapan wilayah dan land clearing

No.	Judul Kajian/Penelitian	Tahun	Rekomendasi	Keterangan
15	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	2019	Peningkatan kapasitas puskesmas, peningkatan produksi pangan dll	Belum ada data
16	Masterplan Smart City	2019	Rekomendasi terkait kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan pengembangan aplikasi, penguatan literasi smart city	Sebagian sudah terlaksana
17	Rencana Pengembangan Industri Kabupaten	2019	Penetapan Kawasan industri Seradang dan Murung Pudak	Sudah dibuatkan RDTR Seradang
18	RDTR Perkotaan Tanjung	2019	Kawasan Perkotaan Tanjung masih dalam proses pengajuan substansi di Kementerian, karena perubahan pada permen ATR No. 14 Tahun 2020 sehingga di haruskan menyelesaikan basis data untuk peta, Ranperda dan juga materi teknis	
19	Revisi RTRW Kabupaten Tabalong	2019	Sistem Pusat Pelayanan, Sistem Jaringan Trasportasi, Jaringan Sumber Daya Air dan Sistem Jaringan Prasarana Pengolahan Lingkungan	
20	Masterplan Ekonomi Kabupaten Tabalong	2020	Rencana Pengembangan Potensi Ekonomi terbagi menjadi 3 koridor. Wilayah	Sudah dibuatkan rencana aksi

No.	Judul Kajian/Penelitian	Tahun	Rekomendasi	Keterangan
			utara pada industri hasil pengolahan alam. Wilayah tengah pada pengembangan jasa informasi dan komunikasi. Wilayah selatan pada pengembangan pertanian dalam arti luas	
21	Pembenahan Hikun Agripark	2020	Pembangunan Hikun Agripark	
22	Analisis Beban Pencemaran dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Jaing di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan	2020	Pemetaan detail rona lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, kaji ulang pembuangan limbah cair, kemandirian dalam pengelolaan sampah	
23	RTBL Kawasan Terpadu Pusat Perkantoran Kabupaten Tabalong	2020	Mekanisme Penyelenggaraan Bangunan, Aspek-aspek pengendalian pelaksanaan dan Pengolahaan Kawasan	
24	Naskah akademis raperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	2021	Sebagai data dukung pengesahan rancangan perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
25	Analisis Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Mangkusip di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan	2021	identifikasi sumber pencemar sungai mangkusip	

No.	Judul Kajian/Penelitian	Tahun	Rekomendasi	Keterangan
26	Optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah	2021	Menerbitkan Perbup yang mengatur koordinasi pemerintah dan DJP dalam optimalisasi penerimaa pajak	
			Mengaktifkan perjanjian kerjasama	
			Integrasi sistem teknologi informasi pemda dan DJP	
			KPP Pratama menyelenggarakan diklat dan sosialisasi pajak bersama	
			Meningkatkan komunikasi dan transparansi	
			Formasi fungsional penilai PBB	
26	Dokumen Indikator Makro Sosial Ekonomi	2022	Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam melaksanakan fokus pembangunan dalam meningkatkan kinerja indikator makro perekonomian daerah hendaknya menetapkan target berdasarkan ketersediaan Sumber daya dan sarana prasarana. yang ada.	
27	Dokumen Strategi Perencanaan	2022	Perlu adanya dorongan alokasi belanja	

No.	Judul Kajian/Penelitian	Tahun	Rekomendasi	Keterangan
	Pembangunan Berbasis Indikator Makro		daerah yang lebih besar untuk sasaran indikator Kemiskinan dan Inflasi, termasuk TPT dan Ketimpangan. Untuk sasaran indikator makro lainnya yang perlu di-manage adalah peningkatan pada kualitas belanja daerah.	
28	Dokumen Pohon Kinerja Tabalong 2022 dan Cascading	2022	Hasilnya diserahkan ke bagian Ortal untuk ditindaklanjuti. Membuat pohon kinerja sesuai sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong	
29	Dokumen Tata Kelola Tambang	2022	Luas area bukaan, faktor penunjang pertambangan, over burden, pengupasan tanah dll pada wilayah kabupaten Tabalong dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan persentase DBH sehingga hasil bagi hasil royalti PT Adaro Indonesia lebih besar ke kabupaten Tabalong	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tabalong 2023.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

a. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Tabalong selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dan sedikit menurun di tahun 2020. Pada Tahun 2020 mencapai 11.283.000/orang/tahun sementara tahun 2022 mencapai 11.914.000 /orang/tahun. Hal ini seiring dengan peningkatan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.133
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Tabalong	11.227	11.476	11.283	11.470	11.914
2	Provinsi Kalimantan Selatan	12.062	12.253	12.032	12.143	12.469

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, dan Provinsi Kalsel 2023

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tabalong, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tabalong maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Pada periode tahun 2018–2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.134
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2018-2022
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Pengeluaran RT	3.477.478	3.656.961	3.640.390	3.711.050	11
2	Jumlah RT	N/A	N/A	71.716	68.330	80.994
3	Jumlah Penduduk	250.809	243.763	253.305	256.903	261.353
4	Pertumbuhan :					
	a. Konsumsi RT	5,01	5,16	-0,45	1,94	4,93
	a. Per Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b. Perkapita	3,46	3,71	3,93	3,97	3,87

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018–2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2018–2022 perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selalu meningkat. Hal ini terjadi karena semakin melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

c. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Adapun angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.135
Angka Kriminalitas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kriminalitas	143	140	195	157	164
Jumlah Penduduk	250.809	254.323	245.765	256.903	261.353
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk (JK/JP x 10.000)	5,70	5,50	7,93	6,28	6,27

Sumber: Website Polres Tabalong, Tahun 2023(Diolah).

d. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas = (Jumlah tindak pidana dalam 1 tahun)/ (jumlah penduduk) x 10.000. Angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.136
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Kriminalitas	143	140	195	157	164
Jumlah Kasus yang tertangani	143	140	164	157	164
Persentase kasus tertangani	100	100	83	100	100

Sumber: Web Polres Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Tabalong cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah kasus kriminalitas yang terjadi adalah 164

kasus mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 157 kasus. Persentasi penanganan kasus kriminalitas pada tahun 2022 adalah 100% juga meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 83%.

e. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun).

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berikut data rasio ketergantungan di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.137
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio Ketergantungan (%)	48,11	47,92	47,71	46,38	46,51

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka (diolah), Tahun 2018-2023

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tabalong pada rentang tahun 2018–2022 menunjukan penurunan. Pada tahun 2022 rasio ketergantungan naik menjadi 46,51%. Ini berarti setiap 100

orang penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) memiliki tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Perumusan dan penyusunan perencanaan sangat dipengaruhi oleh capaian pembangunan tahun sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana rencana pelaksanaan pembangunan tahunan dilaksanakan, apakah sudah sesuai rencana ataukah ada kendala yang menyebabkan target kinerja tidak terpenuhi. Kemudian sejauh mana pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut berkontribusi terhadap upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta visi dan misi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penilaian terhadap capaian pembangunan tersebut menggunakan indikator – indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam masing-masing dokumen perencanaan. Tingkat ketercapaian atas indikator-indikator tersebut menjadi salah satu bahan dalam perumusan kebijakan tahun berikutnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor-faktor pendukung upaya pencapaian maupun faktor-faktor penghambat upaya pencapaian rencana pembangunan.

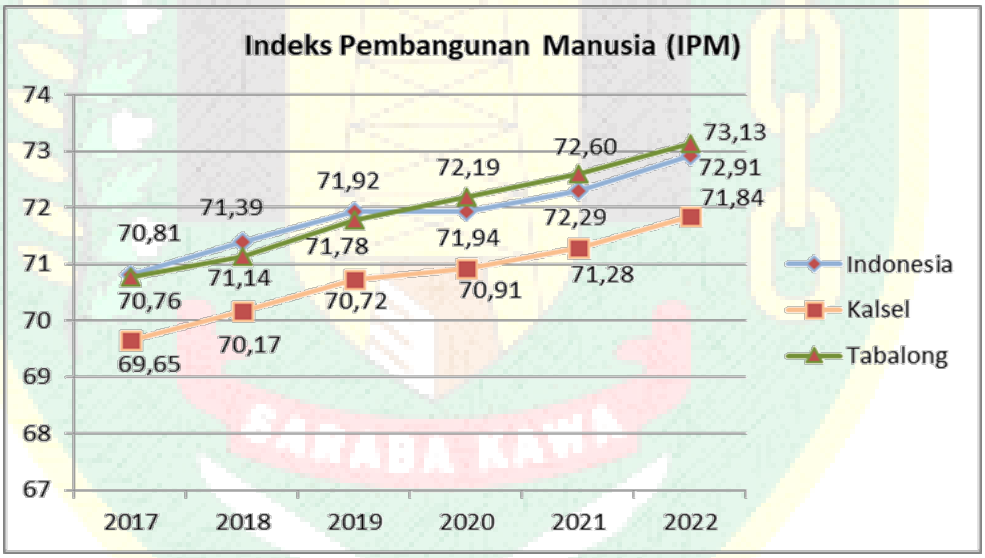
2.2.1. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO

Pencapaian indikator kinerja makro daerah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia tersebut dilakukan dengan menggunakan IPM. Penghitungan IPM saat ini menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2.20
Perbandingan IPM Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian IPM pada tahun 2022 di Kabupaten Tabalong adalah 73,13 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 72,60. IPM ini lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 71,84 dan IPM Nasional 72,91. Sejak tahun 2020 IPM Kabupaten Tabalong telah lebih tinggi dari IPM Nasional.

Sedangkan Tingkat pertumbuhan IPM 2021-2022 dan 2018-2022 adalah 0,53% dan 1,99%. selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Tingkat Pertumbuhan IPM Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018-2022

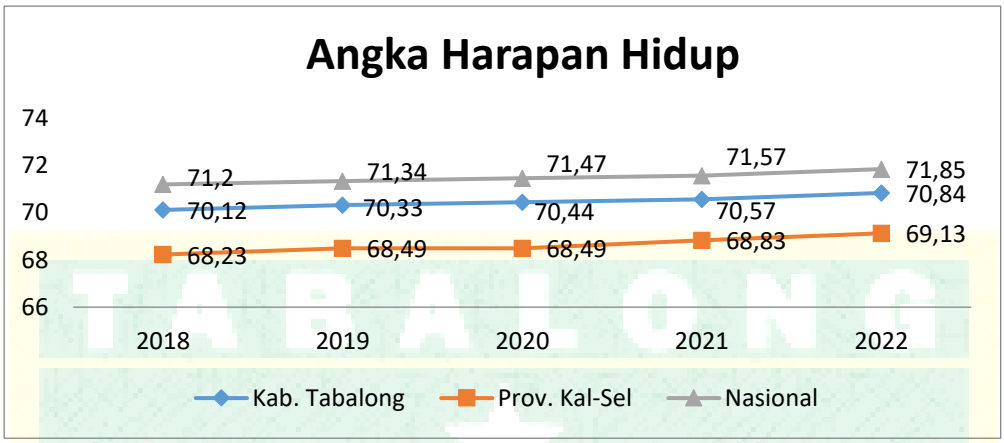
Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	71,14	71,78	72,19	72,6	73,13	0,53	1,99
Prov. Kalimantan Selatan	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84	0,56	1,67
Nasional	71,39	71,92	71,95	72,29	72,91	0,62	1,52

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Angka harapan hidup diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH ini dapat menggambarkan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah yang dikaitkan dengan status kesehatan, pendidikan dan tingkat ekonomi.

Capaian angka harapan hidup Kabupaten Tabalong beberapa tahun terakhir ini terus meningkat, Angka harapan hidup di Kabupaten Tabalong lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Selatan namun masih dibawah angka harapan hidup Nasional. Selengkapnya disajikan pada grafik berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 2.21
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Dari gambar di atas diketahui bahwa Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Tabalong pada periode tahun 2018 – 2022 terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga terjadi pada AHH Provini Kalimantan Selatan dan AHH Nasional.

AHH Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 adalah 70,84 tahun. Ini berarti bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2022 di Kabupaten Tabalong diperkirakan akan dapat hidup selama 70 tahun 7-8 bulan dengan syarat besarnya kematian dan kondisi kesehatan tidak akan berubah.

Bila dibandingkan AHH antara Kabupaten Tabalong dengan Provinsi Kalimantan Selatan, maka gambar di atas menunjukkan bahwa posisi AHH Tabalong selalu lebih tinggi dari Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Tabalong yang diwakili indikator AHH lebih tinggi dari rata-rata masyarakat Kalimantan Selatan. Lebih jelas dapat pada gambar berikut :

Tabel 2.140
Tingkat Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2017 – 2021

Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	70,12	70,33	70,44	70,57	70,84	0,27	0,72
Prov. Kalimantan Selatan	68,23	68,49	68.49	68,83	69,13	0,3	0,9
Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85	0,28	0,65

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

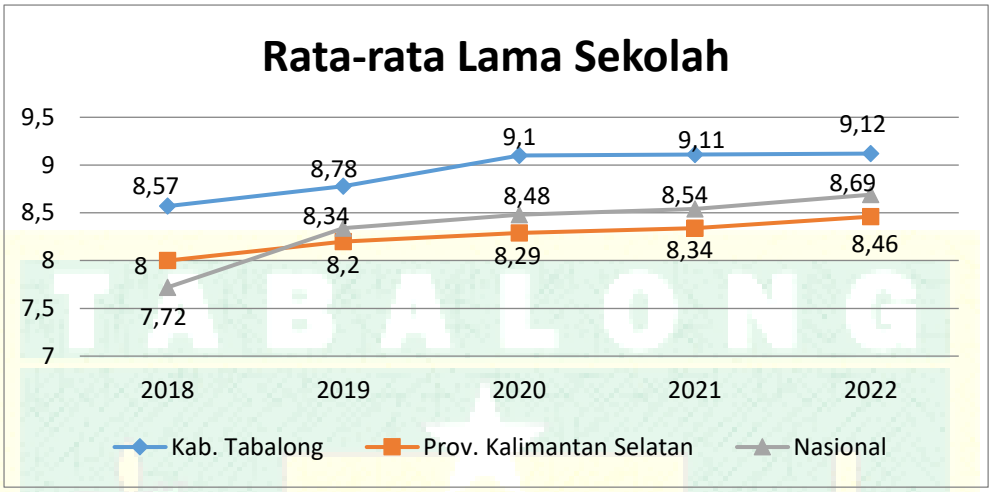
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan AHH di Kabupaten Tabalong tahun 2021 – 2022 (tahunan) dan 2018 – 2022 adalah 0,27 % dan 0,72% sedangkan angka pertumbuhan AHH provinsi Kalimantan Selatan adalah 0,30 % dan 0,90% serta Nasional 0,28% dan 0,65 %.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin lama rata-rata sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat menengah atas.

RLS Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 adalah 9,12 tahun artinya rata – rata penduduk Kabupaten Tabalong usia 15 tahun ke atas telah bersekolah sampai dengan kelas IX atau telah menamatkan SLTP.

RLS Kabupaten Tabalong 2018 – 2022 telah lebih tinggi dari RLS Provinsi Kalimantan Selatan dan RLS Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2.22
Perbandingan Rata-rata lama Sekolah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan RLS di Kabupaten Tabalong tahun 2021-2022 dan 2018-2022 adalah 0,01% dan 0,55%. Tingkat pertumbuhan tahunan RLS Kabupaten Tabalong lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahunan RLS Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Namun untuk tingkat pertumbuhan 2018-2022, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan tapi masih lebih rendah jika dibandingkan Nasional. Perbandingan tingkat pertumbuhan selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Tabel 2.141

Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 – 2022

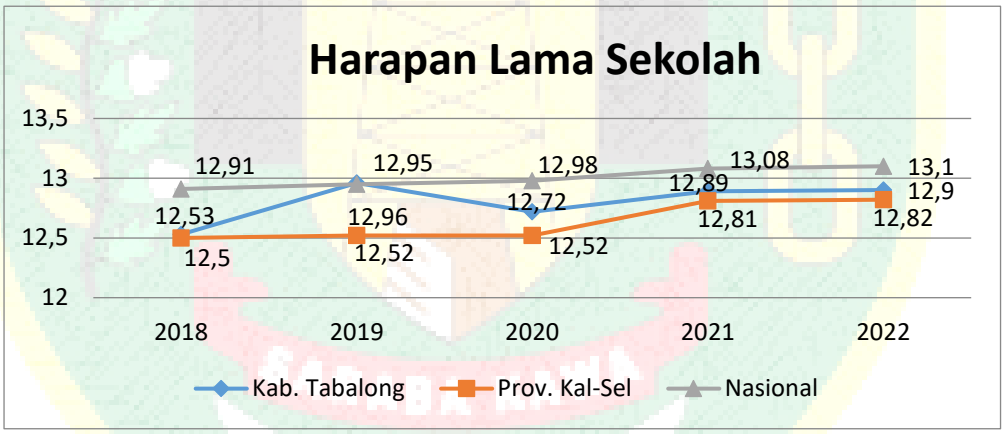
Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	8,57	8,78	9,10	9,11	9,12	0,01	0,55
Prov. Kalimantan Selatan	8,00	8,2	8,29	8,34	8,46	0.12	0,46
Nasional	7,72	8,34	8,48	8,54	8,69	0.15	0,97

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

4. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia tujuh tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perbandingan HLS Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional untuk tahun 2018 – 2022 disajikan pada grafik berikut.



Sumber : BPS RI, BPS Kalsel 2023

Gambar 2.23
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2018 – 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa HLS Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan HLS Provinsi Kalimantan Selatan namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan HLS Nasional. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan HLS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.142
Tingkat Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 – 2022

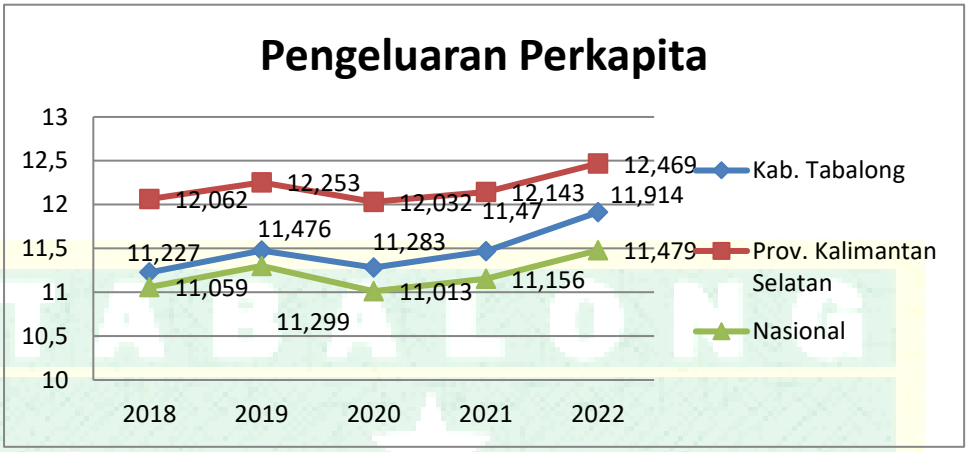
Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	12,53	12,96	12,72	12,89	12,90	0,01	0,37
Prov. Kalimantan Selatan	12,50	12,52	12.52	12,81	12,82	0,01	0,32
Nasional	12,91	12,95	12.98	13,08	13,10	0,02	0,19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan HLS Kabupaten Tabalong 2021-2022 adalah 0,01% sedangkan untuk tingkat pertumbuhan 2018-2022 adalah 0,37%. Tingkat pertumbuhan HLS tahunan Kabupaten Tabalong lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan namun masih lebih rendah jika dibandingkan tingkat pertumbuhan HLS tahunan Nasional.

5. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Informasi ini memberikan gambaran daya beli masyarakat. Tingkat kesejahteraan bisa dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil per kapita.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.24
Perbandingan Pengeluaran Perkapita.

Tabel 2.143
Perbandingan Pengeluaran Perkapita

Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022
Kab. Tabalong	11,227	11,476	11,283	11,470	11,914	0,444
Prov. Kalimantan Selatan	12,062	12,253	12,032	12,143	12 469	0,326
Nasional	11,059	11,299	11,013	11,156	11 479	0,323

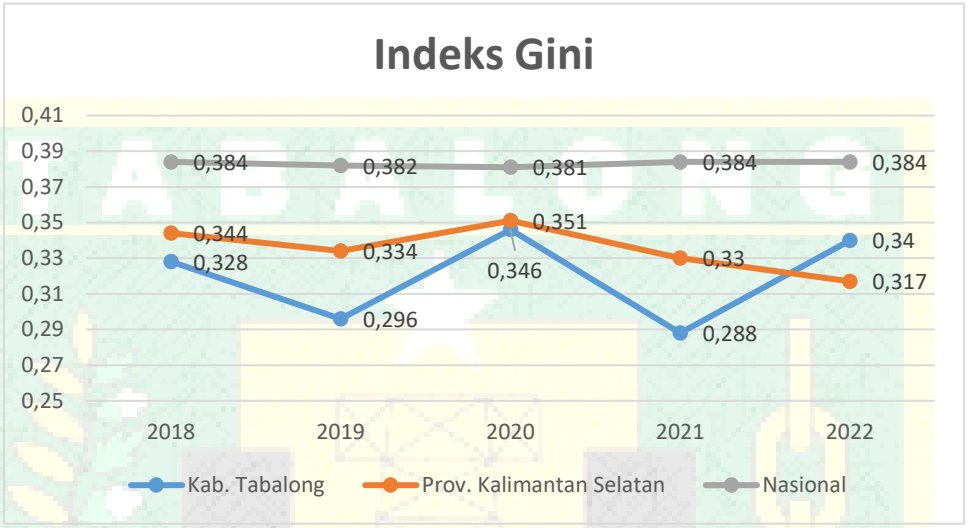
Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat tabalong mengalami peningkatan pada tahun 2022 dari 11.470 Ribu Rupiah pada Tahun 2021, meningkat menjadi 11.914 ribu rupiah pada tahun 2022 dan dari sisi pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Selatan dan lebih tinggi dari Nasional.

6. Indeks Gini (IG)

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jika indeks Gini berkisar antara 0,30 - 0,49 dapat diartikan distribusi pendapatan Cukup Merata, lebih dari 0,5 diartikan distribusi pendapatan cukup serius atau sangat timpang. Kondisi distribusi pendapatan

di Kabupaten Tabalong cukup merata, sama halnya dengan provinsi Kalimantan Selatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2.25
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Berdasarkan grafik di atas, angka indeks gini Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 – 2022 mempunyai tren yang berfluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu 0,346. Sedangkan Indeks Gini Kalimantan Selatan dan Nasional cenderung menunjukkan tren penurunan kecuali pada tahun 2021 terlihat peningkatan di Indeks Gini Nasional. Indeks Gini Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 – 2022 umumnya lebih rendah jika dibandingkan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional kecuali pada tahun 2020.

Tingkat pertumbuhan Indeks Gini di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Tingkat Pertumbuhan Indeks Gini Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

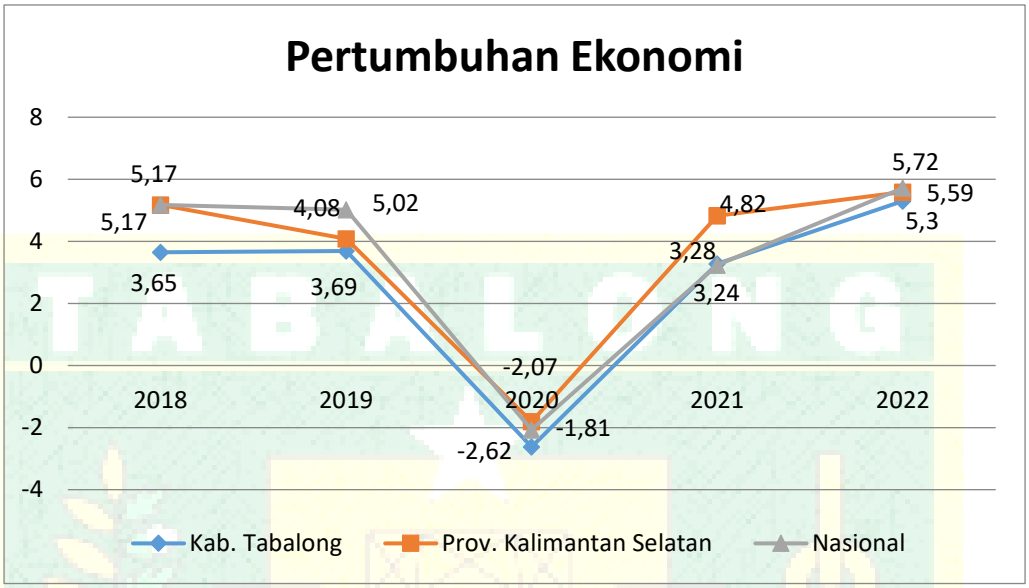
Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	0,328	0,296	0,346	0,288	0,34	0,052	0,012
Prov. Kalimantan Selatan	0,344	0,334	0,351	0,33	0,317	-0,013	-0,027
Nasional	0,384	0,382	0,381	0,384	0,384	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan IG di Kabupaten Tabalong pada rentang waktu 2021-2022 adalah -0,052% dan untuk 2018-2022 adalah 0,012%.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2022 mengalami perlambatan ekonomi hingga tahun 2021, khususnya di sektor pertambangan batubara yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasar luar negeri dan krisis ekonomi dunia. Disamping itu, perlambatan ekonomi pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan karet dunia yang berdampak pada kondisi ekonomi petani karet, serta faktor lain yang mempengaruhi keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan enjadi penghambat besar dalam pertumbuhan ekonomi adalah adanya pandemi Covid-19, namun sejak tahun 2021 hingga 2022 pertumbuhan ekonomi di Tabalong kembali pulih dan mengalami pertumbuhan yang positif.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.26
Perbandingan pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2.145
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

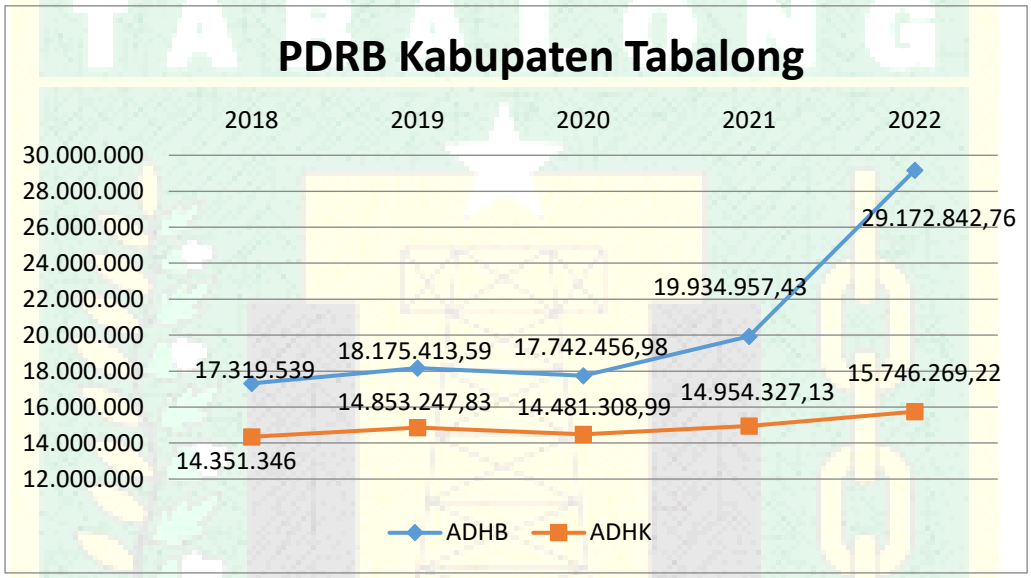
Uraian	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Tabalong	3,78	3,5	-2,49	3,28	5,30
Prov. Kalimantan Selatan	5,17	4.08	-1,81	4,82	5,59
Nasional	5,17	5.02	-2,07	3,24	5,72

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Pertumbuhan ekonomi Tabalong berfluktuatif sejak 2018 hingga 2022 akibat dampak dari pandemi *Covid-19* dimana terjadi penurunan pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2020 menjadi -2,49%. Pada tahun 2021 menunjukan peningkatan positif menjadi 3,28%, hingga mencapai pertumbuhan 5,30% tahun 2022, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Tabalong tahun 2022 menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-4 se Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), berikut disajikan target dan realisasi ADH dan ADHK Kabupaten Tabalong.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2.27
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 2.146
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB	17.319.930,19	18.046.984,3	17.757.238,05	19.291.887,59	29.172.840
ADHK	14.349.957,38	14.879.253,39	14.487.981,69	14.998.475,42	15.746.270

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

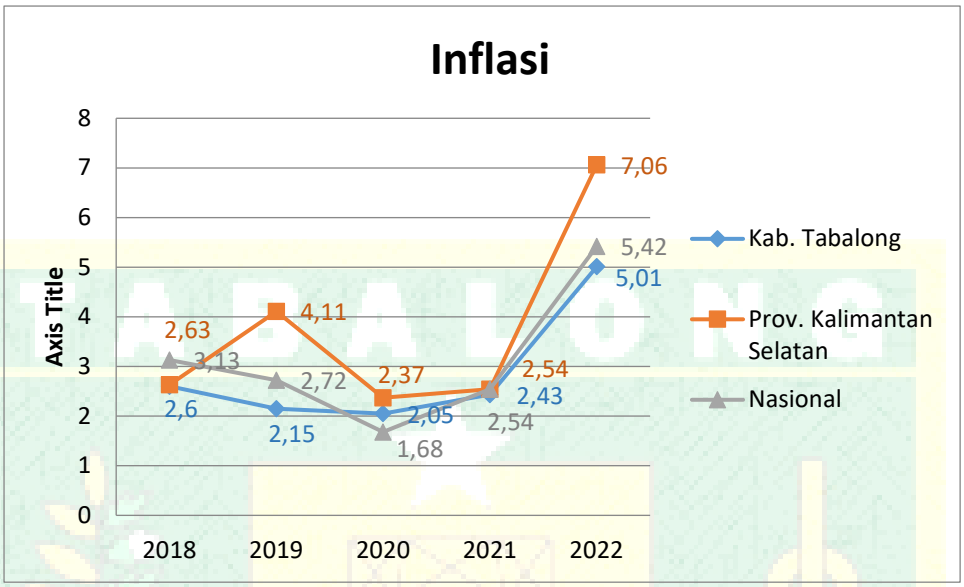
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau pun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sejak tahun 2018 hingga 2022 kian mengalami kenaikan. Tahun 2018 senilai 17.319.930,19 dhingga mencapai 29.172.840 di tahun 2022. Begitu pula PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tabalong sebesar

14.349.957,38 di tahun 2018 dan di tahun 2022 menjadi 15.746.270.

9. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Tabalong berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 inflasi berada pada level 2,40 persen dan naik menjadi 2,60 persen pada tahun 2018 namun kembali menurun pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 2,15 dan 2,05 persen. Tahun 2021 kembali naik hingga menjadi 2,43 persen dan 5,01 persen pada tahun 2022. Kabupaten Tabalong salah satu dari 10 Kabupaten di Indonesia yang mendapat penghargaan dalam mengendalikan inflasi. Data perkembangan inflasi dapat dilihat pada data/tabel berikut ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2.28
Perbandingan Tingkat Inflasi

.

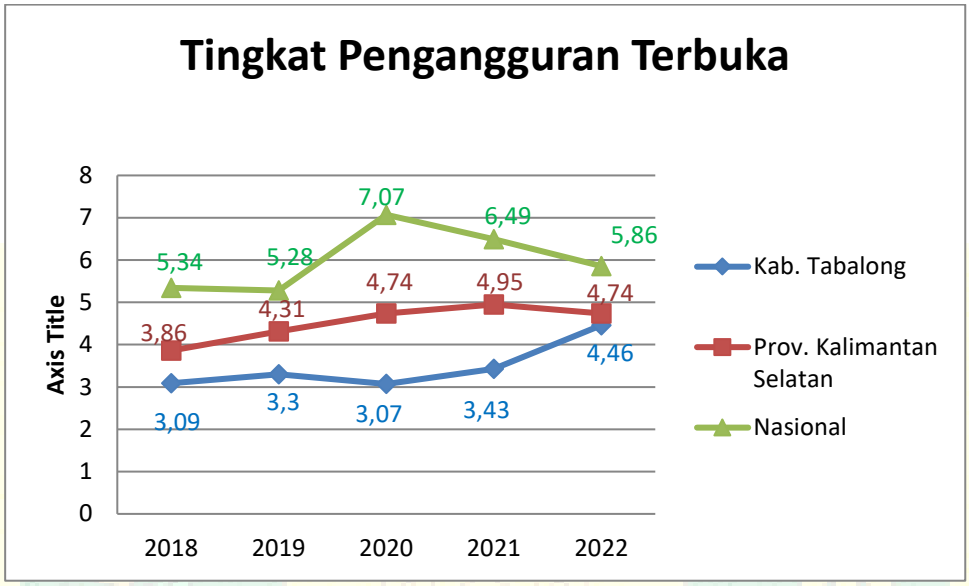
Tabel 2.147
Perbandingan Tingkat Inflasi

Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022
Kab. Tabalong	2.60	2.15	2,05	2,43	5,01	-2,19
Prov. Kalimantan Selatan	2,63	4,11	2,37	2,54	7,06	4,52
Nasional	3,13	2.72	1.68	2,54	5,42	2,88

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, berkenaan dengan tingkat pengangguran terbuka kabupaten tabalong mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif , hal tersebut dapat kita lihat dari data berikut ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2.29
Perbandingan TPT Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa TPT Kabupaten Tabalong tahun 2018 – 2022 lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Untuk tingkat pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148
Tingkat Pertumbuhan TPT Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	3,09	3,3	3.07	3,43	4,46	1,03	1,37
Prov. Kalimantan Selatan	3,86	4,31	4.74	4,95	4,74	-0,21	0,88
Nasional	5,34	5,28	7.07	6,49	5,86	-0,63	0,52

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

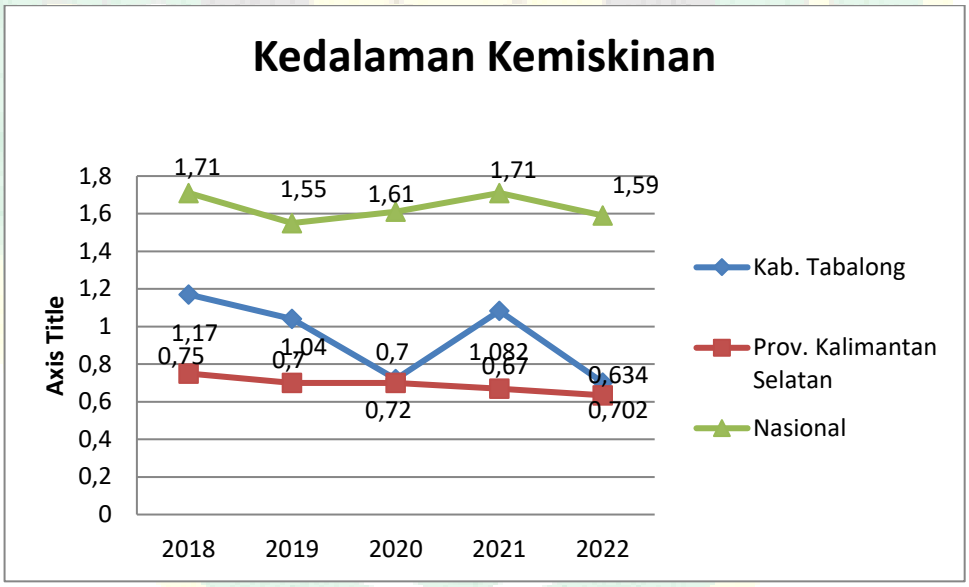
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan TPT Kabupaten Tabalong pada dalam tahun lima tahun terakhir (2018-2022) adalah 1,37%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan tingkat pertumbuhan TPT di Provinsi

Kalimantan Selatan dan Nasional. Naiknya pertumbuhan TPT pada tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh efek bonus demografi, dimana bertambahnya angkatan kerja baru yang tidak terserap oleh dunia kerja.

11. Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah koefisien yang menyatakan jarak atau kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai koefisien tersebut maka semakin lebar kesenjangan antara rata – rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Perbandingan P1 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional selengkapnya disajikan pada grafik berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2.30
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 – 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabalong jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan dan Nasional relatif menunjukkan tren yang berbeda di beberapa tahun terakhir. P1 Nasional dan Kalimantan Selatan

menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2018 sedangkan Kabupaten Tabalong menunjukkan tren meningkat. Namun pada tahun 2020 justru terjadi penurunan P1 di Kabupaten Tabalong sedangkan Nasional dan Kalimantan Selatan menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan P1 menjadi 1,082 demikian juga di tingkat nasional terjadi peningkatan menjadi 1,71. Untuk rata – rata Provinsi Kalimantan Selatan sebaliknya terjadi penurunan menjadi 0,67 pada tahun 2022.

Tingginya P1 ini menunjukkan bahwa rata – rata pengeluaran penduduk miskin jauh di bawah Garis Kemiskinan. Dengan demikian pemberian bantuan sosial, jaminan sosial ataupun subsidi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong.

Untuk tingkat pertumbuhan kedalaman kemiskinan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Tingkat Pertumbuhan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	1,17	1,04	0,72	1,082	0,702	-0,38	-0,468
Prov. Kalimantan Selatan	0,75	0,70	0.70	0,67	0,634	-0,036	-0,116
Nasional	1,71	1,55	1.61	1,71	1,59	-0,12	-0,12

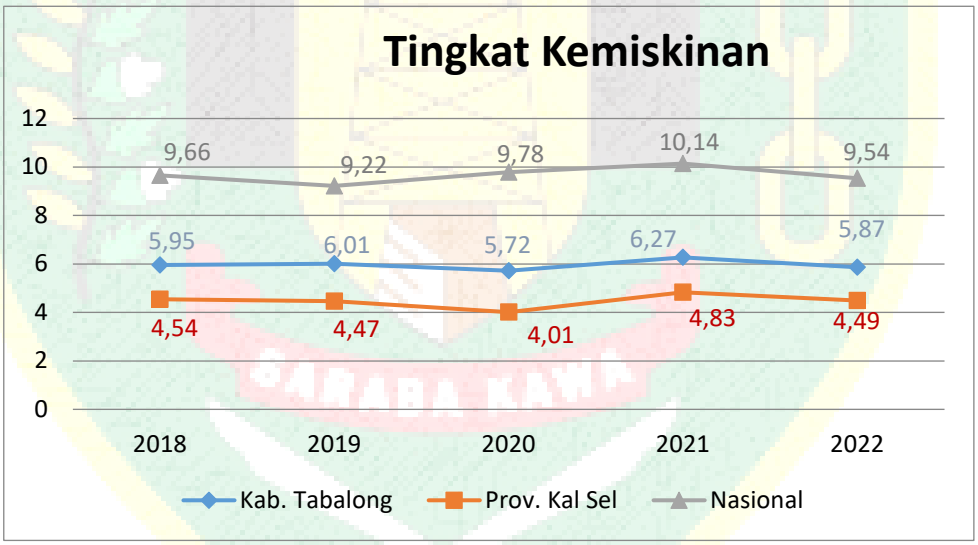
Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2021 sangat tinggi, jauh lebih tinggi jika dibandingkan tingkat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, demikian pula tingkat pertumbuhan selama kurun waktu 2018 – 2022

dibandingkan tingkat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

12. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan disajikan dalam bentuk Persentase Penduduk Miskin didapatkan dengan rumus jumlah penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong tahun 2022 adalah 5,87% lebih tinggi dari Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan namun masih lebih rendah jika dibandingkan Angka Kemiskinan Nasional. Perbandingkan perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2.30
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 -2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tren persentasi penduduk miskin pada rentang waktu 2018 – 2022 pada tingkat Nasional mempunyai kecenderungan yang relatif berbeda antara Provinsi dan Kabupaten Tabalong. Pada tingkat Nasional terjadi

penurunan dari tahun 2018 – 2019 kemudian terlihat adanya peningkatan sejak tahun 2020. Untuk Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan terlihat sedikit peningkatan di tahun 2019, kemudian menurun kembali di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2022.

Untuk tingkat perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Tingkat Pertumbuhan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018 - 2022

Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	5,95	6,01	5,72	6,27	5,87	-0,4	-0,02
Prov. Kalimantan Selatan	4,54	4,47	4,01	4,83	4,49	-0,34	-0,0125
Nasional	9,66	9,22	9,78	10,14	9,54	-0,6	-0,03

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021-2022 paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan, namun lebih rendah jika dibandingkan tingkat pertumbuhan Nasional.

Demikian juga untuk tingkat pertumbuhan 2018–2022 Kabupaten Tabalong lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan dan lebih rendah dari Nasional.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (Rp/Kapita/Bulan) dibawah Garis Kemiskinan tahun 2022 adalah 15.243 jiwa, mengalami penurunan sebanyak 885 jiwa jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2021 yaitu 16.128 jiwa.

Tabel 2.151
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2018- 2022

Uraian	Realisasi					Tingkat Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022	2018-2022
Kab. Tabalong	14.874	15.222	14.700	16.128	15.243	-5,81%	0,45%
Prov. Kalimantan Selatan	189.033	192.480	187.870	208.118	195.702	-6,34%	0,68%
Nasional	25.949.800	24.875.870	26.424.020	28.010.000	26.160.000	-7,07%	0,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabalong tahun 2021-2022 lebih rendah jika dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih tinggi dari Nasional. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan 2018 – 2022 Kabupaten Tabalong menunjukan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan tingkat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

13. Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals*

Berdasarkan uraian data-data di atas, beberapa bagian merupakan data capaian pengarusutamaan *SDGs* Kabupaten Tabalong. Target-target dari 17 tujuan berkelanjutan beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong. RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2023 telah mensinergikan program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan nasional untuk percepatan pencapaian *SDGs*, seperti penanggulangan kemiskinan, penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan *HIV/AIDS*, malaria, akses Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial. Tabel 2.152 berikut adalah pencapaian kinerja sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(SDGs)* Kabupaten Tabalong 2021-2022.

Tabel 2.152
Pencapaian Kinerja Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals (SDGS)
Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2022

No	Sasaran SDGs		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Tujuan dan Indikator	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tanpa Kemiskinan					
	Persentase Penduduk Miskin	Menurun	5,70	6,27	5,65%	5,87
2	Tanpa Kelaparan					
	Balita Gizi Buruk (%)	-	0,00	0,00	0,00	0,01
	Balita Stunting (%)		12	8,88	10,5	7,8
3	Kehidupan Sehat					
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	-	70,44	70,57	70,47	70,84
	Angka Kematian Ibu (Orang)	25 Per 100.0000 KH	125	275	140	135
4	Pendidikan berkualitas					
	Rata-Rata Lama Sekolah(Tahun)	12 Tahun	9,22	9,11	9,45	9,12
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	13,43	12,89	13,77	12,90
5	Kesetaraan Gender					
	Indeks Pembangunan Gender	TPAK Wanita 82,71%	72,51	85.34	85,72	74,65
6	Air Bersih dan Sanitasi					
	Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)	100%	66,73	86,77	100%	80,85%
	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	100%	93	91,77	96,23%	95,39 %
7	Energi Bersih dan Terjangkau					
	Rasio Elektrifikasi (RT Yang menggunakan Listrik)	RE 100%	100	100	100	100
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	1,5-2,0	3,28	1,75-2,3	5,30
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Meningkat	3,04	3,43	3,07	4,46

No	Sasaran SDGs		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Tujuan dan Indikator	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur					
	Kondisi Jalan Baik (%)	100%	80,26	78,15	100%	363,592
10	Berkurangnya Kesenjangan					
	Rasio Gini	0,31	0,28-0,31	0,288	0,28-0,31	0,340
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan					
	Kawasan Kumuh (%)	Kumuh 0%	Na	NA	Na	Na
12	Konsumsi dan Produksi					
	Sampah yang Terkelola	RT Melimpah Sampah 37,68	74		73	21,92
13	Penanganan Perubahan Iklim					
	Dokumen Penurunan Emisi GRK	Penurunan EMISI 29%	NA	NA	NA	NA
14	Ekosistem Lautan					
	Keanekaragaman Hayati Laut	Menurun sampai 50%	NA	NA	NA	NA
15	Ekosistem Daratan					
	Indeks Tutupan Lahan	Lahan Kritis Menurun 50%	62,50	66,23	66,50	66,53
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tangguh					
	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Sakip	-	B	B	B	B (68,13)
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan					
	Pelibatan TJLSP	-	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, Tahun 2023 (berbagai sumber/Diolah).

2.2.2 EVALUASI PERKEMBANGAN CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Upaya mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah

secara keseluruhan. Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi I : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais

Tujuan dari misi tersebut adalah; Mewujudkan masyarakat dan Pemerintahan Daerah yang beriman, berkepribadian dan Produktif dengan indikator tujuan berkurangnya angka kriminalitas. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat, dengan indikator sasaran berkurangnya angka kriminalitas.

Perbandingan antara target dan capaian atas tujuan dan sasaran terkait Misi I dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.153
Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais

Tujuan Pembangunan/Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
Mewujudkan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah yang Beriman, Berkepribadian dan Produktif.			
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat	Angka kriminalitas	11,0 per 10.000 penduduk	6,30 per 10.000 penduduk

Sumber : BAPPEDALITBANG Kab Tabalong, 2023 (RPJMD 2019-2024)

Perwujudan kehidupan masyarakat yang agamais tidak bisa dilihat semata-mata dari pelaksanaan ibadah dan ritual-ritual keagamaan, akan tetapi nilai-nilai keagamaan tersebut harus memberi pengaruh positif terhadap perilaku dan akhlak masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya indikator tujuan dan sasaran yang dirumuskan yaitu

menurunnya angka kriminalitas di masyarakat sudah dapat menggambarkan adanya kehidupan masyarakat yang agamais.

Berdasarkan informasi capaian kinerja sebagai dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan terkait, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka kriminalitas yang sangat signifikan sehingga persoalan kriminalitas di tabalong harus mendapatkan penanganan dan perhatian bagi pemerintah kabupaten Tabalong.

2. Misi II : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah; Meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai meliputi:

a. Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang berkelanjutan.
b. Meningkatnya akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten.
c. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.
d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Air Minum.
e. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa.
f. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
g. Meningkatnya Pertumbuhan di sektor Industri Kecil dan Menengah.
h. Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan.

Perbandingan antara target dan capaian atas tujuan dan sasaran terkait Misi II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.154

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang berkelanjutan	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	11,06	7,73
		Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	12,62	6,86
	Meningkatnya akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten	Persentase Desa yang diakses dengan Mudah	97,52	97,52
		Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	78,80	78,65
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	83,84	82,12
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Mayartakat terhadap Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	71,89	80,85
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa membangun	0,68	0,7511
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya alam Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,30	70,08
	Meningkatnya Pertumbuhan di sektor Industri Kecil dan Menengah dan Koperasi	Persentase UKM Aktif	100	100
		Persentase Koperasi Aktif	78	60
		Kontribusi Industri terhadap PDRB	12,03	6,33
	Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0,288-0,31	0,34

Sumber : BAPPEDALITBANG Kabupaten Tabalong 2023 (RPJMD 2019-2024)

Secara umum upaya meraih tujuan untuk meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, Kontribusi pertanian terhadap PDRB masih belum mencapai target yang ditentukan sehingga masih membutuhkan penanganan khusus, kemudian kontribusi perdagangan terhadap PDRB juga masih belum mencapai target yang di tentukan

Mengenai ketimpangan Indeks Gini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai angka 0,34 dari target yang ditentukan pada kisaran 0,280-0,31, sementara persentase koperasi aktif pada tahun 2022 tercapai 60 persen dari target yang diinginkan 78 persen.

3. Misi III : Mewujudkan Kemandirian Daerah.

Tujuan yang ketiga; Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan, sasaran yang ingin dicapai meliputi:

a. Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan sosial Budaya serta Penerapan IPTEK secara optimal.
b. Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Penduduk Lokal.
c. Meningkatnya Kualitas dan jangkauan Pelayanan sosial.
d. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
e. Menurunnya tingkat Kemiskinan.

Tujuan yang keempat yaitu; Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel, sasaran yang ingin dicapai meliputi:

a. Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.

Perbandingan antara target dan capaian atas tujuan dan sasaran terkait Misi III dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.155
Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Daerah

TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.	Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan sosial Budaya serta Penerapan IPTEK Optimal	Indeks Pembangunan Manusia	73,60	73,13
		Angka Harapan Hidup	70,47	70,84
		Rata-rata Lama Sekolah	9,45	9,12
		Harapan Lama sekolah.	13,77	12,90
	Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Penduduk Lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,0-4,0	4,46
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase PPKS yang dilayani	100	88,88
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IDG	73,38	74,65
		IPG	85,72	86,06
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,65	5,87
Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	79	56,06
		Nilai SAKIP (predikat)	BB	B (68,13)
		Opini BPK (predikat)	WTP	WTP
		Nilai Survey Kepuasan	85	84,55

TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
		Masyarakat terhadap pelayanan publik		
		Tingkat Kemandirian Daerah	15,65	12,49

Sumber : BAPPEDALITBANG Kabupaten Tabalong 2023 (RPJMD 2019-2024)

Kemandirian daerah diupayakan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Realisasi capaian Angka Harapan Hidup sudah melebihi target yang di tetapkan namun Indeks Pembangunan Manusia masih belum mencapai target yang diharapkan. Capaian rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2022 juga masih belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi yaitu mencapai 4,46 persen, presentasi kemiskinan di Kabupaten Tabalong tidak berbanding positif untuk mengungkit penurunan penduduk miskin. Artinya, penduduk yang bekerja belum mampu memenuhi penghasilannya untuk keluar dari garis kemiskinan di Kabupaten Tabalong.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah memastikan tersedianya akses dan infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan melalui pelayanan publik yang berkualitas, perencanaan pembangunan yang efektif serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran pembangunan menjadi optimal. Hasil survey terhadap kepuasan masyarakat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan publik. Nilai survey terhadap kepuasan masyarakat Tabalong pada tahun 2022 capaiannya memperoleh predikat/kategori “Baik” walapun masih belum mencapai target. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabalong mendapatkan predikat 56,06 Sedangkan Nilai SAKIP

Kabupaten Tabalong tahun 2022 mendapatkan predikat B, BPK terhadap keuangan di Tabalong kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tingkat kemandirian daerah pada tahun 2022 mencapai 12,49 persen juga masih belum mencapai target yang di tetapkan pada tahun 2022 15,65 persen sehingga diperlukan upaya-upaya khusus dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

2.2.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Harapannya program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Capaian indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.156
Capaian Indikator Kinerja Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,14	71,78	72.19	72,60	73,13	73,13
	Pertumbuhan PDRB (ADHB) milyar	Milyar Rupiah	17.319,93	18.046,98	17.757,24	19.291.887,59	29.172.840	17.296,38
	Pertumbuhan PDRB (ADHK) milyar	Milyar Rupiah	14.389,96	14.879,25	14.487.98	14.998.475,42	15.746.270	13.313,89
	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	3,50	-2,49	3,28	5,30	1,75-2,3
	Laju Inflasi	%	2,60*	2,15	2,05	2,43	5,01	1.27
	PDRB per kapita (ADHB)	Ribu	69.056	70.961	68.881,50*	69.120,41	29.172.840	70,951
	PDRB per kapita (ADHK)	Ribu	57.214	58.505	56.199,84*	58.221,39	15.746.270	58,086
	Indeks Gini	Koef	0,328	0,296	0,305	0,288	0,34	0,28-0,31
	Kemiskinan	%	5,95	6,01	5,72	6,27	5,87	5,65
	Pengeluaran per kapita (ribu)	Rp	11.227	11.409	11.283	11.470	11.914	12.042
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Angka Melek Huruf	%	99,36	99,48	99,49	98,525	99,53	99,75
	Rata-rata Lama Sekolah	%	8,57	8,78	9,10	9,11	9,12	9,45
	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	- SD/MI	%	98,1	99.75	99,41	99,93	99,97	99,50
	- SMP/MTs	%	81	93,12	89,16	98,57	79,36	91,60
	- SMA/MA/SMK	%	69,00	N/A	72,58	80,57	61,28	Kewenangan Provinsi
	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	- SD/MI	%	110,8	105,94	105,0	107,44	110,54	100
	- SMP/MTs	%	93,40	93,40	101,83	113,10	101,50	100
	- SMA/MA/SMK	%	96,70	96,70	106,36	94,95	117,97	86,39
	Pendidikan yg ditamatkan							
	- SD/MI	%	58,901	58,902	57,953	L=24,4 P=29,73	28,82	23,35
	- SMP/MTs	%	39,002	39,002	39,389	L= 25,14 P= 21,84	23,00	16,45
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
2.1.1	Pendidikan							
	Rasio Ketersediaan Sekolah							
	- SD/MI	%	80,36	80,88	89,62	89,76	33,15	98
	- SMP/MTs	%	47,11	45,07	66,38	58,19	91,40	62,25

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	- SMA/MA/SMK	%	26,03	33,07	30,31	31,40	50,40	27,35
	Rasio Guru dan Murid							
	- SD/MI	%	825	777	852	850	780	15
	- SMP/MTs	%	982	982	1037	900	967	14
	- SMA/MA/SMK	%	776	734	737	880	990	776
	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0,01	0,05	0,01	0,35	106	0,01
	- SMP/MTs	%	0,1	0,12	0,37	0,29	47	0,12
	- SMA/MA/SMK	%	0,35	0,01	0,10	0,60	20	0,12
2.1.2	Kesehatan							
	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita	Rasio	1,16	1,18	1,51	1,45	1,40	1,2*
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Rasio	0,007	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07*
	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	Rasio	0,03	0,19	0,08	0,08	0,08	0,04*
	Rasio Pustu per satuan penduduk	Rasio	0,22	0,17	0,01	0,14	1 : 5860	0,19*
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Rasio	0,22	0.07	0,08	0,08	0,08	0,01*
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Rasio	23,12	19,66	21,56	36,81	1 : 2.172	1: 3.500
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Rasio	3,30	3,12	3,12	0,56	0,44	0,914*
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	62,61	127,72	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,9	86,2	83,4	98,2	98,3*	100
	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*	%	90,08	96,95	89,9	60,3	67,9	90
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	39,6	70
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kunjungan bayi	%	81,98	97,6	84	84,0	99,40	100
	Cakupan pelayanan puskesmas	%	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	96
	Cakupan pelayanan puskesmas pembantu/pustu	%	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	-Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	110	160	160	160	160	-
	-Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota terakreditasi	%		100%	100%	100%	100%	100
	-Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	%	100%	40,60%	100	100	90,60%	N/A
	-Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		164%	182%	77,69%	100	89,20%	100
	-Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	-	62,12%	79,56	80	73.40%	N/A
	-Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh.	%	2,973	3,261	4,692	-	100%	N/A
	-Pelayanan Kesehatan orang terduga Turbekulosis'	%	1,107	2,245	9,69	-	100%	N/A
	-Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia	%	42,03	73,9	80,2	81,02	64,70%	N/A
	-Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	78,6	80,5	78,7	80,5	78,1%	N/A
	-Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	%	98,2	95,5	99,3	95,5	82,60%	N/A
	-Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%					87,1	
	-Pelayanan Kesehatan Balita	%	68,95	75,71	68,95	75,70	90,9	N/A

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	-Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	-	-	-	-	94,4	-
	-Insidensi Turbekulosis (per 1.000 penduduk)	Per 1.000	137	141	63	64	1,34	N/A
	-Insedensi HIV Per 1000 Penduduk yang Tidak terinfeksi HIV	Per 1.000	8	5	1,97	0	0,09	N/A
	-Penurunan Jumlah angka Kematian Ibu (AKI) Per Tahun	%	134	93	146	50	50,90	140
	-Implementasi KTR 9 Tempel (Pendidikan, Transportasi, Kesehatan, dll)	%					100	
	-treatment Converge pada pasien TB		100%	100%	100%	100%	39,60%	100%
	-Presentase Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	84	87	83,4	83,4	98,1	-
	-Jumlah Puskesmas yang menerapkan Layanan Upayan Berhenti Merokok (UBM)	Unit	5	5	5	5	5	5
	-Temuan Kasus TB menggunakan Indikator SPM (terduga TB)	%	1,107	2,245	9,69	N/A	100	N/A
	-Peresentase Imunisasi dasar	%	87	88	83	N/A	86,70	N/A

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	lengkap pada usia 12-23 Bulan.							
	-Persentase Merokok Penduduk Usia 01-18 tahun	%	-	-	9,10	23,67	23,67	N/A
	-Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	19,70	32,96	57,80	-	74.00	100
	-Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar Pelayanan Perizinan.	%	-	-	-	-	53	-
	-Persentase Sarana Produksi UMOT	%	-	-	-	-	0	-
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	KM	586,61	593,82	461,74	444,208	363,592	723
	Jembatan dalam kondisi baik dan Sedang	%	82,18	88,14	88,14	91,11	91,11	82,26
	Tempat Ibadah per Satuan Penduduk:							
	- Masjid/Musholla	Unit	238	233	208	502	874	200
	- Gereja	Unit	31	32	18	30	48	20
	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah berkondisi baik	%	86	87	88	-	90	90

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Rasio Tempat Pem-buangan Sampah per Satuan Penduduk	Rasio	0,075	0,075	0,071	1:1.208	1 : 1128	0,71
	Luas Lahan Pertanian yg terlayani jaringan irigasi	%	18,37	71	95	95	95	95
	Persentase sarana dan prasarana pengairan dalam kondisi baik	%	69	70.04	71,18	72,86	73,94	75
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Persentase Permukiman yang tertata	%	20,034	20,034	20,034	20,034	20,034	20,034
	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	96,07	97,89	99,98	91,77	95,39	96,23
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	3,38	3,40	5,41	3,96	3,32	3,57
	Rasio jumlah Siskamling per 10.000 penduduk	Rasio	5,2	5,2	6,7	4,09	23	6,5*
	Penegakan PERDA dan PERKADA	%	76	76	79	80	80	80
	Persentase jumlah konflik bernuansa SARA yang berhasil diselesaikan	%	100	100	100	100	0 (Tidak ada Konflik)	100

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
2.1.6	Sosial							
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	10	10	10	10	10	10
	Jumlah PPKS yang Memperoleh Bantuan	Orang	20.488	16.717	29.780	28.773	2.421	N/A
	Persentase PPKS yang dilayani	%	83,43	83,45	69,36	70*	88,88	100
2.2	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.2.1.	Tenaga Kerja							
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	75,63	71,02	69,27	71,49	72,32	70,36
	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,09	3,30	3,07	3,43	4,46	3,0-4,0
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	52,78	53,73	54,5	55,70	56,2	52,17*
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	110	62,15	57,56	69,27	57,28	68*
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,97	72,30	72,49	73,39	74,65	73,38
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,95	85,43	85,34	85,34	86,06	85,72
	Status Menuju Kabupaten Layak Anak	Rangking	Madya	Madya	Tidak ada evaluasi	Nindya	Nindya	Nindya

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
2.2.3	Lingkungan Hidup							
	Presentase Penanganan Sampah	%	30,35	30,35	75,02	59,27	71,45	76
	Presentase rumah tangga Berakses Air Bersih	%	78,43	82,38	92,52	86,77	80,85	100
	Tingkat kualitas air	%	54	54,33	56,94	51,87	51,70	55,30
	Tingkat kualitas udara	%	83	89,44	88,97	87,69	89,50	89,20
	Tutupan Lahan	%	61	68,35	65,84	66,23	66,53	66,50
2.2.4	Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Jumlah Penduduk	Jiwa	242.088	243.763	245.765	256.903	251.353	N/A
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,01	1,40	1,01	1,06	1,73	1,46
	Kepemilikan KTP	%	100	100	99,29	99,05	99,26	100
	Kepemilikan Akta Kelahiran per 100 penduduk	Rasio	67,99	71,79	53,33	54,62	60,09	60
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya/ Belum	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.2.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klmpk	6.810	6.810	3.592	3.736	3.818	3.736
	PKK aktif	Unit	155	155	144	144	144	144
	Posyandu aktif	Unit	283	286	282	282	281	282

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Persentase desa yang diakses dengan mudah	%	99,91	96,69	95,87	95,88	97,52	97,52
2.2.6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Jumlah Keluarga Berencana	Kk	38.760	33.632	38.676	37.839	35.631	37.602*
	-Persentase ARG Belanja APBD	%	-	-	-	-	3,41	-
	- Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	-	-	-	Belum Rillis	-
	-Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	-	-	54,95	N/A	53,42	60,32
	-Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age sfscific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Per 1.0000	-	-	40	N/A	41,3	34
	-Angka Kelahiran Total (total Fertility Rate/TFR) Per WUS usia 15-49 Tahun.	Per 1.000	N/A	2,46	2,45	N/A	2,37	2,19
	-Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Per 1.000	82,10%	80,21%	80,89%	N/A	79,22	82,11
	-Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	%	9,53%	8,11%	8,46%	N/A	9,77	7,96
2.2.7	Pangan							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	-	-	-	-	82,12	83,84
	Ketersediaan Pangan	Ton	27.015	27.319	59.570	63.876,8	-	-
2.2.8	Perumahan dan Pemukiman							
	Luas Lahan Bersertifikat	Ha	41,52	20.032	5.961	20.032	20.032	20.032
	Penyelesaian Ijin Lokasi	%	50	50	100	100	100	100
2.2.9	Perhubungan							
	Angkutan Kota	Buah	25	33	35	42	43	45
	Cakupan Wilayah yang terlayani angkutan umum	%	36	40	42	43	45	45
2.2.10	Komunikasi dan Informatika							
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya E-Government	Persen	-	-	-	100	100	100
2.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Persentase Koperasi Aktif	%	57,6	58,00	61,76	58,65	60	78
	Tingkat Pertumbuhan jumlah UMK	%	0,01	0,0046	-71,054	0,01	1,15 (220 UMK)	37,09
2.2.12	Penanaman Modal							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (milyar)	Rp	3.738	3.945	4.095	4.645	1,7 Trilyun	1,01 trilyun
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga							
	Jumlah pemuda berprestasi minimal tingkat Provinsi	Orang	6	23	16	-	-	40
	Jumlah Cabang Olahrga yang mendapat Penghargaan	Buah	11	54	17	-	11	16*
2.2.14	Statisik							
	Produksi Data Pembangunan							
	- Kabupaten Dalam Angka	Ada / Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	- Kecamatan Dalam Angka	Ada / Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	- PDRB	Ada / Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	- Profil Kabupaten	Ada / Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	- Monografi	Ada / Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.15	Persandian							
	Persentase Penyelenggaraan statistic sektoral	%	-	-	-	-	100	100
2.2.16	Kebudayaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	5	5	5	5	5	5
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Keg	3	3	3	3	3	3
2.2.17	Perpustakaan							
	Jumlah Perpustakaan	Buah	86	86	487	493	297	82
	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	94,520	96,161	46,822	88,480	96,161	19,16
2.2.18	Kearsipan							
	Jumlah SKPD yang telah dilakukan Penataan Arsip Dinamis	SKPD	8	19	10	7	18	30
	Jumlah Kecamatan Yang Telah dilakukan penataan arsip dinamis	Kecamatan	3	-	-	11	11	12
	Jumlah Kelurahan Yang telah dilakukan penataan arsip dinamis	Kelurahan	-	-	-	7	7	10
	Jumlah desa yang telah dilakukan	Desa	9	43	19	40	47	35

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	penataan arsip dinamis							
	SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	45,86	45,99	25,81	17,03	15	30
	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip	%	60	50	50	50	802	50
	Tersedianya pedoman pengolahan kearsipan	Pedoman	0	0	3	3	1	3
2.3	Fokus Urusan Wajib Pilihan							
2.3.1	Kelautan dan Perikanan							
	Produksi Perikanan Budidaya							
	Produksi perikanan (ton)	Ton	13.093	13.848,9	14.013	15.378,95	16.160,51	16.220
	Cakupan bina kelompok nelayan	%	73,38	75,51	80	28,57	28,57	20
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	%	73,38	75,51	80	77,73	79,67	_
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg /kapita /tahun	46,51	47,10	45,5	Belum Rillis	-	-
2.3.2	Pariwisata							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Kunjungan wisata	Orang	795.392	203.397	857.760	3.892.671	1.993.088	953.000
2.3.3	Pertanian							
	Produksi padi	Ton	136.237	166.684	152.070	92.713,6	55.001,55	127.238
	Produktivitas Padi/ produksi	Ton/ha	4,60	4,65	4,6	39,97	44,51	4,70
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11	11,01	11,05	10,71	7,73	11.06
	Cakupan bina kel. Petani							
	- Kelompok tani	Klmpk	798	799	818	1.225	696*	1.104
	- Gapoktan	Klmpk	82	82	129	129*	129*	84
	Produksi Karet	Ton	62.129	61.875	62.574	57.450,14	60.442	64.350
	Produktivitas Karet	Ton/Ha	0,90	0,89	1,27	1.191	0,86	1,5
2.3.4	Perdagangan							
	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	8,36	8,98	9,48	8,89	6,86	12,62
2.3.5	Perindustrian							
	Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	10,18	11,69	8,87	8,89	6,33	11,23
	Pertumbuhan Industri	%	56,11	3,78	-3,50	4,59	5,21	33
2.4	Fokus Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan							

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
2.4.1	Perencanaan Pembangunan							
	Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA.	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2	Keuangan							
	Persentase Belanja terhadap Pendapatan	%	109	88,15	80,66	88,03	105,85	107,2*
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.3	Pemerintahan							
	Persentase Pelaksanaan e-Government	%	35	35	35	35	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik (84,55)	Sangat Baik
	Nilai LKjIP	Nilai	B	B	B		BB	BB
	Nilai LPPD	Nilai	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Belum Rillis	Belum Rilis	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Predikat APN/PPD	Peringkat	Nominasi Nasional	Tidak Ada Nominasi	Tidak Ada Nominasi	Peringkat III Provinsi	Peringkat II Provinsi	Nominasi Tingkat Nasional
2.4.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	%	86,98	149,20	107,53	94,50	95	85
2.4.5	Penelitian dan Pengembangan							
	Persentase Impementasi Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fokus Fasilitas Wilayah							
3.1.1	Penataan Ruang							
	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100
3.1.2	Lingkungan Hidup							
	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	%	88,31	90,41	92,52	96,53	80,85	96,23
3.1.3	Kriminalitas							
	Angka Kriminalitas	Angka	5,70	5,50	7,93	6,28	6,27	11,0

No	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target
			2018	2019	2020	2021	2022	2022
	Demonstrasi	Kali	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Listrik dan Telekomunikasi							
	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	persen	100	100	100	100	100	100
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	-	-	-	100	100	100
3.2	Fokus Sumber Daya Manusia							
	Ratio Lulusan S1/S2/S3	Rasio	398	431	336	656	486	13,35
	Ratio Ketergantungan	Rasio	48,11	47,92	47,71	46,38	46,51	46,00

Sumber : BAPPEDALITBANG Kabupaten Tabalong 2023 (Renja SKPD 2024 Diolah)

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penilaian atas aspek kesejahteraan masyarakat difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Secara umum, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan sudah bisa dipenuhi. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 sudah mencapai angka 73,13 dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 72,60 begitu pula rata-rata lama sekolah sudah mengalami peningkatan dari 8,78 di tahun 2019 menjadi 9,10 di tahun 2020, kemudian menjadi 9,11 tahun di tahun 2021 serta menjadi 9,12 di tahun 2022 dan melebihi target yang di tetapkan dan Harapan Lama Sekolah mencapai angka 12,90 tahun pada tahun 2022.

Adapun untuk fokus kesejahteraan sosial terdiri atas bidang urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan seni budaya. Pada bidang pendidikan, angka melek huruf (AMH) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan sedikit menurun di tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 99,53 Persen di tahun 2022. Semua indikator bidang kesehatan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Selain itu, Angka Kematian Bayi juga mengalami penurunan di tahun 2021 namun tetap bertahan pada angka 10,0 Persen di tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan tetap saja hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong perkembangannya mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai 2018, namun kembali naik pada tahun 2019 hingga mencapai 3,29 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 3,07 persen. Akibat dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021 naik lagi menjadi 3,43 persen, namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,07 Persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai 2020 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 72,32 persen.

2. Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan wajib pelayanan dasar

Target indikator rasio ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid, angka putus sekolah capaiannya fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2022. Hal yang perlu mendapat perhatian pada pelayanan dasar bidang pendidikan adalah distribusi guru pada setiap sekolah.

Pelayanan dasar bidang kesehatan antara lain meliputi rasio Puskesmas, rasio Pustu, rasio Rumah sakit, rasio dokter, rasio tenaga medis, serta berbagai indikator lain seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI),* cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan pelayanan puskesmas/pustu masih sangat perlu ditingkatkan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih ideal.

Pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perkembangannya bersifat stabil. Konflik bernuansa SARA, dilaporkan tidak ada kejadian selama tahun 2022.

Adapun untuk bidang urusan sosial, penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial mengalami penurunan di tahun 2018 hingga 2020 namun mengalami peningkatan mencapai 74,05 persen di tahun 2021.

b. Urusan wajib non pelayanan dasar

Perkembangan partisipasi Angkatan Kerja terus mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 69,27 persen dari 71,02 persen dibanding tahun sebelumnya, namun meningkat di tahun 2021 menjadi 71,49hingga tahun 2022 menjadi 72,32 Persen. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka sempat menurun tahun 2020 menjadi 3,07 persen namun mengalami peningkatan di tahun 2021 mencapai 3,43 persen hingga mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 4,46 Persen . Hal ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja belum maksimal disamping banyaknya pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Tabalong.

Peningkatan rasio KDRT pada tahun 2022 perlu dicari akar permasalahannya untuk menemukan solusi yang tepat. Sementara upaya yang dilakukan, adalah dengan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi penderita kekerasan.

Untuk Kabupaten Layak Anak pada 2022 telah mencapai target yang diharapkan yaitu kota layak anak dengan status Nindya.

Pada bidang urusan Lingkungan Hidup, persentase penanganan sampah masih rendah yaitu sebesar 71,45 % pada tahun 2022. Permasalahannya adalah jangkauan layanan yang masih terbatas di wilayah perkotaan dan pasar kecamatan, sedangkan di beberapa wilayah pedesaan belum sepenuhnya bisa dilayani dengan baik.

KTP nasional berbasis NIK dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2022 kepemilikannya mencapai 99,05 persen. Namun kepemilikan akta kelahiran masih dinilai mendekati maksimal hanya mencapai angka 94,09 persen.

Posyandu aktif adalah posyandu yang melakukan kegiatan minimal 10 kali dalam setahun, memiliki kader minimal 5 orang, mencapai cakupan layanan kesehatan (KIA, gizi, imunisasi dan KB) minimal 50 % dengan memiliki alat pemantauan pertumbuhan, serta mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal 1 kegiatan. Posyandu aktif di Kabupaten Tabalong sebanyak 282 posyandu dan ini dinilai sudah mencapai target yang ditargetkan. Begitu pula jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2022 yang meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 3.592 kelompok menjadi 3.736 kelompok pada tahun 2021 dan menjadi 3.818 Kelompok pada tahun 2022. Jumlah PKK aktif pada tahun 2022 mencapai 144 kelompok baik ditingkat kecamatan maupun desa.

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2019 hingga tahun 2022 berjalan baik dan berkembang secara positif.

Penyediaan angkutan kota dengan jangkauan layanannya yang sudah mampu melayani 3 kecamatan wilayah tengah secara penuh sementara untuk wilayah utara dan selatan (sistem zonasi) disiapkan armada di terminal kecamatan Muara Uya dan kecamatan Kelua.

Bidang urusan komunikasi dan informatika, sebagimana diatur dalam perundang-undangan yang menuntut penyiaran TV dan Radio lokal memiliki kelembagaan tersendiri di luar pemerintah melalui wadah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), terus diupayakan dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan desa.

Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, dimana persentase koperasi aktif yang telah mengalami peningkatan dari 58,009 persen di tahun 2019 menjadi 61,76 persen pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 58,65 persen di

tahun 2021 dan Pada tahun 2022 ada sekitar 60% Koperasi Aktif.

Pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga, jumlah pemuda yang berprestasi di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2018 hingga 2022 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Diperlukan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaaan. Begitupula pada bagian cabang olahraga yang mendapatkan prestasi olahraga juga mengalami perkembangan yang masih kurang menggembirakan.

Pada bidang urusan kebudayaan, pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan menunjukkan perkembangan yang positif. Beberapa kegiatan festival seni dan budaya dilaksanakan rutin setiap tahun dan penyelenggaraan festival seni budaya tahun 2022 sebanyak 5 Kali.

c. Fokus Urusan Pilihan

Data produksi perikanan dan angka konsumsi ikan pada bidang urusan kelautan dan perikanan menunjukkan tren perkembangan yang positif sejak tahun 2018-2022, Adapun yang perlu mendapat perhatian adalah budidaya keramba menjadi salah satu penyebab abrasi sungai, sehingga dibutuhkan penanganan dan solusi yang tepat terkait hal tersebut.

Pada bidang urusan pariwisata setiap tahunnya terus mengalami tren pertumbuhan ke arah yang positif hingga tahun 2018, akan tetapi sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 yang cukup pesat. Akan tetapi tetap diperlukan pembenahan dalam beberapa sektor, salah

satunya pada peningkatan sarana dan prasarana pariwisata untuk dapat menarik minat lebih banyak lagi wisatawan.

d. Fokus Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan

Pada bidang urusan perencanaan adalah terlaksananya penyusunan dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang telah di tetapkan PERDA, dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah di tetapkan PERDA, dokumen RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang telah di tetapkan PERDA semuanya telah tersedia, dan konsistensi penjabaran RPJMD ke RKPD mencapai 100%.

Pada bidang urusan keuangan, Kabupaten Tabalong tahun 2018 hingga tahun 2022 secara berturut-turut telah mendapatkan opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus fasilitas wilayah

Pada bidang urusan penataan ruang, ketaatan terhadap RTRW sangat penting, akan tetapi untuk saat ini pengendalian terhadap pemanfaatan ruang hanya bisa dilakukan apabila ada permohonan izin prinsip oleh masyarakat. Adapun untuk bidang urusan air minum sudah terpenuhi dan bahkan melebihi dari target yang di tetapkan yaitu mencapai 80,85 persen dari target 66,12 persen, akan tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi untuk bisa mencapai yang lebih baik. Sementara mengenai persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sarana prasarana air bersih untuk tahun 2022 sudah cukup baik, namun perlu

adanya peningkatan untuk mendukung Tabalong yang sejahtera.

Angka kriminalitas sejak tahun 2018 hingga 2022 sebagai pendukung iklim usaha yang kondusif juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, mengalami penurunan dari tahun 2018-2022. Meningkat di tahun 2020 mencapai 195 kasus, dari tahun 2019 hanya mencapai 140 kasus, kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi hanya 157 kasus hingga pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan menjadi 164 kasus.

b. Fokus Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan adalah rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu pada angka 431 : 10.000 namun sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 336 : 10.000 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 menjadi 486 : 10.000. Sementara itu indikator rasio ketergantungan terus menunjukan tren positif dimana rasio ketergantungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 48,30 persen di tahun 2017 hingga 47,71 persen di tahun 2020, dan menjadi 46,38 persen 2021 hanya saja sedikit mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 46,51 persen. Hasil ini menandakan bahwa jumlah tenaga kerja non produktif yang harus ditanggung mengalami sedikit peningkatan.

2.3. Telaahan Kebijakan

2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** telah

ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) beserta Program Prioritas (PP) sebagai berikut :

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Program Prioritas :

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
5. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi;
6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Program Prioritas :

1. Pengembangan kawasan strategis;
2. Pengembangan kawasan perkotaan;
3. Pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan pedesaan;
5. Kelembagaan dan keuangan daerah.

PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Program Prioritas :

1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan;
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Program Prioritas :

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia;
3. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial;
4. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter.

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Program Prioritas :

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur ekonomi;
3. Infrastruktur perkotaan;
4. Energi dan ketenagalistrikan;
5. Transformasi digital.

PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Program prioritas :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
3. Pembangunan rendah karbon.

PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
3. Penegakan hukum nasional;
4. Reformasi birokrasi dan tata Kelola;
5. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Sasaran pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 5,3 – 5,7 persen;
2. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99 -74,02 Indeks;
4. Gini Rasio pada kisaran 0,374 - 0,377;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 5,0- 5,7 persen.
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 Persen
7. Nilai Tukar Petani 105- 108.
8. Nilai Tukar Nelayan 107-110.

2.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sesuai dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yaitu : **"Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Inklusif"** Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (Lima) Prioritas Daerah (PD) beserta sub prioritas sebagai berikut :

PD 1 : Penguatan Sektor Industri, UMKM dan Pariwisata

Sub Prioritas :

1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
3. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark;
4. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital;
5. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah;
6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN;

PD 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing.

Sub prioritas :

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
3. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
4. Pengendalian Prevalensi Stunting
5. Penurunan Angka Pernikahan Anak
6. Peningkatan Prestasi Olahraga
7. Pengembangan Budaya Daerah

PD 3 : Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.

Sub prioritas :

1. Pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah;
3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN;

PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik.

Sub prioritas :

1. Penguatan reformasi birokrasi;
2. Perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif;
3. Pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
4. Pengembangan satu data Kalsel;
5. Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri;
6. Pelaksanaan Pilkada serentak;
7. Revitalisasi BLUD;

PD 5 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

Sub prioritas :

1. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan mitigasi dan pemulihan pasca bencana.

Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61 – 5,01 persen.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,65.
3. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 4,05-4,59 persen.
4. Angka Kemiskinan sebesar 4,00-4,22 persen.
5. Indeks Gini sebesar 0,324.
6. Tingkat Inflasi sebesar 2,0-4,0.
7. Penurunan Prevalensi Stunting 14%

Kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Kalimatan Selatan dapat diidentifikasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.157

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Kebijakan Tahun 2024	
	Nasional	**Provinsi Kalsel**
1.	**Tema Pembangunan Tahun 2024 :** **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** "	**Tema Pembangunan Tahun 2024**: **"Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Inklusif".**
2.	**Pendekatan Perencanaan :** Perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program*, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial	**Pendekatan Perencanaan :** Perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program*, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
3.	**Prioritas :** 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.	**Prioritas :** 1. Penguatan Sektor Industri, UMKM dan Pariwisata. 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing. 3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah. 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik. 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana .

Sumber : Rancangan RKP 2024 dan Rancangan RKPD Prov. Kalsel 2024

2.3.3. Penelaahan Usulan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat desa. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan dan akan dibahas pada kegiatan Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan pembangunan kemudian diinput kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan lokasi kegiatan dan dibahas dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.158
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Kompilasi Usulan Kecamatan untuk RKPD tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Usulan
1	Banua Lawas	452
2	Kelua	398
3	Tanta	63
4	Tanjung	161
5	Haruai	276
6	Murung Pudak	236
7	Muara Uya	304
8	Muara Harus	61
9	Pugaan	109
10	Upau	107
11	Jaro	147
12	Bintang Ara	113
	JUMLAH	**2.553**

Sumber: Musrenbang Kecamatan, 2023

2.3.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum

terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

Penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan hasil rapat, seperti rapat dengar pendapat dan atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Tabalong yang diinput kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.159

Daftar Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Tabalong

No.	Urusan	Permasalahan/Usulan
1.	Pendidikan.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah Pedesaan.
		Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2.	Kesehatan.	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Puskemas, Poskesdes dan Polindes.
		Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas di daerah kecamatan.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Meningkatkan Pemeliharaan/ Pengembangan Infrastruktur, Irigasi, Sarana dan Prasarana Air dan Pintu Air.
		Meningkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daerah Pedesaan
		Mengoptimalkan Pemeliharaan, Perbaikan & Pengembangan Bangunan Gedung
		Mengoptimalkan Perbaikan/Pemeliharaan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di daerah Pedesaan
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	Meningkatkan penanganan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan pemukiman khususnya daerah kecamatan dan pedesaan terutama penerangan jalan umum.
		Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
5.	Urusan Perhubungan	Mengotimalkan Infrastruktur Perhubungan dan Keselamatan Berlalu lintas

No.	Urusan	Permasalahan/Usulan
		Mengoptimalkan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
6.	Urusan Tenaga Kerja.	Meningkatkan Penyediaan Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja
7.	Kepemudaan dan Olahraga.	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan kegiatan kepemudaan khususnya untuk daerah kecamatan dan pedesaan
		Mengoptimalkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
		Pengelolaan obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan obyek wisata budaya secara profesional.
8.	Urusan Lingkungan Hidup.	Mengoptimalkan Penanganan dan pengelolaan persampahan.
9.	Urusan Pertanian.	Meningkatkan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura.
		Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
10.	Urusan Pangan, Kelautan dan Perikaanan.	Meningkatkan Pembangunan & Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Peternakan.
		Mengoptimalkan Penyediaan Bibit & Benih Tanaman Perkebunan.
11.	Urusan Koperasi dan UKM serta Perdagangan.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil.
12	Urusan Sekretariat daerah	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Ibadah
13.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pencegahan Kebakaran Daerah
		Meningkatkan Fasilitas Pencegahan Bencana Alam dalam Daerah
14.	Urusan Komunikasi dan Informatika.	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika.

Sumber : Pidato Ketua DPRD saat Musrenbang RKPD 2023

Penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana

berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Penelaahan ini disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, prioritas, efisiensi dan efektifitas.

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

2.4.1. Analisis dan Permasalahan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Tabalong berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut:

Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2018 mulai menunjukkan penurunan pada tahun 2019 menjadi 3,50 persen dari tahun sebelumnya tahun 2018 yaitu sebesar 3,78, kemudian Pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -2,49 persen Penurunan tersebut diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Tabalong ini, yaitu pertambangan batubara serta akibat dari Pandemi Covid 19 sehingga banyak sekali perusahaan/Lapangan usaha yang tutup

sehingga berdampak pada menurunnya kontribusi terhadap PDRB kemudian di tahun 2022 terjadi peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam yaitu mencapai 5,30 Persen.

Meski demikian terkait dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Tabalong.

2. Persentase penduduk miskin di Tabalong masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Tabalong tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 6,27 persen dari tahun sebelumnya yaitu 5,72 persen dan tahun 2022 kemiskinan mengalami penurunan menjadi 5,87 persen walaupun demikian pemerintah daerah kabupaten Tabalong harus berupaya untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan di kabupaten tabalong.
3. Angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong tahun 2018 sebesar 5,70 Persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,93 kemudian pada Tahun 2021 mengalami Penurunan menjadi 6,28 Persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1 digit menjadi 6,27 Persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tabalong, agar angka kriminalitas dapat ditekan lebih rendah lagi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan Pelayanan Umum

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan

pilihan. Urusan wajib terdiri atas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah ini terdapat beberapa permasalahan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.160
Identifikasi Permasalahan Pembangunan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1	Pendidikan.	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
		Belum terpenuhinya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
		Distribusi tenaga pendidik tidak merata.	Pemerataan distribusi tenaga pendidik.
2	Kesehatan.	Prevalensi stunting.	Penurunan angka Stunting, AKI dan AKB.
		Penyakit tidak menular (stroke, jantung, diabetes).	*Universal Health Caverage (UHC)*/ Jaminan Kesehatan Nasional.
		Penyakit menular (DBD, Malaria, TBC, Covid-19).	Peningkatan SDM dan Prasana Kesehatan,dan Penanggulangan Penyakit menular.
		Tenaga sumber daya kesehatan yang terbatas.	Penambahan Tenaga SD Kesehatan.
		Manajemen pelayanan rumah sakit yang belum optimal.	Peningkatan SDM dan Prasarana Kesehatan.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Penanganan jalan daerah terisolir.	Penyelenggaraan jalan kabupaten untuk menunjang perekonomian.
		Infrastruktur jalan dan jembatan antar wilayah yang mengalami kerusakan.	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
		Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.	Penetapan RDTR dan revisi RTRW.
		Masih kurangnya infrastruktur pengairan terutama wilayah selatan seperti jalan usaha tani, pintu air dan saluran irigasi.	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan sekunder pada daerah irigasi.
		Belum terpenuhinya sarana dan prasarana air minum.	Peningkatan sarana dan pengembangan sistem layanan air minum.
		Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana sistem air limbah skala domestik.	Penyediaan sarana dan prasarana sistem air limbah.

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Belum optimalnya pengawasan pembangunan gedung.	Peningkatan tenaga terampil konstruksi.
4	Administrasi Pemerintahan.	Masih kurangnya kualitas pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
		Efektifitas tata kelola pemerintahan yang masih kurang.	Optimalisasi tata kelola pemerintahan.
5	Perencanaan Pembangunan.	Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	Optimalisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
		Belum optimalnya penggunaan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	Optimalisasi penguatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
6	Perhubungan.	Belum optimalnya pelayanan transportasi publik dan prasarana perhubungan.	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan multimoda yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terjangkau berbasis IT menuju *Smart City* menjadikan Tabalong Terdepan.
		Belum optimalnya kesadaran pemrekarsa dalam menerapkan penggunaan dokumen rekayasa lalu lintas dan rekomendasi/izin andalalin.	Optimalisasi koordinasi, penguatan komitmen antar instansi terkait.
		Belum optimalnya pengelolaan dan penataan jasa perparkiran.	Optimalisasi Pengelolaan dan Penataan Jasa Perparkiran.
		Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.	Optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan koordinasi, penguatan komitmen antar instansi terkait.
		Belum optimalnya pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	Optimalisasi koordinasi, pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ.
7	Lingkungan Hidup.	Perlunya Peningkatan kualitas lingkungan hidup (status mutu sungai tercemar ringan).	Komitmen pengurangan sampah non organik.
			Peningkatan pengawasan, pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup.
		Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.	Perencanaan pembangunan PDU, Rumah Kompos, RDF dan Pengolahan Sampah

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			Organik dengan BSF akan terus dijalankan.
		Belum tercapainya target pengurangan sampah di sumber timbulan sampah.	Menguatkan eksistensi Bank Sampah dengan berbagai keterbatasan operasionalnya.
			Menguatkan peran serta pelapak sebagai salah satu agen penting pengurangan sampah dan mitra/pasar utama Bank Sampah dan TPS3R.
			Mengembangkan inovasi pengolahan-pengolahan sampah di TPS3R melalui beberapa program seperti RDF dan BSF.
			Menguatkan peranan perkantoran dalam upaya pengurangan sampah dengan menjadi nasabah Bank Sampah serta menjalankan Program *Green Office*.
		Belum Optimalnya Penanganan Sampah Perkotaan dan Kabupaten.	Menambah sarana pengumpul dan pengangkut sampah dari TPS yang tidak hanya berfokus pada dukungan APBD.
			Menguatkan peranan Pemerintah Desa melalui Bumdes atau TPS3R dalam penanganan sampah di wilayahnya masing-masing.
			Memperluas *Landfill* TPA Bongkang dengan sinergi dan pendanaan dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum.
			Mengembangkan sarana pengelolaan sampah seperti TPST di wilayah selatan Kabupaten Tabalong.
		Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.	Penyediaan tempat sampah di fasilitas umum.
			Pembangunan kebun raya.
			Pemeliharaan ruang terbuka hijau.
			Penyediaan TPS dan TPA yang layak.

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			Penggalakkan Gerakan *Green and Clean.*
		Besarnya potensi bencana alam.	Persiapan dalam rangka antisipasi bencana alam.
		Degradasi lingkungan.	Penanganan degradasi lingkungan.
8	Pertanahan.	Belum optimalnya pengadaan tanah untuk pembangunan.	Menyusun database pemanfataan tanah negara.
		Belum optimalnya penyelesaian konflik pertanahan.	Penanganan dan Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan.
			Menyusun pemetaan zona nilai tanah.
9	Kependudukan dan Catatan Sipil.	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA, AKTA Kelahiran, AKTA Kematian).	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel.
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemutahiran data kependudukan danpencatatan sipil.	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis IT.
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Masih adanya KDRT (bentuk tindakan / treatmen).	Peningkatan IPG dan IDG Kota Layak Anak.
		Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan.	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
		Masih perlunya peningkatan kesataraan dan keadilan gender.	Peningkatan kesataraan dan keadilan gender.
		Masih terdapatnya pernikahan remaja.	Upaya mengurangi pernikahan usia remaja.
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Unmet need masih ada (partisipasi pasangan usia subur untuk ber KB masih rendah).	Mengendalian laju pertumbuhan penduduk.
		Metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah.	Meningkatkan akseptor KB.
		Masih tingginya laju pertambahan penduduk.	Meningkatkan peserta KB MKJP.
12	Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.	Masih adanya PPKS yang memerlukan layanan.	Menurunkan pemerlu pelayanan kesejahteraaan sosial (PPKS).
		Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.	Meningkatkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
		Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat desa.	Peningkatan pemberdayaan masyarakatdDesa.
13	Tenaga Kerja.	Adanya Pengangguran terbuka di Kabupaten Tabalong.	Peningkatan perluasan kesempatan kerja.

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja.	Peningkatan Kompetensi/Pelatihan bagi tenaga kerja.
14	Koperasi dan UKM.	Masih lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan UKM).	Meningkatkan kapasitas manajemen usaha.
		Masih kurangnya pengembangan permodalan Koparasi dan UKM.	Peningkatan Perkembangan Permodalan Koperasi.
		Masih lemahnya pemberdayaan Koperasi dan UKM).	Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM.
15	Penanaman Modal	Belum optimalnya promosi untuk meraih investor.	Meningkatkan pelayanan Perizinan dan non perizinan.
			Meningkatkan promosi investasi di dalam maupun luar daerah, baik secara langsung maupun online.
			Sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada investor dan calon investor.
		Belum optimalnya penyediaan peta potensi investasi terkait software dan data.	Perlu pengembangan lebih lanjut terkait software dan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengolahan data.
		Belum optimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal.	Peningkatan dan perluasan segmen dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan izin.
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi penanaman modal.	Mengoptimalkan akses informasi penanaman modal melalui media informasi (website, FB,WA,SMS, sosialisasi dll).
16	Kebudayaan	Masih rendahnya Kreatifitas dan Inovasi Kebudayaan.	Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi.
		Pelestarian budaya perlu dipertahankan dan dikembangkan.	Pelestarian budaya perlu dipertahankan dan dikembangkan.
17	Kepemudaan dan Olahraga.	Prestasi atlet masih rendah.	Peningkatan prestasi atlet.
		Pembinaan kelembagaan kepemudaan belum optimal.	Optimalisasi pembinaan kelembagaan kepemudaan.
18	Ketentraman, Ketertiban umum Linmas.	Masih lemahnya penegakan Perda.	Peningkatan intensitas penegakan Perda dan Perkada.
		Kurangnya pemahaman SDM terhadap tugas pokok dan fungsi	Peningkatan Pemahanaan SDM terhadap tupoksi.
		Masih Tingginya Angka kriminalitas.	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas perlindungan masyarakat.

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Masih terbatasnya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran(SPM).	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
		Perlunya peningkatan kewaspadaan dini terhadap resiko konflik.	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan.
		Perlunya peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.	Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan .
		Masih rendahnya tingkat kecepatan pelayanan dan jumlah bantuan kebutuhan dasar yang terkena dampak bencana.	Penambahan tingkat kecepatan pelayanan dan jumlah bantuan kebutuhan dasar yang terkena dampak bencana.
		Masih rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimca dan Organisasi Pemerintahan lainnya.	Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimca dan Organisasi pemerintahan lainnya.
		Belum optimalnya penanganan bencana alam kebakaran hutan/permukiman/banjir/tanah longsor dan puting beliung.	Optimalisasi penanganan bencana alam kebakaran hutan/permukiman/banjir/ tanah longsor dan puting beliung.
		Belum terpenuhinnya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.	Pemenuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
19	Persandian.	Belum maksimalnya pengamanan informasi pemerintahan.	Peningkatan pengamanan terhadap informasi pemerintahan.
20	Ketahanan Pangan.	Penanganan desa rawan pangan belum optimal.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas distribusi dan cadangan pangan.
		Penguatan cadangan pangan Pemerintah belum optimal.	Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.
		Rentannya keamanan pangan terhadap kontaminasi zat / bahan berbahaya.	Meningkatkan keamanan pangan dan penganekaragaman pangan.
		Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah dan menganekaragamkan pangan).	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah dan menganekaragamkan pangan.
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Kapasitas aparatur pemerintahan Desa masih perlu ditingkatkan.	Pembinaan aparatur dan kewilayahan.
		Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan dan pemberdayaan	Pembinaan administrasi pemerintahan desa.

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		masyarakat Desa (Gotong royong dan Partisipasi).	
		Belum optimalnya peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.	Pembinaan keberdayaan masyarakat desa.
22	Statistik.	Penyelenggaran pengelolaan data dan informasi statistik sektoral belum optimal.	Optimalisasi serta peningkatan pengelolaan data dan informasi statistik sektoral.
23	Kearsipan.	Belum optimalnya pengelolaan arsip.	Pengelolaan arsip.
		Masih Kurangnya SDM arsiparis.	Peningkatan Kualitas SDM arsiparis.
24	Komunikasi dan Informatika.	Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung SPBE.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung SPBE.
		Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah.	Peningkatan penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah.
		Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Tabalong yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.	Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana sinyal telepon Pada daerah yang belum terjangkau.
		Terbatasnya SDM belatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian.	Peningkatan pengetahuan SDM belatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
		Belum maksimalnya penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.	Optimalisasi penggunaan domain resmi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan layanan publik.
		Belum optimalnya fungsi KIM yang telah terbentuk.	Optimalisasi fungsi KIM yang telah terbentuk.
25	Perpustakaan.	Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat.	Peningkatan literasi masyarakat.
		Masih terbatasnya koleksi buku.	Penambahan koleksi buku
26	Pertanian.	Masih rendahnya produksi dan mutu hasil pertanian dan perikanan.	Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian dan perikanan.
		Masih rendahnya nilai tambah hasil produk pertanian.	Peningkatan nilai tambah hasil produk pertanian.
27	Kepegawaian, dan Sumber Daya Manusia	Masih belum terpenuhinya batas minimal peningkatan kompetensi ASN sesuai perundang-undangan.	Melaksanakan pembinaan disiplin dan pelayanan administrasi kepegawaian.

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Penyediaan SDM yang berkualitas di setiap sektor pelayanan pemerintahan.	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.
		Masih belum terpenuhinya batas minimal peningkatan kompetensi ASN sesuai perundang-undangan.	Melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur.
		Masih kurangnya pemenuhan kesejahteraan dan fasilitas profesi ASN.	Memenuhi kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN.
28	Pariwisata.	Kunjungan wisata yang masih kurang.	Peningkatan kunjungan wisata.
		Sarana prasarana belum optimal.	Optimalisasi sarana dan prasarana.
29	Kelauatan dan Perikanan.	Belum terpenuhinya penganekaragaman benih ikan.	Meningkatkan perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan perairan.
		Masih rendahnya AKI.	Meningkatkan pengawasan sumber daya perikanan.
		Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan.	Optimalisasi Pengolahan hasil perikanan.
		Belum optimalnya produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan lokal).	Peningkatan produksi perikanan buddidaya dan tangkap yang ramah lingkungan.
30	Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM.	Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah.	Peningkatan Kualitas Produk Industri, Kecil dan Menengah.
31	Industri.	Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah.	Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah.
		Belum tersedianya sentra industri	Penyiapan Sentra Industri.
32	Penelitian dan Pengembangan.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
		Belum optimalnya keberlanjutan inovasi daerah	Pembinaan inovasi yang lebih komprehensif.
			Optimalisasi pemanfaatan hasil inovasi dalam pencapaian target indikator perencanaan.
		Rekomendasi hasil penelitian belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia	Optimalisasi penggunaan anggaran untuk tindaklanjut rekomendasi penelitian
33	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH).	Penguatan POKJA PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman).
		Kurang optimalnya penanganan PSU di perumahan dan permukiman.	Pemenuhan kebutuhan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak dan

No	Urusan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			sehat (sanitasi dan air bersih).
		Belum optimalnya penanganan Ruang Terbuka Hijau.	Optimalisasi pengelolaan RTH.

Sumber : Hasil Analisa 2023

2.4.2. Analisis dan Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Tabel 2.161
Analisis dan Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran pembangunan	Permasalahan
Misi I : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais.		
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.	Tenaga Pendidik Keagamaan (Da'i dan Mubaligh) masih kurang.
Misi II : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.		
1	Berkembangnya agribisnis terpadu dan berkelanjutan.	Modernisasi pertanian belum optimal.
2	Meningkatnya akses mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten.	Panjangnya ruas jalan.
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Penanganan Desa Rawan Pangan belum optimal.
		Penguatan cadangan pangan Pemerintah belum optimal.
		Rentannya keamanan pangan terhadap kontaminasi zat / bahan berbahaya.

No	Sasaran pembangunan	Permasalahan
		Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah dan menganekaragamkan pangan.
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Mayartakat terhadap Air Minum.	Masih belum optimalnya penyediaan dan Pelayanan Air Minum.
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa.	Kualitas perencanaan pembangunan ditingkat desa belum memadai.
6	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya alam Berkelanjutan.	Penurunan Kualitas Air di sungai Tabalong di Sebabkan Masih Tingginya Limbah Domestik di Perairan , Selain itu juga di sebabkan karena Musim Kemarau lebih lama, sehingga senyawa-senyawa domestik meningkat konsentrasinya.
7	Meningkatnya Pertumbuhan di sektor Industri Kecil , Menengah dan Koperasi.	Masih lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan UKM),
		Masih kurangnya pengembangan permodalan Koparasi dan UKM,
		Masih lemahnya pemberdayaan Koperasi dan UKM)
8	Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan.	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura belum optimal,
		Produksi peternakan belum memenuhi kebutuhan lokal,
		Produksi dan produktivitas perkebunan masih rendah,
		SDM pertanian belum kompetitif,
		Penyediaan sarana dan prasarana pertanian masih terbatas
		Belum terpenuhinya penganekaragaman benih ikan
		Masih rendahnya AKI,
		Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan.

No	Sasaran pembangunan	Permasalahan
		Belum optimalnya produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan lokal).
Misi III : Mewujudkan kemandirian Daerah		
1	Meningkatnya akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan sosial Budaya serta Penerapan IPTEK Optimal.	Masih tingginya Angka Kematian Bayi.
		Masih rendahnya APM SMA, SMK dan MA. Selain itu, kewenangan untuk jenjang ini di bawah provinsi, sehingga sulit diintervensi
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Penduduk Lokal.	Rendahnya keahlian dan keterampilan pekerja.
3	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial.	Data PPKS dan PMKS yang belum akurat.
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Masih ada beberapa indikator KLA yang belum dipenuhi.
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Lesunya pergerakan dunia usaha sehingga tidak dapat menyerap tenaga kerja.
6	Meningkatnya Pengelolaan Kinerja Pemerintahan Daerah serta Kualitas Pelayanan Publik.	Tingkat kesejahteraan aparatur belum memadai.

Sumber : Hasil Analisis 2022

2.5 ISU STRATEGIS

Berdasarkan perkembangan yang terjadi baik di tingkat global, nasional maupun lokal, isu strategis pembangunan tahun 2024 dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi *(economic growth);* pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi dalam kaitannya permasalahan perekonomian di Kabupaten Tabalong dibutuhkan upaya pemulihan ekonomi baik dari sektor pertanian, pariwisata dan daya saing UMKM.

Sektor produktif akan membantu pemulihan ekonomi nasional, apalagi 17 sektor produktif yang tengah diidentifikasi memiliki nilai tambah bagi ekonomi nasional. Adapun sektor-sektor tersebut di antaranya sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, serta basis ekonomi kerakyatan. Selanjutnya sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, peternakan, pertambangan, termasuk administrasi pemerintah di pusat dan daerah, dan beberapa sektor lainnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong pada Tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 5,30 persen di tahun 2022 dari sebelumnya 3,28 persen pada tahun 2021. Hal ini menandakan sektor perekonomian di Kabupaten Tabalong sudah mulai bangkit, yang sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan yang dirumuskan terkait dengan permasalahan dan isu strategis Pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif di Kabupaten Tabalong dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatan produksi dan mutu hasil pertanian dan perikanan untuk mendukung agrowisata.
b. Meningkatan usaha pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah.
c. Meningkatan keterampilan calon tenaga kerja, jumlah dan kelas Wira Usaha Baru (WUB), serta peran UMKM.
d. Optimalisasi transformasi struktur ekonomi daerah;

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, ide-ide pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu. Proses ini diharapkan membawa dampak positif dalam mendorong proses pembangunan nasional.

Dalam dunia industri dan lapangan kerja sekarang ini dituntut setiap tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan serta keahlian tertentu yang memadai terhadap suatu bidang pekerjaan. Semua itu bisa diperoleh melalui pendidikan yang kualitasnya terbaik.

Sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Tabalong harus terus ditingkatkan terkait dengan *skill* dan keterampilan kerja yang berdaya saing tinggi serta kompetitif.

Berkenaan dengan Layanan kesehatan di setiap daerah harus ada pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau hingga di pelosok desa dan pedalaman. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Berkaitan dengan pendidikan di tabalong bahwa pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah di Tabalong mencapai 9,12 Tahun kemudian Harapan Lama sekoah mencapai 12,9 Tahun meningkat di banding tahun sebelumnya, disisi kesehatan juga perlu perhatian mengenai Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 135 Jiwa begitu pula data mengenai angka Kematian Bayi (AKB) mencapai pada angka 10 Bayi.

Adapun permasalahan mengenai Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

a. Masih adanya prevalensi *stunting.*
b. Masih terdapat Penyakit menular (DBD, Malaria, TBC).
c. Masih tingginya penyakit tidak menular (stroke, jantung, diabetes).

d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam menyediakan dan melayani sektor pendidikan dan kesehatan.
e. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
f. Masih kurangnya keahlian dan keterampilan calon tenaga kerja dan Wira Usaha Baru.

3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur.

Wilayah Pengembangan Strategis adalah basis perencanaan keterpaduan infrastruktur yang menstimulasi pembangunan infrastruktur dasar yang secara bersamaan dengan klaster industri dan perkotaan serta sarana transportasi utama akan tumbuh, agar komoditas yang dihasilkan mempunyai daya saing yang lebih tinggi dengan orientasi ekspor.

Dari sisi definisinya bahwa Infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, dan infrastruktur sistem drainase.

Keputusan Presiden memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuat posisi Kabupaten Tabalong semakin strategis. Kabupaten Tabalong akan jadi perlintasan antar provinsi meliputi provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga ke ibukota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dampaknya perpindahan Ibu Kota Negara tersebut secara ekonomi bagi Kabupaten Tabalong adalah berperan sebagai daerah penyangga *(hinterland)* Ibu Kota Negara baru yang nantinya akan memasok berbagai kebutuhan baik itu kebutuhan pangan, maupun kebutuhan lainnya, sehingga dapat menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai jalur logistik yang merupakan *impact* dari posisi Tabalong sebagai wilayah strategis, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung konektivitas di wilayah Kabupaten Tabalong.

Terkait bidang Infrastruktur di Kabupaten Tabalong masih banyak hal yang perlu di benahi terutama di daerah terpencil dan di wilayah perbatasan. Proporsi jalan dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Tabalong masih berkisar 363,592 Km sehingga hal ini masih perlu ditingkatkan lagi.

Upaya kebijakan terkait dengan isu strategis permasalahan Infrastruktur dasar/Wilayah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan volume dan kualitas infrastruktur untuk mendukung perekonomian wilayah, dan infrastrktur dasar di daerah terpencil dan perbatasan.
b. Menyiapkan infrastruktur yang memadai yang mendukung penataan kota dan lingkungan permukiman.

4. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.

Kinerja pemerintah didefenisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Peningkatan kinerja pemerintahan daerah adalah hal menyangkut pelayanan publik dan erat kaitannya di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terintegratif melalui aplikasi sistem perencanaan yang sudah dibangun sejak beberapa tahun yang lalu dirasakan belum optimal dalam penggunaannya, apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah pusat yang cukup berdampak dalam sistem informasi tersebut. Dengan demikian diperlukan *upgrade* (pembaharuan) dari sisi konten dan aplikasi yang cukup memakan waktu, hal inilah yang menjadikan proses perencanaan tidak cukup efektif dan efisien dalam penyusunannya.

Tata kelola pemerintahan dari sisi akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sudah cukup baik di mana pada tahun 2022 nilai SAKIP pada peringkat B. Predikat ini menunjukkan perlunya optimalisasi kinerja instansi pemerintah daerah agar nilai SAKIP dapat meningkat pada periode berikutnya. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, nilai Pemerintah Kabupaten Tabalong menunjukkan hasil yang cukup baik dengan predikat tinggi (2019) sementara data tahun 2022 masih belum rilis. Nilai ini diharapkan terjaga konsistensinya bahkan perlu ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dan berdampak pada meningkatnya kinerja pelayanan publik.

. Peningkatan kinerja di Kabupaten Tabalong difokuskan pada strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b. Meningkatkan dan menjamin kondusifitas wilayah.
c. Optimalisasi efektifitas tata kelola pemerintahan.
d. Meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggara pelayanan publik.

5. Peningkatan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan

Permasalahan lingkungan merupakan problem multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan di kabupaten Tabalong masih relatif rendah hal ini tercermin pada Indeks Kualitas Lingkungan hanya mencapai 65,2 % di tahun 2021, dimana kualitas lingkungan ini juga akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, baik saat ini manusia maupun di masa mendatang.

Pada tahun 2021 persoalan banjir masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian di beberapa wilayah di Kabupaten Tabalong yang menjadi titik rawan terdampak banjir.

Hingga Tahun 2022 persoalan Banjir masih menjadi permasalahan di Kabupaten Tabalong , yakni adanya daerah daerah yang terdampak banjir terutama pada musim penghujan terutama pada daerah dataran rendah serta di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Tabalong.

Terkait dengan persoalan peningkatan tata kelola lingkungan di Kabupaten Tabalong, alternatif penanganannya melalui strategi :

a. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup, dan penanganan persampahan.
b. Memperkuat kesiapan sumber daya penanggulangan darurat dan mitigasi bencana.
c. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 2.163
Isu dan Permasalahan Strategis

No	Isu Strategis	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pemanfaatan pertanian sebagai potensi pariwisata belum maksimal	Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian dan perikanan untuk mendukung agrowisata. daerah.
		Belum optimalnya pengelolaan budaya lokal sebagai objek wisata	Peningkatan usaha pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan
		Belum maksimalnya keterampilan dan keahlian calon tenaga kerja yang siap pakai	Peningkatan keterampilan calon tenaga kerja.
		Melambatnya pertumbuhan UMKM dan Wira Usaha Baru	Peningkatan jumlah dan kelas Wira Usaha Baru (WUB), serta peran UMKM.

No	Isu Strategis	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum optimalnya transformasi Struktur Ekonomi Daerah.	Optimalisasi transformasi struktur ekonomi daerah;
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih adanya prevalensi *stunting.*	Penurunan angka Stunting, AKI dan AKB.
		Masih adanya penyakit tidak menular (stroke, jantung, diabetes).	*Universal Health Caverage (UHC)*/ Jaminan Kesehatan Nasional.
		Masih terdapat Penyakit menular (DBD, Malaria, TBC).	Peningkatan SDM dan Prasana Kesehatan.
		Terbatasnya sumber daya dan belum optimalnya manajemen pelayanan kesehatan.	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan dan kualitas SDM.
		Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dalam menyediakan dan melayani sektor pendidikan dan kesehatan.	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan.
		Masih rendahnya produktivitas dan daya saing angkatan kerja.	Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui peningkatan kompetensi dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
		Masih kurangnya keahlian dan keterampilan calon tenaga kerja dan Wira Usaha Baru.	Peningkatan Keahlian dan keterampilan calon tenaga kerja dan Wira Usaha Baru.
		Daya Saing SDM Masih belum optimal	Meningkatkan Daya saing SDM
3	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	Kurangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mendukung perekonomian wilayah, dan infrastruktur dasar di daerah terpencil dan perbatasan.	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur untuk mendukung perekonomian wilayah, dan infrastruktur dasar di daerah terpencil dan perbatasan.
		Kurang tertatanya kota dan lingkungan permukiman.	Penataan kota dan lingkungan permukiman.

No	Isu Strategis	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Perlunya Kesiapan Kabupaten Tabalong dalam Menyambut Ibukota Negara Baru	Persiapan dalam Perpindahan Ibu Kota Negara.
4	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan penanganan persampahan.
			Meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam
		Rawan terjadinya bencana banjir dan kebakaran hutan.	Memperkuat kesiapan sumber daya penanggulangan darurat dan mitigasi bencana.
5	Penyelenggaraan Pembangunan yang berwawasaan Lingkungan	Belum optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan aparatur pelayanan publik.
		Belum optimalnya pelaksanan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pengendalian dan evaluasi, serta sinergitas program dan kegiatan antar perangkat daerah.
		Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Masih Kurang	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Secara umum perekonomian daerah menggambarkan kondisi ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi ekonomi daerah merupakan dasar untuk menyusun kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah digunakan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tabalong memuat kondisi ekonomi tahun 2022, prospek tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024 yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

Perumusan arah kebijakan perekonomian sangat penting sebagai landasan untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan, termasuk proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala Daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Dalam hal ini, arah kebijakan ekonomi Daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Daerah tahun 2022, arah kebijakan perekonomian nasional dan provinsi tahun 2024, kondisi ekonomi saat ini yang mungkin mempengaruhi kebijakan tahun 2024, serta peluang dan tantangan yang diperkirakan turut mempengaruhi perekonomian Daerah di tahun 2024.

3.2.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi Daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai tambah bruto/ nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu Daerah dalam periode tertentu.

Nilai PDRB Kabupaten Tabalong atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 29,17 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 9,24 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 19,93 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya kondisi perekonomian kabupaten Tabalong setelah melandainya pandemi covid-19. Upaya pemulihan ekonomi berdampak pada peningkatan produksi di semua kategori lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 14,95 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 15,74 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 perekonomian Kabupaten

Tabalong semakin menggeliat hingga mengalami pertumbuhan sampai 5,30 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi pada banyak lapangan usaha, tanpa mempertimbangkan pengaruh inflasi.

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ritme ekonomi global membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Perekonomian Kabupaten Tabalong sebagai salah satu bagian dari perekonomian nasional juga menerima dampak dari pergerakan ekonomi global. Sektor lapangan usaha pertambangan (batubara dan minyak bumi) yang menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong sangat dipengaruhi oleh arus perdagangan (ekspor) sehingga rentan terhadap krisis global.

Kemajuan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah, salah satunya dengan melihat seberapa besar suatu daerah dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi.

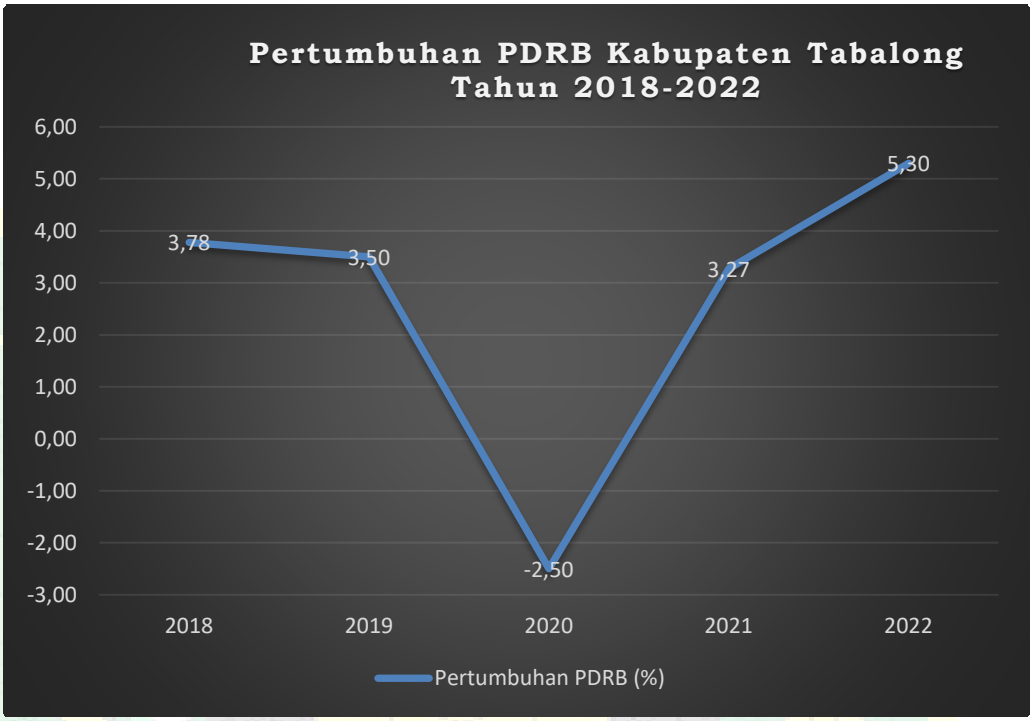
Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Dari tahun 2018 hingga 2019 terus tumbuh positif. Pada tahun 2020, perekonomian dunia mengalami *shock* akibat adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali kabupaten Tabalong. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan, berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif dimana hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Pertumbuhan Kabupaten Tabalong Tahun 2022 sebesar

5,30 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Tabalong dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tabalong
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018 – 2022 (persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,27	1,91	-1,99	2,71	2,88
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,72	1,01	-4,13	1,38	5,57
3.	Industri Pengolahan	5,69	3,37	-3,50	5,30	5,01
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,54	8,34	4,71	4,74	7,85
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,30	7,31	7,52	4,46	3,34
6.	Konstruksi	7,86	7,59	-1,83	5,34	4,49
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,47	9,48	-2,30	8,80	8,13
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,30	9,13	-4,47	4,45	5,74
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,15	11,02	-0,91	7,59	7,42
10.	Informasi dan Komunikasi	11,03	9,57	8,02	8,41	8,66
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,00	5,51	2,52	2,46	1,38
12.	Real Estate	6,23	8,82	3,16	5,24	6,26
13.	Jasa Perusahaan	7,00	6,85	-1,35	7,85	5,06
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,77	5,68	-0,77	0,47	-0,28
15.	Jasa Pendidikan	6,91	7,95	-0,78	3,04	4,27
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,89	6,02	7,22	9,71	7,30
17.	Jasa Lainnya	11,20	10,81	-2,53	5,86	7,39
	PDRB	**3,78**	**3,50**	**-2,50**	**3,27**	**5,30**

***) Angka sementara**
****) Angka sangat sementara**
Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong, 2023



Gambar 3.1
Grafik Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2022

Berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif dimana hampir semua lapangan usaha terus tumbuh positif di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2022 sebesar 5,30 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ini lebih tinggi daripada tahun 2021. Peningkatan kinerja perekonomian ini ditopang oleh tetap kuatnya permintaan eksternal di tengah berlanjutnya konflik Rusia – Ukraina, terjaganya pasokan batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO) untuk kebutuhan dalam negeri, tingginya harga komoditas, serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring kasus Covid-19 yang semakin melandai. Selain itu kontribusi peningkatan aktivitas sektor lain turut serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Tabalong Tahun 2022, seperti sektor pertanian, sektor industri lain, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi,

penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan, dan jasa lainnya.

Lapangan usaha pertambangan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar masih tumbuh positif, dimana komoditas didalamnya yaitu pertambangan batubara tumbuh positif. Tingginya permintaan batubara mendorong tingginya ekspor batubara. Harga batubara yang tinggi di tahun 2022 juga memicu meningkatnya kinerja pertambangan batubara.

Bidang pertanian juga menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kinerja industri juga menunjukkan peningkatan, dimana beberapa industri besar bisa meningkatkan produksinya di tahun 2022 ini antara lain industri makan dan minum, industri karet, dan industri barang galian bukan logam (semen).

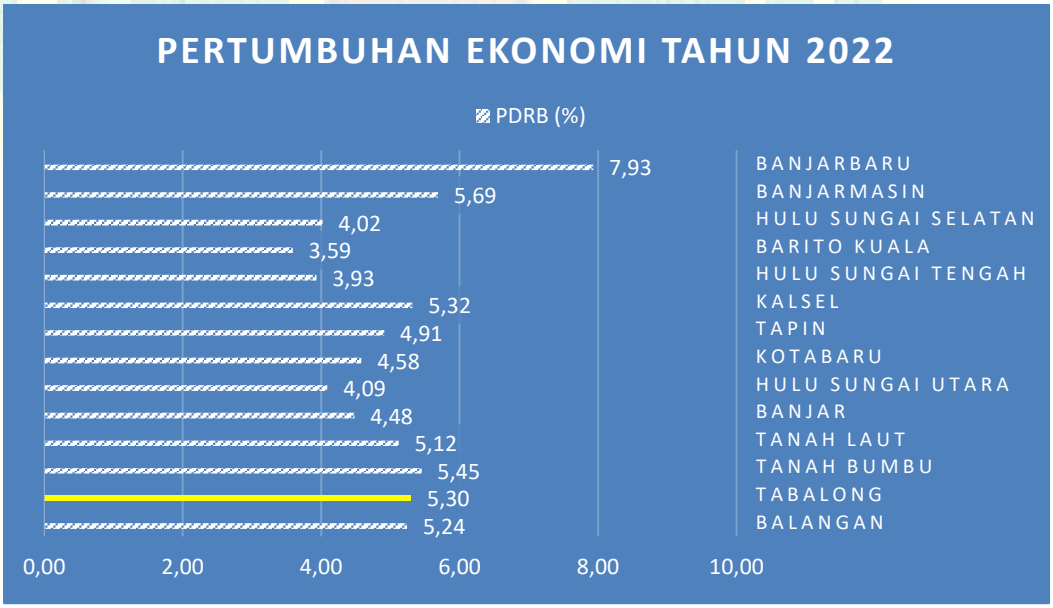
Jika dilihat dari pertumbuhannya, tiga lapangan usaha yang tumbuh positif dan memiliki pertumbuhan terbesar adalah informasi dan komunikasi (8,66 persen), perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (8,13 persen) dan pengadaan listrik (5,57 persen). Peningkatan kinerja di bidang informasi komunikasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya peningkatan permintaan pemasangan instalasi indihome, serta adanya pemasangan tower baru telkom di Kabupaten Tabalong. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat produk jaringan internet baru dari PLN yang sedang banyak diminati masyarakat. Fenomena lain yang juga mendukung peningkatan kinerja perekonomian di bidang informasi dan komunikasi adalah banyaknya inovasi-inovasi berbasis tekonologi informasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

Pada tahun 2022, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi mobil dan Sepeda Motor juga mengalami

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini terjadi karena kenaikan penjualan kendaraan baru pada tahun 2022. Selain itu, terdapat banyak outlet/toko baru khususnya toko sembako. Hal lain yang mendukung peningkatan sektor ini adalah banyaknya pameran/expo yang diselenggarakan pada tahun 2022 mendorong peningkatan penjualan pada sektor perdagangan.

Sektor listrik juga mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Percepatan ini terjadi karena peningkatan produksi dan penyaluran listrik di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022. Selain itu nilai investasi pada sektor listrik juga mengalami peningkatan pada tahun 2022.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong berada di posisi ke lima tertinggi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan.



Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023

Gambar 3.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Kabupaten/Kota

3.1.1.2. Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/*rebalancing* dalam perekonomian wilayah. Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa sektor lapangan usaha pertanian dan pertambangan/penggalian, kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa sektor lapangan usaha industri dan jasa. Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama, namun pada prakteknya kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Kondisi seperti di atas, tampak berlangsung di Kabupaten Tabalong. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020, terjadi penyusutan distribusi PDRB kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; dan kategori pertambangan dan penggalian secara konsisten. Penurunan terlihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun di tahun 2021 – 2022 mengalami peningkatan menjadi 54,01 dan 65,79

persen. Peningkatan pangsa sektor primer tersebut diikuti oleh menurunnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Proses ini mencerminkan bahwa perlu lebih banyak pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah untuk mengurangi dominasi kategori pertanian dan pertambangan/penggalian di Kabupaten Tabalong dalam penciptaan nilai tambah.

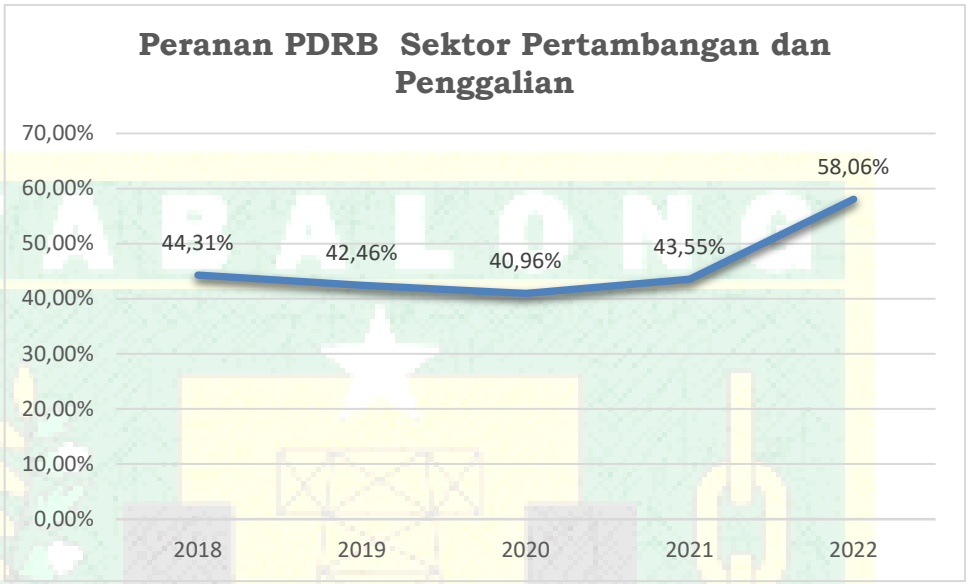
Tabel 3.2
Peranan PDRB Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (%)

No.	Lapangan usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,01	10,87	11,05	10,46	7,73
2	Pertambangan dan Penggalian	44,31	42,46	40,96	43,55	58,06
3	Industri Pengolahan	8,95	8,87	8,95	8,65	6,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,30	0,33	0,31	0,22
6	Konstruksi	6,20	6,54	6,58	6,32	4,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,29	8,82	8,98	8,81	6,86
8	Transportasi dan Pergudangan	2,22	2,38	2,37	2,22	1,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,59	1,73	1,78	1,74	1,30
10	Informasi dan Komunikasi	4,31	4,59	4,94	4,79	3,64

No.	Lapangan usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,97	2,02	2,14	2,04	1,52
12	Real Estat	1,23	1,31	1,40	1,33	0,99
13	Jasa Perusahaan	0,31	0,33	0,34	0,33	0,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Jawib	4,14	4,24	4,40	3,99	2,77
15	Jasa Pendidikan	3,66	3,89	4,03	3,77	2,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,77	0,86	0,86	0,63
17	Jasa Lainnya	0,75	0,82	0,84	0,80	0,61
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2023.

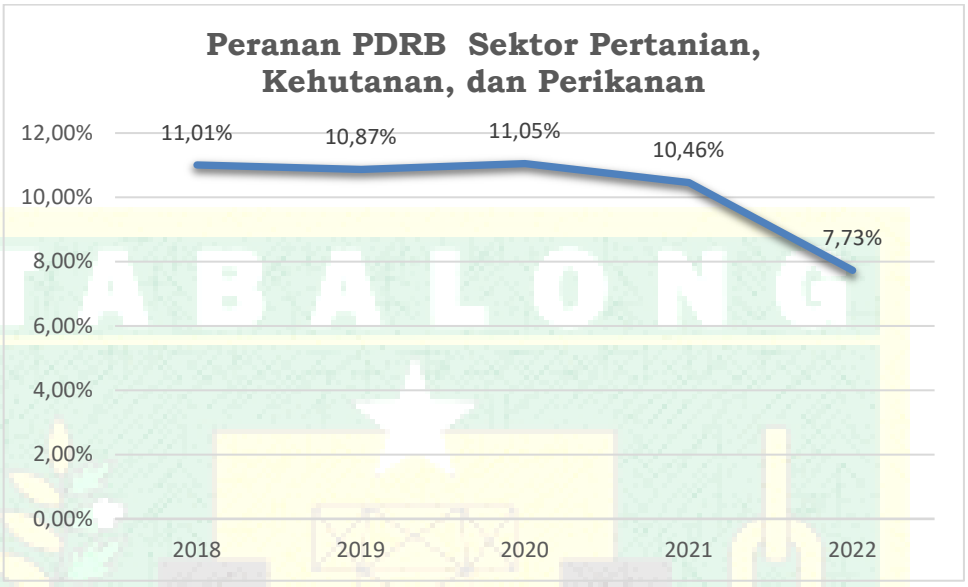
Postur ekonomi (dilihat dari distribusi PDRB) Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Tabalong masih didominasi oleh sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini terlihat dari besarnya pangsa kategori pasar usaha pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 65,79 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun 2022. Besarnya distribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ini karena didukung oleh adanya wilayah produsen komoditas pertambangan batu bara dan minyak bumi yang ada di Kabupaten Tabalong.



Gambar 3.3
Peranan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2018-2022

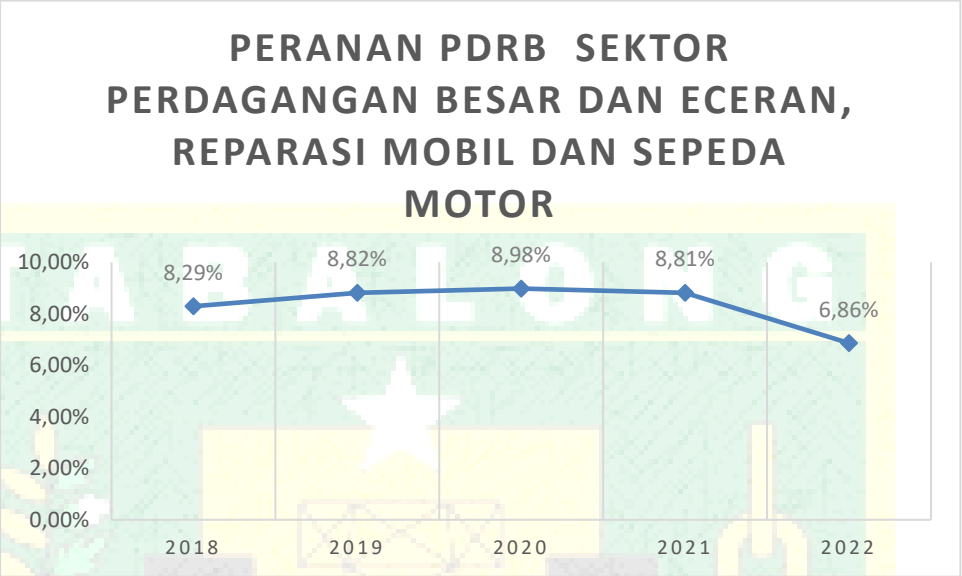
Berdasarkan data pada Tabel 3.2, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tabalong selama lima tahun terakhir (2018-2022) dengan rata-rata mencapai 45,87 persen. Sektor tersebut sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Kabupaten Tabalong dengan ekonomi global, mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Kabupaten Tabalong mengalir melalui keran ekspor ke Cina, India, dan Jepang.

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua setelah pertambangan terhadap perekonomian Tabalong. Sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Tabalong di tahun 2022 adalah sebesar 7,73 persen, nilai ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 10,46 persen.



Gambar 3.4
Peranan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2018-2022

Data distribusi PDRB Kabupaten Tabalong memperlihatkan bahwa kategori perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Sejak 2020 kategori lapangan usaha perdagangan menggeser lapangan usaha industri pengolahan yang sebelumnya berada diurutan ketiga. Kontribusi kedua kategori tersebut memang tidak berbeda jauh, pada tahun 2022 kontribusi lapangan usaha industri pengolahan adalah 6,33 persen dan lapangan usaha perdagangan adalah 6,86 persen. Namun proposi ini lebih kecil dibandingkan tahun 2018-2021, hal ini terjadi karena besarnya peningkatan proporsi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2022.



Gambar 3.5
Peranan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018-2022

3.1.1.3. PDRB Per kapita

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi hanyalah sasaran antara bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena dilatarbelakangi oleh aspek multidimensi. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, di antaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Negara maju rata-rata memiliki PDB per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Menurut klasifikasi World Bank yang telah diperbarui pada pertengahan tahun 2021, negara yang berpendapatan per kapita kurang dari $1.046 dikategorikan sebagai negara

berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan per kapita antara $1.046–$4.095 termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.096–$12.695 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi dan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari $12.695 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

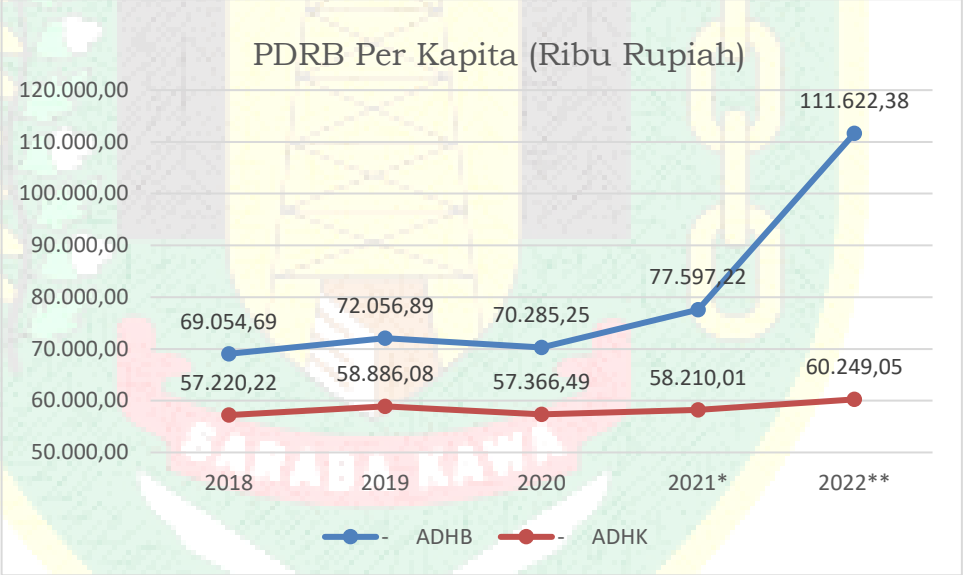
Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
- ADHB	17.319,54	18.175,41	17.742,46	19.934,96	29.172,84
- ADHK	14.351,35	14,853,25	14.481,31	14.954,33	15.746,27
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	69.054,69	72.056,89	70.285,25	77.597,22	111.622,38
- ADHK	57.220,22	58.886,08	57.366,49	58.210,01	60.249,05
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2,24	2,91	-2,58	1,47	3,50
Jumlah penduduk (ribu orang)	250,81	252,24	252,44	256,90	261,35
Pertumbuhan jumlah penduduk (persen)	1,50	0,57	0,08	1,77	1,73

**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2022.

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 3.3. Selama tahun 2020-2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabalong terus meningkat. Pasca pandemi covid-19 PDRB per kapita Kabupaten Tabalong terus mengalami kenaikan. PDRB per kapita harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 111,62 juta rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 261,35 ribu jiwa. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 77,60 juta rupiah dengan jumlah penduduk 256,90

ribu jiwa. Peningkatan ini terjadi karena membaiknya aktivitas perekonomian pada hampir seluruh sektor di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022. Berdasarkan nilai ini, Kabupaten Tabalong masuk ke dalam kategori daerah berpendapatan menengah.

Dari sisi PDRB per kapita konstan, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabalong tumbuh dipercepat selama periode 2018-2019. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB per kapita menurun menjadi negatif. Kemudian di tahun 2021-2022 kembali positif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong serta pemulihan perekonomian pasca adanya pandemi Covid-19.



Gambar 3.6
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2022

3.1.1.4. Potensi Ekonomi Daerah

Potensi wilayah merupakan kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai. Potensi wilayah dapat

dihitung menggunakan metode *location quotient* (LQ), *shift-share*, dan tipologi Klassen.

Berdasarkan ketiga metode tersebut, sektor unggulan di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Sektor Unggulan Kabupaten Tabalong

No	Sektor	Metode				Kesimpulan
		LQ	Shift Share		Tipologi Klassen	
			Psij	Dsij		
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	-	+	4	Potensial, memiliki daya saing
2.	Pertambangan dan Penggalian	+	-	-	2	Unggulan, tertekan
3.	Industri Pengolahan	-	-	+	4	Potensial, memiliki daya saing
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	+	-	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
6.	Konstruksi	-	+	-	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
8.	Transportasi dan Pergudangan	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
10.	Informasi dan Komunikasi	+	+	+	1	Unggulan
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
12.	Real Estate	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
13.	Jasa Perusahaan	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	+	-	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
15.	Jasa Pendidikan	-	+	-	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat
17.	Jasa lainnya	-	+	+	4	Potensial dengan pertumbuhan pesat

Sumber : Masterplan Ekonomi Kabupaten Tabalong, 2020.

3.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Secara keseluruhan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini didukung oleh perbaikan ekonomi global dan domestik secara gradual, seiring program vaksinasi COVID-19

yang terus berlanjut, di tengah peningkatan risiko konflik Rusia – Ukraina.

Mengusung tema **"Penguatan Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas"**, arah kebijakan daerah Kabupaten Tabalong tahun 2024 diselaraskan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengangkat tema pembangunan yakni **"Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"** dengan berdasar pada kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diarahkan untuk membangun Kalimantan Selatan *MAJU* (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara, dan berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi yakni dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan (sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui) ke arah sektor sumber daya alam yang bisa diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hilirisasi industri dan perdagangan, dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Arah kebijakan dimaksud juga sejalan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang mengusung tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan didukung 7 prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 (Pemilu)

Selain mempedomani kebijakan pusat dan daerah diatas, arah kebijakan ekonomi Daerah juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa mendorong maupun yang mungkin menjadi ancaman bagi pembangunan perekonomian Daerah.

Pelaksanaan pembangunan di masa pandemi COVID-19 membawa beberapa konsekuensi yang mengandung resiko. Berlangsungnya pandemi Covid 19 sejak tahun 2020 menuntut adanya perubahan pola interaksi baik dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Masyarakat menyesuaikan dengan tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) agar dapat tetap produktif dan terhindar dari risiko penularan COVID-19. Berbagai kebijakan pun masih diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan vaksinasi. Di kabupaten Tabalong sendiri, sampai akhir tahun 2022 tingkat vaksinasi sudah mencapai 62,60%. Semakin tinggi tingkat vaksinasi diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan

diri masyarakat dalam melakukan kegiatan, khususnya perekonomian.

Tantangan lainnya yaitu krisis global yang dipicu oleh perkembangan geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung. Dampak dari perang tersebut kemudian menimbulkan *spillover* dalam bentuk kenaikan barang-barang terutama energi dan pangan dan terjadinya *supply disruption* sehingga memicu peningkatan inflasi secara global. Ditengah gangguan rantai pasok dan kebijakan bank sentral negara maju yang masih cenderung *hawkish* (lebih memprioritaskan tingkat inflasi yang rendah dibanding pertumbuhan ekonomi), perekonomian global diperkirakan masih akan mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi India sebagai salah satu negara mitra dagang utama juga diprakirakan melambat sehingga berdampak pada turunnya permintaan batubara dan CPO. Perlambatan ekonomi global juga diperkirakan terjadi pada konsumsi rumah tangga, sejalan dengan motif berjaga-jaga masyarakat ditengah potensi resesi perekonomian global. Meskipun demikian, perekonomian Tiongkok diprakirakan akan meningkat seiring dengan penghapusan kebijakan Nol-Covid *(Zero Covid Policy*) yang diprakirakan dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi global sekaligus berpotensi menahan penurunan permintaan komoditas dari negara mitra dagang utama di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan prakiraan oleh Bank Sentral Indonesia, Perekonomian Nasional dan Perekonomian Kalimantan Selatan sendiri diprakirakan masih akan tumbuh positif pada tahun 2023 dan 2024, meskipun masih cenderung melambat jika dibandingkan pada tahun 2022. Konsumsi rumah tangga diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM). Investasi juga diprakirakan akan membaik didorong oleh membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN). Ekspor diprakirakan tumbuh lebih rendah akibat melambatnya ekonomi global, meskipun akan termoderasi dengan permintaan dari Tiongkok.

Berdasarkan data dari Bank Sentral Indonesia, tekanan inflasi secara nasional pada tahun 2022 menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Inflasi pada akhir 2022 tercatat 5,51%, jauh lebih rendah dari prakiraan sesuai dengan *Consensus Forecast* 6,5% pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Tekanan inflasi gabungan tiga kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalimantan Selatan (Banjarmasin, Kotabaru, Tanjung) diperkirakan berangsur menurun pada tahun 2023 dan 2024, sejalan dengan normalisasi harga energi dan komoditas strategis global. Disamping itu, kebijakan suku bunga Bank Sentral untuk mempertahankan suku bunga ketat dalam beberapa waktu diperkirakan akan mampu meredam tekanan inflasi. Dalam hal ini penguatan koordinasi pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Rencana kepindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur juga harus disikapi dengan bijak karena posisi Kabupaten Tabalong akan berbatasan langsung dengan lokasi Ibukota Negara. Pembangunan Ibukota Negara pastinya akan memancing pembangunan besar-besaran disemua sektor ekonomi serta menjadi magnet masyarakat untuk berdatangan mencari pekerjaan dan tempat tinggal.

Di satu sisi keberadaan Ibukota Negara merupakan peluang bagi perkembangan daerah, namun jika tidak

diantisipasi dengan baik, banyak permasalahan yang membayangi.

Peluang yang bisa ditangkap antara lain pembangunan sektor industri serta perdagangan dan jasa, menjadikan Daerah sebagai penyuplai bahan pangan serta permukiman bagi pekerja. Semuanya akan menjadi pemicu bergeraknya roda perekonomian. Sedangkan resiko yang harus diantisipasi antara lain migrasi yang tidak terkendali, pengangguran, permukiman kumuh, kemiskinan, peningkatan kriminalitas, pencemaran lingkungan, meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) serta berkurangnya lahan pertanian dan daerah tangkapan air.

Selain berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur yang juga lokasi calon Ibukota Negara baru, secara geografis Kabupaten Tabalong juga berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Tengah. Artinya secara lokasi, kabupaten Tabalong sangat strategis. Hal ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun harus diingat juga, bahwa setiap Daerah itu bersifat terbuka. Akses dari dan ke Kabupaten Tabalong tidak bisa dibatasi. Berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat, dimana arus orang dan barang lintas negara bisa dikendalikan baik melalui kebijakan imigrasi, kebijakan bea cukai, kebijakan ekspor-impor dan kebijakan lainnya, pemerintah Daerah tidak bisa mengendalikan arus orang dan barang antar daerah. Jika tidak bisa menawarkan nilai tambah, maka keuntungan lokasi ini menjadi sia-sia.

Di tengah komitmen Indonesia dan dunia menuju *Green energy*, kabupaten Tabalong juga perlu mendorong hilirisasi berbagai industri unggulan sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2018-2038 demi mewujudkan *sustainable economy*. Hilirisasi industri juga memungkinkan Kabupaten Tabalong untuk mengambil peran sebagai pemasok

barang jadi atau setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan di Ibukota Negara. Hal ini perlu diiringi dengan penguatan daya saing sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur di daerah untuk memberikan dampak positif terhadap konektivitas yang terintegrasi dengan Ibukota Negara.

Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 juga diyakini akan memberikan kontribusi positif pada perekonomian. Dorongan itu bersumber dari belanja kampanye dan penyelenggaraan pemilu yang dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan pemerintah pada berbagai sektor seperti ritel, garmen, media, logistik, serta transportasi. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak dalam rangka turut serta memelihara stabilitas politik dalam negeri.

Tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang dimulai sejak bulan Juni tahun 2022 diyakini juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak dalam rangka turut serta memelihara stabilitas politik dalam negeri.

Berdasarkan telaahan diatas, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tabalong dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus Tahun 2022, sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling besar yaitu 48,28% jauh lebih besar daripada sektor manufaktur (16,73%) dan jasa (34,99%) oleh sebab itu diperlukan penguatan sektor pertanian, terutama penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan pertanian dan perlindungan terhadap resiko bencana, baik bencana alam seperti banjir dan kebakaran lahan, maupun bencana pertanian seperti hama dan penyakit. Pekerja sektor pertanian umumnya terkonsentrasi di wilayah perdesaan sementara

sektor perdagangan dominan di wilayah perkotaan. Hal ini wajar mengingat lahan pertanian lebih banyak berada di wilayah perdesaan.

2. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan, namun *multiplier effect* dari adanya aktifitas pertambangan akan dioptimalkan sepenuhnya. Orang-orang yang bekerja, mencari nafkah, memperoleh penghasilan dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Tabalong diupayakan agar menggunakan uangnya juga di Kabupaten Tabalong.
3. Penguatan sektor perdagangan dan jasa serta mendorong UMKM agar terus berkembang dan semakin maju, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti bergabung ke dalam *marketplace*. Transformasi digital pada usaha perlu dipercepat untuk mengimbangi perubahan gaya hidup masyarakat yang kini serba daring, termasuk dalam urusan membeli barang. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat mulai menyukai belanja secara *online*.
4. Perlu lebih banyak pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah untuk mengurangi dominasi sektor primer (pertanian dan pertambangan/penggalian) di Kabupaten Tabalong dalam penciptaan nilai tambah.
5. Menjadikan perbatasan sebagai simpul ekonomi, khususnya perdagangan. Dalam konteks yang lebih luas, menjadikan Kabupaten Tabalong secara keseluruhan sebagai simpul perekonomian regional. Untuk itu, Kabupaten Tabalong harus menyiapkan diri, seperti menyiapkan *branding* yang bisa memicu agar kegiatan perekonomian di Kabupaten Tabalong menjadi pilihan dibanding daerah lain di sekitarnya.
6. Dalam hal antisipasi dampak negatif kepindahan Ibukota Negara, penguatan daya saing sumber daya manusia yang inovatif dan penguatan regulasi di Daerah menjadi hal yang utama.

7. Memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perekonomian.
8. Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengantisipasi terjadinya inflasi yang tidak terkendali, termasuk pemberian stimulus jika memungkinkan.
9. Peningkatan kualitas produk dalam daerah sehingga memiliki daya saing.

Sektor lapangan usaha pertambangan (batubara dan minyak bumi) yang menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong sangat dipengaruhi oleh arus perdagangan (ekspor) sehingga rentan terhadap krisis global. Dengan kondisi perlambatan di sisi global, maka arus perdagangan dan investasi, termasuk arus modal di dalam negeri akan terdampak, seiring melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri. Perekonomian Nasional dan Perekonomian Kalimantan Selatan sendiri diprakirakan cenderung melambat jika dibandingkan pada tahun 2022. Sebagai penyeimbang, penguatan sektor pertanian serta sektor perdagangan dan jasa merupakan pilihan yang relevan. Bersama-sama diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 di kisaran 4,0-4,5%.

Karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan tidak sedikit diantaranya merupakan warga miskin, penguatan sektor pertanian juga diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan pada target 5,55% dan mempersempit kesenjangan/ Gini Rasio menjadi pada target 0,30.

Berikut ini merupakan rekapitulasi target indikator makro ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2024, beserta data capaian tahun 2022 dan target pada tahun 2023 sebagai data pembanding.

Tabel 3.5
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	4,00	4,00-4,50
2	Inflasi (%)	5,01	2,0-4,0	3,86
3	Tingkat Kemiskinan (%)	5,87	5,4-5,6	5,55
4	IPM	73,13	74,33	75,07
5	Gini Rasio	0,34	0,288-0,280	0,30
6.	Tingkat Pengangguran (%)	4,46	3,0-3,4	3,05
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,08	71,98	72
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK	n/a	n/a	n/a

Sumber : RKP, Berita Acara Rapat Pelaksanaan Rakortekrenbang Provinsi Kalsel (Pembahasan Target Indikator Makro Daerah 2023)

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 - 2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan akan selalu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu penopang strategi dalam implementasi RKPD yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, kemitraan swasta dan swadaya masyarakat. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu

dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**176.327.889.608**	**217.462.615.352**	**123.33**
	Pajak Daerah	73.920.283.935	74.691.980.857	101.04
	Retribusi Daerah	6.560.454.600	6.767.342.267	103.15
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.800.000.000	13.858.210.657	100.42
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.047.151.073	122.145.081.571	148.87
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.338.560.080.926**	**1.581.534.023.052**	**118.15**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.196.715.730.226	1.383.187.308.959	115.58
	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah	141.844.350.700	198.346.714.093	139,83
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.176.710.373**	**14.304.872.079**	**231.59**
	Pendapatan Hibah	6.176.710.373	14.304.872.079	231.59
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan	-	-	
PENDAPATAN DAERAH		**1.521.064.680.907**	**1.813.301.510.483**	**119,21**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2023)

Secara umum pendapatan daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 mencapai Rp**.** 1.813.301.510.483 atau tercapai sebesar 119,21% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.521.064.860.907,-. Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan masih terpengaruh dampak sesudah pandemi Covid-19 maka ditetapkan sebesar Rp 176.327.889.608 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp

187.075.639.850,00. Adapun realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp 217.462.615.352 atau 123,33% dari target yang ditetapkan.

Dalam hal Pendapatan transfer, perhitungan proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2022 menggunakan Perundang-undangan tentang Dana Transfer yaitu sebesar Rp 1.196.715.730.226 dengan realisasi sebesar Rp 1.383.187.308.959 atau 115,58%. Kelebihan realisasi ini didapat dari pendapatan transfer royalti yang diterima atas Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara.

Proyeksi Pendapatan transfer antar daerah tahun 2022 disusun berdasarkan proyeksi data series selama beberapa tahun sebelumnya, ditetapkan target sebesar Rp 141.844.350.700 dengan realisasi sebesar 198.346.714.093 atau 139,83%. Pencapaian realisasi yang melebih target ini didapat dari kenaikan pendapatan bagi hasil pajak baik Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok.

Perkiraan kemampuan penganggaran ditunjukkan oleh peningkatan penerimaan, didasarkan pada pertimbangan bahwa kinerja perekonomian yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi maupun penerimaan non-pajak akan lebih baik. Namun di lain pihak, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya dalam kerangka otonomi daerah masih belum memberi sinyal positif pada penguatan struktur keuangan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk itu, perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan terus meningkat seiring dengan pulihnya perekonomian dari

dampak Pandemi Covid-19 sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak berjalan lebih efektif.

2. Adanya perubahan kebijakan tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
3. Penerimaan royalti dan dana perimbangan bersifat dinamis sehingga perhitungan proyeksi pendapatan harus lebih hati-hati dengan mempertimbangkan tren fluktuasi perekonomian dan isu resesi global.
4. Alternatif pendapatan lain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.

Untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.
2. Berupaya meningkatkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insenstif Daerah (DID).
   - Peluang pembiayaan pembangunan melalui DAK Fisik harus dioptimalkan. SKPD harus meningkatkan kordinasi dengan SKPD ditingkat Provinsi dan menyiapkan kelengkapan yang diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh DAK Fisik
   - DID diberikan untuk Daerah yang berprestasi, oleh karenanya setiap SKPD yang berpeluang untuk mendapatkan DID didorong terus melakukan inovasi.
3. Penyempurnaan dan penguatan paket kebijakan keuangan di Daerah sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 tahun 2022. Melalui penguatan paket kebijakan keuangan daerah

diharapkan mampu memperluas peluang peningkatan pendapatan asli daerah.

Disamping itu untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat juga berasal dari sumber pendanaan diluar APBD untuk mencapai target-target pembangunan sesuai prioritas, misalnya melalui skema KPBU dan dana CSR perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar **Rp 2.006.626.571.084,00** dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi 2024 RPJMD	Proyeksi/Target 2024
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.391.411.195.035**	**236.976.640.084**
	Pajak Daerah	104.016.101.486	81.886.370.000
	Retribusi Daerah	12.187.192.358	6.030.426.800
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.743.275.000	19.800.883.644
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.950.003.906	129.258.959.640
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.143.414.622.285**	**1.629.649.931.000**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.023.191.780.748	1.442.216.565.000
	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah	120.222.841.537	187.433.366.000
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**9.100.000.000**	**140.000.000.000**
	Pendapatan Hibah	9.100.000.000	140.000.000.000
	Dana Darurat	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan	-	-
PENDAPATAN DAERAH		**1.391.411.195.035**	**2.006.626.571.084**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, (SIPD) 2023

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**BELANJA DAERAH**	**1.760.823.705.877**	**1.543.299.817.751**	**87.65**
1.1	**Belanja Operasi**	1.167.987.115.999	1.030.285.620.622	88.21
1.2	Belanja Pegawai	568.649.112.942	493.947.645.587	86.86
1.3	Belanja Barang dan Jasa	550.742.374.124	495.520.144.244	89.97
1.4	Belanja Bunga	4.453.272.616	3.833.967.372	86.09
1.5	Belanja Subsidi	3.265.000.000	748.623.240	22.93
1.6	Belanja Hibah	18.113.456.317	17.310.020.179	95.56
1.7	Belanja Bantuan Sosial	22.763.900.000	18.925.220.000	83.14
2	**Belanja Modal**	393.022.883.349	316.945.108.621	80.64
2.1	Belanja Modal Tanah	12.168.847.125	8.990.906.532	73.88
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.348.185.075	40.788.229.662	73.69
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.029.173.299	45.146.224.974	80.58
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	266.904.976.062	219.980.565.988	82.42
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.571.701.788	2.039.181.465	79.29
2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	
3	**Belanja Tidak Terduga**	5.412.283.529	1.667.695.520	30.81
3.1	Belanja Tidak Terduga	5.412.283.529	1.667.695.520	30.81
4	**Belanja Transfer**	194.401.423.000	194.401.392.988	100.00
4.1	Belanja Bagi Hasil	8.052.000.000	8.052.000.000	100.00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	186.349.423.000	186.349.392.988	100.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong, (SIPD) 2023

Adapun belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka kebijakan belanja tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Pemenuhan Mandatory Spending.
2. Fokus pada Upaya Pencapaian Sasaran dan Prioritas Daerah. Untuk itu dilakukan optimalisasi belanja melalui :
   - Tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran belanja untuk membayar gaji tenaga kontrak/tenaga honorarium

baru (pegawai non-PPPK) sebagaimana telah diatur dalam pasal 96 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan serta memperhitungkan gaji 14 bulan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai kebutuhan;
- Sumber dana yang berasal dari DBH dan PAD untuk belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) diperuntukkan untuk belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar dan belanja untuk urusan pemerintahan pilihan, belanja untuk urusan pemerintahan, belanja untuk penunjang urusan pemerintahan, belanja untuk urusan pengawasan urusan pemerintahan, belanja untuk urusan kewilayahan dan belanja untuk pemerintahan umum;
- Merasionalisasikan anggaran perjalanan dinas, belanja makan minum rapat/ aktivitas lapangan/ tamu, pemeliharaan kendaraan (suku cadang, biaya servis, BBM), pemeliharaan gedung dan peralatan kantor, alat tulis kantor dan belanja modal yang kurang prioritas;
- Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang agar dilakukan secara selektif sesuai rencana Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pemerintah;
- Belanja pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dapat dianggarkan hanya untuk mengganti kendaraan dinas yang sudak tidak layak pakai, kecuali yang bersifat khusus;

- Belanja langganan internet hanya 1 titik dengan kecepatan maksimal 50 Mbps;
- Honor penyelenggara diklat hanya dapat diberikan untuk perangkat daerah yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan diklat;
- Narasumber, moderator, pembawa acara, dirigen dan pembaca doa tidak diperkenankan diberikan honor untuk kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang bersangkutan, kecuali jika berasal dari luar perangkat daerah tersebut;
- Belanja ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, penggandaan dan lain-lainnya yang berkenaan dengan pelayanan perkantoran dipindahkan ke program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dikelola oleh sekretariat;
- Belanja Pengadaan Pakaian bagi ASN (PDH, Batik dan Olahraga) hanya dianggarkan untuk 1 (satu) jenis dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali yang bersifat khusus;
- Belanja wajib mengikat harus dianggarkan penuh untuk 1 tahun.

3. Menyiapkan belanja tak terduga untuk keperluan belanja daerah yang bersifat tidak biasa atau tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, penanganan pandemi, penanggulangan bencana sosial, pendampingan kegiatan yang didanai APBN dan untuk keperluan tak terduga lainnya yang bersifat darurat dan mendesak sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah secara cermat dan terukur.
4. Memberikan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya melalui Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP). TPP diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN

sehingga produktifitas, motivasi, disiplin, dan kinerja meningkat. TPP juga diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria, beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, tempat bertugas, kelas dan nilai jabatan.

5. Melakukan penyesuaian pagu anggaran belanja SKPD pada tahapan penganggaran dalam rangka pencapaian kinerja sesuai tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan dan menyesuaikan kemampuan keuangan yang tersedia.
6. Penyediaan anggaran untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut, maka belanja daerah tahun 2024 direncanakan sebesar **Rp. 2.045.254.065.821,00** dengan perincian belanja sebagai berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

NO	Uraian	Proyeksi 2024 RPJMD	Proyeksi/Target 2024
1	**BELANJA OPERASI**	**1.025.638.393.000**	**1.409.930.690.390**
	Belanja Pegawai	552.126.188.000	752.328.399.299
	Belanja Barang dan Jasa	451.690.735.000	556.538.681.091
	Belanja Subsidi	-	-
	Belanja Bunga	-	6.349.580.000
	Belanja Hibah	11.046.590.000	71.292.030.000
	Belanja Bantuan Sosial	10.774.880.000	23.422.000.000
2	**BELANJA MODAL**	**207.049.189.000**	**397.284.640.642**
	Belanja Modal Tanah	8.581.710.000	21.083.877.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.450.219.000	54.717.391.402
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.413.650.000	47.424.632.588
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.527.060.000	272.601.836.711
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.076.550.000	490.922.941

NO	Uraian	Proyeksi 2024 RPJMD	Proyeksi/Target 2024
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	965.980.000
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**22.873.640.000**	**16.787.247.789**
	Belanja Tidak Terduga	22.873.640.000	16.787.247.789
4	**BELANJA TRANSFER**	**194.521.045.000**	**221.251.487.000**
	Belanja Bagi Hasil	9.608.700.000	8.709.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan	184.912.345.000	212.542.487.000
PROYEKSI BELANJA DAERAH		**1.450.082.267.000**	**2.045.254.065.821**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPD), 2023

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tabalong terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Tabalong.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**258.759.025.949**	**243.377.103.949**	**94,06**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.759.025.949	138.759.025.949	100,00
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	120.000.000.000	104.618.078.000	87,18
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**19.000.000.000**	**18.000.000.000**	**94,74**
2.1	Penyertaan Modal	19.000.000.000	18.000.000.000	94,74
2.2	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	
PEMBIAYAAN NETO		**239.759.025.949**	**225.377.103.949**	**94,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan daerah tahun 2024 adalah :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diasumsikan berfluktuatif setiap tahun dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diprediksikan mengalami penurunan dari tahun 2024.
3. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar pokok hutang atas pinjaman pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian *(prudential)*.
3. Menyiapkan anggaran untuk pembayaran cicilan pokok utang yang akan jatuh tempo.

Pembiayaan Kabupaten Tabalong tahun 2024 akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan dapat dilakukan dengan pinjaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, proyeksi pembiayaan daerah tahun 2024 direncanakan sebesar **Rp 38.627.494.737,00** dengan penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 81.322.997.198,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 42.695.502.461,00 yang bersumber dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp 16.540.987.145,00 dan Rp 26.154.515.316,00 untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024

NO	Uraian	Proyeksi 2024 RPJMD	Proyeksi/Target 2024
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**83.671.071.965**	**81.322.997.198**
1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	83.671.071.965	81.322.997.198
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**25.000.000.000**	**42.695.502.461**
2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	16.540.987.145
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	26.154.515.316
PROYEKSI PEMBIAYAAN NETTO		**58.671.071.965**	**38.627.494.737**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPD), 2023

3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

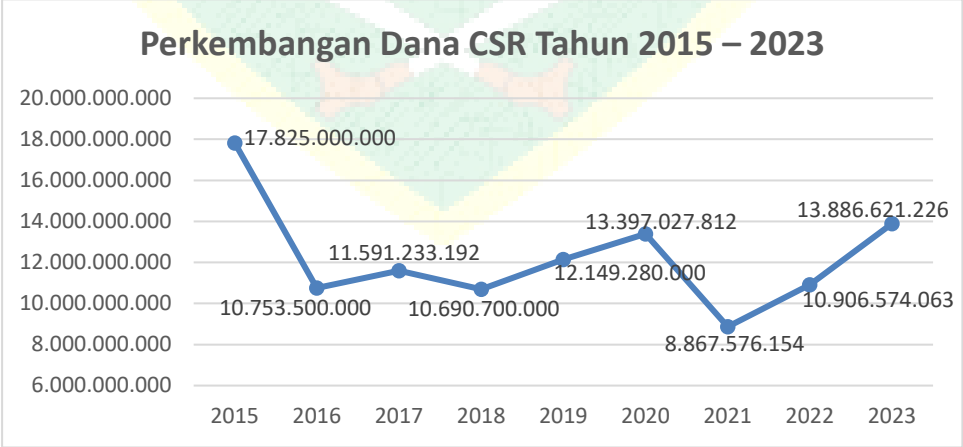
Pencapaian target kinerja pembangunan daerah dari tahun ketahun diharapkan terus mengalami peningkatan dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Kabupaten Tabalong mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah melalui sinergi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), untuk perkembangan CSR dari tahun 2015-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.12
Perkembangan Dana CSR Tahun 2015 – 2023

Tahun	Jumlah Dana (Rp)	Perusahaan Yang Terlibat
2015	17.825.000.000,-	Adaro Indonesia, SIS, PAMA, BUMA, RA
2016	10.753.500.000,-	Adaro Indonesia, SIS, PAMA, BUMA
2017	11.591.233.192,-	Adaro Indonesia, SIS, PAMA, ATA
2018	10.690.700.000,-	Adaro Indonesia, SIS, BUMA, PAMA
2019	12.149.280.000,-	Adaro Indonesia, SIS, BUMA, PAMA
2020	13.397.027.812,-	Adaro Indonesia, SIS, BUMA, PAMA
2021	8.867.576.154,-	Adaro Indonesia, SIS, BUMA, PAMA
2022	10.906.574.063,-	Adaro Indonesia, SIS, BUMA
2023	13.886.621.226,-	Adaro Indonesia, SIS, BUMA, PPA

Sumber : Bappedalitbang Kab. Tabalong, 2023



Gambar 3.7
Perkembangan Dana CSR Tahun 2015 – 2023

Secara umum perkembangan dana CSR di Kabupaten Tabalong dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi. Fluktuatifnya dana CSR ini terjadi karena naik turunnya harga komoditas batubara di pasar dunia dan berkurangnya kuota produksi setelah berakhirnya masa kontrak salah satu kontraktor tambang sehingga berimbas dan mempengaruhi besaran dana CSR yang dikucurkan. Adapun dana CSR ini dipergunakan untuk mendanai berbagai kegiatan diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain yang juga dinilai penting dalam mengakselarasi tercapainya tujuan ekonomi dan mendorong kemandirian masyarakat.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan yang diimplementasikan dalam kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia sebagai motor penggeraknya. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 bahwa visi pembangunan jangka menengah adalah menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamais, sejahtera dan mandiri yang didukung oleh misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamais, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan upaya yang optimal, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk membuat rumusan strategi dan arah kebijakan terkait pemecahan permasalahan pada tahun sebelumnya dan berdampak panjang bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tabalong, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah, sehingga sasaran jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang disusun berlandaskan RPJPD Tahun 2005-2025 yang selanjutnya

dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Dengan Visi Mewujudkan Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais

Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif.

Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

Indikator : Angka kriminalitas

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 2 : Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan.
   Indikator : Kontribusi pertanian terhadap PDRB
2. Meningkatkan akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten.
   Indikator : - Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah
   - Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
   Indikator : Indeks Ketahanan Pangan

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum.
   Indikator : Persentase penduduk berakses air minum
5. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.
   Indikator : Indeks Desa Membangun
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
   Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7. Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi.
   Indikator : - Persentase UKM aktif
   - Persentase koperasi aktif
   - Kontribusi industri terhadap PDRB
8. Terkendalinya ketimpangan pendapatan.
   Indikator : - Kontribusi perdagangan terhadap PDRB
   - Indeks Gini

Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya serta penerapan IPTEK secara optimal.
   Indikator : - Angka Harapan Hidup
   - Rata-Rata Lama Sekolah
   - Harapan Lama Sekolah
2. Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal.
   Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.
   Indikator : Persentase PPKS yang dilayani

4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   Indikator : - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
   - Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5. Menurunnya tingkat kemiskinan.
   Indikator : Persentase penduduk miskin

Tujuan 4 : Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.

Indikator : - Nilai SAKIP (predikat)
- Opini BPK (predikat)
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
- Tingkat Kemandirian Daerah

4.1. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2024 disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *money follow program* yang dianalisis dari :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024.
2. Analisis Kebijakan Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tabalong.
4. Analisis Kewilayahan.

5. Analisis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Analisis prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

4.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Efek *scars* krisis Covid-19 sebagian besar mengenai sisi produksi di mana menyebabkan penurunan produktivitas perekonomian, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan produktivitas modal/kapital. Sebelum Covid- 19, produktivitas Indonesia menurun selama periode 2010-2019 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 %. Kini pekerjaan rumah yang menjadi fokus pemerintah adalah menaikkan output potensial di mana pertumbuhan tinggi tidak hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi diharapkan terus dinamis dalam jangka panjang.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
   e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
   - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
   - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;

- MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
   - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
   d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

   Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas

4.1.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108

4.1.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
    2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
    3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
    4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
    5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
    2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
    3) penyediaan air untuk pertanian;
    4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
6) pengembangan waduk multiguna.

c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
   2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
   3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
   4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
   2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
   3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
   4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
   5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
   6) pengembangan industri halal.
g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
   2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
   3) pengelolaan impor;

4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
7) peningkatan efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital

PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
   1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
   2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
   3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
   4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) sistem jaminan sosial nasional;
   2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan

3) kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
   2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
   3) peningkatan pengendalian penyakit;
   4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
   5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
      - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
      - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
      - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
      - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
      - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
   2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
   3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
   4) penjaminan mutu pendidikan; dan
   5) peningkatan tata kelola pendidikan.

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;

2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
3) kualitas pemuda.

f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
3) reforma agraria; dan
4) perhutanan sosial.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
4) prestasi olahraga.

PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk

mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan budaya literasi;
2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
    2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
    3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
    4) keselamatan dan keamanan transportasi;
    5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
    6) waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi.
b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) konektivitas jalan;
    2) konektivitas kereta api;
    3) konektivitas laut;
    4) konektivitas udara; dan
    5) konektivitas darat.
c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) transportasi perkotaan; dan
    2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.

d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
   2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
   3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
   2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
   3) fasilitas pendukung transformasi digital.

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penanggulangan bencana; dan
2) peningkatan ketahanan iklim.

c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) pembangunan energi berkelanjutan;
2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
3) pengembangan industri hijau

PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
   2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
   3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
   2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan implementasi manajemen ASN;
   2) transformasi pelayanan publik;
   3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
   4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan keamanan dalam negeri;
   2) penguatan keamanan laut; dan
   3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.1.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026, adapun tema pembangunan pada Tahun 2024 adalah "*Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional*". Dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, maka perlu penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2024 ini menjadi:

"*Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*".

Berdasarkan tema Tahun 2024 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan "Kalsel MAJU" dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.

Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif, dapat digambarkan sebagai berikut:

Daya Saing Daerah	Pembangunan Ekonomi Inklusif
1. Kemampuan Ekonomi Daerah	**Pilar I :** *Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi.* Pertumbuhan dan perkembangan yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja untuk mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif
2. Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	**Pilar II :** *Pemerataan pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.* Pembangunan Ekonomi Inklusif harus memastikan pemerataan ekonomi ke semua lapisan masyarakat, ketimpangan sisi pendapatan dan wilayah dan gender
3. Iklim Berinvestasi	**Pilar III :** Perluasan akses dan kesempatan kerja. Seluruh masyarakat harus mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kabapilitas SDM yang adil dan berkualitas
4. Sumber Daya Manusia	

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 maka fokus utamanya diarahkan pada 2 komponen, yaitu :

1. *Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah.*

   Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif* merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Sedangkan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dititikberatkan pada:

1. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja.
2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Struktur perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi UMKM.

4. Hilirisasi industri, pertanian, pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau

2.1.2.1. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025. Berdasarkan hal tersebut, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

Tabel 4.1 :

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalsel 2024

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 3. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark 4. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital 5. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah 6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2.	PD 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda 3. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS 4. Pengendalian Prevalensi Stunting 5. Penurunan Angka Pernikahan Anak 6. Peningkatan Prestasi Olahraga 7. Pengembangan Budaya Daerah
3.	PD 3: Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah 3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN

4.	PD 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	1. Penguatan Reformasi Birokrasi 2. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif 3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik 4. Pengembangan Satu Data Kalsel 5. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) 6. Pelaksanaan Pilkada Serentak 7. Revitalisasi BLUD
5.	PD 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

2.1.2.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tema, isu strategis dan fokus pembangunan, sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang ingin dicapai digambarkan melalui indikator makro daerah dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,61 – 5,01%.
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,0 – 4,22%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,05 – 4,59%.
4. Rasio Gini sebesar 0,324.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,65.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 71,22.

2.1.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan

prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

A. Indikator Makro Kabupaten Kota.

I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran;

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Laut

4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 66,84 (Kabupaten Hulu Sungai Utara) hingga 79,68 (Kota Banjarbaru). Hal ini menunjukan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan status IPM "Tinggi", dan 6 (enam) kabupaten dengan status IPM "Sedang".

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM status "Sedang", antara lain melalui kejar paket guna mengejar mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

II. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE dan Share Perekonomian kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian LPE

kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran;

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Balangan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarbaru.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian capaian LPE lebih tinggi dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara regional dilihat dengan menganalisis share dan pertumbuhan PDRB dari 13 kabupaten/kota dengan membagi daerah ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai share dan pertumbuhan PDRB masing-masing. Perpotongan sumbu vertikal dan sumbu horizontal merupakan nilai share dan pertumbuhan rata-rata. Artinya kabupaten/kota yang berada di sebelah kanan sumbu vertikal (Kuadran II dan IV) merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan

ekonomi di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang berada di sebelah atas sumbu horizontal adalah kabupaten/kota yang memiliki share perekonomian terhadap Provinsi di atas share rata-rata seluruh kabupaten/kota (kuadran I dan II).

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 dan 2 merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah-daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 1 dimana tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

III. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran;

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding

capaian provinsi dan besar perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan besar perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 62,56 persen hingga 72,54 persen. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga

angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

IV. Persentase Penduduk Miskin.

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyakarat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran.

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar

Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Kotabaru

4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi.

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan dan wilyah yang padat penduduknya.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

V. Indeks Gini.

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar- benar sempurna terjadi. Secara umum, ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2021

dalam kategori rendah sampai moderat. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian indeks gini kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase indeks gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran;

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan besar perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupatan Banjar.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan besar perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan besar perubahan indeks gini dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapin.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong.

VI. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan

cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran.

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih rendah dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupatan Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih tinggi dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi.

B. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mengembangkan dan memperkuat infrastruktur ekonomi pada enam Kawasan pusat

pertumbuhan ekonomi provinsi. Keenam kawasan tersebut terbagi menjadi;

A. Kawasan Pendukung sekitar Ibu Kota Nusantara.

Kabupaten/Kota Lokasi:

- Kawasan Banua Anam (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab.HST, Kab. HSS, Kab. Tapin), dan Sebagian Kab. Kotabaru (Cantung Sengayam).
- Kawasan Industri Batulicin.
- Kawasan Industri Jorong.

Arah Pengembangan:

1. Melengkapi fasilitas pendukung.
2. Mengembangkan infrastruktur strategis.
3. Mengembangkan perdangangan, jasa, industri, dan pariwisata.
4. Investasi pada modal.

B. Kawasan Pusat Perdagangan.

Kabupaten/Kota Lokasi:

Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut (Banjarbakula).

Arah Kebijakan Kewilayahan:

1. Kota Banjarmasin sbg kawasan pusat perdagangan dan jasa.
2. Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar sebagai kawasan unggulan pangan.

C. Kawasan Penyangga Pangan (Kawasan Rawa Batang Banyu)
Kabupaten/Kota Lokasi:
Kabupaten Barito Kuala, Sebagian Kab.Banjar, sebagian Kab. Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sebagian Kabupaten Tabalong.

Arah Kebijakan Kewilayahan:

Peningkatan Produksi Pangan Daerah.

D. Kawasan Strategis Lingkungan dan Pariwisata.

Lokasi: Geopark Meratus dan Loksado

E. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mekar Putih.

Lokasi: Kabupaten Kotabaru.

Arah Kebijakan Kewilayahan:

Optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, terutama dalam menunjang percepatan pembangunan ekonomi Ibukota Nusantara.

F. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lokasi: Wilayah Pesisir.

Arah Kebijakan Kewilayahan:

Mendorong Kalimantan Selatan menjadi sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Dengan memperhatikan distribusi penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota, peran kawasan perkotaan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dibagi menjadi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Kawasan Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula) berperan sebagai pusat di barat daya Kalimantan Selatan, yang fungsinya lebih menjadi gerbang dari aktifitas nasional. Lalu, akan ada jaringan jalan yang ditingkatkan dan juga dibangun sebagai koneksi antar pusat baru antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Masing-masing jalur ini dibentuk agar ada konektivitas untuk distribusi barang logistik bagi IKN dan Food Estate. Dengan koneksi antara Banjarbakula, Kandangan dan Batulicin, maka jaringan jalannya akan berbentuk seperti kupu-kupu yang akan menyatukan semua wilayah di Kalimantan Selatan.

Kandangan yang berdekatan dengan Tanjung, Amuntai, Rantau dan Marahaban fungsinya akan ditingkatkan lagi menjadi titik pusat bergerakan jaringan jalan yang nantinya akan terkoneksi menuju Food Estate dan IKN. Wilayah ini nantinya akan menjadi pusat baru yang lebih berkonsep pada alam karena posisinya yang berada pada jalur sungai dan rawa sehingga tidak memungkinkan untuk direncanakan sebagai kawasan yang padat bangunan dan penduduk dan berperan sebagai pusat di utara Kalimantan Selatan bergabung dengan Tanjung.

Pelabuhan di Kotabaru akan difungsikan untuk menangkap arus barang masuk maupun keluar Kalsel berupa barangbarang dari pasar global sedangkan yang di Banjarmasin hanya akan difokuskan sebagai tempat menangkap arus barang nasional. Lalu dengan adanya KEK Mekar Putih, maka wilayah ini berpotensi untuk menjadi kawasan baru yang

difungsikan menjadi maritime center dan gerbang masuk menuju Pulau Kalimantan maupun yang ingin ke IKN. Mekar Putih, Kotabaru dan Batulicin akan dikonsepkan menjadi Kota Sedang karena dari sistem perkotaan dan jumlah penduduknya sudah memenuhi kriteria. Kedua wilayah ini jika di gabungkan akan lebih fokus pada fungsinya sebagai pusat aktifitas ekonomi dan logistik karena posisi geografisnya yang berada di dekat ALKI II yang berbasis kemaritiman. Selain itu kawasan ini juga bisa menangkap arus barang baik masuk-keluar dari jalur internasional. Maka perannya nanti akan berbeda dengan Banjarmasin (nasional) sedangkan Kotabaru (internasional). Tapi dikarenakan posisi geografisnya yang memiliki cagar alam yaitu Terumbu Karang dan bukan berada di laut dalam, maka harus ada cara agar kapal-kapal besar tidak harus berlabuh di Kotabaru maupun Batulicin. Agar distribusi barang dari Kotabaru ini masuk dan terkoneksi dengan jaringan jalan di Kalimantan Selatan, memungkinkan dibangun jembatan untuk membuat aktifitas di kedua wilayah ini menjadi satu kesatuan

C. Arah Kebijakan Kabupaten Kota.

1. *Kota Banjarmasin.*

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarmasintahun 2023, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Program-program penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Sebagai Kota yang berfokus pada kegiatan penduduknya (Program kegiatan diarahkan ke penataan permukiman, sarana dan prasarana transportasi, perdagangan dan

jasa dan pusat ekonomi).

2. Pengembangan industri pengolahan.
3. Pengembangan dan pembinaan destinasi wisata;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi UKM dan pembinaan wirausaha baru;
5. Dukungan terhadap pembangunan pusat distribusi regional dan pasar rakyat.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan pasar induk dan pusat-pusat distribusi regional;
2. Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan utama;

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

1. Kota Banjarbaru

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarbarutahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMK pendukung pariwisata dan penerbangan
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan wisata budaya Banjar, pendulangan intan, wisata buatan dan pelaksanaan festivalbudaya.

2. Pada bidang koperasi, UMKM dengan pembinaan dan pelatihan menjadi wirausaha baru.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Sebagai bagian dari Metropolitan Banjarbakula dan ibukota provinsi, fungsi dari kota berfokus pada kegiatan permukiman, sarana dan prasarana, transportasi, perdagangan dan jasa dan perkantoran pemerintah.
2. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melanjutkan program/kegiatan SPAM regional dan TPA regional Banjarbakula

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

2. Kabupaten Banjar

Arah kebijakan provinsi untuk perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Banjar tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pariwisata; dan program kejar paket B-C.
2. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pembangunan masyarakat desa; dan pemberdayaan kelompok tani.
3. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
4.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang koperasi UMKM dan perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil hasil hutan.
2. Pada bidang pertanian dengan pengembangan kawasan lahan basahkomoditas unggulan padi dan hortikultura, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tadah hujan, sentra produksi pangan dan sentra agribisnis hortikultura.
3. Pada bidang kehutanan dengan program/kegiatan penyediaan bibit pohon, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya hutan; dan pelaksanaan perhutanan sosial.
4. Pengembangan sentra industri dan perdagangan batu permata

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan pertanahan dengan program/kegiatan penyelesaian TORA; dan sertifikasi lahan hutan.
2. Pengembangan daerah irigasi untuk medukung ketahanan pangan Provinsi dan Nasional dan peningkatan produksi beras lokal berkualitas

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

3. Kabupaten Tanah Laut

Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kab. Tanah Laut Tahun2024, sebagai berikut :

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMKpertanian.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Industri pengolahan, dengan dukungan pada KI Jorong yang telah ditetapkan sebagai proyek prioritas pemerintah;
2. Pengadaan listrik dan gas, dengan dukungan pembangunan PLTU asam-asam unit 5, 6 dan 7; dan dukungan pembangunan PLT Bayu.
3. Bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
4. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; pemantapan pelaksanaan IB; dan pengendalian pemotongan ternak produktif.
5. Bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan peningkatan perikanan tangkap; dan pembangunan unit pengolahan ikan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan/ Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
2. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mangrove, serta infrastrukturpengaman pantai;

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

4. Kabupaten Tanah Bumbu

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. TanahBumbu tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan peningkatan kualitaspembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang perindustrian dengan program/kegiatan pengembangankawasan industri batulicin.
2. Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan dan kelautan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan Batulicin – Banjarbaru;
2. Pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dengan pulau laut; dan pembangunan bendungan kusan;
3. Untuk bidang perhubungan dengan dukungan

pengembangan bandara bersujud; dan dukungan pengembangan pelabuhan

4. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mangrove, serta infrastrukturpengaman pantai.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

5. Kabupaten Kotabaru

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. KotabaruTahun 2024 sebagai berikut:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan mengembangkan Sentra Kelautan Terpadu sebagai upaya peningkatan pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian secara luas;
2. Bidang industri pengolahan, dengan mendukung pengembangan KEKMekar Putih;

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan Industri di dalam Kawasan Ekonomi khusus dan Pelabuhan Utama untuk medukung distribusi hasil industry;
2. Peningkatan Jalan akses menuju KEK Mekarputih, Destiniasi Wisata TelukTamiang dan Pusat Perikanan Terpadu serta infrastruktur pengaman pantai.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

6. *Kabupaten Tapin*

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tapintahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan vokasi/SMK pertanian
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; dan pengembangan budidaya ikan lokal.
2. Pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian untuk bidang koperasi UKM dan perindustrian.
3. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
4. Pengembangan pada kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit, kopi, lada dan karet serta mengembangkan kawasan budidaya peternakan unggas, kambing dan sapi.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan dukungan Pengembangan daerah irigasi bendungan tapin; dan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pelaksanaan festival bamboo rafting; pengembangan akomodasi pendukung pariwisata; penyiapan daya Tarik wisata; dan pengusulan taman nasional loksado.
2. Pada bidang koperasi UKM dan perdagangan dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pendukung pariwisata.
3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu, sentra penghasil hutan non kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat; dan peningkatan jalan kandangan-lumpangi-batulicin.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
2. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian.
3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra

penghasil hutan kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan bendungan batang alai; dan pembangunan pengendali banjir.
2. Pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program/kegiatan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

9. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Arah Kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang kesehatan dengan program/kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pelayanan kesehatan inklusi, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan usia dini.
2. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian; dan program kejar paket b-c.
3. Pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pengentasan

kemiskinan dan darah tertinggal.

4. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; peningkatan produksi daging unggas dan petelur; serta pengendalian pemotongan ternak produktif.
2. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; pengembangan budidaya ikan lokal papuyu dan haruan.
3. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan peternakan dan perikanan.
4. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
5. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan ecotourism swimming buffalo dan orang utan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

10. Kabupaten Balangan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi di Kabupaten Balangan pada tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan tenaga kerja dengan pendidikan vokasi/SMK pertanian dan program kejar paket B-C.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
2. Pada bidang pertanian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

11. Kabupaten Tabalong

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada KabupatenTabalong pada tahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Seradang-Tabalong.
2. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanamanpangan dan hortikultura.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin;
2. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkar barat, jalanakses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN;
3. Pengembangan industri pengolahan hasil tambangan

dan perkebunan.

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

12. Kabupaten Barito Kuala

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Barito Kualatahun 2024, antara lain:

a) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMKpertanian/perkebunan.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

b) Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman; dan pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian.
2. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil hutan, perabot dan kayu.
3. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan dukungan pengembangan jalan lingkar barat kalsel; dan rehabilitasi jalan dan jembatan;

2. Peningkatan Infrastruktur Daerah Irigasi Rawa dan Irigasi Permukaan;
3. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian;

d) Aspek Pengembangan Investasi

1. Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

2.1.3. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2024 terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ditengah pertumbuhan perekonomian yang terus menanjak, dimana pada tahun 2022 Kabupaten Tabalong menjadi salah satu Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-4 diwilayah Kalimantan Selatan. Kendati demikian, situasi isu keamanan global bisa berpengaruh terhadap rantai pasok *(supply chain)* beberapa komoditas yang berdampak pada naiknya harga komoditas tersebut sehingga mempengaruhi keseimbangan pasokan ditingkat internasional yang secara sistemik akan mengganggu pasokan di dalam negeri yang tentu juga akan berpengaruh sampai ke daerah.

Berdasarkan isu strategis di atas, pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin berkualitas melalui pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang produktif dengan memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan stabil dalam jangka panjang sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

Akselerasi kinerja ekonomi daerah dilakukan secara simultan antar sektor terutama dalam meningkatkan kualitas SDM yang

dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat), harus sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha, sampai dengan layanan publik yang baik.

Keterpaduan pembangunan antar pusat dan daerah merupakan kunci utama bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi. Dengan mengacu dan mempertimbangkan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, berbagai isu strategis, tema RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Tahun 2024 disusun sebagai respon kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yakni pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong sehingga tema pembangunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang akan ditetapkan adalah **"Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas".**

Tabel : 4.2
Hubungan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Aspek Daya Saing Daerah	Pilar Ekonomi Bekualitas
1. Aspek Penguat/*Enabling Environment*	1. Kelembagaan 2. Infrastruktur 3. Perekonomian Daerah
2. Aspek Pasar/*Market*	1. Efisiensi Produk 2. Ketenagakerjaan, 3. Akses Keuangan 4. Cakupan Pasar
3. Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*	1. Kesehatan 2. Pendidikan & Keterampilan
4. Aspek Ekosistem Inovasi	1. Dinamika Bisnis 2. Kapasitas Inovasi 3. Kesiapan Teknologi

Daya saing daerah merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan untuk mewujudkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun fokus pembangunan tahun 2024 adalah :

1. Struktur ekonomi yang produktif, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
2. Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, penurunan stunting dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
4. Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Tata kelola lingkungan hidup.

2.1.3.1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Sasaran pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang akan dicapai melalui indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,0 - 4,5 %.
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,55%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,05 %.
4. Rasio Gini sebesar 0,28-0,30.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,07.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,00.
7. Inflasi sebesar 3,86 %.

2.1.3.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dan hasil capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Berdasarkan hal

tersebut, RKPD Kabupaten Tabalong menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut :

PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.

PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.

PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.

PD4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.

PD 5 : Peningkatan Kualitas Iingkungan hidup.

2.1.3.3. Arah Kebijakan Prioritas Daerah

RKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang bertujuan untuk pencapaian sasaran prioritas daerah, di-*breakdown* dalam arah kebijakan prioritas daerah dan akan diterjemahkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024. Berikut adalah arah kebijakan prioritas daerah tahun 2024 :

PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.

- Pengembangan pariwisata lokal beserta ekonomi kreatifnya.
- Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, industri dan UMKM.
- Peningkatan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN.
- Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuhnya wira usaha baru.

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan dasar yang baik dan melalui gerakan masyarakat hidup sehat
- Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.
- Peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- Pengendalian prevalensi stunting.

PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik

- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan logistik sebagai penyangga IKN.

PD 4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima

- Penguatan reformasi birokrasi.
- Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
- Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian
- Pengembangan satu data Tabalong.

PD 5 : Peningkatan Kualitas Iingkungan hidup

- Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup.
- Penataan kota dan lingkungan permukiman.

2.1.3.4. *Major Projects* Prioritas Daerah

Terdapat kegiatan multisektor yang menjadi *major projects* prioritas daerah tahun 2024 baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan tata kelola bencana, sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut *major projects* prioritas daerah tahun 2024:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata dan peningkatan promosi destinasi wisata unggulan.
2. Pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas petani, produksi dan pengolahan hasil serta pemasaran.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan distribusi dan kualitas SDM kesehatan.
4. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam mendorong kreativitas dan sekolah penggerak.
5. Pengembangan pendidikan yang berbasis vokasi sesuai potensi keunggulan daerah untuk mendukung industri 4.0.
6. Pengembangan UMKM melalui kemitraan dan peningkatan skala usaha.
7. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.
8. Peningkatan infrastruktur dasar untuk mewujudkan konektivitas daerah terpencil.
9. Perluasan akses air minum perpipaan.
10. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) serta *Stunting.*
11. Peningkatan sarana dan prasarana/utilitas umum.
12. Pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau serta penguatan tata kelola resiko bencana.

13. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang daerah.

2.1.3.5. Pandangan dan Pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan melalui Pokok-Pokok Pikiran

Dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024, DPRD Kabupaten Tabalong merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan dan kebudayaan
   a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah Pedesaan.
   b. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Urusan Kesehatan
   a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Puskemas, Poskesdes dan Polindes.
   b. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas di daerah kecamatan.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Meningkatkan Pemeliharaan/ Pengembangan Infrastruktur, Irigasi, Sarana dan Prasarana Air dan Pintu Air.
   b. Meningkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daerah Pedesaan
   c. Mengoptimalkan Pemeliharaan, Perbaikan & Pengembangan Bangunan Gedung
   d. Mengoptimalkan Perbaikan/Pemeliharaan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di daerah Pedesaan.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   a. Meningkatkan penanganan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan pemukiman khususnya daerah

kecamatan dan pedesaan terutama penerangan jalan umum.

b. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

5. Urusan Tenaga Kerja
   a. Meningkatkan Penyediaan Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja
6. Urusan Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
   a. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan kegiatan kepemudaan khususnya untuk daerah kecamatan dan pedesaan.
   b. Mengoptimalkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
   c. Pengelolaan obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan obyek wisata budaya secara profesional.
7. Urusan Lingkungan Hidup
   a. Mengoptimalkan Penanganan dan pengelolaan persampahan.
8. Urusan Perhubungan
   a. mengotimalkan Infrastruktur Perhubungan dan Keselamatan Berlalu lintas.
   b. mengoptimalkan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang.
9. Urusan Pertanian
   a. Meningkatkan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura.
   b. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
10. Urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan
    a. Meningkatkan Pembangunan & Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Peternakan.
    b. Mengoptimalkan Penyediaan Bibit & Benih Tanaman Perkebunan.

11. Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah serta Perdagangan
    a. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil.
12. Urusan Sekretariat Daerah
    a. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Ibadah
13. Urusan Komunikasi dan informatika
    a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika.
14. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
    a. Meningkatkan Fasilitas Pencegahan Kebakaran Daerah.
    b. Meningkatkan Fasilitas Pencegahan Bencana Alam dalam Daerah.

2.2. Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Perencanaan pembangunan tahun 2024 pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah melalui proses atau tahapan yang mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RKP Tahun 2024 yang menjadi panduan bagi daerah dalam menyeleraskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan, diharapkan terjadi gerak langkah yang seirama, sehingga pencapaian tujuan pembangunan benar-benar berdampak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata.

Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pusat dengan daerah dilakukan rapat koordinasi dengan Gubernur dalam mendukung Prioritas Nasional terutama yang berkaitan dengan

Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)*. Proses atau tahapan untuk menjaring usulan dari Kabupaten/Kota yang mendukung proyek prioritas hasil rapat koordinasi Gubernur dilakukan pada tahap rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan, di mana pada tahapan sebelumnya di tingkat provinsi telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan melalui rapat koordinasi teknis antar instansi/lembaga yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjaring isu strategis, tema, strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Tahun 2024 melalui Musrenbang Provinsi.

Sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah sehingga dapat mempercepat target pencapaian pembangunan.

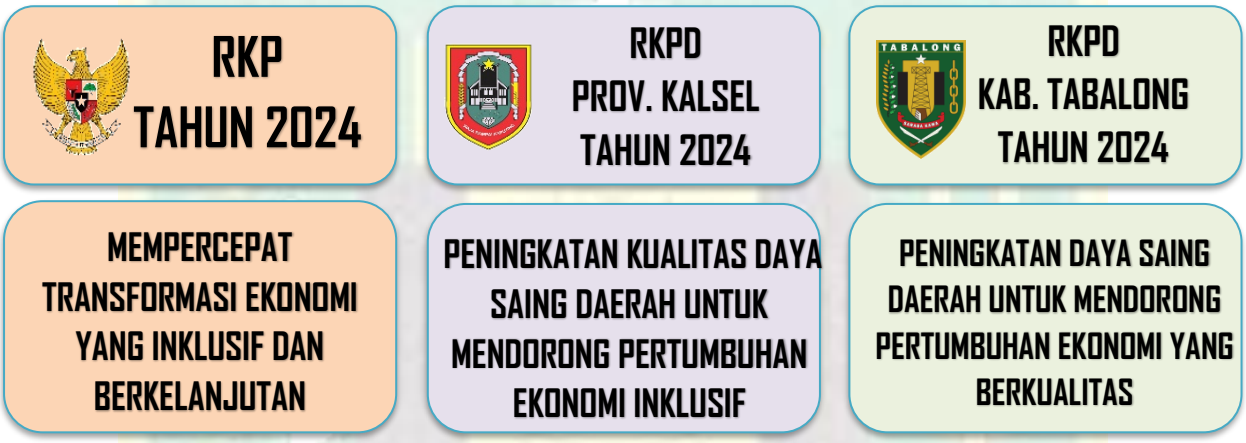
Berdasarkan hal tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024, serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 melalui harmonisasi pada tahapan penyusunan perencanaan sehingga sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan pusat dan daerah.

Pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana sudah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah sekitar serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor Jasa.

Kabupaten Tabalong yang secara geografis berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota negara baru tentunya akan menerima berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Terkait hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Tabalong harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi, diantaranya dengan memperkuat prasarana infrastruktur untuk mendukung konektivitas, meningkatkan kualitas SDM yang inovatif dan berdaya saing serta mengantisipasi berbagai dampak negatifnya secara lebih dini.

Keterkaitan Tema RKP 2024 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan Tema RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai berikut :



Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Tabalong dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Sinergitas Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Tabalong

PRIORITAS NASIONAL 2024	PRIORITAS PROVINSI KALSEL 2024	PRIORITAS TABALONG 2024	Jumlah Program	Jumlah SKPD Pelaksana	Jumlah Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.	30	5	28.943.739.811
PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 3: Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.	7	2	136.575.488.374

PRIORITAS NASIONAL 2024	PRIORITAS PROVINSI KALSEL 2024	PRIORITAS TABALONG 2024	Jumlah Program	Jumlah SKPD Pelaksana	Jumlah Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.	15	7	142.988.331.288
PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.	18	9	42.730.605.100
PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 3: Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.	6	4	227.813.283.014
PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PD 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	PD 5 : Peningkatan Kualitas lingkungan hidup.	14	5	66.387.620.490
PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	PD 4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.	39	Semua SKPD	1.399.814.997.744
Jumlah			**129**	**41**	**2.045.254.065.821**

Sumber : Bappedalitbang - Analisa, 2023

Sedangkan keterkaitan target dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Target dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

No	Uraian	Target		
		Nasional	Prov. Kalsel	Kab.Tabalong
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,7	4,6 - 5,0	4,0-4,5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	4,40 - 4,22	5,55

No	Uraian	Target		
		Nasional	Prov. Kalsel	Kab.Tabalong
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	4,05	3,05
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,374-0,377	0,324	0,28-0,30
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,99 – 74,02	72,65	75,07
6.	Inflasi (%)	2,5	2,0 - 4,0	3,86
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	n/a	71,22	72,00
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Indeks)	27,27	24,6	n/a

Sumber : Rancangan RKP 2024, Rancangan RKPD Prov. Kalsel 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

5.1. RENCANA PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan prioritas RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

Adapun prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif;
2. Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing;
3. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik;
4. Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 5.1
Program Prioritas Kabupaten Tabalong Tahun 2024

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
1	**Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif;**	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.150.000.000
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	910.000.000
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	192.000.000
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	270.000.000
		2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	76.937.000
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	91.400.000
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	180.854.960

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	830.000.000
		2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	400.000.000
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	550.000.000
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	761.659.056
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	297.391.200
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	766.230.054
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	417.889.000
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.401.750.000
		3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	884.795.460
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.084.329.747

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.397.632.168
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	704.861.116
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	965.860.639
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA dan 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	1.372.822.242
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.600.000.000
		3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	57.402.000
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.266.955.169
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	234.413.000
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	93.557.000
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	310.000.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.450.000.000
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	125.000.000
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100.000.000
2	**Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing ;**	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53.731.911.245
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.318.872.481
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN dan 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	55.843.829.234
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	3.755.705.000
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	179.686.393
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	41.623.950
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	3.194.354.000
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	3.900.612.610
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	23.514.684.743
		2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	154.113.702
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.514.453.148

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	780.623.524
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	109.358.000
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	500.104.000
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	227.929.000
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	559.800.000
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	108.503.952
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.974.958.904
		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	188.312.400

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.610.936.000
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	134.065.000
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	139.744.000
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	891.431.956
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9.132.491.547
		2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	705.000.000
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.802.416.760
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	703.505.193
		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.017.503.746
		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.351.001.526
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.135.339.836
		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.574.294.118

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	287.331.000
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	634.439.420
3	**Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik;**	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.232.406.870
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.166.154.514
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	477.503.906
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	189.299.632.175
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	725.698.840
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.974.786.675
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.532.798.000
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.845.627.600
		1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.507.800.000
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	80.315.914.715
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	4.227.858.127

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA dan 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	18.019.609.214
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA dan 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	15.062.980.752
4	**Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima;**	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SELURUH PERANGKAT DAERAH	958.508.731.748
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.229.097.200
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	622.728.679
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	221.332.408
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.586.000
		2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	70.074.000
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.443.405.000
		2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	210.130.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	356.504.264
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	153.650.000
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.271.670.996
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.380.000
		2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.522.079.680
		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	274.999.874
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.602.980.118
		2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.610.480.496
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.807.986.644
		2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	482.499.020
		2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	244.523.000
		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	741.928.708
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	394.433.832
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	28.095.898.588
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.305.207.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	21.166.111.021
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.344.012.780
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.337.721.828
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	248.545.042.387
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.105.428.400
		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.886.872.198
		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.206.757.522
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	2.109.056.770
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	774.247.054
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SELURUH KECAMATAN	1.955.605.293
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SELURUH KECAMATAN	6.696.768.433
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SELURUH KECAMATAN	554.080.649
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SELURUH KECAMATAN	1.056.803.452

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	SELURUH KECAMATAN	354.824.334
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	59.160.358.368
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.160.000.000
5	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.**	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.400.909.621
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.568.718.946
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.838.149.321
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.908.155.054
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	597.813.332
		2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	155.898.020
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.692.825.959
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.463.336.325

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	457.199.930
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	194.919.852
		2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.015.840
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	347.659.959
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	194.919.684
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.467.098.647
		129		**2.045.254.065.821**

Sumber : Renja SKPD Tahun 2024 (SIPD)

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2024

PRIORITAS TABALONG 2024	Jumlah Program	Jumlah SKPD Pelaksana	Jumlah Anggaran	Persentasi Alokasi Anggaran
PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.	30	5	28.943.739.811	1,42%

PRIORITAS TABALONG 2024	Jumlah Program	Jumlah SKPD Pelaksana	Jumlah Anggaran	Persentasi Alokasi Anggaran
PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.	33	15	185.718.936.388	9,08%
PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.	13	5	364.388.771.388	17,82%
PD 4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.	39	41	1.399.814.997.744	68,44%
PD 5 : Peningkatan Kualitas lingkungan hidup.	14	3	66.387.620.490	3,25%
	129	41	**2.045.254.065.821**	100,00%

5.2. RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Dalam rangka tercapainya pelaksanaan prioritas daerah tahun 2024 dilaksanakan beberapa program. Program-program tersebut dibagi dalam beberapa urusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Program Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	
1	2	3	
A	**NON URUSAN**		
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
B	**URUSAN**		
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
I.1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		3	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	
1	2	3	
I.2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		5	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		6	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		7	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
I.3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		9	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		10	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		11	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		12	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		13	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		14	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		15	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
I.4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		17	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		18	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		19	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
I.5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		21	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		22	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
I.6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		24	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		25	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		26	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	
1	2	3	
		27	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
II.7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	28	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		29	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		30	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		31	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
II.8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		33	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		34	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		35	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
		36	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		37	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
II.9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	38	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
		39	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		40	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		41	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
II.10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	42	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
		43	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
		44	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
II.11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	45	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		46	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		47	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	
1	2	3	
		48	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
		49	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		50	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
		51	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		52	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
		53	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
II.12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	54	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		55	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		56	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		57	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
II.13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
		59	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
		60	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		61	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
II.14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	62	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		63	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		64	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
II.15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	65	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
II.16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	66	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		67	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
II.17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN	68	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	
1	2	3	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	69	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
		70	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		71	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		72	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
II.18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	73	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		74	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		75	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		76	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		77	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
II.19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	78	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		79	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		80	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
II.20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	81	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
II.21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	82	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
II.22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	83	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		84	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
II.23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	85	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
II.24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	86	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		87	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
III.25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		89	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		90	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		91	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
III.26		92	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	
1	2	3	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	93	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
III.27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	94	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		95	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		96	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		97	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		98	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
III.30	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	99	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		100	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		101	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		102	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		103	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
III.31	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	104	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		105	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		106	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
IV.1	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	107	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		108	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
IV.2	4.02 SEKRETARIAT DPRD	109	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
V.1	5.01 PERENCANAAN	110	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		111	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
V.2	5.02 KEUANGAN	112	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		113	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		114	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
V.3	5.03 KEPEGAWAIAN	115	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	
1	2	3	
V.4	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	116	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
V.5	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	117	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
VI.1	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	118	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		119	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**		
VII.1	7.01 KECAMATAN	120	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		121	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		122	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		123	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		124	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
VIII.1	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	125	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		126	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		127	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		128	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		129	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Sumber : Renja SKPD Tahun 2024 (SIPD)

5.3. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan

daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024
KABUPATEN TABALONG

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
1	X. NON URUSAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai AKIP : b. IKM :	a. A b. 100	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	9 Laporan	12.231.839
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2505 Orang	314.469.050.453
					1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	84.490.356
					1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokomen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	2 Dokumen	199.957.200
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan, Perlengkapan, Barang cetakan dan penggandaan Kantor yang disediakan.	13 Paket	1.304.659.813
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	1.429.640.000
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	100%	443.676.060
2	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK dan APM SD b. APK dan APM SMP	a. 100,71% dan 100% b. 100% dan 100%	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK dan APM SD	110.71% 100.00%	22.325.068.171
					1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK dan APM SMP	100.00% 100.00%	14.383.364.192

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	100%	15.778.787.309
					1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH)	99,65%	1.244.691.573
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi Guru PAUD,SD,SMP Yang berkualifikasi S1/D.IV dan Bersertifikat Pendidik	89,00 % 48,97 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan serta Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100%	8.318.872.481
3	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan even tradisi dan adat budaya daerah.	9 Event	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan daerah	9 Even	1.985.829.122
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan even tradisi dan adat budaya daerah.	9 Even	816.587.638
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan.	9 Buah	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	10 Buah	703.505.193
JUMLAH								**383.500.411.400**
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN								
1	X. NON URUSAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	BB	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan dan Realisasi Kinerja	14 dokumen	384.014.000
					1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	72.469.008.699
					1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100%	127.800.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	74.062.000
					1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	1.648.680.763
					1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	538.754.479
					1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	2.142.046.180
					1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	3 poin	1.128.316.000
					1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Analisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	1 laporan	16.422.435.453
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. AKI b. AKB c. UHC	a. 130 b. 8 c. 95%	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar (Obat dan Vaksin, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Bangunan/Fasilitas Fisik)	4 kategori	7.745.602.908

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
			d. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	d. 8,5	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	41.244.041.749
					1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100%	72.408.000
					1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaaan	100%	737.688.000
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	1 : 2500	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	100%	14.812.000
					1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi	100%	3.384.352.000
					1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	100%	356.541.000
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	95%	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100%	32.300.743
					1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sediaan farmasi alkes dan makanan minuman sesuai standart	100%	78.171.400

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	90%	69.214.250
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100%	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	100%	41.623.950
JUMLAH								**148.711.873.574**
1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM								
1	X. NON URUSAN	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mewujudkan pemerintahan dac.rah yang profesional, transparan dan akuntabel (Nilai AKIP) :	B	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administraai pclaksanaan tugas ASN	14 bulan	35.269.270.000
					1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	36 orang	894.510.000
					1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tersedianya Kegiatan Pelayanan BLUD	100,00%	72.611.640.000
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. IKM b. Persentase Capaian SPM c. Akreditasi	a. (3 ,59) B b. 100% c. Paripurna	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan kesehatan	7 Paket	6.044.088.577
JUMLAH								**114.819.508.577**
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	X. NON URUSAN	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	100%	131.501.560
					1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	10.758.284.304
					1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	156.976.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perkantoran	100%	803.576.475
					1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan kantor Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.602.154.200
					1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.187.239.938
2	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	6,36% 75,00%	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai di Kabupaten Tabalong	100%	3.750.958.750
					1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di Kabupaten Tabalong	100%	8.481.448.120
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	74,99%	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pengembangan dan pengelolaan sistem Pengelolaan Air minum di Kabupaten Tabalong	100%	18.166.154.514
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,43%	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kab. Tabalong	100%	1.400.909.621
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	80%	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Tabalong	100%	477.503.906
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara	65%	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten Tabalong	100%	9.568.718.946

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	a. Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	a. 100% b. 79,80%	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Tabalong	100%	189.299.632.175
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	100%	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	567.045.000
					1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Tabalong	100%	107.353.840
					1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100%	51.300.000
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	a. Persentase kawasan terbangun b. Ketaatan terhadap RTRW	a. 2,07% b. 100%	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tabalong	100%	2.154.433.572
					1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	145.838.100
					1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	674.515.003
JUMLAH								**249.485.544.024**
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	X. NON URUSAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai AKIP :	BB (80)	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	88.306.913

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.001.206.215
					1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya kegiatan administrasi umum	100%	943.550.559
					1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	155.604.000
					1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedlanya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	2.205.493.411
					1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.280.114.000
2	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah	100%	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	56 Unit	2.532.798.000
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	85%	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh kurang dari 10 Ha yang ditangani	10 Ha	12.845.627.600
		1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase permukiman yang tertata	100%	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RTLH dan PSU diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	7.507.800.000
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	100%	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Kualltas PSU di Perumahan dan Permukiman	100%	80.315.914.715
3	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus tanah tertangani	100%	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tahan tertangani	3 Kasus	70.074.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
	BIDANG PERTANAHAN	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Lahan Yang Bersertifikat	100%	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah terbayar.	100%	21.443.405.000
		2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase bidang tanah yang terdistribusi	100%	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bidang tanah yang terdistribusi	350 bidang	210.130.000
JUMLAH								**134.600.024.413**
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								
1	X. NON URUSAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	37.836.089
					1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.804.186.035
					1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	113.965.000
					1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	832.251.487
					1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	796.625.000
					1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	768.938.095

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. 100%	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penangganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100%	4.631.961.134
			b. Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	b. 100%	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	597.136.066
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Cakupan pencegahan penanggulangan kebakaran	a. 100%	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.908.155.054
			b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	b. 5 unit				
JUMLAH								**18.491.053.960**
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1	X. NON URUSAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaliasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	49.374.000
					1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlalsananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	2.185.637.728
					1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	55.000.000
					1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	625.664.369

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	960.670.000
					1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	686.369.631
2	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	100%	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	100%	154.757.030
					1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	3.656.119.204
					1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban bencana	100%	854.836.712
					1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	172.436.375
JUMLAH								**9.400.865.049**
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL								
1	X. NON URUSAN	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	BB	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	4.251.225.356
					1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	662.273.387
					1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100%	264.223.211
					1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	997.584.735
					1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100%	922.187.327

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	2 Kegiatan	80.213.000
					1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	341 orang	3.114.141.000
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100%	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabiltasi Sosial Dasar	2871 orang	3.063.927.801
					1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabiltasi Sosial Lanjutan	78 orang	836.684.809
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan bantuan	650 anak	4.526.850.000
					1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	4700 KPM	18.987.834.743
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100%	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Baperstok untuk Keluarga Korban Bencana	5000 jiwa	163.578.200
					1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa terdampak Bencana yang mendapatkan Bantuan (Bencana Banjir)	5000 jiwa	434.235.132

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PPKS yang ditangani/dilayani dengan baik	100%	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara, Peringatan Hari Hari Besar Nasional dan Bantuan/ Santuan bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran pada Peringatan Hari Pahlawan	2 Buah TMP dan 47 orang	622.728.679
JUMLAH								**38.927.687.380**
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA								
1	X. NON URUSAN	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	10 Dokumen	26.698.100
					2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	6.092.099.784
					2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	40.000.000
					2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	402.071.163
					2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	41.902.725
					2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	798.174.276
					2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	299.226.000
2	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	154.113.702

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri b. Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	a. 384 orang b. 70 orang	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	2.260.725.693
					2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60 Lembaga	87.100.000
					2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	20 Perusah aan	166.627.455
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	500 Orang	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	457.688.192
					2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	44%	322.935.332
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layakPP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	87,9%	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100%	62.809.000
					2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	46.549.000
JUMLAH								**11.258.720.422**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	X. NON URUSAN	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Kategori SAKIP b. Nilai SAKIP	a. A b. 80	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan dan Realisasi Kinerja	14 Dokumen	10.580.433
					2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	5.134.123.743
					2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	368.704.138
					2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	60.383.693
					2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan dan Aparatur terhadap Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	90%	692.115.000
					2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	100%	481.018.464
2	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Prosentasi ARG pada Belanja APBD b. Prosentasi SKPD yang responsif gender c. IDG	a. 30% b. 100% c. 75,12	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Responsive Gender	42 SKPD	143.537.578
					2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif 'Jumlah Desa Sadar Hukum ' Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	30% '60 Desa '100%	116.502.220
					2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan	100%	240.064.202

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannnya Pada Unit Pelayanan Terpadu	100%	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasaan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan perjanjian Bersama	100%	131.400.000
					2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	24.932.408
					2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	65.000.000
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG	86,1	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100%	174.205.397
					2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	12 Kecamatan	53.723.603
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentasi SKPD yang mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100%	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Membuat Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	30 SKPD	150.586.000
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	150.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	409.800.000
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Indeks Perlindungan Anak b. Presentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	75,12 100%	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM	57 Desa/ Kelurahan	75.000.000
					2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	33.503.952
3	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Laju Pertumbuhan Penduduk b. Indeks Pembangunan Keluarga c. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Sfscific Fertility Rate/ASFR 15-19) d. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) Per WUS usia 15-49 Tahun	a. 1,44% b. 64,55 c. 29 d. 2,12	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk 'Rapat/Pertemuan Program Bangga Kencana	3 SSK '6 Keg	72.850.352
					2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan 'Persentase Pelaporan Tepat Waktu	90 Orang '100%	115.462.048
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Presentase Pencapaian Peserta KB MKJP b. Cakupan Peserta KB yang Aktif	a. 20 b. 82,28%	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	216.036.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
			c. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) d. Persentasi Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	c. 82,28 d. 7,57 %	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PPKBD Aktif 'Persentase Sub PPKBD Aktif	95,4% '66,9%	1.109.950.000
					2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif	81,80%	236.450.000
					2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Akseptor pada Kampung KB	81,80%	48.500.000
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL) b. Cakupan Anggota UPPKS yang ber - KB	a. 80 b. 92%	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	a. Persentase BKB yang Aktif b. 'Persentase BKR yang Aktif c. Persentase BKL yang Aktif	a. 100% b. '80% c. 80%	92.500.000
					2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	41.565.000
JUMLAH								**10.448.494.231**
2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
1	X. NON URUSAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	455.154.118

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	21.772.045.579
					2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat Pegawai	10 orang	150.000.000
					2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	1.737.983.582
					2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	124 unit	1.290.849.986
					2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa telepon / internet, jasa air dan jasa listrik	12 bulan	1.383.040.000
					2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 unit	1.610.926.233
2	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan	B	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan lumbung pangan yang terbina	4 kelompok	1.150.000.000
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	89,9	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terbinanya kelembagaan PUPM	5 kelompok	232.400.000
					2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas pangan lokal yang dikembangkan	4 komoditas	677.600.000
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa tahan pangan	100 %	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan kerawanan pangan	1 dokumen	192.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	90%	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas PSAT yang terawasi	8 komoditas	270.000.000
3	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	2.163,41 ton	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan	375 buah / set	417.889.000
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.053,2 ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya sarana produksi budidaya pembesaran ikan	8 paket	3.251.750.000
					3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi bibit ikan UPTD PBAT	700.000 ekor	1.150.000.000
		3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	0 kali	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di wilayah Kecamatan	12 Kecamatan	884.795.460
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	32 ton	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan dan diversifikasi produk perikanan	3 kali	2.084.329.747
4	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun: -Padi -Jagung -Kedelai -Bawang merah -Cabai rawit -Cabai besar -Karet (sheet) -Lada (biji kering)	 4,7 ton/ha 3,72 ton/ha 1 ton/ha 7 ton/ha 4,72 ton/ha 8,55 ton/ha 1 ton/ha 210 kg/ha	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diberikan kepada masyarakat	5 unit	8.097.875.000
					3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	12 VUB	2.503.698.716

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	68%	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembuatan jalan, jaringan dan irigasi	200 m	7.755.267.265
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase cakupan pencegahan bencana pertanian	100%	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas areal pengendalian bencana pertanian	1.482 ha	607.336.800
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan jumlah kelompoktani yang naik nilai kemampuannya	35%	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang meningkat nilainya	1 unit (1 BPP)	1.600.000.000
JUMLAH								**59.274.941.486**
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	X. NON URUSAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A (82)	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	8 dokumen	44.651.500
					2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan tepat waktu	4 laporan	10.679.855.532
					2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	587.028.971
					2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan umum	12 bulan	2.333.086.520
					2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dipelihara	40 unit	470.508.920
2	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Adanya dokumen perencanaan LH yang updating	2 dokumen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH tersedia	1 dokumen	155.898.020
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN	a. Indeks kualitas air	61	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau		a. 61 b. 89,5	11.527.826.077

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	b. Indeks kualitas udara	89,5	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas udara (IKU)		
					2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kampung iklim yang dibina	2 kampung iklim	164.999.882
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	67,5	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Adanya dokumen pengelolaan kehati	1 dokumen	4.463.336.325
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	70%	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan LB3	24 pelaku usaha kegiatan	457.199.930
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatan terhadap PPLH	82 pelaku usaha	194.919.852
		2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Adanya penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	1 kelompok	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	1 kelompok	100.015.840
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	80%	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	73 sekolah adiwiyata	347.659.959

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	90%	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yamg diselesaikan	10 kasus	194.919.684
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan sampah b. Persentase Penanganan sampah	a. 30% b. 70%	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan sampah kabupaten	30%	28.467.098.647
JUMLAH								**60.189.005.659**
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	X. NON URUSAN	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	85/A	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok/lap	8.990.080
					2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	12 bulan	5.070.544.590
					2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	103.750.000
					2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.110.619.210
					2.12.01.2.07 Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	247.160.656
					2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	12 bulan	2.004.696.119
					2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	62 Unit	297.955.903

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Persentase Cakupan kepemilikan KTP Elektronik	a. 100%	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen kependudukan yang terbit	36.500 dokumen dan 2 Laporan	348.224.264
			b. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	b. 100%	2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Kecamatan	8.280.000
			c. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	c. 100%				
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran	a.70%	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	135.680.000
			b. Persentase cakupan akta kelahiran anak 0-18 tahun	b. 100%				
			c. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	c.100%	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan Kutipan aktanya	100%	10.620.000
			d. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan	d.100%	2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Kecamatan	7.350.000
			e. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	e.100%				
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase validitas database kependudukan	a.100%	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	40 SKPD	44.679.802

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
			b. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	b. Sangat Puas (92)	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 survey 50 peserta 1 Inovasi	287.387.897
			c. Cakupan perangkat derah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	c. 100%	2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan SIAK (Jaringan siak kab dan kec dalam kondisi baik dan peralatan siak hard dan soft ware dalam kondisi baik,update data kependudukan 25 desa	100 % 100 % 25 desa	2.939.603.297
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	15 laporan	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan data dan profil perkembangan kependudukan	15 Laporan	80.380.000
JUMLAH								**12.705.921.818**
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	X. NON URUSAN	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai IKM b. Nilai Lakip	a. B b. BB	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	21.275.256
					2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	4.040.152.453
					2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	825.604.181
					2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	552.525.396
					2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	628.848.917
2	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	a. Jumlah desa yang ditetapkan batas administrasi wilayah desa	a. 121 desa	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	a. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	a. 100%	4.522.079.680

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
	MASYARAKAT DAN DESA		b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun	b. 2 buah		b. Jumlah sarana trasnportasi desa yang dibangun	b. 2 buah	
			c. Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	c. 0 kawasan		c. Jumlah desa yang ditetapkan batas wilayahnya	c. 121 Desa	
		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	1 Kerjasama	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat	1 Kerjasama	274.999.874
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa	80%	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	a. Persentase desa dengan perencanaan yang baik	a. 90%	2.602.980.118
						b. Persentase desa dengan pengelolaankeuangan yang baik	b. 90%	
						c. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik	c. 90%	
						d. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang baik	d. 90%	
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	80%	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah BUM Desa yang terbentuk	a. 121 Bum Desa	1.974.958.904
						b. Persentase BUM Desa yang aktif	b. 75%	
						c. Persentase BUM Desa yang berkembang	c. 70%	
						d. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	d. 5 kelompok	
						e. Persentase LPM aktif	e. 30%	
						f. Persentase LPM berprestasi	f. 1 Kelompok	
						g. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	g. 4 Kelompok	
						h. Persentase PKK aktif	h. 100%	
						i. Persentase Posyandu aktif	i. 100%	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
						j. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat k. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	j. 45% k. 45%	
JUMLAH								**15.443.424.779**
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN								
1	X. NON URUSAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	78 BB	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	21 Dok	65.000.000
					2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	12 Bulan	5.737.016.433
					2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	76.314.000
					2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan. b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. c. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. d. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didalam dan diluar Daerah.	a. 79 BB b. 82 item c. 9 item d. 180 orang	712.006.659
					2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.	a. 30 item/tahun b. 12 bln	4.190.461.797

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	36 Unit, 27 item	554.825.008
2	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Perhubungan	100%	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	a. Terpenuhinya Rambu Standar. b. Terpenuhinya Cermin Tikung. c. Terpenuhinya Water Barrier. d. Terpenuhinya Guadrill e. TerpenuhinyaTraficon. f. Terpenuhinya Marka Tikungan g. Terpeliharanya Fasilitas Keselamatan.	a. 500 buah b. 5 buah c. 20 buah d. 0 buah e. 10 buah f. 40 M2 g. 510 buah	539.999.868
			b. Meningkatnya kelaikan Operasional Kendaraan Umum / Pribadi Di Jalan Raya	4.400 KBWU	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	a. Kontribusi PAD sektor retribusi pengguna jasa/fasilitas terminal. b. Persentase terhadap 3 terminal yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	a. 73810000 b. 100%	30.000.000
			c. Persentasi Layanan Angkutan dan Multimoda	100%	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	a. Terlaksananya peningkatan, pengelolaan dan penataan titik (lokasi) parkir b. Kontribusi PAD sektor Retribusi Parkir.	a. 15 Titik Parkir b. 490.654.516	75.000.000
			d. Meningkatnya Pergerakan Orang dan Barang yang melalui bandara Warukin	2.500 / 42.000	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	a. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah melakukan pengujian. b. Kontribusi PAD Sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	a. 4.500 KBWU b. 953.900.000	791.604.982
					2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	a. Tersedianya Rambu. b. Tersedianya Marka.	a. 52 buah b. 1.583 M2	634.854.513

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	c. Terpeliharanya Peralatan Out Door Area Traffic Control System / RHK	c. 2 lokasi	
			e. Menurunnya Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas	0 Laka 0 Tilang	2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Andalalin	1 Dokumen	45.000.000
					2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	a. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal. b. Tersedianya data laporan hasil Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota. c. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	a. 3 Dokumen b. 3 Dokumen / Lembaga c. 3 Dokumen / Lembaga	259.970.356
					2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Unit Angkutan.	43 Unit	1.753.483.007
					2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Draf Raperda dan/atau Raperbup..	36 Dokumen	37.945.410

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi PAD sektor Retribusi Perizinan Angkutan / Trayek.	25.000.000	59.999.991
JUMLAH								**15.563.482.024**
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	X. NON URUSAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	A	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	83.575.000
					2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	6.227.626.724
					2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	115.000.000
					2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	657.341.593
					2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	7 Unit	201.625.000
					2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	1 Tahun	644.523.500
					2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	519.585.854
2	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentasi, Jumlah Informasi dan Berita yang ditangani	100%	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	5.610.480.496

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
	DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase terlaksananya Program Aplikasi Informatika	100%	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.875.955.568
					2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.932.031.076
3	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Statistik	100%	482.499.020
4	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya Persandian di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang diterima dan diamankan	50 Dokumen	244.523.000
JUMLAH								**19.594.766.831**
2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
1	X. NON URUSAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	100%	67.540.000
					2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai	12 bulan	11.314.627.070
					2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	912.352.334
					2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.477.271.879

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	716.470.847
2	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentasi koperasi aktif	67,16%	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90%	76.937.000
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	16 KSP/USP	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 KSP/USP	91.400.000
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	40%	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 0rang	139.744.000
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	100%	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	4 kegiatan	180.854.960
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	100 UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	830.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
3	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	88%	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	2	22.000.000
					3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	17.000.000
					3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	18.402.000
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	85%	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Melaksanakan pemenuhan kriteria pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	5 Unit	5.488.073.519
					3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	7 dokumen	778.881.650
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	a. Konstribusi sektor perdagangan terhaddap PDRB b. Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	9,21 % 1,10%	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	16.913.000
					3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	12 Laporan	197.500.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
					3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	20.000.000
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	60%	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang siap Ekspor	10	93.557.000
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	70%	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.725	310.000.000
4	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Konstribusi sektor industri terhadap PDRB	8,25%	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan industri baru	40 WUB	1.450.000.000
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	70%	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan Berusaha Industri yang di Fasilitasi secara Elektronik	70%	125.000.000
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	100%	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbitnya Laporan/Buku Informasi Industri	1 Laporan	100.000.000
JUMLAH								**24.444.525.259**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
1	X. NON URUSAN	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana	BB	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	23.060.056
					2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gajih dan tunjangan ASN	14 bln	4.701.835.666
					2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancar Ppelaksanaan tugas untuk pelayanan kepada masayarakat	1 unit	593.240.000
					2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya aparat yang memiliki wawasan	15 orang	116.632.000
					2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan yang tersedia	5 kegiatan	713.894.967
					2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	2 kegiatan	1.735.380.000
					2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	117 unit	505.549.502
2	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi PMDN dan PMA	1,01 Trilyun	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi /intensif dan kemudahan penanaman modal	5 kali	50.000.000
					2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah jenis potensi investasi daerah yang teridentifikasi sesuai standar	2 kajian	350.000.000
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang berminat menanamkan modal	20 Investor	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	5 kali	550.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	90%	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterbitkan	2.500 izin	761.659.056
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	84%	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80 kali	297.391.200
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA	100%	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating sistem informasi investasi serta perizinan dan non perizinan	100%	766.230.054
JUMLAH								**11.164.872.501**
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA								
1	X. NON URUSAN	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	74 (BB)	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	89.535.466
					2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	4.545.496.838
					2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	106.184.000
					2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 kegiatan	653.338.154
					2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjamg Urusan Pemerintah Daerah	2 kegiatan	130.895.793

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 kegiatan	311.646.800
					2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 kegiatan	378.080.000
2	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumalh Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	2 kegiatan	559.997.519
					2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	331.434.437
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	50 org	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewengan daerah kab/kota	1 kegiatan	2.697.999.912
					2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	864.495.148
					2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	2 kegiatan	309.997.020
					2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan organisasi olahraga	2 kegiatan	5.109.999.537

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan olahraga rekreasi	1 kegiatan	149.999.930
		2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	100%	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 organisasi	705.000.000
3	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	1.020.000 orang	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan,Revitalisasi)	a. 4 lokasi	1.397.632.168
						b. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	b. 5 Unit	
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	4%	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	a. 5 lap	704.861.116
						b. Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	b. 6 dok	
JUMLAH								**19.046.593.838**
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
1	X. NON URUSAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	BB	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	96.252.227
					2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	4.893.441.190

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Kegiatan	35.000.000
					2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	581.694.891
					2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Unit	113.710.323
					2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	955.745.000
					2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	375.884.613
2	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a.. Persentase Jumlah pengunjung b.. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka c. Persentase Perpustakaan yang dibina b. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	a. 20,16% b. 0,25 c. 53% d. 65.188 eks	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Jumlah Pengunjung, b. Persentase Jumlah Anggota Perpustakaan, c. Tingkat Kepuasan Masyarakat, d. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka, e. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang dilestarikan, f. Persentase Perpustakaan yang dibina	a. 20,16% , b. 11,06% , c. 87.00 , d. 0,25 , e. 7000 eksemplar , f. 53%	509.007.283
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca	19 Kegiatan	508.496.463
3	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	45%	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina dan dilakukan Pengawasan, Jumlah Kecamatan / Desa / Kelurahan yang dibina dan Peraturan Kearsipan yang tersedia	30 SKPD, 34 Kecamatan Desa / Kelurahan 1 Peraturan	225.226.468
					2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi,	1000	74.604.860

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
						Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
					2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan	100	442.097.380
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Perlindungan, penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip Statis dan Alih Media	300	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen/Berkas Pemusnahan Arsip	300	116.446.218
					2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150	113.994.428
					2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	300	163.993.186
JUMLAH								**9.205.594.530**
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN								
1	X. NON URUSAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Nilai IKM	- BB (Baik) - B (Baik)	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	10 Dokumen	288.201.999
					3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	3.984.496.375
					3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD tepat waktu	12 Bulan	30.994.800
					3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	10 orang	182.904.000
					3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan kesekretariatan	B	786.153.997

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks layanan kesekretariatan	B	1.266.600.000
					3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara	14 unit	2.254.486.283
					3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	10 unit	560.534.286
2	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Produktivitas: - karet; sheet (ton/ha) - lada;biji kering (kg/ha) b. Jumlah populasi sapi yang dikembangkan (ekor)	a. Produktivitas: - 1,1 ton/ha - 220 kg/ha b. 10350 ekor	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Jumlah UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) yang difasilitasi b. Dokumen berisi sarana pertanian yang difasilitasi	a. Total 56 unit b. 1 dokumen	814.477.078
					3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas: - karet; sheet (ton/ha) - lada;biji kering (kg/ha) - Produksi kopi (ton)	Produktivitas: - 1,1 ton/ha - 220 kg/ha Produksi: 466 ton	1.042.184.427
					3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah populasi ternak yang dikembangkan (ekor) - Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB (ekor)	- 10350 ekor - 469 ekor	5.561.373.993
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	70%	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan:	1 action plan	207.889.581
					3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pendukung kegiatan: - perkebunan - kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan peternakan - penanggulangan dan pengendalian	 - 29% - 27% - 12%	7.099.823.906
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	a. Persentase angka mortalitas hewan strategis	a. ≤ 3 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah	Persentase angka penyakit zoonosis	≤ 0 %	315.382.865

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	b. Persentase Penyediaan Daging ASUH	b. 75%	Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
					3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka mortalitas hewan strategis	≤ 3 %	158.731.524
					3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyediaan daging ASUH	70%	491.746.250
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian (%)	40%	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	- Persentase fasilitasi pengendalian OPT perkebunan - Luasan pencegahan kebakaran lahan - Persentase fasilitasi penanggulangan bencana kesehatan hewan	- 18% (900 ha/6442,51) - 75 ha - 22% (650/ 3039)	765.485.442
JUMLAH								**25.811.466.806**
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH								
1	X. NON URUSAN	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai AKIP b. Indeks Pelayanan Kesekretariatan c. Prosentase SAKIP SKPD yang Berpredikat BB d. Persentase tingkat pelayanan protokol dan komunikasi kepala daerah / wakil kepala daerah	a. 73 b. 90 c. 50% d. 100%	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	118 Dokumen	86.735.000
					4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1060 Dokumen	19.797.033.353
					4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100 %	262.500.000
					4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	100 %	113.350.000
					4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	2.121.473.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4.500.000.000
					4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	7.288.699.000
					4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.045.794.000
					4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	14 bulan	777.725.000
					4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	100 %	3.678.340.000
					4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	100 %	530.097.000
					4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 %	1.035.529.322
2	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu b. Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan c. Persentase pembentukan produk hukum	a. 100% b. 100% c. 100%	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	2.659.795.588
					4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	24.820.483.000
					4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	100 %	561.440.000
					4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	54.180.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase tingkat sinkronisasi dan penyelarasan sektor ekonomi dan sumber daya alam	a. 100%	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Singkronisasi dan Penyelarasan Kebijakan Perekonomian	100 %	313.126.000
			b. Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa	b. 100%	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	100 %	718.127.000
					4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	3.156.211.000
					4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terkoordinasi, Selaras dan Singkronisasinya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	117.743.000
JUMLAH								**75.638.381.263**
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD								
1	X. NON URUSAN	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	251.625.600
					4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	100%	5.496.589.302
					4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	2.181.875.005
					4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	100%	1.782.113.083
					4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Set DPRD & DPRD	100%	2.631.601.040
					4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	100%	3.203.866.587
					4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	21.263.985.068
					4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Administrasi DPRD	100%	720.844.116

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan, Kehumasan dan Legislasi DPRD	a. 95%	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%	3.006.628.820
					4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	755.860.458
			b. Persentase TingkatPelayanan Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi/Reses	b. 95%	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasiinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	688.540.000
					4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	2.694.724.944
					4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	2.751.429.474
					4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik	100%	110.224.725
					4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD	100%	12.075.000
					4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya tugas-tugas DPRD	100%	11.146.627.600
JUMLAH								**58.698.610.822**
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	X. NON URUSAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	61.829.169
					5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	6.925.177.384
					5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	7.350.000
					5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu	100%	495.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
						menjawab 80% pertanyaan dengan benar		
					5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	100%	986.826.598
					5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	506.150.235
					5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	846.380.000
					5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	690.855.471
2	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	100%	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	100%	1.431.261.160
					5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan	100%	242.714.740
					5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	476.806.880
					5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	193.230.000
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program	100%	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada	100%	1.362.115.584

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
			pada Dokumen Perencanaan daerah			Dokumen Perencanaan Daerah		
					5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	206.000.000
					5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah	100%	769.606.244
3	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	20%	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	20%	385.339.836
					5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	20%	1.350.000.000
					5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	20%	1.400.000.000
JUMLAH								**18.336.643.301**
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
1	X. NON URUSAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	BB	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 Dok	29.575.670
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	17 dok	67.510.505.348

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	175.621.200
					5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	1.152.391.000
					5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	429.024.336
					5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.110.687.701
					5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.937.830.000
2	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan Penetapan APBD b. Persentase Waktu Penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat Waktu c. Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	a. 100% b. 100% c. 100%	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah	100 Dok	1.788.660.400
					5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	60 Dok	975.554.698
					5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	16 Dok	1.144.885.500
					5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	244.635.941.789
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah	100%	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik	100%	2.105.428.400

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
JUMLAH								**322.996.106.042**
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH								
1	X. NON URUSAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	BB	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	23 Dokumen	61.160.000
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen	8.840.736.722
					5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	50.000.000
					5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	813.632.539
					5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	52 Unit	1.214.701.097
					5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	1.463.627.087
					5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	656.552.857
2	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah b. Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah c. Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	a. 43,54 % b. 5,1 % c. 14%	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	a. Jumlah Pajak Daerah b. Jumlah Retribusi Daerah c. Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target	a. 104.016.101.486 b. 12.187.192.358 c. 4 OPD	2.886.872.198
JUMLAH								**15.987.282.500**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	X. NON URUSAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasaan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	82	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	51.826.564
					5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100%	4.579.179.891
					5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	776.075.430
					5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	726.749.900
					5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	298.201.706
2	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Indeks kepuasan Terhadap Layanankepegawaian Kepegawaian daerah (IKM)	a. 82	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian, & Informasi Kepegawaian	82	1.266.686.635
			Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaaan Pengadaan ASN	100%	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN (Nilai)	82	654.092.952
			Persentase penyelesaian pelanggaran displin ASN	100%	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	100%	1.839.544.348
					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (nilai)	82	446.433.587
3	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan kompetensi pegawai	100%	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi teknis (Persen)	100%	768.906.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	100%	2.228.760.974
					5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	100%	353.334.552
JUMLAH								**13.989.792.539**
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT								
1	X. NON URUSAN	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP :	BB	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	9 Dokumen	32.757.500
					6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	gaji dan tnjangan ASN	14 Bulan	8.582.955.586
					6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapabilitas APIP	3 Level	558.234.500
					6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM Pelayanan Administrasi Umum	74%	1.089.963.846
					6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	507.006.280
					6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 Macam	724.822.704
2	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Muturits SPIP Kab. Tabalong	50%	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal	100%	1.536.800.619
					6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	572.256.151
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat WBK	3 PD	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada 8 Area Intervensi	3 PD	774.247.054
JUMLAH								**14.379.044.240**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	A	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	44.526.020
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	7.149.121.236
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	6.900.912
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah	100%	1.427.678.034
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	31.080.000
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.083.577.426
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	984.020.389
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	73,96%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100%	133.371.929
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	192.934.620

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparature, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,8%	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	365.122.451
					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bulan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.398.370.294
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan)	97,64%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban	12 Bulan	26.639.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	82,23%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum	100%	217.473.849
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	75,8%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Bulan	107.468.972
JUMLAH								**13.168.285.132**
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Evaluasi Nilai AKIP	B Nilai	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangakat daerah yang disusun	10 Dokumen	9.661.000
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	7.430.256.215
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	850.684

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	725.050.405
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit	1.018.679.379
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	1.278.507.800
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	101 Unit	534.622.708
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	10 Laporan	131.278.304
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarkat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	354.737.297
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksnakan	12 Dokumen	150.000.000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	100%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Desa	31.950.000
					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	3.596.334.072
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1 00 Keluarga	448.718.368

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
						tingkat kecamatan dan kelurahan		
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	67.889.769
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraaan Pemerintahan yang di susun Target Waktu	80,83%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Dokumen	75.151.000
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 Dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka fasilitas,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemrintah desa	12 Dokumen	33.796.000
JUMLAH								**15.887.483.001**
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	10.251.075
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	2.877.715.226
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	330.942.811
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	85.000.000
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	271.584.500

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	133.309.000
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasi Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	75%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	86.494.000
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	21.997.368
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Keluarga	41.037.562
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	45.000.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	66.100.000
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	14 Dokumen	11.283.684
JUMLAH								**3.980.715.226**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	9.523.860
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	2.416.328.553
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	1.805.976
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	158.210.155
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	3 unit	28.371.224
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	223.502.500
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	34 unit	95.148.035
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 laporan	72.772.300
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur,kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	75%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	13.600.000
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang diberdayakan/disejahterakan	1.544 keluarga	52.594.730

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	36.930.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 laporan	44.189.721
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	75%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/di awasi	7 desa	13.600.000
JUMLAH								**3.166.577.054**
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	10.500.000
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Laporan	2.821.654.944
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	210.491.059
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	2 Unit	31.784.850
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	214.957.400
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	48 Unit	109.011.363

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	77.720.000
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang difasilitasi	3 Kegiatan	41.840.000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayah Desa	80%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang Dibina dan diberdayakan	15 Desa	23.615.000
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina	15 Desa	23.756.586
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	55.750.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	80%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	90.714.742
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	11.250.000
JUMLAH								**3.723.045.944**
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran	15 Dok	25.429.962

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				dan evaluasi Perangkat daerah		
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	12 Dok	3.412.658.109
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	365.023.209
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	5 unit	15.540.000
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bln	480.389.407
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	167.484.660
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	73,96%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 keg	113.001.192
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,8%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 keg	114.665.893
					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	1 keg	309.032.308
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran dalam Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 keg	25.200.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Keamanan)	97,64%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 keg	22.407.400
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	82,23%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 keg	146.637.117
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84,59%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Keg	40.116.850
JUMLAH								**5.237.586.107**
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	9.823.240
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 Dokumen	2.670.467.369
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administasi umum perangkat daerah	100%	219.048.065
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	100%	227.715.000
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	40 Unit	86.519.044

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	85%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	86.740.634
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	20.406.260
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	18.357.281
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, keamanan dan kenyamanan)	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	7 desa	37.875.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	85%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	93.000.290
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	80%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	7 Desa	17.500.000
JUMLAH								**3.487.452.183**
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (8B)	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10.544.000
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yg disusun	20 Dokumen	2.622.889.425

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.913.752
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	163.371.956
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dibeli	5 Unit	30.216.945
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	238.626.713
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 Unit	85.130.000
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat	85%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	70%	98.943.854
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70%	11.999.865
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan tata kelola Kewilayahan Desa	85%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang dibina/ diberdayakan	9 desa	21.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (Ketertiban,Keamansan dan Kenyamanan	80%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 desa	49.556.280
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	16.544.952
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 dokumen	21.741.000
JUMLAH								**3.372.478.742**
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	9.893.170
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	2.515.954.000
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	2.997.956
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	283.923.880
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	15 Unit	191.492.559
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	251.693.382

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Unit	80.320.000
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	85%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	125.464.748
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	P:ersentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	85%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang dibina/diberdayakan	14 Desa	30.293.828
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/diberdayakan	14 Desa	58.769.800
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 Patroli Terpadu	61.499.200
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan	1 Laporan	108.450.288
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	30.293.828
JUMLAH								**3.751.046.639**
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	9.547.650
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 laporan	2.069.370.432

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	1.799.550
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	194.798.899
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	3 unit	50.128.620
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	310.900.000
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	31 unit	102.970.000
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 laporan	63.934.000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	13 desa	7.800.000
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang diberdayakan/ disejahterakan	9021 Keluarga	20.600.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	40.440.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 dokumen	48.380.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 dokumen	10.930.000
JUMLAH								**2.931.599.151**
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	10.000.000
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Laporan	2.014.015.767
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	276.931.504
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258.000.000
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	11 Unit	138.383.496
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	65.000.000
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayaann Kepada Masyarakat	3 Laporan	30.000.000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas	80%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan berdayakan	6 Desa	12.500.000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	aparatur dan Tata Kelola Kewilayah		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2000 Keluarga	15.700.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	41.700.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggraaan Pemerintahan yang di susun tepat Waktu	80%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	81.000.000
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	14.700.000
JUMLAH								**2.957.930.767**
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA								
1	X. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	9.629.000
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Laporan	2.153.864.274
					7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusu	3 Laporan	1.813.000
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	139.151.027

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	15 unit	77.100.854
					7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	242.204.170
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 unit	82.130.000
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	97.375.182
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	9 desa	27.344.000
					7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa yanng dibina	9 Desa	20.000.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	68.394.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	69.161.493
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	42.144.000
JUMLAH								**3.030.311.000**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	X. NON URUSAN	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	11 buah	32.000.000
					8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	12 bulan	3.647.703.322
					8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	12 bulan	42.625.000
					8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan	378.824.166
					8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	20 unit	200.000.000
					8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	12 bulan	756.679.362
					8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	18 unit	570.660.851
2	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	80%	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	60 orang	1.574.294.118
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	80%	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	12 bulan	59.160.358.368

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET		KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET		PAGU KEGIATAN
1	2	3	4		5	6		7
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	80%	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	12 bulan	287.331.000
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	80%	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	12 bulan	634.439.420
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	80%	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	1.160.000.000
JUMLAH								**68.444.915.607**

Sumber Renja SKPD Tahun 2024 (SIPD)

Beberapa proyek/pekerjaan dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencapaian sasaran strategis tahun 2024, untuk itu perlu perhatian khusus dan diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Proyek-proyek tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4 DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Peningkatan Jalan Burum - Mihol dan kuari - Mihol, jalan Kalingai - Rungun, Rungun - Misim, Jembatan Sakuyah - Bina Desa	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lanjutan
2.	Peningkatan Jalan Binjai Salikung, Sp. 3 Kumap - Kumap	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lanjutan
3.	Penataan Trotoar dan Devider Jln. Ir. PHM Noor	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lanjutan
4	Pembangunan Jembatan Wikau - Kambitin	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5.	Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten (Keperluan Preservasi Lokasi Tersebar di Kab. Tabalong)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tersebar
6.	Rehabilitasi Jalan Masintan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5	6
7.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tersebar
8.	Penyelenggaraan PSU Permukiman dan Perumahan	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.2.10.1.05.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tersebar
9.	Bantuan Sosial (Bansos) Kesejahteraan Keluarga	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	
10.	Pengadaan Alat Laboratorium	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
11.	Pembuatan Jalan Desa Nawin Kecamatan Haruai Menuju Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
12.	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5	6
		ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		

Sumber Renja SKPD Tahun 2024 (SIPD)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten. Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah pada tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati disajikan pada Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2023. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
1	Angka Kriminalitas	Poin	10	10
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,07	75,07

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,73	70,73
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,93
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,46	14,46
6	Persentase penduduk miskin	Persen	5,55	5,55
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,0 – 4,0	3,05
8	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	100	100
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	75,12	75,12
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	86,10	86,10
11	Pertumbuhan ekonomi	Persen	2,5-3,5	4,0-4,5
12	Indeks Gini	Indeks	0,28-0,31	0,30
13	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	11,15	11,5
14	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,29	15,29
15	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,72	84,72
16	Persentase UKM Aktif	Persen	82	82
17	Persentase koperasi aktif	Persen	86	67,16
18	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah	Persen	100	100
19	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	79,8	79,8
20	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	74,99	74,99
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72	72
22	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,77
23	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	12	12
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	63
25	Nilai SAKIP (predikat)	Predikat	A	BB
26	Opini BPK (predikat)	Predikat	WTP	WTP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
27	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai	85	85
28	Tingkat Kemandirian Daerah	Persen	17,17	17,17

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sedangkan IKK Kabupaten Tabalong disajikan pada Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021. Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	2,5-3,5	2,5-3,5
2	Inflasi	Persen	1,14	3,86
3	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	80.683	80.683
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	62.538	62.538
5	Indeks Gini	Indeks	0,28-0,31	0,30
6	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	75,07	75,07
7	Persentase penduduk miskin	Persen	5,55	5,55
8	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	75,12	75,12
10	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Point	86,10	86,10
11	Status Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
12	Angka Melek Huruf	Persen	100	100
13	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,93	9,93
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,46	14,46
15	APK SD	Persen	110,72	110,71
16	APK SMP/MTs	Persen	100	100
17	APK SMA/SMK/MA	Persen	89,60	100
18	Angka pendidikan yang ditamatkan:	Persen		
	- SD	Persen	26,10	26,10
	- SMP/MTs	Persen	17,15	17,15
	- SMA/SMK/MA	Persen	19,58	19,58
19	APM SD/SDLB/MI	Persen	100	100
20	APM SMP	Persen	100	100
21	Angka Kematian Bayi/Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	4/1000	9/1000
22	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,73	70,73
23	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0,00	0,00
24	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	97,25	97,25
25	Jumlah Grup Kesenian	Buah	42	45
26	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	1	1
27	Jumlah klub olahraga	Buah	80	80
28	Jumlah Gedung Olahraga	Buah	36	36
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	**Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**			
1.1	**Pendidikan**			
1.1.1	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1	Persen	100	93,90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
1.1.2	Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertikat pendidik	Persen	100	85.87
1.1.3	Persentase APK PAUD, SD, SMP dan DIKMAS	Persen	106,03	106,03
1.1.4	Persentase APM PAUD, SD, SMP dan DIKMAS	Persen	99,48	99,48
1.1.5	Jumlah Penyelenggaraan Even Tradisi dan Adat Budaya Daerah	Jumlah	10	3
1.1.6	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	9	9
1.2	**Kesehatan**			
	Dinas Kesehatan			
1.2.1	AKI	Rasio	130/100.000 Kelahiran Hidup	130/100.000 Kelahiran Hidup
1.2.2	AKB	Rasio	8/1000 Kelahiran Hidup	9/1000 Kelahiran Hidup
1.2.3	UHC	Persen	100	100
1.2.4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	9,5	9,5
1.2.5	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	Rasio	1:2500	1:2500
1.2.6	Persentase Faskes dengan ketersediaan Obat Esensial	Persen	100	100
	Rumah Sakit			
1.2.7	IKM	Indeks	3,53	3,53
1.2.8	Akreditasi	Status	Paripurna	Paripurna
1.2.9	SPM	Persen	100	100
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1.3.1	Persentase Penduduk berakses air minum	Persen	74,99	74,99
1.3.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	96,43	96,43
1.3.3	Persentase bangunan pasilitas publik yang terpelihara	Persen	65	65

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
1.3.4	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	Persen	80	80
1.3.5	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	Persen	100	100
1.3.6	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	6,36	6,36
1.3.7	Persentase irigasi Kabupaten dengan kondisi baik	Persen	75	75
1.3.8	Persentase kawasan terbangun	Persen	2,07	2,07
1.3.9	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	100
1.3.10	Persentase Desa yang dapat di akses dengan mudah	Jumlah	100	100
1.3.11	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	79,8	79,8
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1.4.1	Rasio rumah layak huni	Rasio	1:1,46	1:1,73
1.4.2	Persentase pemukiman yang tertata	Hektar	100	100
1.4.3	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	85	85
1.4.4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100	100
1.5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			
1.5.1	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
1.5.2	Persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100	100
1.5.3	Persentase pencegahan penanggulangan kebakaran	Persen	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
1.5.4	Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	Unit	5	5
1.5.5	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	Persen	100	100
1.6	**Sosial**			
1.6.1	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100
1.6.2	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Persen	100	100
1.6.3	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Jaminan Sosial	Persen	100	100
1.6.4	Persentase Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Sosial	Persen	100	100
1.6.5	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
2.1	**Tenaga Kerja**			
2.1.1	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	Dokumen	1	1
2.1.2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri	Orang	320	384
2.1.3	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	140	70
2.1.4	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Orang	500	500
2.1.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	Persen	86,76	87,9

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
	terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.			
2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
2.2.1	IPG	Point	86,10	86,10
2.2.2	IDG	Point	75,12	75,12
2.2.3	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Utama
2.2.4	Prosentase SKPD yang resfonsif gender	Persen	100	100
2.2.5	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100
2.2.6	Prosentase SKPD yang memiliki Data terpilah gender	Persen	100	100
2.2.7	Prosentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100
2.2.8	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	30	30
2.2.9	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	68,03	68,03
2.3	**Pangan**			
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,9	89,9
2.3.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah (IKP)	Indeks	84,72	84,72
2.3.3	Meningkatnya diversifikasi dan cadangan pangan masyarakat	Ton	50	60
2.3.4	Meningkatnya Desa Tahan Pangan	Persen	100	100
2.3.5	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	90	90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
2.4	**Pertanahan**			
2.4.1	Persentase Luas Lahan Bersetifikat (Tanah Aset Pemda)	Persen	100	100
2.4.2	Prosentase penetapan tanah untuk pembangunan kepentingan umum (aset Pemda)	Jumlah	4	8
2.4.3	Jumlah kasus sengketa lahan yang tertangani	Kasus	5	5
2.4.4	Luas Tanah Kosong terkelola	Dokumen	1	1
2.5	**Lingkungan Hidup**			
2.5.1	Persentase pengurangan sampah	Persen	30	30
2.5.2	Persentase Penanganan Sampah	Persen	70	70
2.5.3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	67,5	67,5
2.5.4	Persentase pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	Persen	100	100
2.5.5	Indeks kualitas air	Indeks	55,50	61
2.5.6	Dokumen Perencanaan LH yang Updating	Dokumen	2	1
2.5.7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,5	89,5
2.5.8	Persentase Jumlah Pengaduan Lingkungan yang di tindaklanjuti	Persen	90	100
2.5.9	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	100	100
2.5.10	Penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	Perda/ Perbup	1	1
2.5.11	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Persen	80	80

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
2.5.12	Tingkat Ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Limbah B 3	Persen	70	70
2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
2.6.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Puas	Sangat Puas (92,00)
2.6.2	Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	Persen	100	100
2.6.3	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	100	100
2.6.4	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100	100
2.6.5	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	75	100
2.6.6	Persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	60	70
2.6.7	Persentase kepemilikan akte kelahiran anak 0 - 18	Persen	100	100
2.6.8	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akte perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100
2.6.9	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan	Persen	100	100
2.6.10	Persentase kepemilikan akte kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	100
2.6.11	Persentase validitas database kependudukan	Persen	100	100
2.6.12	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan database kependudukan	Persen	10	10
2.6.13	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Status	Ada	Ada

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
2.7	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**			
2.7.1	Jumlah Desa yang ditetapkan batas wilayahnya	Desa	121	121
2.7.2	Jumlah Sarana Transportasi Desa yang dibangun	Jumlah	2	2
2.7.3	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100	100
2.7.4	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	Jumlah	1	1
2.7.5	Jumlah kerjasama antar desa	Persen	2	2
2.7.6	Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	Persen	80	80
2.7.7	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persen	80	80
2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
2.8.1	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Persen	20	20
2.8.2	Cakupan anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL)	Persen	80	80
2.8.3	Cakupan anggota UPPKS yang ber KB	Persen	92	92
2.8.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,44	1,44
2.8.5	Total Fertility Rate (TFR)	Rate	2,12	2,12
2.8.6	Cakupan Peserta KB yang aktif	Persen	82,28	82,28
2.8.7	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,55	60,55
2.8.8	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age sfscific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Angka	29	29
2.8.9	Angka Kelahiran Total (total Fertility Rate/TFR) Per WUS usia 15-49 Tahun.	Angka	2,12	2,12

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
2.8.10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Angka	82,28	82,28
2.8.11	Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	7,57	7,57
2.9	**Perhubungan**			
2.9.1	Meningkatnya Kelaikan Operasional Kendaraan Umum / Pribadi di Jalan Raya	Angka	4.900 KBWU	4.900 KBWU
2.9.2	Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana fasilitas keselamatan Perhubungan	Persen	90	90
2.9.3	Meningkatnya pergerakan Orang dan Barang yang melalui Bandara Warukin	Jumlah	1.500 Orang/ 40.000 Barang/Kuli	1.500 Orang/ 40.000 Barang/Kuli
2.9.4	Menurunnya Angka Kecelakaan dan Pelanggaran	Angka	20 Laka 930 Tilang 6 lokasi	20 Laka 930 Tilang 6 lokasi
2.9.5	Persentase Layanan Angkutan Multimoda	Persen	100	100
2.10	**Komunikasi dan Informatika**			
2.10.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100
2.10.2	Terlaksananya E-Government	Persen	100	100
2.11	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**			
2.11.1	Pertumbuhan UMK	Persen	0,27	0,27
2.11.2	Jumlah Koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai	Persen	80	55
2.11.3	Jumlah anggota koperasi yang dilatih	Jumlah	360	150
2.11.4	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Persen	3	3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
2.11.5	Terlaksananya pembinaan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah	30	30
2.11.6	Jumlah pelaku usaha yang dilatih Wirausaha	Jumlah	90	40
2.12	**Penanaman Modal**			
2.12.1	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	1,01 Triliun	1,01 Triliun
2.12.2	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal	Investor	20	20
2.12.3	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	Skor	90	90
2.12.4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Informasi PM	Persen	84	84
2.12.5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	20	20
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**			
2.13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100	100
2.13.2	Jumlah atlet berprestasi	Orang	50	50
2.13.3	Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	Persen	100	100
2.14	**Statistik**			
2.14.1	Persentase penyelenggaraan Statistik sektoral lingkup Kabupaten	Persen	100	100
2.15	**Persandian**			
2.15.1	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	100
2.16	**Kebudayaan**			
2.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	Festival	5	5
2.16.2	Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Situs	9	9
2.17	**Perpustakaan**			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
2.17.1	Persentase Jumlah Pengunjung	Persen	20,16	20,16
2.17.2	Rasio ketersediaan koleksi bahan pustaka	Rasio	0,25	0,25
2.17.3	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen	53	53
2.18	**Kearsipan**			
2.18.1	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	Persen	45	45
2.18.2	Jumlah Perlindungan, Penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip statis dan Alih Media	Jumlah	300	300
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**			
3.1	**Kelautan dan Perikanan**			
3.1.1	Jumlah produksi perikan budidaya	Ton	18.053,2	1.8053,2
3.1.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang ramah Lingkungan	Ton	2.163,41	2.163,41
3.1.3	Jumlah Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Kegiatan	0 kali	0 kali
3.1.4	Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan	Ton	32	32
3.2	**Pariwisata**			
3.2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	1.020.000	1.020.000
3.2.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	Persen	4	4
3.3	**Pertanian**			
3.3.1	Produktivitas Pertanian per hektar pertahun - Padi - Jagung - Kedelai - Bawang Merah - Cabai Rawit - Cabai Besar - Karet (sheet) - Lada (biji kering)	Hektar/ tahun	 4,8 ton/ha 4,05 ton/ha 1,15 ton/ha 7,3 ton/ha 5 8,8 1,1 ton/ha 220 kg/ha	 4,8 ton/ha 4,05 ton/ha 1,15 ton/ha 7,3 ton/ha 5 8,8 1,1 ton/ha 220 kg/ha

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
3.3.2	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	Persen	70	72,5
3.3.3	Persentase angka mortalitas hewan strategis	Persen	≤3%	≤3%
3.3.4	Persentase penyediaan daging asuh	Persen	75%	75%
3.3.5	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	Persen	40	40
3.3.6	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	Persen	35	35
3.3.7	Jumlah UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) yang di fasilitasi	UPPB	46	56
3.4	**Perdagangan**			
3.4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,21	9,21
3.4.2	Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	Persen	1,14	1,14
3.4.3	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Rekomendasi	86	86
3.4.4	Persentase Pemenuhan Indikator pasar Tipe A Kriteria SNI 8152:2015	Persen	100	85,15
3.4.5	Jumlah Produk unggulan daerah yang siap ekspor	Persen	75	60
3.4.6	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang di tera / tera ulang	Persen	80	69
3.5	**Perindustrian**			
3.5.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,51	11,23
3.5.2	Pertambahan Industri baru	WUB	37	37
3.5.3	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait secara elektronik	Persen	66	66
3.5.4	Tersedianya Informasi Industri	Persen	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
4	**Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**			
4.1	**Sekretariat Daerah**			
4.1.1	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintaha yang disusun tepat waktu	Persen	100	100
4.1.2	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	100
4.1.3	Persentase Pemebentukan Produk Hukum	Persen	100	100
4.1.4	Persentase Tingkat Sinkronisasi dan Penyelarasan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100
4.1.5	Persentase Tingkat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100
4.2	**Sekretariat DPRD**			
4.2.1	Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan, Kehumasan dan Legislasi DPRD	Persen	100	100
4.2.2	Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi/Reses	Persen	100	100
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**			
5.1	**Perencanaan**			
5.1.1	Persentase Indikator Kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	Persen	100	100
5.1.2	Persentasi keselarasan program pada dokumen perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan Daerah	Persen	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
5.2	**Keuangan**			
5.2.1	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan APBD	Persen	100	100
5.2.2	Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100
5.2.3	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
5.2.4	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan neraca keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
5.2.5	Persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	43,54	43,54
5.2.6	Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5,1	5,1
5.2.7	Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	Persen	14	14
5.3	**Kepegawaian**			
5.3.1	Persentase kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	92	92
5.3.2	Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaaan Pengadaan ASN	Persen	100	100
5.3.3	Persentase penempatan ASN sesuai analisis jabatan	Persen	90	90
5.3.4	Persentase penyelesaian pelanggaran displin ASN	Persen	100	100
5.4	**Pendidikan dan Pelatihan**			
5.4.1	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100	100
5.5	**Penelitian dan Pengembangan**			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
5.5.1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persen	20	20
6	**Administrasi Pemerintahan Umum**			
6.1.1	Persentase tingkat pelayanan anggaran	Persen	100	100
6.1.2	Persentase perda yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100
6.1.3	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	43,54	43,54
6.1.4	Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5.1	5.1
6.1.5	Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target	Persen	14	14
6.1.6	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100
6.1.7	Nilai AKIP: Indeks Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	73,90	73,90
6.1.8	Persentase tingkat pelayanan Protokol dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100
6.1.9	Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat BB	Persen	50	50
7	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**			
7.1.1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong	Persen	0	80%
7.1.2	Jumlah Perangkat Daerah dengan predikat WBK	Jumlah	3 PD	5 PD
8	**Kewilayahan**			
8.1.1	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	73,96	73,96
8.1.2	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	Persen	75,80	75,80
8.1.3	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran	Persen	97,64	97,64

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
	K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan)			
8.1.4	Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persen	82,23	82,23
8.1.5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	84,59	84,59
9	**Unsur Pemerintahan Umum**			
9.1.1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	100	100
9.1.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah	12	12
9.1.3	Persentase penganganan konflik dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	Persen	100	100
9.1.4	Meningkatnya ketahanan sosial, budaya, agama, kemasyarakatan dan Ekonomi	Persen	100	100
9.1.5	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	10	10
9.1.6	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi Wawasan Kebangsaan	Persen	80	80
9.1.7	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Persen	78	78
9.1.8	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	Persen	80	80
9.1.9	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	Persen	80	80
9.1.10	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	Persen	80	80

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024 RPJMD	Target Tahun 2024
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Pengeluaran Konsumsi Pangan per Kapita	ribu rupiah	1.541.054/12.613	1.541.054/12.613
2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	ribu rupiah	55,08	55,08
3	Ketaatan Terhadap RTRW	persen	100	100
4	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	24	24
5	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jumlah	4	4
6	Jenis. Kelas. dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	21	21
7	Angka kriminalitas	Jumlah	10	10
8	Jumlah demo	Kali	0	0
9	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	5	5
10	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	15,45	15,45
11	Rasio Ketergantungan	persen	45,00	45,00

Dari gambaran target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatas, ada beberapa indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2024 yang berbeda dibandingkan dengan target kinerja tahun ke-V pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, yakni sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

   Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan target kinerja dibandingkan dengan RPJMD 2019-2024. Adapun penurunan target ini diproyeksikan akibat dampak positif dari pengembangan dan penguatan sektor usaha non tambang. Selain itu sesuai kesepakatan pada pelaksanaan rakortekbang tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dalam rangka memberikan kontribus Indikator Makro Daerah untuk tahun 2024;

2. Tingkat Inflasi

   Tingkat inflasi yang menjadi target dalam RPJMD 2019-2024 dinilai terlalu optimis berdasarkan fakta empiris dalam beberapa tahun terakhir. Kekhawatiran akan tingginya inflasi juga dipengaruhi oleh proyeksi BI akan stagnasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Berdasarkan data dari Bank Sentral Indonesia, tekanan inflasi secara nasional pada tahun 2022 menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Inflasi pada akhir 2022 tercatat 5,51%, jauh lebih rendah dari prakiraan sesuai dengan *Consensus Forecast* 6,5% pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Tekanan inflasi gabungan tiga kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalimantan Selatan (Banjarmasin, Kotabaru, Tanjung) diperkirakan juga berangsur menurun pada tahun 2023 dan 2024, sejalan dengan normalisasi harga energi dan komoditas strategis global.

3. Persentase Koperasi Aktif

   Persentase koperasi aktif mengalami penurunan target kinerja dibandingkan dengan RPJMD 2019-2024. Adapun penurunan target kinerja tersebut disebabkan pasca pandemi *Covid-19*, dimana pemulihan ekonomi di Kabupaten Tabalong masih belum signifikan pengaruhnya sehingga banyaknya koperasi yang tidak bisa menjalankan fungsi dan operasionalnya secara maksimal seperti yang diharapkan;

4. Indeks Reformasi Birokrasi

   Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan target kinerja dibandingkan dengan RPJMD 2019-2024. Adapun penurunan target kinerja tersebut disebabkan karena sampai saat ini regulasi daerah tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabalong belum terbentuk. Keberadaan regulasi ini memiliki nilai yang sangat signifikan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tabalong;

5. Nilai SAKIP

   Nilai SAKIP mengalami penurunan target kinerja dibandingkan dengan RPJMD 2019-2024. Penurunan target kinerja disebabkan Pemerintah

Kabupaten Tabalong diproyeksikan belum bisa memenuhi semua rekomendasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bisa meningkatkan predikat nilai SAKIP sampai pada tahun 2024;

6. Angka Kematian Bayi/Angka Kelangsungan Hidup Bayi
   Indikator ini mengalami penurunan target kinerja dibandingkan dengan RPJMD 2019-2024. Penurunan target kinerja ini terjadi secara nasional diseluruh Indonesia. Adapun target yang ditetapkan Kabupaten Tabalong masih dibawah dari target yang ditetapkan secara nasional sehingga secara tidak langsung dapat mendongkrak pencapaian target kinerja secara nasional;
7. Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1
   Indikator ini mengalami penurunan target kinerja dikarenakan terbatasnya kesempatan guru yang belum memiliki kualifikasi Pendidikan S.1/D.IV terutama pada tenaga guru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun PPPK;
8. Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat
   Indikator ini mengalami penurunan target kinerja dibandingkan RPJMD 2019 – 2024. Hal ini disebabkan syarat seorang guru untuk mendapatkan sertifikat adalah dengan mengikuti Pendidikan Frofesi Guru (PPG). Seleksi yang ketat serta keterbatasan kuota menyebabkan banyak guru yang belum memenuhi syarat ketika mengikuti seleksi PPG. Hal inilah yang mendasari penurunan target kinerja yang cukup signifikan pada indikator ini;
9. Jumlah Penyelenggaraan Even Tradisi dan Adat Budaya Daerah
   Indikator ini mengalami penurunan target kinerja dari yang cukup signifikan dari 10 even menjadi 3 even kebudayaan. Adapun terjadi perbedaan yang sangat signifikan dikarenakan adanya pemilahan antara even tradisi dan budaya adat daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan skala Kabupaten dengan even yamg diaksanakan oleh pihak swasta atau lembaga adat lokal;

10. Angka Kematian Bayi (AKB)

    Indikator ini mengalami penurunan target kinerja dibandingkan dengan RPJMD 2019-2024. Penurunan target kinerja ini terjadi secara nasional diseluruh Indonesia. Adapun target yang ditetapkan Kabupaten Tabalong masih dibawah dari target yang ditetapkan secara nasional sehingga secara tidak langsung dapat mendongkrak pencapaian target kinerja secara nasional;

11. Rasio Rumah Layak Huni

    Indikator juga ini mengalami penurunan target kinerja dibanding RPJMD 2019 – 2024. Ada beberapa point yang mendasari penurunan target ini sebagai berikut:

    a. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah rumah layak huni di Tabalong;
    b. Terdapat penurunan kualitas Rumah Layak Huni (RLH) menjadi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terutama di Kawasan pedesaan;
    c. Jumlah unit RTLH yang diusulkan untuk dilakukan rehabilitasi terus bertambah setiap tahunnya;
    d. Terbatasnya jumlah bantuan perbaikan RTLH yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan anggaran.

12. Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya

    Indikator ini mengalami penurunan target kinerja dibanding RPJMD 2019-2024. Hal didasari pada perhitungan terdahulu, pembinaan pada LPK swasta masuk kedalam aspek peningkatan produktivitas pekerja tingkat Kabupaten/Kota. Adapun untuk tahun 2024, ada pemilahan terhadap perhitungan peningkatan produktivitas pekerja dengan hanya memperhitungkan intervensi dari Pemerintah saja;

13. Jumlah Koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai

    Indikator ini mengalami penurunan kinerja dibandingkan RPJMD 2019-2024. Hal ini disebabkan oleh pada saat penetapan target RPJMD 2019-2024 pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tabalong tetap optimis bahwa perkembangan koperasi di Kabupaten Tabalong akan kembali aktif di tahun 2024, akan tetapi pada perkembangannya pasca

pandemi *Covid-19* perkembangan koperasi masih belum mengalami perkembangan secara optimal sesuai target yang ditentukan.

14. Jumlah anggota koperasi yang dilatih

    Indikator ini mengalami penurunan kinerja dibandingkan RPJMD 2019-2024. Hal ini disebabkan penurunan jumlah koperasi yang masih aktif, sehingga berdampak pula pada jumlah pengurus/anggota koperasi yang masih aktif yang akan diberikan pelatihan;

15. Persentase Pemenuhan Indikator pasar Tipe A Kriteria SNI 8152:2015

    Indikator ini mengalami penurunan kinerja dibandingkan RPJMD 2019-2024. Hal ini disebabkan untuk mencapai pemenuhan indikator pasar tipe A Kriteria SNI 8152:2015 diperlukan revitalisasi yang menyeluruh dan berdampak pada kebutuhan. Pada tahun 2021 dan 2022, dampak adanya pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian serta kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah dalam penanganan *Covid-19*. Hal inilah yang mengakibatkan revitalisasi pasar belum bisa dilaksanakan secara optimal.

16. Jumlah Produk unggulan daerah yang siap ekspor

    Indikator ini mengalami penurunan kinerja dibandingkan RPJMD 2019-2024. Hal ini disebabkan komoditas karet sebagai primadona dalam produk unggulan daerah di Kabupaten Tabalong mengalami penurunan produksi dikarenakan penyakit gugur daun yang merupakan permasalahan secara nasional.

17. Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang di tera / tera ulang

    Indikator ini mengalami penurunan kinerja dibandingkan RPJMD 2019-2024. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran Masyarakat terutama pengguna UTTP di pasar tradisional untuk melakukan tera terhadap UTTP yang digunakan;

18. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

    Indikator ini mengalami penurunan kinerja dibandingkan RPJMD 2019-2024. Hal ini karena adanya penyesuaian terhadap hasil

kesepakatan pada rakortekbang SIPD Kementrian Dalam Negeri Urusan Perindustrian dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VII

PENUTUP

(RKPD)

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2019-2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Sebagai dokumen perencanaan, RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, penyusunannya membutuhkan sinkronisasi dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut.

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, sehingga menjadi tahapan yang penting pencapaian visi Kabupaten Tabalong, yaitu ”Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri”.

Penyusunan RKPD juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pendanaannya selain melalui APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 juga diusulkan untuk dapat didanai dari APBD Provinsi maupun APBN, baik melalui DAK, Bantuan Keuangan maupun Tugas Pembantuan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi tolok ukur kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

--oOo—

TABALONG
SABABA KAWA